

**PELANGGARAN PRINSIP KERJA SAMA DALAM PROGRAM MATA NAJWA  
BARA DI MARKAS JAKSA DI TRANS 7: PERSPEKTIF GRICE**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Fakultas  
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau*



Oleh:

**YULIA CITRA**  
**NPM: 176210509**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2021**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

PELANGGARAN PRINSIP KERJA SAMA DALAM PROGRAM MATA NAJWA  
*BARA DI MARKAS JAKSA DI TRANS 7: PERSPEKTIF GRICE*

Dipersiapkan Oleh

Nama : Yulia Citra  
NPM : 176210509  
Program Studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Pembimbing

**Dr. Fatmawati, S.Pd., M.Pd**

**NIDN: 1021038801**

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

**Desi Sukenti, S.Pd., M.Ed**

**NIDN: 1019078001**

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana  
Pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Islam Riau

**Wakil Dekan I Bidang Akademik**

**Dr. Miranti Eka Putri, S.Pd., M.Ed.**

**NIDN: 1005068201**

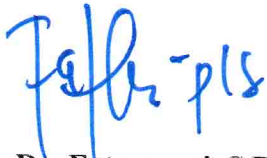
**SKRIPSI**

**PELANGGARAN PRINSIP KERJA SAMA DALAM PROGRAM MATA  
NAJWA BARA DI MARKAS JAKSA DI TRANS 7: PERSPEKTIF GRICE**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Yulia Citra  
NPM : 176210509  
Program Studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

**Pembimbing Utama**



**Dr. Fatmawati, S.Pd., M.Pd.**  
NIDN: 1021038801

**Anggota Tim**



**Dr. Hj. Erni, M.Pd.**  
NIDN: 0013016501



**Dr. Rika Ningsih, S.Pd., M.Pd.**  
NIDN: 1028058901

Skripsi ini telah Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Pendidikan Strata ( SI ) Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau

**Wakil Dekan I Bidang Akademik**



**Dr. Miranti Eka Putri, S.Pd., M.Ed.**  
NIDN: 1005068201



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SAstra INDONESIA**

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: [www.uir.ac.id](http://www.uir.ac.id) Email: [pbsi@uir.ac.id](mailto:pbsi@uir.ac.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 094/PSPBSI/VII/2021

Hal : Bebas Plagiarisme

Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau menerangkan bahwa mahasiswa berikut ini.

Nama : Yulia Citra

NPM : 176210509

Judul Skripsi : Pelanggaran Prinsip Kerja Sama dalam Program Mata Najwa Bara di Markas Jaksa di Trans 7: Perspektif Grice

Bahwa skripsi mahasiswa di atas telah memenuhi syarat bebas plagiat kurang dari 30%. Surat ini digunakan sebagai syarat untuk pengurusan surat *keterangan* bebas pustaka. Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 11 Juli 2021

Ketua Program Studi,

**Desi Sukenti, S.Pd., M.Ed.**  
**NIDN 1019078001**



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU**  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: [www.uir.ac.id](http://www.uir.ac.id) Email: [info@uir.ac.id](mailto:info@uir.ac.id)

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR**  
**SEMESTER GENAP TA 2020/2021**

NPM : 176210509  
Nama Mahasiswa : YULIA CITRA  
Dosen Pembimbing : Dr. Fatmawati, S.Pd.,M.Pd.  
Program Studi : PENDIDIKAN BAHASA DAN SAstra INDONESIA  
Judul Tugas Akhir : Pelanggaran Prinsip Kerja Sama dalam Program Mata Najwa Bara di Markas Jaksa di Trans 7: Perspektif Grice  
Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Violation of the Cooperation Principle in the Mata Najwa Bara Program at the Prosecutor's Headquarters in Trans 7: Grice's Perspective  
Lembar Ke : 1 (Satu)

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	Senin, 20 Juli 2020	Konfirmasi judul	Tentukan objek yang akan diteliti sesuai dengan teori yang akan digunakan.	
2	Rabu, 02 September 2020	Konfirmasi Judul	ACC judul proposal	
3	Kamis, 03 Desember 2020	BAB I 1. Latar belakang 2. Rumusan masalah	Disarankan untuk banyak memasukkan dari artikel jurnal	
4	Senin, 07 Desember 2020	BAB I 1. Kata pengantar 2. Latar belakang 3. Fokus masalah	Perbaiki susunan kalimat, cara membuat kutipan, dan perbaiki redaksi kalimat yang rancu. Bagian fokus masalah tidak perlu dipaparkan.	
5	Senin, 14 Desember 2020	BAB I 1. Kata pengantar 2. Latar belakang	Bagian kata pengantar pindahkan kalimat, dan perbaiki redaksi kalimat yang rancu.	
6	Kamis, 07 Januari 2021	BAB III 1. Ruang lingkup 2. Uji keabsahan	Defenisi istilah diganti penjelasan istilah, cara mengutip kutipan langsung dan kutipan tidak langsung.	
7	Rabu, 13 Januari 2021	Contoh data	Tentang cara menganalisis data dengan mencantumkan teori yang memperkuat analisis tersebut.	
8	Sabtu, 16 Januari 2021	BAB 1 dan BAB II 1. Latar belakang 2. Tinjauan pustaka 3. Penelitian Relevan	Membuat per paraprase, dan mengutip dari berbagai sumber seperti artikel jurnal. Untuk penelitian relevan ambil dua skripsi dan tiga jurnal	
9	Rabu, 24 Februari 2021	BAB IV Hasil dan pembahasan	Sebutkan banyaknya data yang ditemukan dan dijabarkan satu persatu	
10	Rabu, 09 Juni 2021	BAB IV Interpretasi data	Interpretasi data diganti dengan pembahasan	

11	Selasa, 22 Juni 2021	BAB V Kesimpulan	Dalam BAB V ada implikasi, dan saran diganti dengan Rekomendasi	<i>Handwritten signature</i>
12	Sabtu, 03 Juli 2021	Disetujui untuk diujikan	Disetujui untuk diujikan	<i>Handwritten signature</i>

Pekanbaru, 12 Juli 2021  
Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



MTC2MJEWNTA5



(Dr. Miranti Eka Putri, M.Ed.)  
NIDN. 1005068201

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yulia Citra

NPM : 176210509

Program Studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali ringkasan, dan kutipan baik secara langsung maupun tidak langsung yang saya ambil dari berbagai sumber dan disebutkan sumbernya. Secara ilmiah, saya yang bertanggung jawab atas ini serta kebenaran data dan fakta skripsi atau karya ilmiah ini.

Pekanbaru, 12 Juli 2021

Saya menyatakan,



Yulia Citra

NPM. 176210509

## SURAT KETERANGAN

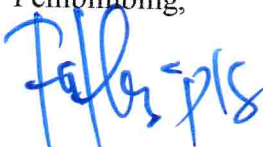
Saya pembimbing skripsi dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa saya yang tersebut di bawah ini:

Nama : Yulia Citra  
NPM : 176210509  
Program Studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia  
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Telah selesai menyusun skripsi dengan judul “Pelanggaran Prinsip Kerja Sama dalam Program Mata Najwa *Bara di Markas Jaksa* di Trans 7: Perspektif Grice” dan siap untuk diujikan.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Pekanbaru, 12 Juli 2021  
Pembimbing,



**Dr. Fatmawati, S.Pd., M.Pd.**  
**NIDN.1021038801**



## HALAMAN MOTTO

“Anda mungkin bisa menunda, tapi waktu tidak akan menunggu”  
(Benjamin Franklin)

...

"Allah tidak membebani seseorang melainkan  
sesuai dengan kesanggupannya"  
(Q.S. Al-Baqarah: 286)

...

“Semua pasti berlalu”  
Keep calm, and carry on  
(Penulis)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah* rabbil'alam, karya ini penulis persembahkan:

Untuk diri sendiri, terima kasih sudah mau bertahan sampai detik ini, terima kasih atas semua usaha dan upayanya, terima kasih untuk usaha berproses menjadi lebih baik, terima kasih juga sudah mau berusaha menyadarkan diri bahwa diri sendiri ternyata tidak seburuk itu.

Untuk kedua orang tua penulis Bapak Abasri yang telah menjadi contoh, lelaki hebat, tidak pernah marah di rumah, yang selalu memenuhi semua keinginan penulis, dan memberikan banyak pelajaran bagi penulis. Kepada Ibu Kasmawati yang telah menjadi perempuan luar biasa didalam hidup penulis, terima kasih atas segala motivasi, dan doa yang tak henti-hentinya terselip dalam setiap sujud kepadaNya, terima kasih atas semua air mata, keringat, lelah, dan waktu yang sudah terkorbankan untuk memberikan yang terbaik bagi penulis.

Juga untuk adik-adik penulis Hera Malia dan Arga Alfa Riansyah, terima kasih telah memberikan semangat yang cukup untuk penulis jadikan pembelajaran dalam proses menjadi kakak yang baik dan manusia yang lebih baik sebagai manusia yang berguna bagi dunia dan agama.

## ABSTRAK

### **Yulia Citra. 2021. *Skripsi. Pelanggaran Prinsip Kerja Sama dalam Program Mata Najwa Bara di Markas Jaksa di Trans 7: Perspektif Grice***

---

Adanya perbedaan pola maksim prinsip kerja sama yang dikemukakan oleh Grice dengan budaya tutur masyarakat di Indonesia menyebabkan pelanggaran prinsip kerja sama sering terjadi. Hal ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelanggaran prinsip kerja sama Grice dalam program Mata Najwa *Bara di Markas Jaksa di Trans 7*. Masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelanggaran prinsip kerja sama dan bagaimanakah alasan terjadinya pelanggaran prinsip kerja sama dalam program Mata Najwa *Bara di Markas Jaksa di Trans 7*. Sumber data dalam penelitian ini adalah aktivitas berbahasa yang terjadi dalam program Mata Najwa dengan tema *Bara di Markas Jaksa* pada hari Rabu 28 Agustus 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative approach*) dan menggunakan metode analisis isi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau (*library Research*). Teknik pengumpulan data adalah teknik dokumentasi, simak, dan catat. Hasil penelitian ini adalah dari 271 tuturan ditemukan 83 tuturan yang dilanggar. Dari 83 data tuturan tersebut terdapat 25 tuturan yang melanggar maksim kuantitas dengan 5 kategori alasan pelanggarannya. Untuk maksim kualitas terdapat 8 tuturan yang melanggar dengan 5 kategori alasan pelanggarannya. Selanjutnya, untuk maksim relevansi terdapat 23 tuturan yang melanggar dengan 11 kategori alasan pelanggarannya. Untuk maksim cara/pelaksanaan terdapat 27 tuturan yang melanggar maksim cara/pelaksanaan dengan 10 kategori alasan pelanggarannya. Adapun jenis pelanggaran keempat maksim tersebut adalah keramahan, kesantunan, keakraban, penolakan, berbagi informasi, humor, sindiran, mengelak, provokasi, tidak tahu jawaban pasti, memerintah, pembelaan diri, menegaskan, basa-basi, menyangkal, dan kesal. Meskipun terjadi pelanggaran, mitra tutur tidak mempermasalahkannya dan percakapan tetap berjalan dengan baik. Pelanggaran pada prinsip kerja sama Grice merupakan hal yang lazim terjadi. Perbedaan budaya membuat prinsip kerja sama Grice tidak bisa diterapkan secara universal pada semua bahasa khususnya yang terjadi dalam program Mata Najwa *Bara di Markas Jaksa di Trans 7*.

Kata kunci: Pelanggaran, Maksim kuantitas, Maksim kualitas, Maksim Relevansi, Maksim cara/pelaksanaan.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah *Shallallahu 'alaihi wasallam*, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi penelitian ini yang berjudul “Pelanggaran Prinsip Kerja Sama dalam Program Mata Najwa *Bara di Markas Jaksa* di Trans 7: Perspektif Grice”. Penulisan skripsi ini merupakan langkah dalam melakukan penelitian untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana pendidikan bahasa Indonesia di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, dukungan, serta do'a dari berbagai pihak, penyusunan skripsi penelitian ini tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Sri Amnah, S.Pd., M.Si. selaku dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau, yang telah memberi izin kepada penulis dalam melakukan penelitian ini.
2. Ibu Desi Sukenti, S.Pd.,M.Ed. selaku ketua Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia yang telah memberikan masukan dan nasihat kepada penulis.
3. Seluruh dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia beserta seluruh staf Tata Usaha Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau yang telah membimbing dan mendidik penulis selama dalam proses perkuliahan.
4. Ibu Dr. Fatmawati, S.Pd.,M.Pd. selaku dosen pembimbing skripsi penelitian ini, yang telah meluangkan waktu, dan pikiran untuk memberikan nasihat,

bimbingan, dan arahan kepada penulis sehubungan dengan penyempurnaan skripsi ini.

5. Teristimewa kedua orang tua penulis yakni Ayahanda Abasri dan Ibunda Kasmawati yang selalu memberikan, *support*, materi, cinta, dan kasih sayang serta do'a, dan motivasi kepada penulis, dan kedua adik-adik tercinta Hera Malia dan Arga Alfa Riansyah.
6. seluruh teman seperjuangan mahasiswa Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UIR angkatan 2017/2018 khususnya kelas C, yang telah memberi motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Untuk para *bestie* penulis yakni Erlina Julia Putri, Lestari Mahanani, Iva Febien Fitri, Ella Ang Raini, Sri Murni, Sumarni, Susi Mariana Panggabean, Kuntum Khairul Ummah, Susi Purnama Sari, dan Desi Asriana, keluarga kedua penulis di Pekanbaru teman suka maupun duka.

Penulis menyadari sebagai hamba Allah yang tak luput dari kesalahan dan keterbatasan, skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun, penulis berharap skripsi ini dapat memberi manfaat bagi para pembaca, serta kritik, dan saran yang konstruktif senantiasa penulis nantikan, guna penyempurnaan penulisan skripsi penelitian ini.

Pekanbaru, Juli 2021

Penulis,

## DAFTAR ISI

ABSTRAK

LEMBAR PERSETUJUAN

SURAT PERNYATAAN

KATA PENGANTAR .....i

DAFTAR ISI.....iii

DAFTAR TABEL..... vi

DAFTAR GAMBAR .....vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah..... 1

1.2 Fokus Masalah ..... 9

1.3 Rumusan Masalah ..... 10

1.4 Tujuan Penelitian ..... 10

1.5 Manfaat Penelitian ..... 10

1.6 Definisi Istilah..... 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori yang Relevan ..... 13

2.1.1 Hakikat Pragmatik ..... 13

2.1.2 Hakikat Konteks..... 14

2.1.3 Hakikat Prinsip Kerja Sama..... 16

2.1.4 Pelanggaran Prinsip Kerja Sama..... 17

2.1.5 Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama..... 24

2.2 Penelitian yang Relevan..... 26

2.3 Kerangka Konseptual ..... 33

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian .....	35
3.2 Data dan Sumber Data .....	36
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	37
3.4 Teknik Analisis Data.....	38
3.5 Teknik Keabsahan Data .....	39

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian .....	43
4.1.1 Deskripsi Data .....	43
4.1.2 Analisis Data.....	85
4.1.2.1 Bentuk-Bentuk Pelanggaran Maksim Kuantitas .....	85
4.1.2.2 Bentuk-Bentuk Pelanggaran Maksim Kualitas .....	106
4.1.2.3 Bentuk-Bentuk Pelanggaran Maksim Relevansi .....	112
4.1.2.4 Bentuk-Bentuk Pelanggaran Maksim Cara/pelaksanaan .....	131
4.1.2.5 Alasan Pelanggaran Maksim Kuantitas .....	154
4.1.2.6 Alasan Pelanggaran Maksim Kualitas .....	172
4.1.2.7 Alasan Pelanggaran Maksim Relevansi .....	178
4.1.2.8 Alasan Pelanggaran Maksim Cara/pelaksanaan .....	194
4.2 Pembahasan.....	218
4.2.1 Pembahasan Hasil Penelitian Data Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice dan Alasan Pelanggarannya .....	218
4.2.1.1 Pembahasan Pelanggaran Maksim Kuantitas Prinsip Kerja Sama Grice dan Alasan Pelanggarannya. ....	220
4.2.1.2 Pembahasan Pelanggaran Maksim Kualitas Prinsip Kerja Sama Grice dan Alasan Pelanggarannya .....	222
4.2.1.3 Pembahasan Pelanggaran Maksim Relevansi Prinsip Kerja Sama Grice dan Alasan Pelanggarannya .....	224
4.2.1.4 Pembahasan Pelanggaran Maksim Cara/pelaksanaan Prinsip Kerja Sama Grice dan Alasan Pelanggarannya .....	226

<b>BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI</b>	
5.1 Simpulan.....	229
5.2 Implikasi .....	231
5.3 Rekomendasi.....	232
<b>DAFTAR RUJUKAN .....</b>	<b>233</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>236</b>



## **DAFTAR TABEL**

4.1 Tabel Deskripsi Data Penelitian Tentang Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice.....	46
4.2 Tabel Deskripsi Data Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice .....	63

## DAFTAR GAMBAR

1.1 Bagan Kerangka Konseptual.....	34
4.1 Pelanggaran Maksim Prinsip Kerja Sama Grice dan Alasan Terjadinya Pelanggaran Maksim Prinsip Kerja Sama Grice .....	217

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pragmatik merupakan ilmu bahasa yang mempelajari pemakaian bahasa yang berhubungan dengan konteks pemakaiannya. Menurut Yule (2006:3), pragmatik adalah studi yang mempelajari tentang makna yang disampaikan oleh penutur dan ditafsirkan oleh pendengar. Studi ini perlu melibatkan penafsiran tentang apa yang dimaksudkan penutur di dalam suatu konteks khusus dan bagaimana konteks itu berpengaruh terhadap apa yang dikatakan. Wijana (1996:2) mengatakan bahwa pragmatik mengkaji makna yang terikat oleh konteks.

Penafsiran dan pemahaman bahasa mengacu pada fakta bahwa untuk paham suatu ujaran bahasa, dibutuhkan pula pengetahuan di luar makna kata dan ikatan tata bahasanya, yaitu hubungan bahasa dengan konteks pemakaiannya. Dalam pragmatik, bahasa dikaji sesuai dengan penggunaannya atau bagaimana bahasa itu digunakan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini membuktikan bahwa faktor penggunaan bahasa menjadi hal yang sangat penting dalam kajian pragmatik termasuk juga di dalamnya di mana, untuk apa, dan tentang apa bahasa itu digunakan.

Pragmatik lebih menekankan kajiannya terhadap antardisiplin bahasa dengan konteks (di luar bahasa). Implementasinya adalah memahami hakikat bahasa harus menyentuh permasalahan di luar bahasa atau dalam perspektif data yang lebih luas, termasuk bagaimana bahasa digunakan dalam berkomunikasi. Menurut Setiawan dkk (2017:2), suatu komunikasi dalam sebuah percakapan

dikatakan berjalan dengan baik apabila tidak terjadi salah penafsiran oleh mitra tutur. Oleh karena itu, penutur dan mitra tutur yang terlibat dalam suatu percakapan harus menerapkan prinsip kerja sama.

Prinsip kerja sama merupakan bagian dari ilmu pragmatik. Prinsip ini menekankan pada adanya bentuk kerja sama yang terjalin antara penutur dan mitra tutur dalam suatu percakapan. Kerja sama yang dimaksud berkaitan dengan tuturan yang diujarkan. Jadi, penutur selalu berusaha supaya tuturannya relevan dengan konteks, jelas, dan mudah dipahami, padat dan ringkas. Hal ini dirangkum dalam maksim-maksim yang terdapat dalam prinsip kerja sama.

Bentuk kerja sama yang dimaksud adalah prinsip kerja sama yang digagas oleh Grice. Prinsip kerja sama Grice ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang tindakan penutur dan mitra tutur dalam suatu percakapan. Grice dalam Wijana (1996:46) mengatakan bahwa dalam melakukan prinsip kerja sama setiap penutur haruslah menerapkan 4 (empat) maksim percakapan di antaranya, yaitu: (1) maksim kuantitas (*maxim of quantity*), (2) maksim kualitas (*maxim of quality*), (3) maksim relevansi (*maxim of relevance*), dan (4) maksim pelaksanaan/cara (*maxim of manner*). Maksim adalah prinsip yang wajib ditaati oleh penutur dalam berinteraksi, baik secara tekstual maupun interpersonal, supaya komunikasi berjalan dengan lancar.

Secara ringkas maksim-maksim prinsip kerja sama Grice dijabarkan sebagai berikut. Pertama adalah maksim kuantitas. Maksim kuantitas menginginkan supaya partisipan menyumbangkan informasi secukupnya serta tidak berlebihan dalam menyampaikan informasi yang diperlukan oleh mitra tutur. Kedua adalah maksim kualitas. Dalam maksim kualitas menginginkan supaya partisipan

menyampaikan informasi sesuai dengan faktanya disertai dengan bukti-bukti yang ada. Ketiga adalah maksim relevansi. Maksim relevansi menginginkan supaya partisipan memberikan kontribusi yang sesuai dengan topik pembicaraan. Keempat adalah maksim cara/pelaksanaan. Maksim cara menghendaki setiap peserta tutur untuk berbicara secara singkat, padat, jelas, dan tidak ambigu ataupun membingungkan sehingga tidak menimbulkan pertanyaan baru.

Penerapan prinsip kerja sama merupakan lawan dari pelanggaran prinsip kerja sama. Penerapan prinsip kerja sama dalam percakapan merupakan wujud interaksi yang dilakukan demi terciptanya komunikasi yang efektif. Menurut Merri Silvia Basri, dkk (2021:242) menyebutkan bahwa kegiatan berkomunikasi dapat dilakukan antara dua orang penutur maupun dalam skala besar. Dalam penerapan prinsip kerja sama perlu adanya kerja sama dalam pertuturan yang bersifat kooperatif antara penutur dan mitra tutur. Suatu komunikasi bisa dikatakan berhasil apabila penutur dan mitra tutur menerapkan prinsip kerja sama dalam pertuturannya. Pelanggaran terhadap prinsip kerja sama bisa diatasi oleh ilmu pragmatik yang mengkaji mengenai maksud penutur secara tersurat ataupun tersirat yang berada di balik tuturan yang dianalisis.

Suatu komunikasi dalam sebuah percakapan dikatakan berjalan dengan baik apabila tidak terjadi salah penafsiran oleh mitra tutur. Dalam percakapan, hendaknya mitra tutur menyampaikan sesuatu yang mudah untuk dipahami, serta sesuai dengan topik yang dibicarakan dengan bukti-bukti yang ada. Menurut Nurfaedah dan Suwatri Jura (2020:680) menyebutkan bahwa penggunaan bahasa disesuaikan dengan situasi dan konteks kapan dan di mana bahasa itu dituturkan. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Fatmawati (2020:1) mengatakan bahwa supaya

tidak terjadi kesalahpahaman dalam percakapan, penutur dan mitra tutur dalam bertutur sebaiknya sama-sama mencermati aspek-aspek situasi tutur, seperti penutur dan mitra tutur, konteks tuturan, tujuan tuturan, tuturan sebagai bentuk tindakan atau aktivitas, dan tuturan sebagai produk tindak verbal.

Maksim dalam prinsip kerja sama yang digagas oleh Grice perlu diterapkan dalam peristiwa tutur. Teori mengatakan bahwa prinsip kerja sama itu menghendaki partisipan dalam bertutur harus sesuai dengan apa yang diminta, tuturan yang benar dan dapat dibuktikan kebenarannya, relevansi yang sesuai dengan apa yang dibicarakan, serta pada saat berbicara harus singkat, ringkas dan mudah untuk dipahami. Namun, pada kenyataannya dalam percakapan masih banyak peserta tutur yang mengabaikan keempat maksim dalam prinsip kerja sama Grice.

Bagi masyarakat tutur Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketimuran seperti keramah-tamahan, akan terasa sangat kaku jika harus menerapkan prinsip kerja sama yang disarankan oleh Grice. Apabila prinsip tersebut dipaksakan untuk diterapkan dalam konteks budaya Indonesia, justru akan berdampak pada kesantunan komunikasi yang berlangsung. Perlu dipahami bahwa pelanggaran terhadap maksim prinsip kerja sama Grice tidak serta-merta menyebabkan kegagalan dalam komunikasi. Pelanggaran yang terjadi justru sengaja dilakukan untuk alasan-alasan yang berkenaan dengan kesantunan.

Pelanggaran prinsip kerja sama ini terjadi bukan tanpa tujuan. Terdapat alasan-alasan tertentu yang melatarbelakangi seseorang melanggar prinsip kerja sama. Contohnya, untuk mencairkan suasana percakapan yang tegang seseorang akan memberikan suatu lelucon supaya suasana percakapan berubah menjadi lebih

santai. Namun, pada prinsipnya hal tersebut sudah melanggar prinsip kerja sama Grice.

Menurut Fatmawati (2020:125—138), pelanggaran terhadap prinsip kerja sama Grice terjadi karena beberapa alasan di antaranya, yakni: Pelanggaran terhadap maksim kuantitas terjadi karena ingin berbagi informasi, keramahan, kesantunan, kejelasan informasi, dan persuasif. Pelanggaran terhadap maksim kualitas terjadi karena ingin bercanda, alasan, sindiran, dan berbohong. Pelanggaran terhadap maksim relevansi terjadi karena menghindari tuturan langsung, penolakan, bercanda, dan penegasan. Selanjutnya, pelanggaran terhadap maksim cara/pelaksanaan terjadi karena bingung memberikan jawaban, lupa, gugup, empati, basa-basi, dan rahasia.

Suryani (2015:3), mengatakan bahwa maksim yang digagas oleh Grice tidak selalu dipatuhi oleh partisipan, pada situasi tertentu maksim-maksim prinsip kerja sama dilanggar untuk tujuan tertentu. Pernyataan tersebut didukung oleh pendapat Jazeri (2008:151), menyatakan bahwa dalam sebuah percakapan, pelanggaran maksim sering tidak terelakkan. Pelanggaran tersebut terjadi karena unsur kesengajaan dan unsur ketidaksengajaan. Pelanggaran yang terjadi karena unsur kesengajaan lebih menekankan pada permainan dan ejekan, dengan maksud supaya tuturannya memiliki efek tertentu, misalnya efek humoris dan santun dalam berbicara. Pelanggaran prinsip kerja sama karena ketidaksengajaan disebabkan oleh kegagalan dalam menggunakan maksim percakapan yang mengakibatkan penutur kesulitan dalam menafsirkan isi tuturannya.

Berdasarkan paparan di atas, bahwasanya pelanggaran prinsip kerja sama sering terjadi dalam peristiwa tutur terutama di budaya masyarakat Indonesia.

Adanya perbedaan penerapan prinsip kerja sama yang dikemukakan oleh Grice dengan yang terjadi di Indonesia menyebabkan pelanggaran prinsip kerja sama sering terjadi. Konteks budaya yang terdapat pada suatu bahasa akan sangat berpengaruh terhadap bahasa yang digunakannya. Jadi, tidak selamanya dalam percakapan harus memenuhi maksim-maksim yang digagas oleh Grice adakalanya karena tujuan atau pada situasi tertentu terjadi pelanggaran. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelanggaran prinsip kerja sama.

Pelanggaran prinsip kerja sama tidak hanya terjadi dalam percakapan sehari-hari, tetapi terjadi juga dalam percakapan di media telekomunikasi, salah satunya dalam program Mata Najwa yang ditayangkan oleh saluran televisi Trans 7. Mata Najwa adalah suatu narasi gelar wicara yang dipandu oleh jurnalis senior, Najwa Shihab. Mata Najwa merupakan suatu acara yang berisikan percakapan antara Najwa Shihab dengan bintang tamunya dengan topik yang berbeda-beda di setiap episodenya.

Mata Najwa kerap menayangkan perbincangan atau diskusi seseorang atau sekelompok orang mengenai isu-isu politik di Indonesia yang dipandu oleh pemandu wicara. Mata Najwa konsisten membahas isu-isu menarik dengan narasumber kelas atas hingga rakyat biasa. Dalam sebuah program *Talkshow* pasti terdapat pembicaraan, baik antara pemandu acara dengan narasumber maupun sesama narasumber. Dalam hal ini kegiatan berbicara disebut juga sebagai percakapan. Menurut Rani dkk (2006:230), menyatakan bahwa percakapan adalah salah satu bentuk interaksi.



Interaksi yang terjadi dalam program Mata Najwa membutuhkan kerja sama yang baik saat berkomunikasi. Komunikasi antara pemandu acara dengan narasumber merupakan proses komunikasi untuk menanggapi, menyusun, dan mengungkapkan segala sesuatu yang ada di sekitarnya sebagai bahan komunikasi. Dalam proses berkomunikasi adanya peristiwa tutur atau tindak tutur yang memerlukan prinsip kerja sama.

Berdasarkan pernyataan di atas, tuturan-tuturan yang tidak menerapkan prinsip kerja sama sangat mungkin terjadi dalam program Mata Najwa di Trans 7 karena adanya interaksi antara pemandu acara dengan narasumber. Dalam berdiskusi menunjukkan besarnya potensi percakapan beradu argumen yang terjadi sehingga banyak tuturan yang dapat diamati. Percakapan antara pemandu acara dengan beberapa narasumber yang akan dikaji untuk mengetahui bentuk pelanggaran prinsip kerja sama diperoleh dari interaksi dalam program Mata Najwa pada episode *Bara di Markas Jaksa* di Trans 7.

Dipilihnya Mata Najwa sebagai objek penelitian ini karena dalam percakapan antara Najwa dengan narasumbernya ditemukan pelanggaran-pelanggaran prinsip kerja sama yang menuai polemik antara pemandu acara dengan narasumber maupun sesama narasumber. Contohnya, narasumber *Talk show* Mata Najwa kerap memberikan informasi melebihi yang diperlukan. Tidak hanya itu, untuk menelusuri informasi dari narasumbernya, Najwa berulang kali memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menyebabkan narasumbernya melakukan pelanggaran terhadap prinsip kerja sama. Topik yang diperbincangkan dalam program Mata Najwa tersebut adalah terbakarnya gedung Kejaksaan Agung yang yang diberi judul *Bara di Markas Jaksa*. Selain tayang di Televisi tayangan

tersebut sudah diunggah ke laman *youtube Narasi Newsroom*. Video ini sudah ditonton sebanyak 137 Ribu kali dan disukai sebanyak 1,5 Ribu orang dengan 401 komentar. Selain itu, dalam program tersebut prinsip kerja sama benar-benar dilanggar oleh penutur pada saat berinteraksi. Berikut salah satu contoh pelanggaran yang terjadi dalam program Mata Najwa tersebut.

Konteks : Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dan Hary Setiyono seorang (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Ham Jakarta Selatan) sebagai salah satu narasumber di acara Mata Najwa yang akan dimintai keterangan terkait terbakarnya gedung Kejaksaan Agung. Tuturan ini bermula saat Najwa mulai membuka diskusi dan menyapa semua narasumber salah satunya Hary Setiyono.

Najwa : “Empat hari setelah kebakaran melanda markas jaksa, spekulasi masih terus bermunculan penyebab kebakaranpun masih jadi tanda tanya, bagaimana perkembangan terkini terkait pengusutan kasus kebakaran ini, hadir di studio mata Najwa kepala pusat penerangan dan hukum kejaksaan agung Hary Setiono. Selamat malam Pak Hary”.

Hary : ”Selamat malam, salam sehat untuk semuanya” (1)

Tuturan (1) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim kuantitas. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban Hary yang berlebihan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim kuantitas tidak menginginkan mitra tutur memberikan informasi yang kurang maupun berlebihan. Dalam tuturan (1) terlihat bahwa Hary berlebihan dalam menjawab pertanyaan Najwa yang seharusnya Hary cukup menjawab “selamat malam”. Namun pada percakapan di atas, Hary menambahkan ucapan “salam sehat untuk semuanya” yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim kuantitas.

Alasan pelanggaran maksim kuantitas yang terjadi pada tuturan (1) di atas karena Hary ingin terlihat lebih ramah dan santun. Hal tersebut tergambar pada tuturan Hary yang memberikan penambahan informasi yang tidak dibutuhkan

oleh Najwa yaitu “salam sehat untuk semuanya” pada tuturan tersebut menunjukkan keramahan dan kesantunan karena memberikan doa kepada orang lain baik itu untuk Najwa, narasumber, maupun penontonnya yang tergambar pada kata “semuanya”.

## **1.2 Fokus Masalah**

Penelitian ini termasuk ke dalam ruang lingkup kajian pragmatik. Pragmatik memiliki banyak cabang ilmu di antaranya: Pertama tindak tutur, terdapat tiga jenis tindakan yang dapat dilakukan oleh seorang penutur, yakni tindak lokusi, tindak ilokusi, dan tindak perlokusi. Kedua, presuposisi atau praanggapan. Presuposisi atau praanggapan adalah sesuatu yang diasumsikan oleh penutur sebagai kejadian sebelum menghasilkan suatu tuturan. Ketiga implikatur. Implikatur adalah maksud yang terkandung dalam suatu tuturan yang biasanya dinyatakan secara tidak langsung atau mengemukakan sesuatu dengan bentuk lain. Keempat deiksis. Deiksis adalah ‘penunjukan’ melalui bahasa. Deiksis terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu, deiksis persona, deiksis tempat dan deiksis waktu. Kelima, prinsip kesopanan. Prinsip kesopanan didefinisikan sebagai alat yang digunakan untuk menunjukkan kesadaran tentang wajah orang lain. Keenam, prinsip kerja sama, di dalam prinsip kerja sama terdapat empat maksim percakapan yaitu, (1) maksim kuantitas (*maxim of quantity*), (2) maksim kualitas (*maxim of quality*), (3) maksim relevansi (*maxim of relevance*), dan (4) maksim cara/pelaksanaan (*maxim of manner*).

Mengingat luasnya cakupan kajian pragmatik, dan keterbatasan waktu serta biaya, penelitian ini difokuskan pada prinsip kerja sama. Penelitian ini hanya menelaah pelanggaran prinsip kerja sama dan alasan terjadinya pelanggaran

prinsip kerja sama yang terdapat dalam program Mata Najwa yang berjudul *Bara di Markas Jaksa* berdasarkan 4 (empat) maksim percakapan yaitu, (1) maksim kuantitas (*maxim of quantity*), (2) maksim kualitas (*maxim of quality*), (3) maksim relevansi (*maxim of relevance*), dan (4) maksim cara/pelaksanaan (*maxim of manner*).

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelanggaran prinsip kerja sama dalam program Mata Najwa *Bara di Markas Jaksa* di Trans 7: Perspektif Grice?
2. Bagaimanakah alasan terjadinya pelanggaran prinsip kerja sama dalam program Mata Najwa *Bara di Markas Jaksa* di Trans 7: Perspektif Grice?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengeksplorasi dan mengelaborasi pelanggaran prinsip kerja sama dalam program Mata Najwa *Bara di Markas Jaksa* di Trans 7: Perspektif Grice.
2. Mengeksplorasi dan mengelaborasi alasan terjadinya pelanggaran prinsip kerja sama dalam program Mata Najwa *Bara di Markas Jaksa* di Trans 7: Perspektif Grice.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

## 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini yaitu berupa sumbangan wawasan terhadap ilmu pengetahuan bidang pragmatik khususnya mengenai pelanggaran prinsip kerja sama, dan memberikan gambaran yang nyata kepada pembaca dan peneliti selanjutnya tentang alasan-alasan pelanggaran maksim prinsip kerja sama Grice.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah dapat dijadikan bahan ajar bagi guru dan dosen dalam memahami prinsip kerja sama, dan penelitian ini juga dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya sebagai dasar berpijak untuk melakukan penelitian yang mendalam.

### **1.6 Definisi Istilah**

Beberapa istilah mungkin saja terdapat perbedaan dalam penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh penulis yang lainnya. Untuk mempermudah pembaca dalam memahami orientasi penelitian ini, maka berikut penulis jelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan permasalahan pokok penelitian.

1. Prinsip kerja sama adalah proses komunikasi yang dilakukan oleh penutur serta lawan tutur yang mengartikulasikan sesuatu kepada penutur untuk menguasai apa yang mau diinformasikan sehingga proses komunikasi dapat berjalan dengan lancar serta terdapatnya kerja sama.
2. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar suatu kaidah atau aturan-aturan yang berlaku dalam percakapan yang dituturkan oleh Najwa Shihab dengan bintang tamunya dalam program Mata Najwa *Bara di Markas Jaksa* di Trans 7.

3. Maksim yang dimaksud dalam penelitian ini adalah prinsip yang wajib ditaati oleh penutur dalam berinteraksi, baik secara tekstual maupun interpersonal, supaya komunikasi berjalan dengan lancar.
4. Pelanggaran maksim kuantitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tuturan-tuturan yang disampaikan oleh pemandu acara dan narasumber dalam program Mata Najwa *Bara di Markas Jaksa* di Trans 7 terlalu berlebihan dan bertele-tele melebihi dari apa yang dibutuhkan.
5. Pelanggaran maksim kualitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu tuturan dalam program Mata Najwa *Bara di Markas Jaksa* di Trans 7 yang disampaikan oleh pemandu acara dan narasumber tidak nyata dan tidak didasari pada bukti-bukti yang ada.
6. Pelanggaran maksim relevansi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tidak terjalinnya kerja sama yang baik antara pemandu acara dan narasumber tentang suatu yang dipertuturkan yang terdapat dalam program Mata Najwa *Bara di Markas Jaksa* di Trans 7.
7. Pelanggaran maksim cara/pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemandu acara dan narasumber dalam program Mata Najwa *Bara di Markas Jaksa* di Trans 7 tidak berbicara dengan jelas, dan apa yang disampaikan ambigu serta membingungkan sehingga menimbulkan pertanyaan baru.
8. *Talkshow* adalah acara yang menayangkan suatu permasalahan melalui perbincangan, interaksi, diskusi, dan wawancara dengan narasumber, tanpa adanya aktor yang memerankan karakter tertentu.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Teori yang Relevan**

Penelitian ini menggunakan sejumlah teori yang dikemukakan oleh para ahli yang berkaitan dengan masalah penelitian. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung kajian mengenai pelanggaran prinsip kerja sama yang dilakukan oleh Najwa Shihab dan bintang tamunya dalam program Mata Najwa dengan tema *Bara di Markas Jaksa* di Trans 7. Sugiyono (2015:103), “Teori pada dasarnya seperangkat konsep, definisi, proposisi, konsep, dan pemikiran yang disusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan fenomena”. Tidak hanya itu teori ini digunakan untuk menguatkan keakuratan data. Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya sebagai berikut.

##### **2.1.1 Hakikat Pragmatik**

Untuk dapat memahami konsep pragmatik, berikut ini dipaparkan pengertian pragmatik menurut beberapa ahli. Wijana (1996:1), mendefinisikan pragmatik sebagai cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur bahasa secara eksternal, yakni bagaimana satuan kebahasaan itu digunakan di dalam komunikasi. Menurut Nadar (2013:2), “Pragmatik merupakan cabang linguistik yang mempelajari bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dalam situasi tertentu”. Sementara itu, Yule (2006:3), mengatakan bahwa pragmatik adalah studi yang mempelajari tentang makna yang disampaikan oleh penutur dan ditafsirkan oleh pendengar. Lebih detail Rahardi (2005:49), mengemukakan bahwa pragmatik merupakan ilmu bahasa yang menekuni keadaan pemakaian

bahasa manusia yang pada dasarnya ditentukan oleh konteks yang mewadahi serta melatarbelakangi bahasa itu.

Berdasarkan beberapa definisi pragmatik di atas, dapat disimpulkan bahwa pragmatik merupakan ilmu bahasa yang mempelajari maksud suatu pertuturan yang sesuai dengan konteksnya. Kajian pragmatik perlu melibatkan penafsiran tentang apa yang dimaksudkan orang di dalam suatu konteks khusus dan bagaimana konteks itu berpengaruh terhadap apa yang dikatakan. Konteks yang dimaksud dalam kajian pragmatik mencakup latar belakang pengetahuan yang dimiliki oleh peserta tutur. Oleh karena itu, untuk bisa memahami suatu percakapan, peserta tutur harus bisa menjadi penerjemah yang baik. Keahlian dalam menerjemahkan percakapan mutlak dibutuhkan karena tidak selamanya maksud yang ingin diinformasikan penutur tergambar dari kata-kata yang diucapkan. Bahkan, dalam pragmatik maksud yang ingin disampaikan oleh penutur tersirat dalam konteks. Oleh karena itu, penutur harus mampu menghubungkan tuturan dengan konteks yang menyertai munculnya tuturan tersebut.

### **2.1.2 Hakikat Konteks**

Dalam mengkaji pragmatik, konteks merupakan hal yang harus diperhatikan. Tanpa konteks, analisis pragmatik tidak dapat berlangsung. Pentingnya konteks dalam pragmatik ditekankan oleh Wijana (1996:2), yang menyatakan bahwa pragmatik mempelajari makna yang terikat oleh konteks. Menurut Nadar (2013:6), mengatakan bahwa konteks merupakan hal-hal yang bergantung dengan lingkungan fisik dan sosial suatu tuturan maupun latarbelakang pengetahuan yang sama-sama dimiliki oleh penutur dan mitra tutur



yang dapat membantu mitra tutur menafsirkan maksud tuturan. Djajasudarma (2006:54), menambahkan bahwa “Konteks merupakan ciri atau gambaran yang berfokus pada budaya dan linguistik sesuai dengan ujaran yang dihasilkan dan interpretasinya”.

Sejalan dengan Lubis dalam Darma (2014:137), yang menyatakan bahwa konteks pemakaian bahasa dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu. Pertama, konteks fisik (*physical context*). Konteks fisik meliputi tempat terjadinya pemakaian bahasa dalam suatu komunikasi, objek yang disajikan dalam peristiwa komunikasi dan tindakan atau perilaku dari para peran dalam peristiwa itu. Kedua, konteks epistemis (*epistemic context*) atau latar belakang pengetahuan yang sama-sama diketahui oleh pembicara maupun pendengar. Ketiga konteks linguistik (*linguistics context*) yang terdiri atas kalimat-kalimat atau tuturan-tuturan yang mendahului satu kalimat atau tuturan tertentu dalam peristiwa komunikasi. Dan yang keempat adalah konteks sosial (*social context*) yaitu relasi sosial dan latar *setting* yang melingkupi hubungan antara pembicara (penutur) dengan pendengar”.

Senada dengan pendapat Lubis di atas, terkait dengan konteks Nadar (2013:7—8), menjelaskan 8 (delapan) komponen yang menentukan konteks pembicaraan berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Hymes. Delapan komponen tersebut disingkat dengan SPEAKING yaitu, *setting, participants, ends, act of sequence, keys, instrumentalities, norms, dan genres*. *Setting* adalah tempat dan waktu percakapan terjadi, *participants* adalah orang yang terlibat dalam percakapan (peserta tutur), *ends* merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam percakapan, *act of sequence* adalah bentuk saluran tutur yang berupa lisan

maupun tertulis, *keys* terkait dengan cara dari pertuturan yang dilangsungkan, *instrumentalities* terkait dengan kaidah berbahasa dalam percakapan, *norms* norma atau aturan dalam berinteraksi dan *genres* adalah jenis wacana. Delapan komponen di atas dapat melatarbelakangi munculnya suatu percakapan.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa konteks sangat memengaruhi kelancaran komunikasi. Konteks dapat diartikan sebagai sebab serta alasan terjadinya suatu percakapan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan tuturan, baik itu arti, maksud ataupun informasi sangat gayut pada konteks yang melatarbelakangi peristiwa pertuturan tersebut. Arti suatu kalimat bisa dikatakan benar apabila kita mengetahui siapa pembicaranya, siapa pendengarnya, dan bagaimana mengucapkannya. Oleh karena itu, untuk mengetahui makna yang tersurat maupun tersirat dalam sebuah tuturan maka kita harus memahami konteksnya. Peran konteks sangat berpengaruh dalam menentukan makna suatu ujaran. Apabila Tuturan yang sama dituturkan pada konteks yang berbeda maka maknanya akan berbeda.

### **2.1.3 Hakikat Prinsip Kerja Sama**

Teori-teori yang dikemukakan di atas merupakan sebagai pengayaan sedangkan teori yang penulis gunakan untuk menganalisis masalah penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh Grice. Grice (dalam Wijana 1996:45—53) menyatakan bahwa ada semacam prinsip kerja sama yang harus dilakukan penutur serta mitra tutur supaya proses suatu komunikasi berjalan dengan lancar. Grice dalam Rahardi (2005:52), juga mengemukakan bahwa supaya pesan dapat sampai dengan baik kepada peserta tutur, maka perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip kerja sama. Selanjutnya, Nadar (2013:24), menjelaskan dalam percakapan

seseorang harus memberikan kontribusi yang sesuai dengan kebutuhan, pada tingkat di mana percakapan tersebut berlangsung, sesuai dengan maksud dan tujuan di mana anda terlibat.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa, untuk kelancaran suatu komunikasi partisipan harus mematuhi prinsip kerja sama. Menurut Grice prinsip kerja sama tertuang dalam 4 (empat) maksim yang harus dipatuhi oleh peserta tutur, empat maksim percakapan tersebut di antaranya. Pertama, maksim kuantitas (*maxim of quantity*). Kedua, maksim kualitas (*maxim of quality*). Ketiga, maksim relevansi (*maxim relevance*), dan keempat adalah maksim cara/pelaksanaan (*maxim of manner*). Namun, pada kenyataannya dalam percakapan masih banyak peserta tutur yang melanggar keempat maksim dalam prinsip kerja sama.

#### **2.1.4 Pelanggaran Prinsip Kerja Sama**

Pelanggaran prinsip kerja sama sering terjadi dalam peristiwa tutur. Menurut Jazeri (2008:151), mengatakan bahwa dalam sebuah percakapan, pelanggaran prinsip kerja sama sering tidak terelakkan. Pelanggaran tersebut terjadi karena unsur kesengajaan dan unsur ketidaksengajaan. Di bawah ini akan dipaparkan secara rinci konsep pelanggaran maksim prinsip kerja sama Grice beserta contoh tuturan dan analisisnya.

##### **1. Pelanggaran Maksim Kuantitas (*Maxim of Quantity*)**

Menurut Wijana (1996:46), dalam maksim kuantitas menginginkan setiap penutur dan mitra tutur memberikan kontribusi yang secukupnya tidak melebihi dari apa yang dibutuhkan oleh lawan bicaranya. Yule (2006:64), mengatakan dalam bertutur ada dua hal yang harus dilakukan. Pertama, buatlah percakapan

yang informatif seperti yang diminta. Kedua, jangan membuat percakapan lebih informatif dari yang diminta. Sejalan dengan pendapat Nadar (2013:24), mengatakan dalam maksim kuantitas berikanlah informasi sesuai kebutuhan dalam rangka tujuan atau maksud pertuturan, dan jangan memberikan informasi yang melebihi kebutuhan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa di dalam maksim kuantitas setiap partisipan diharapkan menyumbangkan informasi yang secukupnya atau sebanyak yang dibutuhkan oleh mitra tutur. Informasi yang diberikan tidak boleh melebihi yang dibutuhkan mitra tutur. Tuturan yang mengandung informasi yang sungguh-sungguh di butuhkan mitra tutur dapat dikatakan pematuhan terhadap maksim kuantitas prinsip kerja sama Grice. Demikian sebaliknya, apabila tuturan itu mengandung informasi yang berlebihan dapat dikatakan melanggar maksim kauntitas. Adapun contoh pelanggaran maksim kuantitas dalam prinsip kerja sama, bisa dilihat dari contoh berikut.

Konteks : Percakapan ini terjadi antara si A dan si B. Si A dan si B merupakan dua orang yang belum saling mengenal, pada saat itu terjadilah percakapan antara si A dan si B. Si A menanyakan nama si B seperti percakapan di bawah ini.

A : Siapa namamu?

B : Ani, rumah saya di Klaten, tepatnya di Pedan. Saya belum bekerja. Saya masih mencari pekerjaan. Saya anak bungsu dari lima bersaudara. Saya pernah kuliah di UGM, tetapi karena tidak ada biaya, saya terpaksa berhenti kuliah (1) (Suryani: 2015:3)

Tuturan (1) di atas, menurut teori Grice tidak kooperatif karena memberikan informasi yang melebihi dari yang dibutuhkan A. Tuturan tersebut dapat dikatakan melanggar prinsip kerja sama maksim kuantitas. Menurut Grice dalam maksim kuantitas berikanlah informasi secukupnya yang dibutuhkan oleh mitra tutur serta tidak berlebihan. Dari percakapan di atas A hanya membutuhkan

informasi nama mitra tutur yaitu Ani. Namun, B memberikan kontribusi berupa informasi alamat, status pekerjaan, statusnya dalam keluarga, dan pengalamannya yang pernah kuliah di UGM yang pada saat itu belum dibutuhkan oleh A (Penutur). Pelanggaran maksim kuantitas tersebut terjadi karena B (mitra tutur) ingin terlihat ramah dan lebih jelas dalam memberikan informasi. Hal tersebut tergambar dari tuturan B yang memberikan informasi alamat, status pekerjaan, statusnya dalam keluarga, dan pengalamannya yang pernah kuliah di UGM sebelum diminta oleh A (penutur).

Dengan demikian, berdasarkan contoh di atas tuturan yang mematuhi maksim kuantitas dalam prinsip kerja sama Grice tidak perlu menambahkan informasi pendukung. Partisipan cukup memberikan sumbangan informasi sesuai dengan apa yang diminta oleh mitra tuturnya. Konsep di atas, tidak relevan dengan budaya bertutur masyarakat di Indonesia. Masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan 'basa-basi' yang cukup tinggi dan sikap ramah-tamah yang membudaya di masyarakat Indonesia.

## 2. Pelanggaran Maksim Kualitas (*Maxim of Quality*)

Menurut Wijana (1996:48), bahwa maksim kualitas mewajibkan setiap partisipan percakapan harus mengatakan hal yang sesuai dengan faktanya, kontribusi peserta percakapan hendaknya didasarkan pada bukti-bukti yang memadai. Yule (2006:64), mengatakan ada tiga hal yang harus dilakukan partisipan dalam bertutur di antaranya. Pertama, dalam bertutur cobalah untuk membuat suatu informasi yang benar. Kedua, jangan mengatakan sesuatu yang Anda yakini salah, dan yang ketiga, jangan mengatakan sesuatu jika anda tidak memiliki bukti yang memadai". Sejalan dengan Nadar (2013:24), mengatakan

dalam bertutur jangan mengatakan sesuatu yang tidak benar, dan jangan mengatakan sesuatu yang kebenarannya tidak dapat dibuktikan secara memadai.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, di dalam maksim kualitas diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi yang benar. Dengan kata lain, baik penutur maupun mitra tutur tidak mengatakan apa-apa yang dianggap salah dan setiap kontribusi percakapan hendaknya didukung oleh bukti yang memadai. Apabila dalam suatu pertuturan ada peserta tutur yang tidak mempunyai bukti yang memadai, maka dapat dikatakan telah melanggar maksim kualitas prinsip kerja sama Grice. Contoh pelanggaran prinsip kerja sama Grice maksim kualitas seperti percakapan di bawah ini.

Konteks : Tuturan ini terjadi antara A penutur dan B mitra tutur. A dan B sedang makan sate. Pada saat itu terjadilah percakapan antara si A dan si B. Si A bertanya perihal jenis sate yang sedang mereka makan kepada si B seperti percakapan di bawah ini.

A: “Ini sate ayam atau sate kambing?”

B: “Ayam berkepala kambing.” (2)

(Wijana, 1996:49)

Contoh tuturan (2) di atas, dapat dikatakan pelanggaran terhadap maksim kualitas. Menurut Grice dalam maksim kualitas kontribusi yang diberikan hendaknya didasarkan pada bukti-bukti yang memadai. Pelanggaran pada tuturan (2) tersebut terjadi karena adanya upaya dari B mitra tutur untuk mendapatkan efek lucu dalam percakapannya. Humor yang dimunculkan diharapkan mampu menciptakan suasana percakapan menjadi lebih akrab.

Berdasarkan contoh di atas dapat disimpulkan bahwa pada situasi tertentu partisipan sengaja mengabaikan maksim kualitas Grice. Hal ini dilakukan karena di Indonesia secara budaya, tuturan yang dituturkan seperti tuturan (2) di atas merupakan hal yang wajar dan biasa terjadi. Bahkan, penyampaian tuturan yang

tidak benar tersebut justru dilakukan untuk tujuan tertentu seperti efek humor, bercanda, menyindir, memerintah, serta melarang.

### 3. Pelanggaran Maksim Relevansi (*Maxim of Relevance*)

Maksim relevansi merupakan sebuah batasan dalam pemberian informasi, pada batasan ini seorang penutur maupun mitra tutur dituntut untuk bekerja sama dalam menyampaikan informasi agar terbentuknya percakapan yang relevan terhadap topik yang dibicarakan. Menurut Wijana (1996:49), maksim relevansi mengharuskan partisipan percakapan memberikan kontribusi yang sesuai dengan masalah pembicaraan. Yule (2006:64) Relevanlah. Sementara itu, Rahardi (2005:56), menyatakan bahwa dalam maksim relevansi, agar terjalin kerja sama yang baik antara penutur dan mitra tutur, masing-masing hendaknya memberikan kontribusi yang relevan tentang sesuatu yang dipertuturkan itu.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa supaya terjalin kerja sama yang baik antara penutur dan mitra tutur, hendaknya peserta tutur dapat memberikan kontribusi yang relevan tentang sesuatu yang dipertuturkannya. Bertutur tetapi tidak memberikan kontribusi yang relevan dengan yang dituturkan dapat dikatakan melanggar maksim relevansi prinsip kerja sama Grice. Berikut contoh pelanggaran prinsip kerja sama Grice maksim relevansi.

Konteks : Tuturan ini terjadi antara seorang ayah dan anaknya. Dalam percakapan ini anak sebagai penutur, dan ayah sebagai mitra tutur. Sang anak memberi tahu ayahnya bahwa ada kecelakaan, seperti percakapan di bawah ini.

Anak : Pak ada tabrakan motor lawan truk di pertigaan depan.

Ayah : Yang menang apa hadiahnya? (3) (Wijana, 1996:49)

Pada percakapan di atas, tuturan (3) dapat dikatakan pelanggaran terhadap maksim relevansi. Menurut Grice dalam maksim relevansi partisipan harus memberikan kontribusi yang sesuai dengan apa yang dibicarakan. Berdasarkan tuturan (3) Bila sang ayah sebagai peserta percakapan yang kooperatif, maka tidak selayaknya ia menyamakan peristiwa kecelakaan yang dilihat anaknya itu dengan sebuah pertandingan atau kejuaraan. Dalam kecelakaan tidak ada pemenang, dan tidak ada pula yang menerima hadiah. Semua pihak akan merasa kerugian, bahkan salah satu bisa meninggal dunia. Hal tersebutlah yang menyebabkan tuturan dikatakan tidak relevan atau melanggar prinsip kerja sama Grice maksim relevansi. Pelanggaran tersebut terjadi karena sang ayah ingin melucu atau bercanda supaya percakapan tersebut terlihat lebih santai dan tidak tegang.

Berdasarkan contoh di atas, pada situasi tertentu partisipan sengaja tidak mengindahkan maksim relevansi Grice. Masyarakat Indonesia yang memiliki kebiasaan bercanda, mengakibatkan maksim relevansi Grice tidak bisa diterapkan secara utuh. Hal ini dilakukan karena secara budaya, tuturan yang dituturkan merupakan suatu hal yang wajar dan biasa terjadi.

#### 4. Pelanggaran Maksim Cara/Pelaksanaan (*Maxim of Manner*)

Maksim cara atau pelaksanaan merupakan suatu batasan dalam percakapan yang menekankan agar penutur dan mitra tutur menyampaikan informasi dengan lugas, tidak ambigu dan tidak bertele-tele. Menurut Grice dalam Wijana (1996:50), bahwa dalam maksim pelaksanaan partisipan pertuturan diharapkan untuk berbicara secara langsung, tidak kabur, tidak taksa dan tidak berlebih-lebihan serta runtut. Sementara itu, Rahardi (2005:57), mengatakan bahwa maksim pelaksanaan mengharuskan peserta pertuturan bertutur secara



langsung, jelas, dan tidak kabur. Lebih rinci Yule (2006:64), menyampaikan bahwa dalam maksim cara/pelaksanaan peserta tutur harus cerdas, dan terdapat 4 (empat) hal yang harus dilakukan di antaranya. Pertama, hindari ungkapan yang tidak jelas. Kedua, hindari ketaksaan. Ketiga, buatlah singkat (hindari panjang-lebar yang tidak perlu), dan keempat buatlah secara teratur”.

Berdasarkan uraian pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kunci dari maksim cara/pelaksanaan ini adalah usahakan apa yang dituturkan mudah untuk dimengerti. Dalam maksim ini yang dipentingkan adalah bagaimana cara kita mengungkapkan ide, gagasan, pendapat dan saran kepada orang lain. Apabila tuturan yang diberikan tidak jelas dan sulit untuk dipahami dapat dikatakan melanggar maksim cara/pelaksanaan. Berikut contoh pelanggaran prinsip kerja sama Grice maksim cara/pelaksanaan.

Konteks : Tuturan ini terjadi antara si A dan B. A sebagai penutur dan B sebagai mitra tutur. Pada saat itu terjadilah percakapan seperti di bawah ini.

A : “Ayo, cepat dibuka!” (4)

B : “Sebentar dulu, masih dingin.” (5) (Rahardi, 2005:57)

Tuturan (4) dan (5) di atas dapat dikatakan melanggar prinsip kerja sama Grice maksim cara/pelaksanaan. Dikatakan melanggar karena kadar kejelasannya rendah dan kadar kekaburannya sangat tinggi. Menurut Grice dalam maksim cara/pelaksanaan partisipan diminta bertutur secara langsung, jelas, dan tidak kabur. Tuturan (4) sama sekali tidak memberikan kejelasan tentang apa yang sebenarnya diminta oleh mitra tutur. Kata *dibuka* dalam tuturan (4) di atas mengandung ketaksaan dan kekaburan sangat tinggi. Oleh karena itu, maknanya pun menjadi sangat kabur. Dikatakan demikian karena kata itu bisa ditafsirkan dengan bermacam-macam. Begitupun tuturan (5) mengandung ketaksaan yang cukup tinggi. Kata *dingin* pada tuturan tersebut dapat mendatangkan banyak

persepsi penafsiran karena dalam tuturan tersebut tidak dijelaskan apa sebenarnya yang masih *dingin* itu. Pelanggaran tersebut terjadi karena ketidaklangsungannya dalam berbicara.

Berdasarkan contoh di atas, maksim cara/pelaksanaan menghendaki partisipan untuk bertutur secara langsung, tidak ambigu dan runtut. Konsep tersebut bertentangan dengan budaya bertutur masyarakat di Indonesia yang memiliki kebiasaan basa-basi, gugup, empati serta bingung memberikan jawaban sehingga akan terjadi pelanggaran terhadap maksim cara/pelaksanaan Grice.

### **2.1.5 Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama**

Dalam percakapan tidak selamanya tuturan yang disampaikan harus memenuhi maksim-maksim dalam prinsip kerja sama yang digagas oleh Grice, adakalanya karena tujuan atau pada situasi tertentu terjadi pelanggaran. Pelanggaran yang terjadi disebabkan oleh beberapa permasalahan sosial. Suryani (2015:5) mengatakan bahwa maksim yang digagas oleh Grice tidak selalu dipatuhi oleh partisipan, pada situasi tertentu maksim-maksim prinsip kerja sama dilanggar untuk tujuan tertentu. Jazeri (2008:151), mengatakan bahwa dalam sebuah percakapan, pelanggaran maksim sering tidak terelakkan, pelanggaran tersebut terjadi karena unsur kesengajaan dan unsur ketidaksengajaan.

Masih terkait dengan alasan pelanggaran prinsip kerja sama, Rochmawati (2017:156), mengatakan bahwa humor atau lelucon akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran prinsip kerja sama Grice, yaitu maksim kuantitas, kualitas, relevansi, dan maksim cara/pelaksanaan. Selanjutnya, Lili (2012:94) dalam artikelnya menyatakan bahwa alasan pelanggaran maksim-maksim prinsip kerja sama juga bisa terjadi karena seseorang memberikan informasi tambahan dan

tidak sengaja menciptakan masalah dalam interaksi sosial. Lebih luas Chaer (2010) menyatakan bahwa alasan terjadinya pelanggaran maksim prinsip kerja sama disebabkan oleh beberapa hal, yaitu. Adanya kemauan dari partisipan untuk memberikan kontribusi yang berlebihan dalam berbicara, respons terhadap jawaban lawan tutur, kemauan untuk menciptakan situasi menjadi santai atau menimbulkan efek humor, dan adanya usahan untuk menciptakan informasi yang disampaikan menjadi kabur.

Lebih detail Fatmawati (2020:154—156) membagi alasan pelanggaran prinsip kerja sama Grice berdasarkan maksim-maksim prinsip kerja sama Grice, sebagai berikut. Pertama pelanggaran maksim kuantitas terjadi karena beberapa alasan, yakni: berbagi informasi, keakraban, keramahan, kesantunan, penolakan, dan persuasi. Kedua, alasan pelanggaran maksim kualitas terjadi karena humor dan berbohong. Ketiga, alasan pelanggaran maksim relevansi yang paling sering terjadi karena penolakan. Selanjutnya, alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan berkaitan dengan kesantunan, dan tuturan disampaikan secara tidak langsung.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip kerja sama Grice benar-benar terjadi. Pelanggaran tersebut dikarenakan beberapa alasan. Adapun alasan-alasan pelanggaran prinsip kerja sama Grice, yakni sebagai berikut: Pertama, pelanggaran terhadap maksim kuantitas bisa terjadi karena ingin berbagi informasi, keramahan, kesantunan, kejelasan, dan persuasi. Kedua, pelanggaran terhadap maksim kualitas bisa terjadi karena ingin bercanda, dan berbohong. Ketiga, pelanggaran terhadap maksim relevansi biasa terjadi karena penolakan. Keempat, pelanggaran terhadap maksim

cara/pelaksanaan terjadi karena ingin terlihat santun dan menyampaikan tuturan secara tidak langsung.

Dalam penelitian ini penulis akan mengelaborasi tentang pelanggaran-pelanggaran maksim prinsip kerja sama Grice serta alasan terjadinya pelanggaran yang terdapat dalam program Mata Najwa *Bara di Markas Jaksa* di Trans 7 berdasarkan teori-teori yang telah disampaikan oleh para ahli. Pengelaborasi dalam penelitian ini tidak serta-merta mengikuti apa yang dikemukakan oleh para ahli, mungkin saja apa yang dikemukakan oleh para ahli sesuai dengan hasil penelitian. Namun, tidak menutup kemungkinan bisa saja penulis menemukan alasan-alasan pelanggaran prinsip kerja sama yang berbeda dengan yang ditemukan oleh para ahli. Jadi, penulis tidak selalu berpatokan terhadap apa yang dikemukakan oleh para ahli di atas. Teori tersebut hanya dijadikan sebagai dasar membantu penulis dalam menentukan alasan pelanggaran keempat maksim prinsip kerja sama Grice yang terdapat dalam program Mata Najwa *Bara di Markas Jaksa* di Trans 7.

## **2.2 Penelitian yang Relevan**

Sebelum penulis meneliti kajian tentang pelanggaran prinsip kerja sama, penelitian serupa sudah pernah diteliti oleh beberapa peneliti lain. Pertama, penelitian yang berbentuk skripsi yang di tulis oleh Intan Suryani tahun 2015 dengan judul “Pelanggaran Prinsip Kerjasama dalam Acara *Talk show Hitam Putih* di Trans 7”. Masalah dalam penelitian ini yaitu pelanggaran maksim prinsip kerja sama dan jenis-jenis pelanggaran prinsip kerja sama. Teori yang digunakan adalah teori yang dikemukakan oleh R. Kunjana Rahardi (2005) tentang maksim-maksim prinsip kerja sama, Lubis (1991) tentang konteks pemakaian bahasa, dan

teori yang dikemukakan oleh Grice (1975) dalam Wijana (1996) tentang pragmatik dan maksim-maksim prinsip kerja sama. Metode yang digunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya adalah seluruh tuturan yang melanggar bentuk dan jenis maksim prinsip kerja sama dalam acara *Talk Show Hitam Putih* di Trans 7 sebanyak 99 turunan dalam 7 situasi, tuturan yang mengandung melanggar kuantitas sebanyak 23 tuturan, melanggar maksim kualitas sebanyak 30 tuturan, melanggar maksim relevansi sebanyak 25 tuturan, dan melanggar maksim pelaksanaan/cara sebanyak 21 tuturan.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan Intan Suryani adalah sama-sama membahas tentang kajian pragmatik khususnya prinsip kerja sama. Terdapat 3 (tiga) perbedaan dalam penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh Intan Suryani. Perbedaannya terletak pada objek yang dikaji, masalah, dan metode yang digunakan. Objek yang di kaji oleh Intan Suryani adalah acara *Talk show Hitam Putih* di Trans 7, sedangkan objek kajian penulis adalah Program *Mata Najwa Bara di Markas Jaksa* di Trans 7. Dalam penelitian Intan Suryani terdapat dua masalah yaitu, (1) pelanggaran maksim prinsip kerja sama, dan (2) jenis-jenis pelanggaran prinsip kerja sama. Sedangkan masalah dalam penelitian penulis adalah (1) Bagaimanakah pelanggaran prinsip kerja sama dalam program *Mata Najwa Bara di Markas Jaksa* di Trans 7, serta (2) Bagaimanakah alasan terjadinya pelanggaran prinsip kerja sama dalam program *Mata Najwa Bara di Markas Jaksa* di Trans 7. Metode yang digunakan Intan Suryani adalah metode deskriptif kualitatif sedangkan metode yang penulis gunakan adalah metode analisis isi.

Penelitian yang kedua skripsi yang di tulis oleh Pipit Ustari tahun 2019 dengan judul “Pelanggaran Prinsip Kerja Sama dan Implikatur Percakapan dalam Acara *Waktu Indonesia Bercanda* di NET TV”. Adapun masalah yang diteliti adalah (1) Bagaimanakah wujud pelanggaran prinsip kerja sama dalam acara *Waktu Indonesia Bercanda*? (2) Bagaimanakah wujud implikatur percakapan yang terdapat dalam acara *Waktu Indonesia Bercanda*? Teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh Leech dalam Wijana (1996) tentang pragmatik dan situasi tutur, Grice (1975) tentang prinsip kerja sama dan implikatur percakapan, Parker dalam Rustono (1999) tentang pragmatik, Halliday dalam Rustono (1999) tentang prinsip kerja sama dan prinsip kesantunan, Wijana (2011) dan Oktavianus (2006) tentang implikatur.

Metode dan teknik analisis yang digunakan dalam menganalisis data yaitu menggunakan metode heuristik dan metode padan dengan subjenis pragmatis dan normatif. Hasil penelitian ini adalah ditemukan pelanggaran terhadap prinsip kerja sama yang meliputi semua maksim (empat maksim). Pelanggaran paling banyak ialah terhadap maksim relevansi, maksim cara, maksim kualitas, dan yang terakhir adalah maksim kuantitas.

Diketahui bahwa pelanggaran paling banyak dilakukan yaitu maksim relevansi, maka dapat dikatakan bahwa sebagian besar humor yang terdapat dalam acara *Waktu Indonesia Bercanda* di NET Tv dimunculkan dengan cara tuturan yang menyimpang dari pembahasan topik sebelumnya yang menjadikan percakapan tersebut tidak kooperatif. Kedua, terdapat pula implikatur percakapan dalam acara *Waktu Indonesia Bercanda* di NET Tv. Implikatur percakapan tersebut terdiri dari delapan macam implikatur yang berbeda. Kedelapan macam

implikatur tersebut ialah, implikatur representatif dengan wujud menyatakan, menunjukkan, dan menyebutkan, implikatur direktif dengan wujud memohon, implikatur ekspresif dengan wujud mengkritik dan mengeluh, dan implikatur isbati dengan wujud melarang dan memberikan maaf.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan Pipit Ustari adalah sama-sama membahas kajian pragmatik khususnya prinsip kerja sama. Terdapat perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pipit Ustari terletak pada objek yang dikaji, masalah dan metode yang digunakan. Objek yang dikaji oleh Pipit Ustari adalah acara *Waktu Indonesia Bercanda* di NET Tv, sedangkan objek kajian penulis adalah program *Mata Najwa Bara di Markas Jaksa* di Trans 7.

Dalam penelitian Pipit Ustari terdapat dua masalah yaitu, (1) Bagaimanakah wujud pelanggaran prinsip kerja sama dalam acara *Waktu Indonesia Bercanda*? (2) Bagaimanakah wujud implikatur percakapan yang terdapat dalam acara *Waktu Indonesia Bercanda*? Sedangkan masalah dalam penelitian penulis yaitu (1) Bagaimanakah pelanggaran prinsip kerja sama dalam program *Mata Najwa Bara di Markas Jaksa* di Trans 7, serta (2) Bagaimanakah alasan terjadinya pelanggaran prinsip kerja sama dalam program *Mata Najwa Bara di Markas Jaksa* di Trans 7. Metode yang digunakan Pipit Ustari adalah metode heuristik dan metode padan dengan subjenis pragmatis dan normatif, sedangkan metode yang penulis gunakan adalah metode analisis isi.

Ketiga, penelitian dalam bentuk artikel jurnal yang di tulis oleh Ferdian Achsani tahun 2019 dengan judul *Pematuhan dan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama dalam Komunikasi Siswa-Siswi MAN 1 Surakarta*. Masalah dalam

penelitian ini adalah (1) Bagaimana bentuk kepatuhan dan pelanggaran prinsip kerja sama dalam komunikasi antara siswa dan guru di MAN 1 Surakarta. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh Grice tentang prinsip kerja sama. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan metode membaca dilengkapi dengan teknik sadap, kemudian dilanjutkan dengan teknik mencatat dan merekam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kepatuhan dan pelanggaran prinsip kerja sama dalam komunikasi antara siswa dan guru.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan Ferdian Achسانی adalah sama-sama membahas kajian pragmatik khususnya prinsip kerja sama dan sama-sama penelitian kualitatif. Adapun perbedaan yang penulis lakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ferdian Achسانی yaitu pada masalah, objek, dan metode penelitian. Masalah dalam penelitian Ferdian Achسانی yaitu tentang (1) Bagaimanakah bentuk pelanggaran dan pematuhan prinsip kerja sama, sedangkan masalah dalam penelitian yang penulis lakukan yaitu, (1) Bagaimanakah pelanggaran prinsip kerja sama dalam program *Mata Najwa Bara di Markas Jaksa* di Trans 7, serta (2) Bagaimanakah alasan terjadinya pelanggaran prinsip kerja sama dalam program *Mata Najwa Bara di Markas Jaksa* di Trans 7. Objek dalam penelitian Ferdian Achسانی adalah guru dan siswa-siswi MAN 1 Surakarta. Sedangkan objek penelitian penulis adalah program *Mata Najwa Bara di Markas Jaksa* di Trans 7. Metode yang digunakan oleh Ferdian Achسانی metode simak yang dilengkapi dengan teknik sadap, sedangkan penulis menggunakan metode analisis isi.



Keempat, penelitian dalam bentuk artikel jurnal yang di tulis oleh Hestiyana tahun 2012 dengan judul *Pelanggaran Prinsip Kerja Sama dalam Wacana Humor Kisah-Kisah Sarawin*. Masalah dalam penelitian Hestiyana adalah (1) Bagaimanakah pelanggaran prinsip kerja sama dalam wacana humor kisah-kisah Sarawin? Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh Grice dalam Astuti (2006) tentang prinsip kerja sama, Rustono dan Aple dalam Astuti (2006) tentang humor, Herawati (2007) tentang humor, dan Grice dalam Chaer (2010) tentang maksim-maksim prinsip kerja sama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil pembahasan ditemukan pelanggaran prinsip kerja sama, berupa pelanggaran maksim kuantitas, kualitas, relevansi, dan maksim cara.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan Hestiyana adalah sama-sama membahas kajian pragmatik khususnya pelanggaran prinsip kerja sama dan sama-sama penelitian kualitatif. Adapun perbedaan yang penulis lakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hestiyana yaitu pada objek, metode, dan masalah penelitian. Objek penelitian Hestiyana adalah kisah-kisah Sarawin cerita-cerita humor tokoh legendaris dalam bahasa Banjar oleh Syamsiar Seman, sedangkan objek penelitian penulis adalah program *Mata Najwa Bara di Markas Jaksa* di Trans 7. Metode yang digunakan Hestiyana adalah metode deskriptif sedangkan penulis menggunakan metode analisis isi. Masalah dalam penelitian Hestiyana adalah (1) Bagaimanakah pelanggaran prinsip kerja sama dalam wacana humor kisah-kisah Sarawin?, sedangkan masalah dalam penelitian penulis yaitu, (1) Bagaimanakah bentuk pelanggaran prinsip kerja sama dalam program *Mata Najwa Bara di Markas Jaksa* di Trans 7, serta (2) Bagaimanakah

alasan terjadinya pelanggaran prinsip kerja sama dalam program *Mata Najwa Bara di Markas Jaksa* di Trans 7.

Kelima, penelitian dalam bentuk artikel jurnal yang di tulis oleh Mulya Tiara Fauziah, dkk tahun 2018 dengan judul *Pelanggaran Prinsip Kerja Sama dalam Tuturan Diskusi Kelas Bahasa Indonesia*. Masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana bentuk lebih mendalam dan memberikan gambaran sampai sejauh mana pelanggaran prinsip kerja sama dalam diskusi kelas bahasa Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Nadar (2013) tentang prinsip kerja sama, dan Rahardi tentang prinsip kerja sama.

Metode dalam penelitian adalah metode analisis isi (*content analysis*) model Philip Myring. Hasil penelitian menunjukkan, (1) pelanggaran maksim kuantitas sebanyak 7 tuturan (16%), (2) pelanggaran maksim kualitas sebanyak 5 tuturan (12%), (3) pelanggaran maksim relasi sebanyak 17 tuturan (39%), dan (4) pelanggaran maksim cara sebanyak 14 tuturan (33%). Tuturan-tuturan dalam diskusi kelas bahasa Indonesia yang melanggar prinsip kerja sama ini menjadikan tidak terjalinnya komunikasi yang baik sehingga diskusi yang terjadi kurang efektif. Hal ini dipicu karena beberapa hal seperti adanya rasa kurang percaya diri dari penutur atau lawan tutur, ingin menunjukkan kelucuan yang membuat suasana diskusi menjadi tidak monoton, kurang paham dan tidak tuntasnya di dalam memberikan tanggapan saat berdiskusi.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan Mulya Tiara Fauziah, dkk adalah sama-sama membahas kajian pragmatik khususnya prinsip kerja sama dan sama-sama menggunakan metode analisis isi. Adapun perbedaan yang penulis lakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulya Tiara

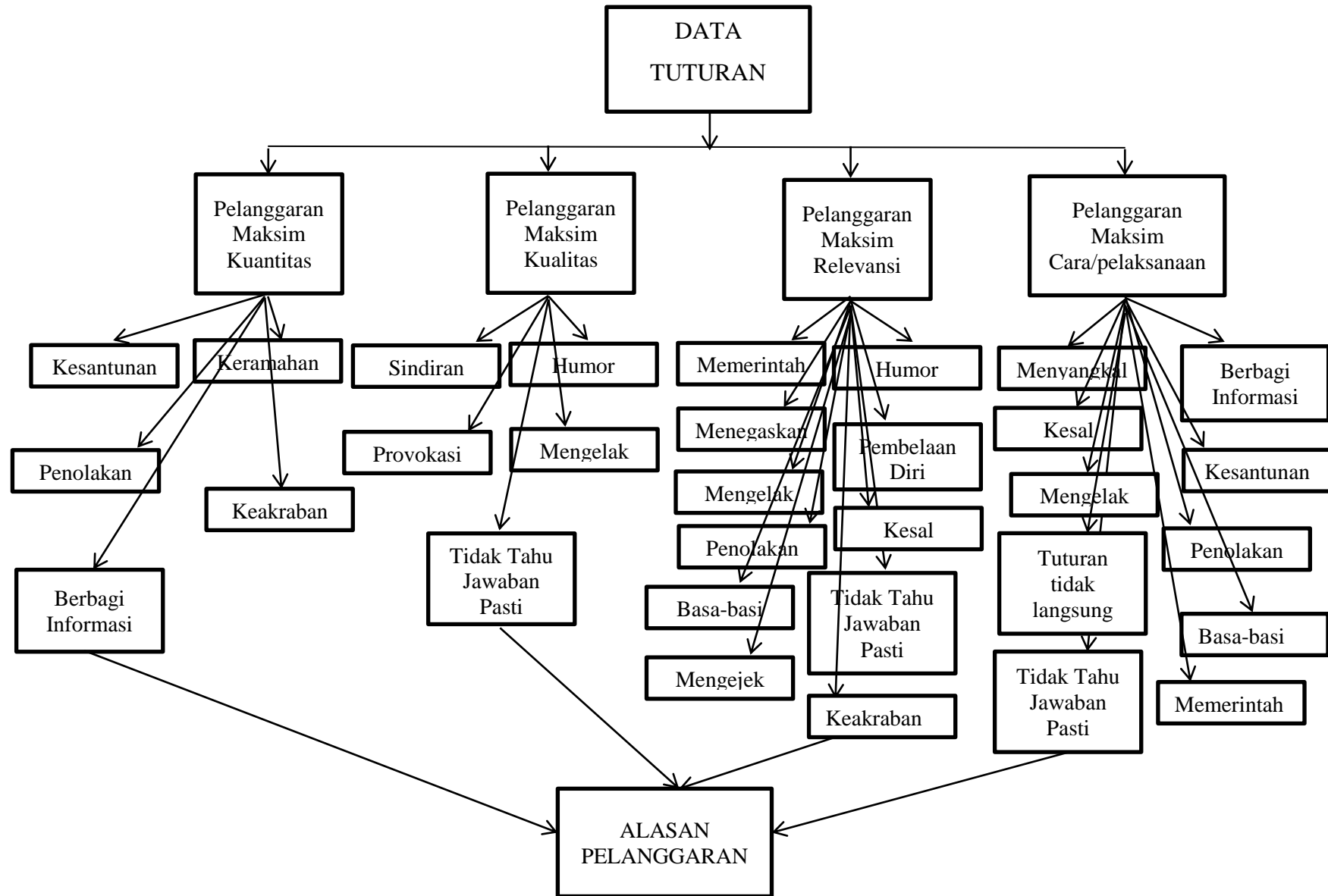
Fauziah, dkk terdapat pada masalah dan objek penelitian. Masalah dalam penelitian Mulya Tiara Fauziah, dkk adalah (1) Bagaimana bentuk lebih mendalam dan memberikan gambaran sampai sejauh mana pelanggaran prinsip kerja sama dalam diskusi kelas bahasa Indonesia, sedangkan masalah dalam penelitian penulis adalah (1) Bagaimanakah pelanggaran prinsip kerja sama dalam program *Mata Najwa Bara di Markas Jaksa* di Trans 7, serta (2) Bagaimanakah alasan terjadinya pelanggaran prinsip kerja sama dalam program *Mata Najwa Bara di Markas Jaksa* di Trans 7. Objek penelitian Mulya Tiara Fauziah, dkk adalah diskusi kelas bahasa Indonesia, sedangkan objek penelitian penulis adalah program *Mata Najwa Bara di Markas Jaksa* di Trans 7.

### **2.3 Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi mengenai masalah-masalah yang akan diteliti. Kerangka konseptual memberikan petunjuk kepada peneliti dalam merumuskan masalah penelitian. Kerangka konsep ini digunakan untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini diperoleh dari konsep atau teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan dalam bab tinjauan pustaka.

Kerangka konseptual penelitian ini dibuat berdasarkan tujuan penelitian yaitu untuk mengeksplorasi dan mengelaborasi bentuk pelanggaran dan alasan terjadinya pelanggaran prinsip kerja sama dalam program *Mata Najwa Bara di Markas Jaksa* di Trans 7. Kerangka penelitian digambarkan pada bagan 1.1 sebagai berikut.

Bagan 1.1 Kerangka Konseptual



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative approach*) yang menganalisis bentuk pelanggaran prinsip kerja sama dalam program Mata Najwa *Bara di Markas Jaksa* di Trans 7. Pendekatan kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, melalui kata-kata, laporan terinci, dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami. Sitoyo dan Sodik (2015:28), menyatakan bahwa pendekatan kualitatif adalah penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman dengan teknik analisis mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi.

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi. Menurut Bungin (2017:187), metode analisis isi (*content analysis*) adalah suatu metode yang sistematis dan objektif untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan, atau alat untuk mengamati dan menganalisis perilaku penutur dan mitra tutur. Analisis ini merupakan metode analisis penelitian yang menarik simpulan melalui data sah dengan mencermati konteks data. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi karena dalam pelaksanaannya penulis akan mengidentifikasi, mengklasifikasi pelanggaran prinsip kerja sama berdasarkan percakapan yang terjadi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan atau (*library Research*). Penelitian yang penulis teliti diperoleh dari video *audiovisual* yaitu adanya suara dan gambar. Penulis juga menggunakan teori yang diperoleh dari berbagai buku, dan beberapa penelitian

terdahulu yang relevan sebagai referensi. Menurut Sari dan Asmendri (2020:43) penelitian kepustakaan adalah studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.

### **3.2 Data dan Sumber Data**

Menurut Arikunto (2010:172) sumber data dalam penelitian merupakan subjek dari mana data bisa diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah aktivitas berbahasa yang terjadi dalam program Mata Najwa dengan tema *Bara di Markas Jaksa* pada hari Rabu 28 Agustus 2020. Alasan penulis memilih Program Mata Najwa *Bara di Markas Jaksa* di Trans 7 karena dalam satu video saja pada episode tersebut Najwa dan bintang tamunya banyak melanggar prinsip kerja sama. Alasan berikutnya karena video tersebut mendapat banyak respon dari khalayak ramai yang sudah ditonton sebanyak 137 Ribu kali dan disukai sebanyak 1,5 Ribu orang dengan 401 komentar, baik itu komentar positif maupun negatif tentang isi percakapan Najwa dengan bintang tamunya. Oleh karena itu, penulis hanya mengambil satu tayangan video Mata Najwa pada episode *Bara di Markas Jaksa*.

Data dalam penelitian ini adalah seluruh tuturan yang melanggar prinsip kerja sama yang dituturkan oleh Najwa Shihab dan bintang tamunya dalam Program Mata Najwa *Bara di Markas Jaksa* di Trans 7. Jumlah seluruh tuturan dalam program Mata Najwa tersebut ditemukan sebanyak 271 tuturan. Berdasarkan hasil observasi dari 271 tuturan ditemukan pelanggaran terhadap maksim prinsip kerja sama Grice berjumlah 83 tuturan, dan secara keseluruhan ditemukan 16 kategori alasan pelanggarannya.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2015:62) dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai *setting*, berbagai *sumber*, dan berbagai *cara*. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, dan sebaliknya. Adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, teknik simak, dan teknik catat. Berikut ini akan dijelaskan teknik-teknik yang digunakan oleh peneliti di antaranya sebagai berikut ini.

#### 1. Teknik Dokumentasi

Menurut Gunawan (2016:175) dokumen (dokumentasi) merupakan proses pembuktian yang berdasarkan atas ragam sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis. Sejalan dengan Sugiyono (2015:82), yang juga mengatakan bahwa dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Adapun dokumentasi dalam penelitian ini berupa video yang berdurasi 1:10:04 (satu jam sepuluh menit empat detik) dengan model MP4 kapasitas 239 MB, yang diunduh pada Tanggal 19 September 2020.

#### 2. Teknik Simak

Teknik simak digunakan untuk memperoleh data lisan yang berupa video berdurasi 1:10:04 (satu jam sepuluh menit empat detik) ke bentuk data tulisan. Mahsun (2005:92) menyatakan dinamakan teknik simak karena cara yang digunakan adalah menyimak penggunaan bahasa untuk memperoleh data. Dalam upaya mendapatkan data dilakukan dengan menyimak seluruh tuturan dalam

program Mata Najwa *Bara di Markas Jaksa* di Trans 7. Teknik ini penulis lakukan dengan cara melihat, mendengarkan, menyimak, mengikuti dengan saksama, serta memperhatikan seluruh tuturan dari awal sampai akhir.

### 3. Teknik Catat

Teknik catat adalah teknik lanjutan setelah melakukan teknik simak. Teknik catat menurut Mahsun (2005:132) “Apa yang dilihat harus dicatat”. Dalam hal ini penulis mencatat seluruh tuturan dalam program Mata Najwa *Bara di Markas Jaksa* di Trans 7 dari *youtube* yang diunduh pada tanggal 19 September 2020, dari bahasa lisan ke dalam bahasa tulis untuk memudahkan penulis menganalisis tuturan yang terdapat pelanggaran prinsip kerjasama. Teknik catat penulis lakukan bersamaan dengan teknik simak, karena ketika penulis menyimak video program Mata Najwa di *youtube*, penulis juga mencatat tuturan dengan cara memberikan jeda pada saat melakukan teknik catat. Setelah pencatatan dilakukan, peneliti melakukan klasifikasi atau pengelompokan.

### 3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil dokumentasi, simak, dan catat dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, serta membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Adapun teknik analisis data dalam penelitian analisis isi adalah sebagai berikut.



### 1. Pengkodean (*coding*)

Pada tahap ini, penulis memberi kode terhadap data. Pengkodean yang diberikan dalam bentuk angka.

### 2. Klasifikasi data

Pada tahap klasifikasi, penulis mengklasifikasi sekaligus menganalisis data. Klasifikasi tersebut dilakukan untuk mengelaborasi pelanggaran prinsip kerja sama yang terjadi dalam program Mata Najwa *Bara di Markas Jaksa* di Trans 7. Untuk mempermudah proses klasifikasi dan analisis data, penulis menggunakan tabel bantu. Tabel bantu yang digunakan dapat dilihat pada Lampiran 1 (halaman 236).

### 3. Menginterpretasi temuan penelitian.

Pada tahap ini, penulis melakukan interpretasi terhadap temuan penelitian. Interpretasi dilakukan untuk memberikan pemaknaan terhadap hasil penelitian. Dalam melakukan interpretasi, peneliti menghubungkan temuan penelitian ini dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu.

### 4. Selanjutnya penulis menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan data-data yang diperoleh.

## **3.5 Teknik Keabsahan Data**

Pelaksanaan teknik pemeriksaan data didasarkan pada kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang dapat digunakan dalam menentukan keabsahan data penelitian. Keempat kriteria tersebut adalah kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Di bawah ini akan dipaparkan keempat kriteria tersebut.

## 1. Kredibilitas

Agar hasil penelitian kualitatif memiliki derajat kepercayaan yang tinggi sesuai dengan fakta di lapangan perlu dilakukan upaya-upaya. Ada beberapa upaya yang peneliti lakukan untuk memastikan derajat kepercayaan terhadap data pelanggaran prinsip kerja sama dalam program Mata Najwa *Bara di Markas Jaksa* di Trans 7 yang dikumpulkan. Langkah pertama yang peneliti lakukan adalah menggunakan triangulasi. Menurut Sugiyono (2015:125), “Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu”. Sementara itu, menurut Gunawan (2016:219—221), triangulasi terbagi menjadi empat yakni: triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi peneliti, dan triangulasi teoritik. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi metode.

Menurut Gunawan, (2016:219), triangulasi metode dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan berjumlah 3 (tiga), yakni: teknik dokumentasi, teknik simak, dan teknik catat. Triangulasi metode ini digunakan supaya data yang diperoleh benar-benar bisa dipercaya dan diakui derajat kepercayaannya.

Langkah kedua yang peneliti lakukan dengan triangulasi adalah mengecek hasil penelitian, yaitu menggunakan bahan referensi, yang dimaksud dengan bahan referensi di sini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah diperoleh oleh peneliti. Misalnya, data hasil simak dan catat perlu didukung dengan adanya naskah hasil simak dan catat dalam bentuk tertulis. Naskah tertulis tersebut sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah

ditemukan oleh peneliti. Melalui teknik triangulasi ini diperoleh informasi mengenai pelanggaran maksim-maksim prinsip kerja sama yang bervariasi.

## 2. Transferabilitas

Kriteria tranferabilitas merujuk pada bagaimana supaya hasil penelitian ini dapat dipahami oleh pembaca. Menurut Sugiyono, (2015:130) nilai tranfer berkenaan dengan pertanyaan, sampai mana hasil penelitian ini bisa diaplikasikan atau digunakan dalam situasi lain. Agar hasil penelitian ini memiliki standar transferabilitas yang tinggi, penulis memberikan uraian secara detail tentang latar penelitian, konteks penelitian, data penelitian, dan subjek penelitian dalam bentuk laporan hasil penelitian. Melalui pemaparan laporan penelitian yang detail, sistematis, jelas, dan dapat dipercaya, maka pembaca menjadi lebih memahami hasil penelitian. Dengan demikian, pembaca dapat melakukan transmisi hasil penelitian tentang pelanggaran prinsip kerja sama ini kepada masyarakat tutur yang memiliki karakteristik yang sama.

## 3. Dependabilitas

Dalam kriteria dependabilitas, makin konsekuen peneliti dalam keseluruhan proses penelitian, baik dalam proses pengumpulan data, analisis data, interpretasi temuan, maupun dalam melaporkan hasil penelitian, maka akan semakin memenuhi standar dependabilitas. Menurut Sugiyono (2015:131), pengujian dependabilitas dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Dalam penelitian ini, upaya yang penulis lakukan untuk menguji kriteria dependabilitas adalah dengan cara berdiskusi dan melakukan audit (pemeriksaan) dengan dosen pembimbing untuk memeriksa keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.

#### 4. Konfirmabilitas

Menurut Sugiyono, (2015:131), “Dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada”. Standar konfirmabilitas dalam penelitian ini terfokus pada audit (pemeriksaan) aktivitas dan kepastian hasil penelitian. Apakah benar data yang diperoleh berasal dari pengumpulan data di lapangan. Dalam penelitian ini, pemeriksaan konfirmabilitas dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan dependabilitas. Untuk mencapai kriteria konfirmabilitas, peneliti melakukan pengecekan secara berulang-ulang terhadap proses dan temuan penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis memaparkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang mengandung pelanggaran prinsip kerja sama dan alasan terjadinya pelanggaran prinsip kerja sama percakapan pemandu acara dengan narasumber dalam program Mata Najwa pada tema *Bara di Markas Jaksa* di stasiun televisi Trans 7. Analisis data dan interpretasi data dimulai dengan mengidentifikasi setiap tuturan pembawa acara dan narasumber dan selanjutnya menentukan realisasi dalam setiap maksim prinsip kerja sama dan alasan terjadinya pelanggaran prinsip kerja sama Grice.

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Deskripsi Data**

Pada pembahasan ini, penulis mengeksplorasi semua pelanggaran dan alasan terjadinya pelanggaran terhadap tuturan antara pembawa acara dan narasumber dalam program Mata Najwa pada tema *Bara di Markas Jaksa* di Trans 7 ini dengan cara memberikan konteks dan pengkodean dengan penomoran berupa angka pada setiap data, guna untuk mempermudah penulis menganalisis data. Selain mengeksplorasi penulis juga mengelaborasi pelanggaran serta alasan terjadinya pelanggaran maksim prinsip kerja sama Grice. Program ini ditayangkan pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2020 pada pukul 20:30 WIB. Jumlah tuturan yang diperoleh dalam program ini terdiri dari 271 tuturan.

Berdasarkan data yang telah diperoleh, penulis menganalisis berdasarkan maksim-maksim prinsip kerja sama Grice dan alasan terjadinya pelanggaran

dalam program Mata Najwa pada tema *Bara di Markas Jaksa* di Trans 7. Agar penulis mudah dalam menganalisis, masing-masing penutur yang berkontribusi dalam percakapan akan dilambangkan dengan inisial nama. Simbol tersebut ditulis dua huruf berdasarkan inisial nama peserta percakapan. Penentuan inisial nama ditentukan sendiri oleh penulis. Penulis memberi inisial penutur dan mitra tutur dengan kode yang berbeda-beda sebagai berikut.

1. NS = Najwa Shihab (Pemandu Acara)
2. MM = Muhammad Mahfud MD (Narasumber)
3. HS = Hari Setiyono (Narasumber)
4. BS = Boyamin Saiman (Narasumber)
5. KR = Kurnia Ramadhana (Narasumber)
6. SG = Satriadi Gunawan (Narasumber)
7. FL = Fatmawati Lestari (Narasumber)
8. PB = Barita Simanjuntak (Narasumber)

Berdasarkan data yang terkumpul dalam program Mata Najwa *Bara di Markas Jaksa* pada tanggal 28 Agustus 2020. Penulis menentukan konteks menurut segmen yang ada pada video. Adapun rincian waktu yang terdapat pada setiap segmen atau konteks yaitu sebagai berikut: konteks satu berdurasi 8 menit 35 detik, konteks kedua berdurasi 15 menit 30 detik, konteks ketiga 9 menit 5 detik, konteks keempat 11 menit 35 detik, konteks kelima 8 menit 35 detik, konteks keenam berdurasi 8 menit 35 detik, dan konteks ketujuh 6 menit 45 menit.

Data dalam penelitian ini adalah tuturan antara pemandu acara dan bintang tamu dalam program Mata Najwa *Bara di Markas Jaksa* di Trans 7 sebanyak 83

tuturan dari 271 tuturan dalam tujuh situasi. Dari 83 data tersebut penulis menemukan dua pasang data yang masing-masing data melanggar dua maksim yang berbeda. Adapun kedua pasang data yang melanggar dua maksim yang berbeda yaitu, *pertama* pada data tuturan ke-25 dan data tuturan ke-26. Data tuturan 25 dan 26 merupakan satu pasang tuturan yang sama melanggar dua maksim yang berbeda, maksim yang dilanggar adalah maksim cara dengan alasan tuturan tidak langsung untuk data tuturan 25 dan data tuturan 26 melanggar maksim kualitas dengan alasan tidak tahu jawaban pasti, *kedua* data tuturan ke-58 dan data tuturan ke-59, kedua data tersebut merupakan satu pasang tuturan yang melanggar dua maksim berbeda yaitu untuk data tuturan 58 maksim yang dilanggar adalah maksim relevansi dengan alasan tidak tahu jawaban pasti, sedangkan data tuturan 59 maksim yang dilanggar adalah maksim cara dengan alasan tidak tahu jawaban pasti.

Sehingga, dari 83 data tersebut setelah dianalisis terdapat 25 tuturan yang melanggar maksim kuantitas dengan 5 kategori alasan pelanggarannya, 8 tuturan melanggar maksim kualitas dengan 5 kategori alasan pelanggarannya, 23 tuturan melanggar maksim relevansi dengan 11 kategori alasan pelanggarannya, dan selanjutnya 27 tuturan melanggar maksim cara/pelaksanaan dengan 10 kategori alasan pelanggarannya.

Untuk lebih rinci tabel berikut menjelaskan tentang deskripsi data. Tabel 4.1 adalah tabel deskripsi data penelitian tentang pelanggaran prinsip kerja sama grice. Tabel 4.2 adalah tabel deskripsi data tentang alasan pelanggaran prinsip kerja sama grice.

#### 4.1 Tabel Deskripsi Data Penelitian Tentang Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice

NO	Pasangan Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama			
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan
1	NS: “Empat hari setelah kebakaran melanda markas jaksa, spekulasi masih terus bermunculan penyebab kebakaranpun masih jadi tanda tanya, bagaimana perkembangan terkini terkait pengusutan kasus kebakaran ini, hadir di studio Mata Najwa kepala pusat penerangan dan hukum kejaksaan agung Hary Setyono. Selamat malam Pak Hary”. HS: ”Selamat malam, salam sehat untuk semuanya” (1)	✓			
2	NS: “Hadir teman saya peneliti Indonesian korupsi was atau ICW Kurnia Ramadana. Selamat malam Kurnia” KR: “Selamat malam Mba Nana, selamat malam semuanya” (2)	✓			
3	NS: “Saya juga sudah terhubung lewat video <i>call</i> dengan menteri koordinator politik hukum dan HAM Muhammad Mahfud Md. “Selamat malam, assalamualaikum Pak Mahfud” MM: “Waalaikumsalam, Najwa dan semuanya, Hari, Mas Bonyamin, Mas Ramadani.” (3)	✓			
4	NS: “Terima kasih sudah bergabung Pak Mahfud. Pak saya mau langsung <i>to the point</i> ya Pak Mahfud karnakan anda bahkan pada malam saat terjadi kebakaran langsung berani menyebut dan menjamin berkas-berkas perkara aman 100% tidak akan mengganggu proses penanganan perkara, keyakinan Pak Mahfud dari mana Pak? bahkan sudah disebutkan pada saat kebakarannya masih terjadi”. MM: “Karena saya langsung berhubungan dengan Jaksa Agung dan jampidum, itu gimana perkara-perkara yang sedang ditangguh. Oo jauh Pak, bukan disitu kalau berkas perkara, gitu. Jadi yang saya jamin aman tu jamak perkara yang sedang ditangani yang pada saat itu sering disebut ada dua. Satu, soal Djoko Chandra dan Pinangki, yang kedua soal Jiwasraya.(4)	✓			
5	NS: “Jadi, Pak Makfud karena kemudian bisa saja, kemudian argumennya jadi Pak Mahfud yakin hanya sebatas pernyataan sepihak yang dikeluarkan oleh pihak Kejaksaan Agung? MM : “Saya sudah katakan Pak gitu, saya katakan Pak kita nda bisa berbohong sekarang, nda mungkin berbohong ke masyarakat kita berbohong sekarang besok lusa akan dibuka oleh Bonyamin itu saya bilang. Oleh sebab itu jangan main-main RSM sekarang tu lebih canggih, Bonyamin tu suka menghubungi istri-istri Jaksa itu minta fotonya hahaha sehingga foto-foto yang rahasia dia punya tu. Saya bilang jangan main-main.” (5)			✓	



NO	Pasangan Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama			
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan
6	<p>NS:“Pak...Pak Mahfud, iya. Sebelum masuk ke bohong berbohong karena itu juga menarik, tapi saya ingat Andakan sempat mengatakan terbuka kaget bahwa kebakarannya besar sekali, cepat sekali, jadi jujur Pak Mahfud ke saya malam ini memang adakan di benak Pak Mahfud? mungkin saja ada ketidak wajaran dari bara yang muncul di markas Jaksa ini”</p> <p>MM :“Oo begini, saya katakan masyarakat jangan berspekulasi kan itukan ada di TV ya, spekulasi apa Pak, spekulasi yang saya baca di medsos itu, itu nda masuk akal gitu, lalu media itu banyak yang menulis kata Mahfud MD terbakarnya nda masuk akal, padahal saya mengutip medsos, yang berkembang ketika itu masyarakat mengatakan di medsos itu, ini ndak masuk akal kok dari lantai enam turun ke-empat turun ke-lima, masa kalo listrik separah itu, itu kata masyarakat. Oleh sebab itu saya katakan jangan berspekulasi lah, spekulasi apa, ya itu yang ada di masyarakat bahwa kok turun dari lantai enam ke-empat ke-tiga. (6)</p>			✓	
7	<p>MM : “Oo begini, saya katakan masyarakat jangan berspekulasi, itukan ada di TV ya, spekulasi apa Pak, spekulasi yang saya baca di medsos itu, itu nda masuk akal gitu, lalu media itu banyak yang menulis kata Mahfud MD terbakarnya nda masuk akal, padahal saya mengutip medsos, yang berkembang ketika itu masyarakat mengatakan di medsos itu, ini ndak masuk akal kok dari lantai enam turun ke-empat turun ke-lima, masa kalo listrik separah itu, itu kata masyarakat. Oleh sebab itu saya katakan jangan berspekulasi lah, spekulasi apa, ya itu yang ada di masyarakat bahwa kok turun dari lantai enam ke-empat ke-tiga.</p> <p>NS : “Tapi dari pengamatan Pak maaf” (7)</p>				✓
8	<p>NS : “Tapi.. Pak Mahfud pertanyaan saya apakah Pak Mahfud sendiri tidak terlintas dibenak Pak Mahfud mungkin saja ada ketidak wajaran, tidak pernah terlintas sama sekali Pak? Melihat besarnya kebakarannya.</p> <p>MM : “Semula terlintas, semula terlintas karena begini saya tidak tau kebakarannya, tiba-tiba itu ada telpon, Kejaksaan Agung kebakaran lalu saya liat televisi sudah parah lalu saya baca di media di medsos macam-macam ada kecurigaan saya juga ikut curiga gitu, terlintas, lalu saya telpon Jaksa Agung gimana Pak. Ooo Pak saya ada di tengah-tengah, gimana tu perkara-perkara itu gitu, aman.. oo aman saya terus telpon Fadil Sumana juga aman, lalu saya katakan saya terlintas ndak mungkin lah tidak telintas, kalo itu bohong kalo (8)</p>	✓			
9	<p>NS : “Apa Pak Mahfud, boleh saya tau Pak lintasan pertama dibenak karena mungkin saja itu yang benar Pak, hans Pak Mahfud apa? waktu terlintasnya ini dibakar.</p>	✓			

NO	Pasangan Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama			
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan
	MM : “Ya lintasan pertama karena sedang nangani perkara itu jangan-jangan ini ada yang sengaja orang dalam, kan gitu itu saya kira siapa aja bisa mengira begitu, manusiawi saya juga mengira begitu tetapi sesudah telpon itu, Pak gedungnya jauh yang diseberang sana itu kalo gedung yang nangani perkara itu begitu. (9)				
10	NS : “Karena misalnya Pak kebakaran di gedung vital milik negara ditengah pengusutan kasus besar inikan bukan pertama kali terjadi, kita tau misalnya tahun 97 di gedung BI, kemudian juga di gedung BPKP juga pernah, kemudian di gedung kementerian ESDM tiba-tiba terbakar ketika sedang menyelidiki kasus yang melibatkan menteri ESDM Ketika itu jadi ada presedenya terbakar atau dokumen yang dalam tanda kutip RAIP atau di raipkan terjadi di tengah-tengah pengusutan kasus yang besar, Pak kemonpulhukam” MM : “Iya iya makanya tadi saya terlintas gitu hehehe... kan sudah saya bilang keterlintasan keingat ke yang lain-lain juga, saya dulukan di luar. Jadi juga saya ingat ke yang lain-lain. tapi sesudah berkomunikasi, saya kemudian mengatakan ya sudah jangan berspekulasi kita serahkan ke polisi kan gitu, ha polisinya juga langsung saya telepon Pak apa Pak IPDA Hamasid, Pak ini dibuka Pak siap, kami lurus tegak, tegak lurus melaksanakan konstitusi dan hukum gitu, kami pasti profesional. Saya ingatkan lagi jangan main-main dengan masyarakat sekarang, kita akan ketahuan kalau bohong sedikit sekarang, orang ndak bohong aja dibilang bohong saya bilang begitu heheheh” (10)				✓
11	NS : “Bara di markas Jaksa, saya akan kembali menghubungi menkopulhukam bapak Muhammad Mahfud MD, Pak Mahfud anda berkali-kali menyebutkan tidak mungkin pemerintah menyembunyikan sesuatu dalam situasi seperti ini, pertanyaannya Pak, pemerintah itu maksudnya presiden Jokowi, atau menkopulhukamnya Pak Mahfud MD atau aparat-aparat dibawahnya Pak?” MM : “Semua menurut saya kalau pemerintah main-main, kalau pemerintah berani berarti dia melanggar sebuah ketidak mungkinan dia lakukan, karena tidak ada yang disembunyikan sekarang ini, oleh sebab itu jangan berspekulasi karena kalau anda berbohong hari ini menyembunyikan sesuatu anda tidak akan bisa tidur mencari alasan baru untuk besok, oleh sebab itu kalau saya katakan saja bahwa tidak mungkin dan yang saya katakan yang saya yakini hari ini, karena seumpama saya apa, misalnya besok harus ketemu orang lagi ya saya tidak mencari kebohongan baru, jadi sekarang siapapun pejabat jangan coba berbohonglah,			✓	

NO	Pasangan Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama			
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan
	nanti akan ketahuan” (11)				
12	<p>NS : “Ketika disebut pemerintah tidak mungkin menyembunyikan sesuatu atau aparat-aparat dalam hal ini aparat kepolisian atau aparat penegak hukum tidak mungkin menyembunyikan sesuatu, tapi tidak usah jauh-jauh pak, kasus Novel Baswedan, jelas-jelas ada kejanggalan disitu, puplik berteriak, puplik membongkar tapi tidak ditelusuri dan dalihnya sudah sesuai proses hukum jadi agak sulit untuk meminta puplik percaya ketika yang di depan mata seperti Novel Baswedan saja tidak”</p> <p>MM : “Ya itulah, itulah kalau orang berbohong orang akan tidak percaya silahkan, tetapi kalau saya ndak akan berbohong, saya katakan tidak mungkin bisa maksudnya, tidak mungkin sekarang ini orang pemerintah berbohong artinya tidak mungkin bisa, lalu orang bisa begitu percaya aja kepada kebohongan itu, tetap itu akan menjadi perdebatan puplik kalau mau berbohong, gitu kan” (12)</p>				✓
13	<p>MM : “Ya itulah, itulah kalau orang berbohong orang akan tidak percaya silahkan, tetapi kalau saya ndak akan berbohong, saya katakan tidak mungkin bisa maksudnya, tidak mungkin sekarang ini orang pemerintah berbohong artinya tidak mungkin bisa, lalu orang bisa begitu percaya aja kepada kebohongan itu, tetap itu akan menjadi perdebatan puplik kalau mau berbohong, gitu kan”</p> <p>NS : “Pak Mahfud tapi lagi-lagi walaupun misalnya tidak mungkin bisa berbohong dalam beberapa kasus kita lihat mungkin saja bukan berbohong tetapi menutup mata atas kejanggalan yang jelas-jelas nyata terlihat Pak, sekali lagi saya mengambil contoh kasus Novel Baswedan, tidak berbohong mungkin tetapi yang ada di depan mata tidak diakui” (13)</p>		✓		
14	<p>NS : “Akhirnya selesai habis di spekulasi puplik Pak dan peran negara yang seharusnya bisa lebih jauh dari situ kita tidak lihat apakah ini akan berulang lagi dikasus ini Pak Mahfud?”</p> <p>MM : “Kalau saya tidak akan berakhir di kasus ini saya kan sakarang koordinator, ini menteri koordinator saya akan mengkoordinir kemana arahnya perkara ini saya akan pertanggungjawabkan ke puplik, sehingga nantik kalau terpaksa loh kok di bawah beda saya akan beda ndak papa, kalau memang ada yang akan berbohong dibawah. (14)</p>			✓	
15	<p>NS : “Pak Mahfud sampai sejauh apakah anda akan mendorong KPK atau institusi di luar kejaksaan agung yang masuk dan memeriksa kasus yang saat ini ditangani kejaksaan agung</p>				✓

NO	Pasangan Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama			
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan
	<p>menyangkut oknum jaksanya Pak?</p> <p>MM : “Itu tidak perlu dorongan seorang minfo itu adalah haknya KPK kalau KPK mau ambil ndak boleh jaksa agung menolak, ndak boleh menkopulhukam menolak itu berdasar pasal 8 dan pasal 9 UU KPK bagaimana anda minta dorongan ke saya, saya tidak akan mendorong dan tidak akan menghalangi itu haknya KPK sepenuhnya, KPKnya mau gak, kalau KPK mau silahkan aja itu UU yang mengatakan begitu, bukan saya bukan anda.” (15)</p>				
16	<p>NS : “Apakah perlu atau apakah menurut anda puplik harus percaya begitu saja kejaksan berani memeriksa keluarganya sendiri?</p> <p>MM : “Terserah puplik dan terserah juga kejaksaannya mau transparan apa ndak dan terserah KPK mau ambil apa tidak. KPK punya hak kan” (16)</p>				✓
17	<p>NS : “Kalau Pak Mahfud sendiri bagaimana saya bertanya pendapat anda sebagai kemenkopulhukam Pak, apakah anda memang merasa kejaksan tidak bisa memeriksa keluarganya sendiri apalagi kalau mungkin memeriksa jaksa agungnya langsung?</p> <p>MM : “Ndak itu tidak fer, kalau saya sebagai atasan saya harus bicara atas nama kesatuan pemerintah tapi saya orang di luar KPK kalau KPK mau ambil, ambil” (17)</p>			✓	
18	<p>NS : “Saya ingin ke Pak Mahfud ada Kurnia dari ICW saya ingin tau karena ICW yang sejak awal bilang KPK harus masuk karena melihat rasanya sulit untuk, untuk kejaksan memeriksa kasus ini”</p> <p>KR : “Iya.. saya tadi mau bahas soal bohong atau tidak bohong ya Mbak Nana, kita masih mengingat masih ditahun ini sebenarnya dua kali pemerintah diduga memberikan kabar yang tidak benar bukan hanya novel Baswedan bulan januari ada kasus Harun Masiku apa kata bawahan Pak Mahfud saat itu, Harun Masiku tidak berada di Indonesia, padahal beberapa waktu kemudian pernyataan itu diralat. Yang kedua kasus Djoko Tjandra bawahan Pak Mahfud juga mengatakan tidak ada data perlintasan atas nama Djoko Tjandra faktanya orangnya ada mendapatkan berbagai prefilip sampai pada mendaftarkan upaya hukum luar biasa. Yang kedua soal tadi apakah persoalan hukum terbatas pada dokumen perkara kalau kita melihat kasus yang ada di kejaksan agung yang melibatkan jaksa Pinangki Sirna Malasari oke klim kejaksan dokumennya berbeda gedung akan tetapi ada bukti petunjuk berupa CCTV yang ada diruangan jaksa Pinangki kemana sekarang, pastikan hangus, jadi</p>				✓

NO	Pasangan Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama			
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan
	jangan terlalu cepat menyimpulkan apalagi kalau kasus hukum hanya melandaskan pada dokumen ada banyak alat bukti lain yang juga masih kita pertanyakan hari ini kepada kejaksaan agung dan ICW sejak awal mendorong agar KPK terlibat dalam penyelidikan terbakarnya gedung kejaksaan agung kenapa Mbak Nana? karena kita khawatir inikan apakah ini tidak disengaja atau ini disengajakan dua itu saja opsionnya. Kami ingin KPK masuk kalau memang nanti terbukti ada pihak-pihak entah itu oknum internal kejaksaan agung atau di luar Kejaksaan Agung yang berupaya untuk menghentikan perkara-perkara besar maka dapat di sangka dengan pasal 21 oprasaljastis. Karena tadi Mbak Nana sampaikan kita agak sulit percaya kalau penegak hukum A menangani perkara yang melibatkan oknum penegak hukum A juga lebih bagus ambil tarik netral biar KPK yang masuk. Itu pointnya Mba Nana. (18)				
19	NS : “Tadi Pak Mahfud mengatakan kewenangan itu ada pada KPK, apakah anda berharap menkopulhukam bisa, karena tadi katanya tidak boleh ni” KR : “Saya akan masuk disini sekaligus mengkritisi kejaksaan agung, Mbak Nana pekan lalu bareskrim secara terbuka mengundang KPK untuk mengadakan gelar perkara tapi Kejaksaan Agung saya tidak tau, saya belum pernah melihat ada pemberitaan kejaksaan agung mengundang KPK untuk gelar perkara, dan sampai hari ini pun kejaksaan agung” (19)			✓	
20	NS : “Ini spesifik gelar perkara terhadap?” KR : “Gelar perkara kasus suap surat jalan dan reknotis, itu kabarnya sih mengundang KPK tapi sampai hari ini kok terlihat seperti kejaksaan agung menutup diri, itu yang ada” (20)	✓			
21	KR : “Gelar perkara kasus suap surat jalan dan reknotis, itu kabarnya sih mengundang KPK tapi sampai hari ini kok terlihat seperti kejaksaan agung menutup diri, itu yang ada” MM : “Jadi kalau begitu, benar dong saya bahwa sekarang ini pejabat ndak bisa berbohong buktinya tadi disampaikan oleh Mas Kurnia, dulu ada orang yang bilang Masiku ndak ada ternyata bohongkan militas, kemudian katanya Djoko Tjandra bohong ternyata masuk, kan berarti saya sudah benar bilang, jangan berbohong sekarang ini masyarakat akan tau, dimana salahnya” (21)				✓
22	KR : “Dan sanksi orang yang berbohong itu sampai hari ini tidak ada Prof Mahfud itu yang kita sesalkan kalau tidak ada <i>phanismen</i> yang tegas dari presiden maka bukan tidak mungkin orang itu akan berbohong dimasa yang akan datang terlebih terhadap penegakan hukum di				✓

NO	Pasangan Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama			
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan
	<p>bawah kewenangan profesor Mahfud MD. Itu yang kita khawatir Pak Mahfud”</p> <p>MM : “Konteksnya bukan itu, konteksnya yang saya katakan tidak mungkin sekarang orang bisa berbohong buktinya anda sudah tunjukkan buktinya itu bohong ketahuan juga, nah soal itu nanti soal lain ada, ada proses-proses internal kan sudah ada tindakan-tindakan juga tu, cuma tindakan menurut anda beda menurut tindakan pemerintah, misalnya saya contoh begini, di keminkoham dirjennya dicopot, wah anda curiga lagi, namanya sudah curiga oo itu bukan itu gitu terus gimana dong kan begitu, nanti aja yang Djoko Tjandra juga semuanya ditangani siapa yang melayani dia pergi sudah ditangani semua terus apalagi yang mau dilakukan, apakah mau melanggar hukum kita ini, ikut saran anda gitu wah itu yang ditangkap kapolrinya gitu misalnya, kan harus yang, kan sudah ada bukti bahwa yang berbohong ternyata salah ditindak ha gitu, lagi pula kasus Harun Masiku tukan bukan bukan di pemerintah ya itukan di KPK” (22)</p>				
23	<p>NS : “Baik, Pak Mahfud, Pak Bonyamin silahkan anda mau menyampaikan apa?”</p> <p>BS : “Sederhana Pak Mahfud mengajukan permohonan ajalah, Pak Mahfud atas kewenangan yang dimiliki memberikan arahan menghimbau atau tanda kutip lebih tinggi memerintah, jaksa agung untuk dalam ekspose, istilah di kejaksaan itu ekspose bukan gelar perkara, ketika pada posisi nanti di arahkan mengundang KPK, biar menjawab keraguan ini jadi Pak Mahfud saya yakin tidak akan menyalahi kewenangan dan tidak akan intervensi karena Jaksa Agung adalah di bawah pemerintahan, jadi diarahkan ajalah dihimbau saya yakin kalau Pak Mahfud nyentil jaksa agungnya eh tolong itu KPK di undang ajalah dalam ekspose ini hal yang sederhana dan gampang dilakukan Pak Mahfud, demikian terimakasih.” (23)</p>				✓
24	<p>BS : “Persetujuan ini mohon di implementasikan habis ini atau besok mengontak jaksa agung eh tolong dong diajak ajalah KPK begitu”</p> <p>MM : “Itu, tu tinggal cara saya hahahhhahhaa” (24)</p>			✓	
25	<p>MM : “Itu, tu tinggal cara saya hahahhhahhaa”</p> <p>NS : “Yang jelas, ini sudah terbuka dan disaksikan jutaan orang jadi seharusnya ini sudah”. (25)</p>				✓
26	<p>MM : “Itu, tu tinggal cara saya hahahhhahhaa”</p> <p>NS : “Yang jelas, ini sudah terbuka dan disaksikan jutaan orang jadi seharusnya ini sudah” (26)</p>		✓		
27	<p>NS : “Yang jelas, ini sudah terbuka dan disaksikan jutaan orang jadi seharusnya ini sudah”</p> <p>MM : “Iya disaksikan jutaan orang dan bisa disampaikan juga oleh Pak Hari kan” (27)</p>		✓		

NO	Pasangan Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama			
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan
28	MM : “Iya disaksikan jutaan orang dan bisa disampaikan juga oleh Pak Hari kan” NS : “Jaksa Agung yang menyaksikan Mata Najwa saya tau sedang nonton jadi Pak Jaksa Agung tolong di dengar itu Pak Mahfud MD. (28)		✓		
29	NS : “Jaksa agung yang menyaksikan Mata Najwa saya tau sedang nonton jadi Pak jaksa agung tolong di dengar itu Pak Mahfud MD. Pak Mahfud” BS : “Jadi ini model orang solo ujung ujungnya nuntutnya juga, ujungnya ya nusuk juga Pak Mahfud jadi tolong dipahami.” (29)			✓	
30	NS : “Baik, Pak Mahfud pertanyaan penutup Pak Mahfud yang jelas puplik sempat dikagetkan oleh beberapa temuan yang dilakukan investigasi yang dilakukan media maupun investigasi yang dilakukan oleh sebutlah maki begitu ya, salah satunya adalah dugaan bahwa jaksa Pinangki itu melapor kepada jaksa agung pertemuannya dengan Djoko Tjandra di luar negeri, Jaksa Pinangki bahkan sempat video <i>call</i> dengan jaksa agung melapor sudah dil begitu, itu dugaan-dugaan yang muncul, apakah anda melihat kejaksaan akan berani memeriksa Jaksa Agung atas kasus ini Pak Mahfud?” MM : “Itu sudah substansi perkara saya ndak boleh masuk tanyakan ke Pak Hari Setiyono aja ada di situ, saya ndak boleh masuk ke situ, karena Nana kan tau sendiri” (30)				✓
31	MM : “Itu sudah substansi perkara saya ndak boleh masuk tanyakan ke Pak Hari Setiyono aja ada di situ, saya ndak boleh masuk ke situ, karena Nana kan tau sendiri” NS : “Tapi seharusnya apakah bisa jeruk makan jeruk pak?” (31)			✓	
32	NS : “Tapi seharusnya apakah bisa jeruk makan jeruk pak?” MM : “Ndak papa jeruk makan jeruk (hahaha)” (32)		✓		
33	MM : “Ndak papa jeruk makan jeruk (hahahaha)” NS : “Yakin ya Pak bisa, jadi kita” (33)				✓
34	NS : “Yakin ya Pak bisa, jadi...jadi kita” MM : “Pertanyaannya terlalu main-main sih”(34)			✓	
35	NS : “Kita masih bisa percaya bahwa tidak akan sungkan-sungkan anak buah jaksa agung memeriksa bos besarnya untuk perkara yang dikaitkan dengan Djoko Tjandra Pak?” MM : “Seluruh rakyat indonesia mulai dari presiden sama rakyat kecil sampai rakyat kecil sama pikirannya semua harus terbuka saya tadi baru bertemu presiden” (35)			✓	
36	NS : “Presiden bilang apa Pak?”				✓

NO	Pasangan Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama			
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan
	MM : “Saya bilang Pak ini yang ribut-ribut sabtu kemarin orang mempersoalkan orang 546 milyar seakan-akan itu digelapkan, itu ndak benar sesudah itu dijelaskan bahwa itu ndak benar sudah ada bukti otentiknya orang mempertanyakan lagi, la dulu kan 900 laputusan mahkamah agungnya 546 gitu, yang 300nya silahkan dipersoalkan lagi tapi yang putusan mahkamah agung 546 yang diributkan sampe sore sampe saya menjelaskan itu ni masih ada di meja saya ni bukti-buktinya ni, bahwa itu sudah selesai, ha kata presiden Pak Mahfud profesional aja, kita jangan takut, buka sejujur-jujurnya begitu kalau presiden selalu. (36)				
37	NS : “Baik, baik Pak Mahfud terimakasih waktu anda untuk Mata Najwa malam ini Pak, MM : “Makasih Najwa, jumpa lagi di lain waktu” (37)	✓			
38	NS : “Sehat-sehat terus ya Pak” MM : “Alhamdulillah sehat, terimakasih Najwa dan semuanya juga sehat-sehat” (38)	✓			
39	MM : “Alhamdulillah sehat, terimakasih Najwa dan semuanya juga sehat-sehat” NS : “Kita tunggu bagaimana jeruk makan jeruknya ya Pak ya” (39)			✓	
40	NS : “Kita tunggu bagaimana jeruk makan jeruknya ya Pak ya” MM : “Salam Abi Quraish Shibab ya” (40)			✓	
41	NS : “Yak membutuhkan waktu kurang lebih 11 jam untuk bisa menaklukkan api di gedung kejaksaan agung yang terbakar 65 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan bagaimana api bisa menghanguskan seluruh gedung utama kejaksaan, sudah hadir di mata najwa kepala dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan gulkarmat provinsi DKI Jakarta hadir Bapak, saya mengundang Pak Satria Diginawan yang akrab disapa Pak Bili, selamat malam Pak Bili” SG : “Selamat malam Mba Nana, salam sejahtera untuk kita semua” (41)	✓			
42	NS : “Terima kasih sudah hadir di mata najwa Pak” SG : “Sama-sama Mba Nana, terimakasih juga telah mengundang saya” (42)	✓			
43	NS : “Saya juga terhubung dari luar dengan Ibu Fatma Lestari pakar fairsevti dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, selamat malam Bu Fatma” FL : “Selamat malam Mba Nana, selamat malam juga semuanya” (43)	✓			
44	NS : “Yak terimakasih atas video itu Pak Bili jadi persisnya anda dan teman-teman mendapatkan info dari orang yang datang justru kemarkas?” SG : “Betul, jadi pertama kita dapat berita terjadinya kebakaran yaitu dari warga yang datang ke				✓



NO	Pasangan Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama			
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan
	pos terdekat, yaitu pos Kebayoran baru tepatnya sekitar jam 7 lewat 10 menit, kemudian langsung kita luncurkan 4 unit dan pada saat di TKP sudah ada 3 selasar dari gedung utama kejaksaan agung sisi sebelah utara sudah terbakar nah itu langsung kita tambahkan lagi unit terakhir sampai dengan 65 unit dengan jumlah personil sekitar 325 orang.” (44)				
45	NS : “Apakah di dalam ada alat-alat pemadam yang sempat berfungsi atau sama sekali tidak ada? SG : “Pada saat itu sudah terbakar jadi mungkin kita akan liat nanti hasil porenfis dari kepolisian seperti apa gitu.(45)			✓	
46	NS : “Jadi, tapi ketika kemudian masuk kedalam itu titik api dimula memang dari lantai 6 dan cepat sekali menjalar ke titik-titik yang lain itu karena kondisi gedungnya yang tadi anda katakan? SG : “Betul, jadi pada saat jam tepatnya sekitar jam 7.10 menit itu sampai dengan jam 12 kita bisa mengantisipasi melokalisir satu setengah gedung utama kejaksaan agung itu, hanya pas jam 1 tepatnya itu <i>flash over</i> terjadi di lantai 6 kemudian merambat sampai ke sisi selatan gedung kejaksaan agung. (46)	✓			
47	NS : “Apa istilahnya Pak <i>flash over</i> itu? SG : “ <i>Flahs over</i> itu ada pengaruh dari asap, pengaruh asap yang bisa mangakibatkan panas nah itu juga merambat sampai ke sebelah sisi selatan gedung kejaksaan agung. (47)	✓			
48	NS : “Dari pengalaman anda memadamkan kebakaran ini termasuk yang besar Pak? SG : “Besar, termasuk besar ini karena satu gedung ada 6 lantai memanjang areanya cukup luas dan cukup besar, dan api juga dengan cepat merambat ke bagian yang lainnya” (48)	✓			
49	NS : “Oke, tapi yang gedung utamanya yang di depan yang kita lihat itu yang terbakar, nah pertanyaannya tadi Pak, apakah memang tidak ada sistem proteksi kebakaran atau yang bisa mendeteksi? HS : “Yak, sepengetahuan saya karena gedung ini kemarin saya katakan bahwa masuk dikawasan pemukiman kemarin memang dikatakan ini belum sebagai gedung cakar budaya tetapi sudah masuk kawasan pemukiman, kenapa? Karena ketika kami pengen mempercantik gedung itu di tahun 2018 itu ditegur oleh dinas pariwisata tidak boleh begini tidak boleh begitu sehingga ketika dilakukan itu ada berita acara yang ditandatangani oleh pengawas cagar budaya” (49)			✓	
50	NS : “Oke, pertanyaannya Pak itu belum menjawab pertanyaan saya Pak Hari, apakah ada sistem proteksi itu Pak?				✓

NO	Pasangan Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama			
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan
	HS : “Iya saya mau masuk ke sana” (50)				
51	NS : “Oke, pertanyaannya Pak itu belum menjawab pertanyaan saya Pak Hari, apakah ada sistem proteksi itu Pak? HS : “Ya tentu di dalam pemeliharaan gedung itu ada proteksi terhadap keamanan gedung itu sepanjang yang saya ketahui ada istilahnya apar park ya, apar di tiap-tiap jarak sekian meter kemudian juga yang saya ketahui peringatan dini katakanlah sedangkan spengler karena tinggi gedung juga ruangan itu saya ketahui cukup tinggi hanya di beberapa bagian saja yang saya tau ini ya, tetapi secara umum saya tidak tau, tetapi ada seperti itu, nah nanti mungkin dari bapak damkar yang sudah melakukan itu bisa lebih lengkap lagi” (51)				✓
52	NS : “Yaaak dalam kasus seperti ini Pak Bili investigasi itu biasanya meliputi apa-apa saja? SG : “Yaak, jadi kalau investigasi itu kewenangan dari puslapolri ya, kalau pemadam kebakaran memang posisinya pada saat itu hanya operasi bagaimana segera tuntas kebakaran yang terjadi di TKP itu.” (52)				✓
53	NS : “Hmm jadi anda tidak dilibatkan ni oleh, oleh puslapor tidak dimintai nasehat juga tidak dimintai masukan sebagai orang yang sehari-hari urusan dengan api? SG : “Tidak Mba Nana, saya hanya melakukan tugas saya dengan mengerahkan semua anggota saya untuk turun ke TKP (53)	✓			
54	NS : “Kenapa ya pak? SG : “Memang aturannya seperti itu mungkin” (54)				✓
55	NS : “Ada rasa gemas mungkin, ingiin” SG : “Ya, pasti ada rasa, tapi ya manakala dibutuhkan kami siap” (55)	✓			
56	NS : “Oke, saya membutuhkan anda malam ini untuk menjawab Pak, jadi kalau bapak beri tugas wewenang investigasi biasanya apa sih yang diperiksa untuk tau ini tu sebetulnya tidak wajar kebakarannya? SG : “Yaa kita pasti nyari titik utama titik pertama dari api tu dari mana di lantai berapa dan itu kita akan telusuri, kita akan telusuri biasanya ada berkas-berkas yang memang pasti ada titik utama itu di lantai berapa, nah itu perambatannya kemana arahnya nah itu nanti kita” (56)				✓
57	NS : “Oke saya ingin ke Bu Fatma, Buk Fatma jadi dugaan sabotase kalau memang ada itu sesungguhnya bisa ditemukan dalam penyelidikan kasus-kasus seperti ini Buk? FL : “Betul sekali Mba Nana, jadi kita menggunakan sains dengan mengambil sampel dari tempat	✓			

NO	Pasangan Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama			
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan
	lokasi kejadian kebakaran kemudian dibawa ke laboratorium untuk membutuhkan apakah disitu ada jejak-jejak apabila terjadi sabotase misalnya jejak-jejak adakah hidrokarbon karena di sebuah perkantoran tentunya jejak hidrokarbon ini tidak ada sebagai sumber bahan bakar, kalau disitu ditemukan ada jejak-jejak hidrokarbon maka ada kemungkinan di bakar, tetapi kalau itu tidak ada maka murni karena terbakar begitu. Kemudian, disamping itu juga bisa terlihat dari material-material yang merupakan sumber dari selain bahan bakar kemudian juga dari sumbernya dari dimana lokasi pertama api itu bisa terjadi dari pola kebakarannya itu semua bisa ditemukan di investigasi dan didalam sebuah investigasi sebetulnya bisa saja melibatkan ahli ataupun melibatkan damkar atau melibatkan ekspert, witnes, atau saksi untuk bisa merangkum hasil investigasi tersebut secara lebih komprehensif” (57)				
58	NS : “Oke. Pak Hari tapi yang jelas gedung kejaksaan yang terbakar belum diasuransikan ya Pak? HS : “Sepengetahuan saya memang demikian” (58)			✓	
59	NS : “Oke. Pak Hari tapi yang jelas gedung kejaksaan yang terbakar belum diasuransikan ya Pak? HS : “Sepengetahuan saya memang demikian” (59)				✓
60	NS : “Itu karena memang sesuatu yang tidak pernah dirasa perlu atau karena lalai saja atau karena tidak sempat atau kenapa Pak? HS : “Ya barang kali lalai saja, mungkin sudah beranggapan oo ini masuk cagar budaya maka pengelolaannya sesuai dengan standar yang ada di dalam pengelolaan cagar budaya, nah tadi saya katakan bahwa kenapa kami mengatakan itu cagar budaya di tahun 2018 tadi yang sudah saya sampaikan nah tentunya kalau itu masuk di dalam kawasan cagar budaya saya pikir perlakuannya juga harus memenuhi standar pengamanan untuk cagar budaya dan barang kali kami sebagai yang menempati tentu juga pemerintah provinsi DKI yang seharusnya juga peduli terhadap gedung-gedung yang sudah ditetapkan masuk di dalam kawasan itu. (60)	✓			
61	NS : “Kawasan-kawasan cagar budaya Pak tapi gedungnya bukan, gedungnya tidak Pak” HS : “Dibawahnya lagi perlakuan terhadap kawasan budaya sama dengan cagar budaya makanya bacanya jangan” (61)				✓
62	NS : “Jadi artinya tidak perlu di asuransi” HS : “Nah contohnya tadi saya katakan di 2018 tadi kita katakan mau direnovasi di tegur itu				✓

NO	Pasangan Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama			
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan
	ditandatangani oleh pengawas cagar budaya nah siapa yang seharusnya mengansuransikan, ha itu kira-kira” (62)				
63	NS : “Hmm oke tapi yang jelas sekarang karena tidak di asuransi maka kerugiannya ini kalau dari direktur jendral kekayaan negara itu nilai gedungnya 161 milyar Pak dan itu akan masuk ke APBN di 2021 kalau sekarang katanya belum di anggarkan jadi memang ini kerugian yang kerugian yang besar, kerugian yang besar” BS : “Ya tapi bagaimana mungkin meminta orang lain peduli anda sendiri tidak peduli Pak Hari? (63)			✓	
64	BS : “Bukan, infeksi keselamatan itu lo, saya hanya kapan terakhir dilakukan? Itu aja” HS : “Ya, oleh karena itu kami akan lakukan cek itu” (64)			✓	
65	NS : “Yak kebakaran gedung kejaksaan memicu spekulasi terkait penanganan kasus Djoko Tjandra yang melibatkan jaksa Pinangki, selain nara sumber di studio kita sudah terhubung dengan ketua komisi kejaksaan Barita Simanjuntak, selamat malam Pak Barita. PB : “Selamat malam Mba Nana, selamat malam Pak Arsep, Pak Mas Boyamin, Mas kurnia. (65)	✓			
66	NS : “Baik sebelum ke anda saya mau ke maki dulu Bonyamin yang sejak awal mengawal kasus ini, apa <i>to the point</i> . Jadi anda tidak percaya jaksa Pinangki bekerja sendirian pasti ada orang lain yang terlibat. BS : “Iyalah, masak dalam konteks itu menerima suap pemberi gak ada, ini ngarangnya bukan main ini kejaksaan agung ini. (66)	✓			
67	NS : “Bukan yang memberi, maksud saya apakah mungkin jaksa eslon empat bisa bertemu dengan buron kakap dan menjanjikan macam-macam sampai menjanjikan fatwa. BS : “Ya sementara ini masih apa, istilah saya kepandaian Pinangki itu aja mancatut banyak orang (67)			✓	
68	BS : “Ya sementara ini masih apa, istilah saya kepandaian Pinangki itu aja mancatut banyak orang” NS : “Mencatut atau, atau” (68)				✓
69	NS : “Mencatut atau, atau” BS : “Ya itu nanti bisa anu dimaknai ke kanan dan ke kiri gitu” (69)		✓		
70	NS : “Anda jadi hati-hati ni Pak Bonyamin” BS : “Ya kan nanti kan bisa menjadi bersedia dicabut kan ada, kan gitu kan malah udah cabut aja				✓

NO	Pasangan Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama			
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan
	nama ku juga ada nanti, itu lo jadi artinya bukan hati-hati kan saya harus koridor hukum karena sebagai detektek patikelir begitu jadi ya harus pada posisi meskipun saya sejak awal kalimat dugaan tapi lebih banyak terbukti gitu lo.(70)				
71	<p>NS : “Oke karena kan kemudian ada dokumen yang menyebut bahwa melapor ke jaksa agung dua kali soal pertemuannya menggelar video <i>call</i> dan sebagainya, ee itu, itu sesuatu yang memang hasil temuan anda juga ya terjadi atau bagaimana?”</p> <p>BS : “Gak itu temuan tempo kalau itu saya mengakui karena, saya posisi bahwa Pinangki itu memang pergi keluar negeri terus kemudian Djoko Tjandra itu pasti tidak mudah percaya seorang jaksa yang bukan bidangnya eslonnya bawah terus kemudian bisa dipercaya oleh Djoko Tjandra tanpa sesuatu yang akan diberitahukan dia, baik secara rahasia maupun secara terbuka kepada Djoko Tjandra bahwa saya itu begini lo dekat dengan A dekat dengan B itu, sehingga saya akan bisa memberikan bantuan kepada anda bebas dari hukum untuk mengajukan permohonan fatwa, permohonan fatwa ini akan didukung dari sisi yang kemudian bisa jadi akan didukung oleh instansinya dia, dan dia bisa mencatat level tertinggi, nah tapi mencatat itu bisa juga memang, bersedia dicatat atau malah menyuruh dicatat kan begitukan. (71)</p>				✓
72	<p>BS : “Penanganan perkara korupsikan cepat utamakan dari yang lain”</p> <p>HS : “Kan tidak boleh omongan di warung kopi kemudian jadi berkas kemudian dipaksakan untuk menjadi berkas kan alat bukti Pak” (72)</p>			✓	
73	<p>HS : “Nana boleh saya jawab ya, saya belum selesai dalam penanganan perkara itukan bai proses tgl 4 diserahkan bidang pengawasan tgl 7 kalau tidak salah penyidikan tgl 11 ditangkap 12 ditahan. Kemudian untuk memanggil memeriksa seseorang siapa kawan berbuat kemudian pemberinya siapa inikan bai proses artinya apa ketika seseorang di panggil menggunakan haknya tidak adil tentukan bai proses dan hari ini kita periksa 3 orang termasuk Djoko Tjandra kemudian juga dari garuda juga dari salah satu diluar mobil BMW oleh karena itu tolong dukung kami berikan masukan kami dan kami akan buktikan itu.</p> <p>BS : “Misalnya berandai-andai Pak, berandai inikan sebenarnya bisa jadi penyidiknya pengen cepat terus kemudian ada tangan-tangan tidak terlihat atau tangan-tangan yang lebih kuat meminta untuk tidak cepat-cepat ada gak Pak? Ini” (73)</p>		✓		
74	NS : “Iyaaak saya ingin ke Pak Barita komisi kejaksanaan, perlu ditekankan jadi ini komisi kejaksanaan	✓			

NO	Pasangan Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama			
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan
	<p>komisi independen yang memang sejak awal menerima laporan masyarakat dan berniat memeriksa jaksa Pinangki tetapi kemudian dikatakan tidak perlu diperiksa karena sudah diperiksa internal dan sampai sekarang juga masih belum dapat akses untuk memeriksa langsung jaksa Pinangki, begitu Pak Barita?</p> <p>PB : “Yak betul, tapi saya perlu sampaikan bahwa kami melaksanakan pasal 4 A peraturan presiden NO 18 tahun 2011 yang mengatakan wewenang komisi kejaksaan adalah menerima dan menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat tentang kinerja dan perilaku jaksa dalam melakukan tugas dan wewenangnya. Itu makanya kami mengundang untuk didengarkan penjelasan dan keterangannya kami belum masuk tahapan pemeriksaan masih meminta penjelasan dan keterangan, itu perlu di sampaikan sehingga klir buat kita bahwa komisi kejaksaan melakukan tugasnya berdasarkan peraturan presiden Mbak Nana. (74)</p>				
75	<p>NS : “Pak Barita, apakah mendapatkan akses itu, karena tadi di awal pak Mahfud MD mengatakan bahwa seharusnya komisi kejaksaan bisa juga mendapatkan akses tidak perlu menunggu 2 minggu untuk mendapatkan laporan, apakah memang merasa ada ketidak ada tertubi kejaksaan agung tidak membuka ke komisi kejaksaan, betulkah kesan itu?</p> <p>PB : “Iya, karena pertama kami mengundang oknum jaksa P itu tanggal 27 juli tidak datang tanpa alasan tanggal 30 juli kami undang kedua juga tidak datang. Namun kami mendapatkan surat dari atasannya bahwa karena pemeriksaan pengawasan sudah berjalan sehingga artinya komisi kejaksaan tidak perlu memeriksa lagi. Itu sebabnya sesuai dengan pasal 4 C peraturan presiden kami meminta laporan hasil pemeriksaannya sebab itu wewenang komisi kalau kami tidak bisa periksa. Kasih dong mana LHP nya karena LHP ini diperlukan supaya kami bisa menjawab ini maki, Mas Bonyamin inikan kejar terus ni, mana hak dia itu sebagai pelapor harus kita sampaikan untuk memberi jawaban itu kami harus membutuhkan dokumen itu. (75)</p>	✓			
76	<p>NS : “Baik, Pak Barita silahkan, karena kemudian ini juga bisa menjadi preseden menunjukkan bahwa memang ada keengganan dari kejaksaan agung untuk diperiksa atau diawasi oleh pihak independen.”</p> <p>BS : “Buka aja Pak Barita” (76)</p>			✓	
77	<p>NS : “Pak Barita waktu saya mepet sekali, boleh langsung jawab <i>to the point</i> saja Pak, karena saya mau membahas yang lain, betul atau tidak itu tidak bisa memanggil jampidung?</p>			✓	

NO	Pasangan Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama			
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan
	PB : “Nah selanjutnya kamikan menindak lanjuti supaya kami mengundang meminta keterangan kepada kejaksaan tinggi direktur DPWEL dan aspidung DKI itu yang kami tidak lagi di ijinakan untuk kami mintai keterangan” (77)				
78	NS : “Oke, berarti betul ya, berarti betul kalau begitu sekarang Pak Hari tolong dijawab karena ini tanda-tanda dulu tidak mau sekarang tidak mau dibuka anda tadi bilang percayakanlah kepada kejaksaan, bagaimana mau percaya kalau ada keengganan seperti ini Pak Hari? HS : “Yak baik, memang betul ada perpres 18 tahun 2011 tentang komisi kejaksaan di pasal 4 tadi juga disampaikan komisi kejaksaan berwenang menerima laporan dan menindaklanjuti tetapi perpres tersebut ada tambahannya mungkin Pak Ketua komisi kejaksaan belum menyampaikan tadi saya sampaikan ada MOYU antara komisi kejaksaan dengan bidang pengawasan kalau tidak atau dengan kejaksaan jadi apabila ada laporan pengaduan yang ditujukan ke komisi kejaksaan itu komisi kejaksaan melakukan rapat kalau tidak salah yang saya baca untuk menyerahkan kepada bidang pengawasan atau jaksa agung untuk dilakukan pemeriksaan oleh bidang pengawasan. Apabila dalam pemeriksaan itu tidak sempurna dan sebagainya maka komisi kejaksaan bisa mengambil alih atau menambahi seperti yang disampaikan oleh Pak Bonyamin tadi dan seterusnya, itu kira-kira.” (78)				✓
79	HS : “Mudah-mudahan ndak lah, mudah-mudahan ndak” BS : “Berarti boleh masuk? (79)				✓
80	HS : “Nah itu tadi tergantung pimpinan dalam arti Pak Barita Simanjuntak untuk berkomunikasi” KR : “Jadi semua menutup diri Mbak nana, ada menutup diri tentang komisi kejaksaan, tidak pernah mengundang KPK untuk melakukan gelar perkara jadi klir sekali kejaksaan agung ingin melokalisir kasus jaksa Piangki Sirna Malasari” (80)		✓		
81	NS : “Oke, apakah akan ada rencana memeriksa internal kejaksaan sendiri, apakah misalnya akan memeriksa jaksa agungnya sendiri karena namanya disebut-sebut akan memeriksa mantan jam intel Janmarinka karena namanya disebut-sebut? HS : “Yak, sebagaimana kita ketahui bahwa sudah ada penyidikan terhadap jaksa PSM tentu penyidikan akan lebih kuat apakah diperoleh dari keterangan para saksi ataupun tersangka untuk mengait ke masalah itu oleh karena itu ini sudah cukup kuat sudah dilakukan penyidikan saya kira itu lebih dipertekankan. (81)	✓			
82	HS : “Yak, yaak menurut kami itu ada namanya korsup, saya pikir semua terbuka, semua terbuka			✓	

NO	Pasangan Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama			
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan
	<p>dan mudah-mudahan kedepan juga seperti itu harapan kita”.</p> <p>BS : “Nana sebagai sama-sama barangkali santrinya Gusbahaudin Nursalim rembang ini saya kembalikan ke spiritual jadi kebakaran itu bisa jadi tanda kutip karena doa kita ini hanya berdoa memohon keselamatan tapi tindakan-tindakan kita bukan bagian dari doa, bukan bagian dari menjalankan tugas ini bukan bagian dari doa artinya apa kalau doa, berarti tulus melakukan tugasnya tulus keterbukaan, tulus untuk kebaikan dan kebaikan negeri ini juga sebagai bendera saya yang merah putih saya melakukan ini sebagai sumbangsih saya kepada negara ini untuk tidak runtuh Pak. Jadi, inilah kejaksan agung nampaknya doanya itu hanya doa memohon keselamatan tapi tidak disertai dengan doa-doa yang melakukan tugas dengan tulus dengan kebaikan tidak ada selingkuh, selingkuh arti luas arti sempit itu, sehingga cctv itu khawatir saya dibakar atau terbakar karena ada selingkuh baik arti luas maupun arti sempit, demikian” (82)</p>				
83	<p>NS : Mohon maaf Pak Barita waktunya sudah habis kita juga akan mendorong supaya komisi kejaksan bisa dapat akses untuk memeriksa karena sekali lagi ini komisi independen yang perlu untuk mewakili publik menjawab berbagai spekulasi yang ada. Selamat bekerja Pak Barita kita akan dorong terus supaya komisi kejaksan terus”</p> <p>PB : “Terimakasih, sip selamat kerja kembali Nana dan semuanya” (83)</p>	✓			



#### 4.2 Tabel Deskripsi Data Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice

NO	Pasangan Data	Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice								
		BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL
1	NS: “Empat hari setelah kebakaran melanda markas jaksa, spekulasi masih terus bermunculan penyebab kebakaranpun masih jadi tanda tanya, bagaimana perkembangan terkini terkait pengusutan kasus kebakaran ini, hadir di studio Mata Najwa kepala pusat penerangan dan hukum kejaksaan agung Hary Setyono. Selamat malam Pak Hary”. HS: ”Selamat malam, salam sehat untuk semuanya” (1)			✓						
2	NS: “Hadir teman saya peneliti Indonesian korupsi was atau ICW Kurnia Ramadana. Selamat malam Kurnia” KR: “Selamat malam Mba Nana, selamat malam semuanya” (2)			✓						
3	NS: “Saya juga sudah terhubung lewat video <i>call</i> dengan menteri koordinator politik hukum dan HAM Muhammad Mahfud Md. “Selamat malam, assalamualaikum Pak Mahfud” MM:“Walaikumsalam, Najwa dan semuanya, Hari, Mas Bonyamin, Mas Ramadani.” (3)				✓					
4	NS: “Terima kasih sudah bergabung Pak Mahfud. Pak saya mau langsung <i>to the point</i> ya Pak Mahfud karnakan anda bahkan pada malam saat terjadi kebakaran langsung berani menyebut dan menjamin berkas-berkas perkara aman 100% tidak akan mengganggu proses penanganan perkara, keyakinan Pak Mahfud dari mana Pak? bahkan sudah disebutkan pada saat kebakarannya masih terjadi”. MM:“Karena saya langsung berhubungan dengan Jaksa Agung dan jampidum, itu gimana perkara-perkara yang sedang ditangguh. Oo jauh Pak, bukan disitu kalau berkas perkara, gitu. Jadi yang saya jamin aman tu jamak perkara yang sedang ditangani yang pada saat itu sering disebut ada dua. Satu, soal Djoko Chandra dan Pinangki, yang kedua soal Jiwasraya.(4)	✓								
5	NS:“Jadi, Pak Mafud karena kemudiankan bisa saja, kemudian argumennya jadi Pak Mahfud yakin hanya sebatas pernyataan sepihak yang dikeluarkan oleh pihak							✓		

NO	Pasangan Data	Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice								
		BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL
	Kejaksanaan Agung? MM :“Saya sudah katakan Pak gitu, saya katakan Pak kita nda bisa berbohong sekarang, nda mungkin berbohong ke masyarakat kita berbohong sekarang besok lusa akan dibuka oleh Bonyamin itu saya bilang. Oleh sebab itu jangan main-main RSM sekarang tu lebih canggih, Bonyamin tu suka menghubungi istri-istri Jaksa itu minta fotonya hahaha sehingga foto-foto yang rahasia dia punya tu. Saya bilang jangan main-main.” (5)									
6	NS:“Pak...Pak Mahfud, iya. Sebelum masuk ke bohong berbohong karena itu juga menarik, tapi saya ingat Andakan sempat mengatakan terbuka kaget bahwa kebakarannya besar sekali, cepat sekali, jadi jujur Pak Mahfud ke saya malam ini memang adakan di benak Pak Mahfud? mungkin saja ada ketidak wajaran dari bara yang muncul di markas Jaksa ini” MM:“Oo begini, saya katakan masyarakat jangan berspekulasi kan itukan ada di TV ya, spekulasi apa Pak, spekulasi yang saya baca di medsos itu, itu nda masuk akal gitu, lalu media itu banyak yang menulis kata Mahfud MD terbakarnya nda masuk akal, padahal saya mengutip medsos, yang berkembang ketika itu masyarakat mengatakan di medsos itu, ini ndak masuk akal kok dari lantai enam turun ke-empat turun ke-lima, masa kalo listrik separah itu, itu kata masyarakat. Oleh sebab itu saya katakan jangan berspekulasi lah, spekulasi apa, ya itu yang ada di masyarakat bahwa kok turun dari lantai enam ke-empat ke-tiga. (6)	MENEGASKAN								
7	MM : “Oo begini, saya katakan masyarakat jangan berspekulasi, itukan ada di TV ya, spekulasi apa Pak, spekulasi yang saya baca di medsos itu, itu nda masuk akal gitu, lalu media itu banyak yang menulis kata Mahfud MD terbakarnya nda masuk akal, padahal saya mengutip medsos, yang berkembang ketika itu masyarakat mengatakan di medsos itu, ini ndak masuk akal kok dari lantai enam turun ke-empat turun ke-lima, masa kalo listrik separah itu, itu kata masyarakat. Oleh sebab itu saya katakan jangan berspekulasi lah, spekulasi apa, ya itu yang ada di masyarakat bahwa kok turun dari lantai enam ke-empat				✓					

NO	Pasangan Data	Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice								
		BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL
	ke-tiga. NS : “Tapi dari pengamatan Pak maaf” (7)									
8	NS : “Tapi.. Pak Mahfud pertanyaan saya apakah Pak Mahfud sendiri tidak terlintas dibenak Pak Mahfud mungkin saja ada ketidak wajaran, tidak pernah terlintas sama sekali Pak? Melihat besarnya kebakaranran. MM : “Semula terlintas, semula terlintas karena begini saya tidak tau kebakarannya, tiba-tiba itu ada telpon, Kejaksaan Agung kebakaran lalu saya liat televisi sudah parah lalu saya baca di media di medsos macam-macam ada kecurigaan saya juga ikut curiga gitu, terlintas, lalu saya telpon Jaksa Agung gimana Pak. Ooo Pak saya ada di tengah-tengah, gimana tu perkara-perkara itu gitu, aman.. oo aman saya terus telpon Fadil Sumana juga aman, lalu saya katakan saya terlintas ndak mungkin lah tidak telintas, kalo itu bohong kalo (8)								✓	
9	NS : “Apa Pak Mahfud, boleh saya tau Pak lintasan pertama dibenak karena mungkin saja itu yang benar Pak, hans Pak Mahfud apa? waktu terlintasnya ini dibakar. MM : “Ya lintasan pertama karena sedang nangani perkara itu jangan-jangan ini ada yang sengaja orang dalam, kan gitu itu saya kira siapa aja bisa mengira begitu, manusiawi saya juga mengira begitu tetapi sesudah telpon itu, Pak gedungnya jauh yang diseberang sana itu kalo gedung yang nangani perkara itu begitu. (9)	✓								
10	NS : “Karena misalnya Pak kebakaran di gedung vital milik negara ditengah pengusutan kasus besar inikan bukan pertama kali terjadi, kita tau misalnya tahun 97 di gedung BI, kemudian juga di gedung BPKP juga pernah, kemudian di gedung kementerian ESDM tiba-tiba terbakar ketika sedang menyelidiki kasus yang melibatkan menteri ESDM Ketika itu jadi ada presedenya terbakar atau dokumen yang dalam tanda kutip RAIP atau di rapkan terjadi di tengah-tengah pengusutan kasus yang besar, Pak kemonpuluhkam”	MENGELAK/MENCARI ALASAN								

NO	Pasangan Data	Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice								
		BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL
	MM : “Iya iya makanya tadi saya terlintas gitu hehehe... kan sudah saya bilang keterlintasan keingat ke yang lain-lain juga, saya dulukan di luar. Jadi juga saya ingat ke yang lain-lain. tapi sesudah berkomunikasi, saya kemudian mengatakan ya sudah jangan berspekulasi kita serahkan ke polisi kan gitu, ha polisinya juga langsung saya telepon Pak apa Pak IPDA Hamasid, Pak ini dibuka Pak siap, kami lurus tegak, tegak lurus melaksanakan konstitusi dan hukum gitu, kami pasti profesional. Saya ingatkan lagi jangan main-main dengan masyarakat sekarang, kita akan ketahuan kalau bohong sedikit sekarang, orang ndak bohong aja dibilang bohong saya bilang begitu hehe” (10)									
11	NS : “Bara di markas Jaksa, saya akan kembali menghubungi menkopulhukam bapak Muhammad Mahfud MD, Pak Mahfud anda berkali-kali menyebutkan tidak mungkin pemerintah menyembunyikan sesuatu dalam situasi seperti ini, pertanyaannya Pak, pemerintah itu maksudnya presiden Jokowi, atau menkopulhukamnya Pak Mahfud MD atau aparat-aparat dibawahnya Pak? MM : “Semua menurut saya kalau pemerintah main-main, kalau pemerintah berani berarti dia melanggar sebuah ketidak mungkinan dia lakukan, karena tidak ada yang disembunyikan sekarang ini, oleh sebab itu jangan berspekulasi karena kalau anda berbohong hari ini menyembunyikan sesuatu anda tidak akan bisa tidur mencari alasan baru untuk besok, oleh sebab itu kalau saya katakan saja bahwa tidak mungkin dan yang saya katakan yang saya yakini hari ini, karena seumpama saya apa, misalnya besok harus ketemu orang lagi ya saya tidak mencari kebohongan baru, jadi sekarang siapapun pejabat jangan coba berbohonglah, nanti akan ketahuan” (11)									TIDAK TAHU JAWABAN PASTI
12	NS : “Ketika disebut pemerintah tidak mungkin menyembunyikan sesuatu atau aparat-aparat dalam hal ini aparat kepolisian atau aparat penegak hukum tidak mungkin menyembunyikan sesuatu, tapi tidak usah jauh-jauh pak, kasus Novel Baswedan, jelas-jelas ada kejanggalan disitu, puplik berteriak, puplik									MENYANGKAL

NO	Pasangan Data	Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice								
		BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL
	<p>membongkar tapi tidak ditelusuri dan dalihnya sudah sesuai proses hukum jadi agak sulit untuk meminta publik percaya ketika yang di depan mata seperti Novel Baswedan saja tidak”</p> <p>MM : “Ya itulah, itulah kalau orang berbohong orang akan tidak percaya silahkan, tetapi kalau saya ndak akan berbohong, saya katakan tidak mungkin bisa maksudnya, tidak mungkin sekarang ini orang pemerintah berbohong artinya tidak mungkin bisa, lalu orang bisa begitu percaya aja kepada kebohongan itu, tetap itu akan menjadi perdebatan publik kalau mau berbohong, gitu kan” (12)</p>									
13	<p>MM : “Ya itulah, itulah kalau orang berbohong orang akan tidak percaya silahkan, tetapi kalau saya ndak akan berbohong, saya katakan tidak mungkin bisa maksudnya, tidak mungkin sekarang ini orang pemerintah berbohong artinya tidak mungkin bisa, lalu orang bisa begitu percaya aja kepada kebohongan itu, tetap itu akan menjadi perdebatan publik kalau mau berbohong, gitu kan”</p> <p>NS : “Pak Mahfud tapi lagi-lagi walaupun misalnya tidak mungkin bisa berbohong dalam beberapa kasus kita lihat mungkin saja bukan berbohong tetapi menutup mata atas kegagalan yang jelas-jelas nyata terlihat Pak, sekali lagi saya mengambil contoh kasus Novel Baswedan, tidak berbohong mungkin tetapi yang ada di depan mata tidak diakui” (13)</p>									PROVOKASI
14	<p>NS : “Akhirnya selesai habis di spekulasi publik Pak dan peran negara yang seharusnya bisa lebih jauh dari situ kita tidak lihat apakah ini akan berulang lagi dikasus ini Pak Mahfud?</p> <p>MM : “Kalau saya tidak akan berakhir di kasus ini saya kan sakarang koordinator, ini menteri koordinator saya akan mengkoordinir kemana arahnya perkara ini saya akan pertanggungjawabkan ke publik, sehingga nantik kalau terpaksa loh kok di bawah beda saya akan beda ndak papa, kalau memang ada yang akan berbohong dibawah. (14)</p>									PEMBELAAN DIRI
15	<p>NS : “Pak Mahfud sampai sejauh apakah anda akan mendorong KPK atau institusi di luar kejaksaan agung yang masuk dan memeriksa kasus yang saat ini</p>									MENYANGKAL

NO	Pasangan Data	Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice								
		BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL
	<p>ditangani kejaksanaan agung menyangkut oknum jaksanya Pak?</p> <p>MM : “Itu tidak perlu dorongan seorang minfo itu adalah haknya KPK kalau KPK mau ambil alih ndak boleh jaksa agung menolak, ndak boleh menkopulhukam menolak itu berdasar pasal 8 dan pasal 9 UU KPK bagaimana anda minta dorongan ke saya, saya tidak akan mendorong dan tidak akan menghalangi itu haknya KPK sepenuhnya, KPKnya mau gak, kalau KPK mau silahkan aja itu UU yang mengatakan begitu, bukan saya bukan anda.” (15)</p>									
16	<p>NS : “Apakah perlu atau apakah menurut anda puplik harus percaya begitu saja kejaksanaan berani memeriksa keluarganya sendiri?</p> <p>MM : “Terserah puplik dan terserah juga kejaksaannya mau transparan apa ndak dan terserah KPK mau ambil apa tidak. KPK punya hak kan” (16)</p>									✓
17	<p>NS : “Kalau Pak Mahfud sendiri bagaimana saya bertanya pendapat anda sebagai kemenkopulhukam Pak, apakah anda memang merasa kejaksanaan tidak bisa memeriksa keluarganya sendiri apalagi kalau mungkin memeriksa jaksa agungnya langsung?</p> <p>MM : “Ndak itu tidak fer, kalau saya sebagai atasan saya harus bicara atas nama kesatuan pemerintah tapi saya orang di luar KPK kalau KPK mau ambil, ambil” (17)</p>					✓				
18	<p>NS : “Saya ingin ke Pak Mahfud ada Kurnia dari ICW saya ingin tau karena ICW yang sejak awal bilang KPK harus masuk karena melihat rasanya sulit untuk, untuk kejaksanaan memeriksa kasus ini”</p> <p>KR : “Iya.. saya tadi mau bahas soal bohong atau tidak bohong ya Mbak Nana, kita masih mengingat masih ditahun ini sebenarnya dua kali pemerintah diduga memberikan kabar yang tidak benar bukan hanya novel Baswedan bulan januari ada kasus Harun Masiku apa kata bawahan Pak Mahfud saat itu, Harun Masiku tidak berada di Indonesia, padahal beberapa waktu kemudian pernyataan itu diralat. Yang kedua kasus Djoko Tjandra bawahan Pak Mahfud</p>	✓								

NO	Pasangan Data	Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice								
		BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL
	<p>juga mengatakan tidak ada data perlintasan atas nama Djoko Tjandra faktanya orangnya ada mendapatkan berbagai prefilip sampai pada mendaftarkan upaya hukum luar biasa. Yang kedua soal tadi apakah persoalan hukum terbatas pada dokumen perkara kalau kita melihat kasus yang ada di Kejaksaan Agung yang melibatkan jaksa Pinangki Sirna Malasari oke klim Kejaksaan dokumennya berbeda gedung akan tetapi ada bukti petunjuk berupa CCTV yang ada diruangan jaksa Pinangki kemana sekarang, pastikan hangus, jadi jangan terlalu cepat menyimpulkan apalagi kalau kasus hukum hanya melandaskan pada dokumen ada banyak alat bukti lain yang juga masih kita pertanyakan hari ini kepada Kejaksaan Agung dan ICW sejak awal mendorong agar KPK terlibat dalam penyelidikan terbakarnya gedung Kejaksaan Agung kenapa Mbak Nana? karena kita khawatir inikan apakah ini tidak disengaja atau ini disengajakan dua itu saja opsiannya. Kami ingin KPK masuk kalau memang nanti terbukti ada pihak-pihak entah itu oknum internal Kejaksaan Agung atau di luar Kejaksaan Agung yang berupaya untuk menghentikan perkara-perkara besar maka dapat di sangka dengan pasal 21 oprasaljastis. Karena tadi Mbak Nana sampaikan kita agak sulit percaya kalau penegak hukum A menangani perkara yang melibatkan oknum penegak hukum A juga lebih bagus ambil tarik netral biar KPK yang masuk. Itu pointnya Mba Nana. (18)</p>									
19	<p>NS : “Tadi Pak Mahfud mengatakan kewenangan itu ada pada KPK, apakah anda berharap menkopulhukam bisa, karena tadi katanya tidak boleh ni”  KR : “Saya akan masuk disini sekaligus mengkritisi Kejaksaan Agung, Mbak Nana pekan lalu bareskrim secara terbuka mengundang KPK untuk mengadakan gelar perkara tapi Kejaksaan Agung saya tidak tau, saya belum pernah melihat ada pemberitaan Kejaksaan Agung mengundang KPK untuk gelar perkara, dan sampai hari ini pun Kejaksaan Agung” (19)</p>	MENEGASKAN								
20	<p>NS : “Ini spesifik gelar perkara terhadap?  KR : “Gelar perkara kasus suap surat jalan dan reknotis, itu kabarnya sih</p>	✓								

NO	Pasangan Data	Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice								
		BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL
	mengundang KPK tapi sampai hari ini kok terlihat seperti kejaksanaan agung menutup diri, itu yang ada” (20)									
21	<p>KR : “Gelar perkara kasus suap surat jalan dan reknotis, itu kabarnya sih mengundang KPK tapi sampai hari ini kok terlihat seperti kejaksanaan agung menutup diri, itu yang ada”</p> <p>MM : “Jadi kalau begitu, benar dong saya bahwa sekarang ini pejabat ndak bisa berbohong buktinya tadi disampaikan oleh Mas Kurnia, dulu ada orang yang bilang Masiku ndak ada ternyata bohongkan militas, kemudian katanya Djoko Tjandra bohong ternyata masuk, kan berarti saya sudah benar bilang, jangan berbohong sekarang ini masyarakat akan tau, dimana salahnya” (21)</p>	✓								
22	<p>KR : “Dan sanksi orang yang berbohong itu sampai hari ini tidak ada Prof Mahfud itu yang kita sesalkan kalau tidak ada <i>phanismen</i> yang tegas dari presiden maka bukan tidak mungkin orang itu akan berbohong dimasa yang akan datang terlebih terhadap penegakan hukum di bawah kewenangan profesor Mahfud MD. Itu yang kita khawatir Pak Mahfud”</p> <p>MM : “Konteksnya bukan itu, konteksnya yang saya katakan tidak mungkin sekarang orang bisa berbohong buktinya anda sudah tunjukkan buktinya itu bohong ketahuan juga, nah soal itu nanti soal lain ada, ada proses-proses internal kan sudah ada tindakan-tindakan juga tu, cuma tindakan menurut anda beda menurut tindakan pemerintah, misalnya saya contoh begini, di keminkoham dirjennya dicopot, wah anda curiga lagi, namanya sudah curiga oo itu bukan itu gitu terus gimana dong kan begitu, nanti aja yang Djoko Tjandra juga semuanya ditangani siapa yang melayani dia pergi sudah ditangani semua terus apalagi yang mau dilakukan, apakah mau melanggar hukum kita ini, ikut saran anda gitu wah itu yang ditangkap kapolrinya gitu misalnya, kan harus yang, kan sudah ada bukti bahwa yang berbohong ternyata salah ditindak ha gitu, lagi pula kasus Harun Masiku bukan bukan di pemerintah ya itukan di KPK” (22)</p>					✓				



NO	Pasangan Data	Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice								
		BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL
23	NS : “Baik, Pak Mahfud, Pak Bonyamin silahkan anda mau menyampaikan apa?” BS : “Sederhana Pak Mahfud mengajukan permohonan ajalah, Pak Mahfud atas kewenangan yang dimiliki memberikan arahan menghimbau atau tanda kutip lebih tinggi memerintah, jaksa agung untuk dalam ekpose, istilah di kejaksaan itu ekpose bukan gelar perkara, ketika pada posisi nanti di arahkan mengundang KPK, biar menjawab keraguan ini jadi Pak Mahfud saya yakin tidak akan menyalahi kewenangan dan tidak akan intervensi karena Jaksa Agung adalah di bawah pemerintahan, jadi diarahkan ajalah dihimbau saya yakin kalau Pak Mahfud nyentil jaksa agungnya eh tolong itu KPK di undang ajalah dalam ekpose ini hal yang sederhana dan gampang dilakukan Pak Mahfud, demikian terimakasih.” (23)	MEMERINTAH								
24	BS : “Persetujuan ini mohon di implementasikan habis ini atau besok mengontak jaksa agung eh tolong dong diajak ajalah KPK begitu” MM : “Itu, tu tinggal cara saya hahahhhahhaa” (24)	MENGEJEK								
25	MM : “Itu, tu tinggal cara saya hahahhhahhaa” NS : “Yang jelas, ini sudah terbuka dan disaksikan jutaan orang jadi seharusnya ini sudah”. (25)									✓
26	MM : “Itu, tu tinggal cara saya hahahhhahhaa” NS : “Yang jelas, ini sudah terbuka dan disaksikan jutaan orang jadi seharusnya ini sudah” (26)	TIDAK TAHU JAWABAN PASTI								
27	NS : “Yang jelas, ini sudah terbuka dan disaksikan jutaan orang jadi seharusnya ini sudah” MM : “Iya disaksikan jutaan orang dan bisa disampaikan juga oleh Pak Hari kan” (27)	TIDAK TAHU JAWABAN PASTI								
28	MM : “Iya disaksikan jutaan orang dan bisa disampaikan juga oleh Pak Hari kan” NS : “Jaksa Agung yang menyaksikan Mata Najwa saya tau sedang nonton jadi Pak Jaksa Agung tolong di dengar itu Pak Mahfud MD. (28)	TIDAK TAHU JAWABAN PASTI								

NO	Pasangan Data	Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice								
		BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL
29	NS : “Jaksa agung yang menyaksikan Mata Najwa saya tau sedang nonton jadi Pak jaksa agung tolong di dengar itu Pak Mahfud MD. Pak Mahfud” BS : “Jadi ini model orang solo ujung ujungnya nuntutnya juga, ujungnya ya nusuk juga Pak Mahfud jadi tolong dipahami.” (29)								✓	
30	NS : “Baik, Pak Mahfud pertanyaan penutup Pak Mahfud yang jelas puplik sempat dikagetkan oleh beberapa temuan yang dilakukan investigasi yang dilakukan media maupun investigasi yang dilakukan oleh sebutlah maki begitu ya, salah satunya adalah dugaan bahwa jaksa Pinangki itu melapor kepada jaksa agung pertemuannya dengan Djoko Tjandra di luar negeri, Jaksa Pinangki bahkan sempat video <i>call</i> dengan jaksa agung melapor sudah dil begitu, itu dugaan-dugaan yang muncul, apakah anda melihat kejaksaan akan berani memeriksa Jaksa Agung atas kasus ini Pak Mahfud? MM : “Itu sudah substansi perkara saya ndak boleh masuk tanyakan ke Pak Hari Setiyono aja ada di situ, saya ndak boleh masuk ke situ, karena Nana kan tau sendiri” (30)	✓								
31	MM : “Itu sudah substansi perkara saya ndak boleh masuk tanyakan ke Pak Hari Setiyono aja ada di situ, saya ndak boleh masuk ke situ, karena Nana kan tau sendiri” NS : “Tapi seharusnya apakah bisa jeruk makan jeruk pak?” (31)							✓		
32	NS : “Tapi seharusnya apakah bisa jeruk makan jeruk pak?” MM : “Ndak papa jeruk makan jeruk (hahaha)” (32)							✓		
33	MM : “Ndak papa jeruk makan jeruk (hahahaha)” NS : “Yakin ya Pak bisa, jadi kita” (33)									✓
34	NS : “Yakin ya Pak bisa, jadi...jadi kita” MM : “Pertanyaannya terlalu main-main sih”(34)	MENGEJEK								
35	NS : “Kita masih bisa percaya bahwa tidak akan sungkan-sungkan anak buah jaksa agung memeriksa bos besarnya untuk perkara yang dikaitkan dengan Djoko	MENEGASKAN								

NO	Pasangan Data	Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice								
		BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL
	Tjandra Pak? MM : “Seluruh rakyat indonesia mulai dari presiden sama rakyat kecil sampai rakyat kecil sama pikirannya semua harus terbuka saya tadi baru bertemu presiden” (35)									
36	NS : “Presiden bilang apa Pak?” MM : “Saya bilang Pak ini yang ribut-ribut sabtu kemarin orang mempersoalkan orang 546 milyar seakan-akan itu digelapkan, itu ndak benar sesudah itu dijelaskan bahwa itu ndak benar sudah ada bukti otentiknya orang mempertanyakan lagi, la dulu kan 900 laputusan mahkamah agungnya 546 gitu, yang 300nya silahkan dipersoalkan lagi tapi yang putusan mahkamah agung 546 yang diributkan sampe sore sampe saya menjelaskan itu ni masih ada di meja saya ni bukti-buktinya ni, bahwa itu sudah selesai, ha kata presiden Pak Mahfud profesional aja, kita jangan takut, buka sejujur-jujurnya begitu kalau presiden selalu. (36)	✓								
37	NS : “Baik, baik Pak Mahfud terimakasih waktu anda untuk Mata Najwa malam ini Pak, MM : “Makasih Najwa, jumpa lagi di lain waktu” (37)			✓						
38	NS : “Sehat-sehat terus ya Pak” MM : “Alhamdulillah sehat, terimakasih Najwa dan semuanya juga sehat-sehat” (38)				✓					
39	MM : “Alhamdulillah sehat, terimakasih Najwa dan semuanya juga sehat-sehat” NS : “Kita tunggu bagaimana jeruk makan jeruknya ya Pak ya” (39)							✓		
40	NS : “Kita tunggu bagaimana jeruk makan jeruknya ya Pak ya” MM : “Salam Abi Quraish Shibab ya” (40)		✓							
41	NS : “Yak membutuhkan waktu kurang lebih 11 jam untuk bisa menaklukkan api di gedung kejaksaan agung yang terbakar 65 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan bagaimana api bisa menhanguskan seluruh gedung utama kejaksaan, sudah hadir di mata najwa kepala dinas penanggulangan kebakaran			✓						

NO	Pasangan Data	Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice								
		BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL
	dan penyelamatan gulikarmat provinsi DKI Jakarta hadir Bapak, saya mengundang Pak Satria Digunawan yang akrab disapa Pak Bili, selamat malam Pak Bili” SG : “Selamat malam Mba Nana, salam sejahtera untuk kita semua” (41)									
42	NS : “Terima kasih sudah hadir di mata najwa Pak” SG : “Sama-sama Mba Nana, terimakasih juga telah mengundang saya” (42)			✓						
43	NS : “Saya juga terhubung dari luar dengan Ibu Fatma Lestari pakar fairsevti dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, selamat malam Bu Fatma” FL : “Selamat malam Mba Nana, selamat malam juga semuanya” (43)			✓						
44	NS : “Yak terimakasih atas video itu Pak Bili jadi persisnya anda dan teman-teman mendapatkan info dari orang yang datang justru kemarkas?” SG : “Betul, jadi pertama kita dapat berita terjadinya kebakaran yaitu dari warga yang datang ke pos terdekat, yaitu pos Kebayoran baru tepatnya sekitar jam 7 lewat 10 menit, kemudian langsung kita luncurkan 4 unit dan pada saat di TKP sudah ada 3 selasar dari gedung utama kejaksanaan agung sisi sebelah utara sudah terbakar nah itu langsung kita tambahkan lagi unit terakhir sampai dengan 65 unit dengan jumlah personil sekitar 325 orang.” (44)	✓								
45	NS : “Apakah di dalam ada alat-alat pemadam yang sempat berfungsi atau sama sekali tidak ada?” SG : “Pada saat itu sudah terbakar jadi mungkin kita akan liat nanti hasil porenensif dari kepolisian seperti apa gitu.(45)	TIDAK TAHU JAWABAN PASTI								
46	NS : “Jadi, tapi ketika kemudian masuk kedalam itu titik api dimula memang dari lantai 6 dan cepat sekali menjalar ke titik-titik yang lain itu karena kondisi gedungnya yang tadi anda katakan?” SG : “Betul, jadi pada saat jam tepatnya sekitar jam 7.10 menit itu sampai dengan jam 12 kita bisa mengantisipasi melokalisir satu setengah gedung utama	✓								

NO	Pasangan Data	Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice								
		BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL
	kejaksaan agung itu, hanya pas jam 1 tepatnya itu <i>flash over</i> terjadi di lantai 6 kemudian merambat sampai ke sisi selatan gedung kejaksaan agung. (46)									
47	NS : “Apa istilahnya Pak <i>flash over</i> itu? SG : “ <i>Flahs over</i> itu ada pengaruh dari asap, pengaruh asap yang bisa mengakibatkan panas nah itu juga merambat sampai ke sebelah sisi selatan gedung kejaksaan agung. (47)	✓								
48	NS : “Dari pengalaman anda memadamkan kebakaran ini termasuk yang besar Pak? SG : “Besarnya, termasuk besar ini karena satu gedung ada 6 lantai memanjang areanya cukup luas dan cukup besar, dan api juga dengan cepat merambat ke bagian yang lainnya” (48)	✓								
49	NS : “Oke, tapi yang gedung utamanya yang di depan yang kita lihat itu yang terbakar, nah pertanyaannya tadi Pak, apakah memang tidak ada sistem proteksi kebakaran atau yang bisa mendeteksi? HS : “Yak, sepengetahuan saya karena gedung ini kemarin saya katakan bahwa masuk dikawasan pemukiman kemarin memang dikatakan ini belum sebagai gedung cagar budaya tetapi sudah masuk kawasan pemukiman, kenapa? Karena ketika kami pengen mempercantik gedung itu di tahun 2018 itu ditegur oleh dinas pariwisata tidak boleh begini tidak boleh begitu sehingga ketika dilakukan itu ada berita acara yang ditandatangani oleh pengawas cagar budaya” (49)	MENGELAK								
50	NS : “Oke, pertanyaannya Pak itu belum menjawab pertanyaan saya Pak Hari, apakah ada sistem proteksi itu Pak? HS : “Iya saya mau masuk ke sana” (50)	TIDAK TAHU JAWABAN PASTI								
51	NS : “Oke, pertanyaannya Pak itu belum menjawab pertanyaan saya Pak Hari, apakah ada sistem proteksi itu Pak? HS : “Ya tentu di dalam pemeliharaan gedung itu ada proteksi terhadap keamanan	✓								

NO	Pasangan Data	Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice								
		BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL
	gedung itu sepanjang yang saya ketahui ada istilahnya apar park ya, apar di tiap-tiap jarak sekian meter kemudian juga yang saya ketahui peringatan dini katakanlah sedangkan spengler karena tinggi gedung juga ruangan itu saya ketahui cukup tinggi hanya di beberapa bagian saja yang saya tau ini ya, tetapi secara umum saya tidak tau, tetapi ada seperti itu, nah nanti mungkin dari bapak damkar yang sudah melakukan itu bisa lebih lengkap lagi” (51)									
52	NS : “Yaaak dalam kasus seperti ini Pak Bili investigasi itu biasanya meliputi apa-apa saja? SG : “Yaak, jadi kalau investigasi itu kewenangan dari puslapolri ya, kalau pemadam kebakaran memang posisinya pada saat itu hanya operasi bagaimana segera tuntas kebakaran yang terjadi di TKP itu.” (52)		✓							
53	NS : “Hmm jadi anda tidak dilibatkan ni oleh, oleh puslapor tidak dimintai nasehat juga tidak dimintai masukan sebagai orang yang sehari-hari urusan dengan api? SG : “Tidak Mba Nana, saya hanya melakukan tugas saya dengan mengerahkan semua anggota saya untuk turun ke TKP (53)	✓								
54	NS : “Kenapa ya pak? SG : “Memang aturannya seperti itu mungkin” (54)	TIDAK TAHU JAWABAN PASTI								
55	NS : “Ada rasa gemas mungkin, ingiin” SG : “Ya, pasti ada rasa, tapi ya manakala dibutuhkan kami siap” (55)			✓						
56	NS : “Oke, saya membutuhkan anda malam ini untuk menjawab Pak, jadi kalau bapak beri tugas wewenang investigasi biasanya apa sih yang diperiksa untuk tau ini tu sebetulnya tidak wajar kebakarannya.? SG : “Yaa kita pasti nyari titik utama titik pertama dari api tu dari mana di lantai berapa dan itu kita akan telusuri, kita akan telusuri biasanya ada berkas-berkas yang memang pasti ada titik utama itu di lantai berapa, nah itu perambatannya kemana arahnya nah itu nanti kita” (56)	✓								

NO	Pasangan Data	Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice								
		BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL
57	<p>NS : “Oke saya ingin ke Bu Fatma, Buk Fatma jadi dugaan sabotase kalau memang ada itu sesungguhnya bisa ditemukan dalam penyelidikan kasus-kasus seperti ini Buk?”</p> <p>FL : “Betul sekali Mba Nana, jadi kita menggunakan sains dengan mengambil sampel dari tempat lokasi kejadian kebakaran kemudian dibawa ke laboratorium untuk membutuhkan apakah disitu ada jejak-jejak apabila terjadi sabotase misalnya jejak-jejak adakah hidrokarbon karena di sebuah perkantoran tentunya jejak hidrokarbon ini tidak ada sebagai sumber bahan bakar, kalau disitu ditemukan ada jejak-jejak hidrokarbon maka ada kemungkinan di bakar, tetapi kalau itu tidak ada maka murni karena terbakar begitu. Kemudian, disamping itu juga bisa terlihat dari material-material yang merupakan sumber dari selain bahan bakar kemudian juga dari sumbernya dari dimana lokasi pertama api itu bisa terjadi dari pola kebakarannya itu semua bisa ditemukan di investigasi dan didalam sebuah investigasi sebetulnya bisa saja melibatkan ahli ataupun melibatkan damkar atau melibatkan ekspert, witnes, atau saksi untuk bisa merangkum hasil investigasi tersebut secara lebih komprehensif” (57)</p>	✓								
58	<p>NS : “Oke. Pak Hari tapi yang jelas gedung kejaksaan yang terbakar belum diasuransikan ya Pak?”</p> <p>HS : “Sepengetahuan saya memang demikian” (58)</p>	TIDAK TAHU JAWABAN PASTI								
59	<p>NS : “Oke. Pak Hari tapi yang jelas gedung kejaksaan yang terbakar belum diasuransikan ya Pak?”</p> <p>HS : “Sepengetahuan saya memang demikian” (59)</p>	TIDAK TAHU JAWABAN PASTI								

NO	Pasangan Data	Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice								
		BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL
60	<p>NS : “Itu karena memang sesuatu yang tidak pernah dirasa perlu atau karena lalai saja atau karena tidak sempat atau kenapa Pak?”</p> <p>HS : “Ya barang kali lalai saja, mungkin sudah beranggapan oo ini masuk cagar budaya maka pengelolaannya sesuai dengan standar yang ada di dalam pengelolaan cagar budaya, nah tadi saya katakan bahwa kenapa kami mengatakan itu cagar budaya di tahun 2018 tadi yang sudah saya sampaikan nah tentunya kalau itu masuk di dalam kawasan cagar budaya saya pikir perlakuannya juga harus memenuhi standar pengamanan untuk cagar budaya dan barang kali kami sebagai yang menempati tentu juga pemerintah provinsi DKI yang seharusnya juga peduli terhadap gedung-gedung yang sudah ditetapkan masuk di dalam kawasan itu. (60)</p>	✓								
61	<p>NS : “Kawasan-kawasan cagar budaya Pak tapi gedungnya bukan, gedungnya tidak Pak”</p> <p>HS : “Dibawahnya lagi perlakuan terhadap kawasan budaya sama dengan cagar budaya makanya bacanya jangan” (61)</p>	KESAL								
62	<p>NS : “Jadi artinya tidak perlu di asuransi”</p> <p>HS : “Nah contohnya tadi saya katakan di 2018 tadi kita katakan mau direnovasi di tegur itu ditandatangani oleh pengawas cagar budaya nah siapa yang seharusnya mengansuransikan, ha itu kira-kira” (62)</p>	MENGELAK/MENCARI ALASAN								
63	<p>NS : “Hmm oke tapi yang jelas sekarang karena tidak di asuransi maka kerugiannya ini kalau dari direktur jendral kekayaan negara itu nilai gedungnya 161 milyar Pak dan itu akan masuk ke APBN di 2021 kalau sekarang katanya belum di anggarkan jadi memang ini kerugian yang kerugian yang besar, kerugian yang besar”</p> <p>BS : “Ya tapi bagaimana mungkin meminta orang lain peduli anda sendiri tidak peduli Pak Hari? (63)</p>	KESAL								
64	<p>BS : “Bukan, infeksi keselamatan itu lo, saya hanya kapan terakhir dilakukan? Itu aja”</p>	PEMBELAAN DIRI								



NO	Pasangan Data	Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice								
		BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL
	HS : “Ya, oleh karena itu kami akan lakukan cek itu” (64)									
65	NS : “Yak kebakaran gedung kejaksaan memicu spekulasi terkait penanganan kasus Djoko Tjandra yang melibatkan jaksa Pinangki, selain nara sumber di studio kita sudah terhubung dengan ketua komisi kejaksaan Barita Simanjuntak, selamat malam Pak Barita. PB : “Selamat malam Mba Nana, selamat malam Pak Arsep, Pak Mas Boyamin, Mas kurnia. (65)			✓						
66	NS : “Baik sebelum ke anda saya mau ke maki dulu Bonyamin yang sejak awal mengawal kasus ini, apa <i>to the point</i> . Jadi anda tidak percaya jaksa Pinangki bekerja sendirian pasti ada orang lain yang terlibat. BS : “Iyalah, masak dalam konteks itu menerima suap pemberi gak ada, ini ngarangnya bukan main ini kejaksaan agung ini. (66)					✓				
67	NS : “Bukan yang memberi, maksud saya apakah mungkin jaksa eslon empat bisa bertemu dengan buron kakap dan menjanjikan macam-macam sampai menjanjikan fatwa. BS : “Ya sementara ini masih apa, istilah saya kepandaian Pinangki itu aja mancatut banyak orang (67)	KESAL								
68	BS : “Ya sementara ini masih apa, istilah saya kepandaian Pinangki itu aja mancatut banyak orang” NS : “Mencatut atau, atau” (68)									✓
69	NS : “Mencatut atau, atau” BS : “Ya itu nanti bisa anu dimaknai ke kanan dan ke kiri gitu” (69)	MENGELAK/MENCARI ALASAN								
70	NS : “Anda jadi hati-hati ni Pak Bonyamin” BS : “Ya kan nanti kan bisa menjadi bersedia dicabut kan ada, kan gitu kan malah udah cabut aja nama ku juga ada nanti, itu lo jadi artinya bukan hati-hati kan saya harus koridor hukum karena sebagai detektek patikelir begitu jadi ya harus pada posisi meskipun saya sejak awal kalimat dugaan tapi lebih banyak	MENGELAK/MENCARI ALASAN								

NO	Pasangan Data	Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice								
		BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL
	terbukti gitu lo (70)									
71	<p>NS : “Oke karena kan kemudian ada dokumen yang menyebut bahwa melapor ke jaksa agung dua kali soal pertemuannya menggelar video <i>call</i> dan sebagainya, ee itu, itu sesuatu yang memang hasil temuan anda juga ya terjadi atau bagaimana?”</p> <p>BS : “Gak itu temuan tempo kalau itu saya mengakui karena, saya posisi bahwa Pinangki itu memang pergi keluar negeri terus kemudian Djoko Tjandra itu pasti tidak mudah percaya seorang jaksa yang bukan bidangnya eslonnya bawah terus kemudian bisa dipercaya oleh Djoko Tjhandra tanpa sesuatu yang akan diberitahukan dia, baik secara rahasia maupun secara terbuka kepada Djoko Tjhandra bahwa saya itu begini lo dekat dengan A dekat dengan B itu, sehingga saya akan bisa memberikan bantuan kepada anda bebas dari hukum untuk mengajukan permohonan fatwa, permohonan fatwa ini akan didukung dari sisi yang kemudian bisa jadi akan didukung oleh instansinya dia, dan dia bisa mencatut level tertinggi, nah tapi mencatut itu bisa juga memang, bersedia dicatut atau malah menyuruh dicatut kan begitukan. (71)”</p>	MENYANGKAL								
72	<p>BS : “Penanganan perkara korupsikan cepat utamakan dari yang lain”</p> <p>HS : “Kan tidak boleh omongan di warung kopi kemudian jadi berkas kemudian dipaksakan untuk menjadi berkas kan alat bukti Pak” (72)</p>							✓		
73	<p>HS : “Nana boleh saya jawab ya, saya belum selesai dalam penanganan perkara itukan bai proses tgl 4 diserahkan bidang pengawasan tgl 7 kalau tidak salah penyidikan tgl 11 ditangkap 12 ditahan. Kemudian untuk memanggil memeriksa seseorang siapa kawan berbuat kemudian pemberinya siapa inikan bai proses artinya apa ketika seseorang di panggil menggunakan haknya tidak adil tentukan bai proses dan hari ini kita periksa 3 orang termasuk Djoko Tjandra kemudian juga dari Garuda juga dari salah satu diluar mobil BMW oleh karena itu tolong dukung kami berikan masukan kami dan kami akan buktikan itu.</p>	SINDIRAN								

NO	Pasangan Data	Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice								
		BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL
	BS : “Misalnya berandai-andai Pak, berandai inikan sebenarnya bisa jadi penyidiknya pengen cepat terus kemudian ada tangan-tangan tidak terlihat atau tangan-tangan yang lebih kuat meminta untuk tidak cepat-cepat ada gak Pak? Ini” (73)									
74	NS : “Iyaaak saya ingin ke Pak Barita komisi kejaksaan, perlu ditekankan jadi ini komisi kejaksaan komisi independen yang memang sejak awal menerima laporan masyarakat dan berniat memeriksa jaksa Pinangki tetapi kemudian dikatakan tidak perlu diperiksa karena sudah diperiksa internal dan sampai sekarang juga masih belum dapat akses untuk memeriksa langsung jaksa Pinangki, begitu Pak Barita? PB : “Yak betul, tapi saya perlu sampaikan bahwa kami melaksanakan pasal 4 A peraturan presiden NO 18 tahun 2011 yang mengatakan wewenang komisi kejaksaan adalah menerima dan menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat tentang kinerja dan perilaku jaksa dalam melakukan tugas dan wewenangnya. Itu makanya kami mengundang untuk mendengarkan penjelasan dan keterangannya kami belum masuk tahapan pemeriksaan masih meminta penjelasan dan keterangan, itu perlu di sampaikan sehingga klir buat kita bahwa komisi kejaksaan melakukan tugasnya berdasarkan peraturan presiden Mbak Nana. (74)	✓								
75	NS : “Pak Barita, apakah mendapatkan akses itu, karena tadi di awal pak Mahfud MD mengatakan bahwa seharusnya komisi kejaksaan bisa juga mendapatkan akses tidak perlu menunggu 2 minggu untuk mendapatkan laporan, apakah memang merasa ada ketidak ada tertubi kejaksaan agung tidak membuka ke komisi kejaksaan, betulkah kesan itu? PB : “Iya, karena pertama kami mengundang oknum jaksa P itu tanggal 27 juli tidak datang tanpa alasan tanggal 30 juli kami undang kedua juga tidak datang. Namun kami mendapatkan surat dari atasannya bahwa karena pemeriksaan pengawasan sudah berjalan sehingga artinya komisi kejaksaan								✓	

NO	Pasangan Data	Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice								
		BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL
	tidak perlu memeriksa lagi. Itu sebabnya sesuai dengan pasal 4 C peraturan presiden kami meminta laporan hasil pemeriksaannya sebab itu wewenang komisi kalau kami tidak bisa periksa. Kasih dong mana LHP nya karena LHP ini diperlukan supaya kami bisa menjawab ini maki, Mas Bonyamin inikan kejar terus ni, mana hak dia itu sebagai pelapor harus kita sampaikan untuk memberi jawaban itu kami harus membutuhkan dokumen itu. (75)									
76	NS : “Baik, Pak Barita silahkan, karena kemudian ini juga bisa menjadi preleden menunjukkan bahwa memang ada keengganan dari kejaksaan agung untuk diperiksa atau diawasi oleh pihak independen.” BS : “Buka aja Pak Barita” (76)	MEMERINTAH								
77	NS : “Pak Barita waktu saya mepet sekali, boleh langsung jawab <i>to the point</i> saja Pak, karena saya mau membahas yang lain, betul atau tidak itu tidak bisa memanggil jampidung? PB : “Nah selanjutnya kamikan menindak lanjuti supaya kami mengundang meminta keterangan kepada kejaksaan tinggi direktur DPWEL dan aspidung DKI itu yang kami tidak lagi di ijinakan untuk kami mintai keterangan” (77)	MENEGASKAN								
78	NS : “Oke, berarti betul ya, berarti betul kalau begitu sekarang Pak Hari tolong dijawab karena ini tanda-tanda dulu tidak mau sekarang tidak mau dibuka anda tadi bilang percayakanlah kepada kejaksaan, bagaimana mau percaya kalau ada keengganan seperti ini Pak Hari? HS : “Yak baik, memang betul ada perpres 18 tahun 2011 tentang komisi kejaksaan di pasal 4 tadi juga disampaikan komisi kejaksaan berwenang menerima laporan dan menindaklanjuti tetapi perpres tersebut ada tambahannya mungkin Pak Ketua komisi kejaksaan belum menyampaikan tadi saya sampaikan ada MOYU antara komisi kejaksaan dengan bidang pengawasan kalau tidak atau dengan kejaksaan jadi apabila ada laporan pengaduan yang ditujukan ke komisi kejaksaan itu komisi kejaksaan melakukan rapat kalau tidak salah yang saya baca untuk menyerahkan kepada bidang pengawasan atau kejaksa agung	✓								

NO	Pasangan Data	Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice								
		BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL
	untuk dilakukan pemeriksaan oleh bidang pengawasan. Apabila dalam pemeriksaan itu tidak sempurna dan sebagainya maka komisi kejaksaan bisa mengambil alih atau menambahi seperti yang disampaikan oleh Pak Bonyamin tadi dan seterusnya, itu kira-kira.” (78)									
79	HS : “Mudah-mudahan ndak lah, mudah-mudahan ndak” BS : “Berarti boleh masuk? (79)	PAHAM KONTEKS								
80	HS : “Nah itu tadi tergantung pimpinan dalam arti Pak Barita Simanjuntak untuk berkomunikasi” KR : “Jadi semua menutup diri Mbak nana, ada menutup diri tentang komisi kejaksaan, tidak pernah mengundang KPK untuk melakukan gelar perkara jadi klir sekali kejaksaan agung ingin melokalisir kasus jaksa Piangki Sirna Malasari” (80)	SINDIRAN								
81	NS : “Oke, apakah akan ada rencana memeriksa internal kejaksaan sendiri, apakah misalnya akan memeriksa jaksa agungnya sendiri karena namanya disebut-sebut akan memeriksa mantan jam intel Janmarinka karena namanya disebut-sebut?” HS : “Yak, sebagaimana kita ketahui bahwa sudah ada penyidikan terhadap jaksa PSM tentu penyidikan akan lebih kuat apakah diperoleh dari keterangan para saksi ataupun tersangka untuk mengait ke masalah itu oleh karena itu ini sudah cukup kuat sudah dilakukan penyidikan saya kira itu lebih dipertekankan. (81)	✓								
82	HS : “Yak, yaak menurut kami itu ada namanya korsup, saya pikir semua terbuka, semua terbuka dan mudah-mudahan kedepan juga seperti itu harapan kita”. BS : “Nana sebagai sama-sama barangkali santrinya Gusbahaudin Nursalim rembang ini saya kembalikan ke spiritual jadi kebakaran itu bisa jadi tanda kutip karena doa kita ini hanya berdoa memohon keselamatan tapi tindakan-tindakan kita bukan bagian dari doa, bukan bagian dari menjalankan tugas ini bukan bagian dari doa artinya apa kalau doa, berarti tulus melakukan tugasnya								✓	

NO	Pasangan Data	Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice								
		BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL
	tulus keterbukaan, tulus untuk kebaikan dan kebaikan negeri ini juga sebagai bendera saya yang merah putih saya melakukan ini sebagai sumbangsiah saya kepada negara ini untuk tidak runtuh Pak. Jadi, inilah kejaksaan agung nampaknya doanya itu hanya doa memohon keselamatan tapi tidak disertai dengan doa-doa yang melakukan tugas dengan tulus dengan kebaikan tidak ada selingkuh, selingkuh arti luas arti sempit itu, sehingga cctv itu khawatir saya dibakar atau terbakar karena ada selingkuh baik arti luas maupun arti sempit, demikian” (82)									
83	NS : Mohon maaf Pak Barita waktunya sudah habis kita juga akan mendorong supaya komisi kejaksaan bisa dapat akses untuk memeriksa karena sekali lagi ini komisi independen yang perlu untuk mewakili puplik menjwab berbagai spekulasi yang ada. Selamat bekerja Pak Barita kita akan dorong terus supaya komisi kejaksaan terus” PB : “Terimakasih, sip selamat kerja kembali Nana dan semuanya” (83)			✓						

#### **4.1.2 Analisis Data**

Berdasarkan data tuturan yang telah penulis peroleh dari video program Mata Najwa *Bara di Markas Jaksa* di Trans 7 yang diunduh dari *youtube*, data tuturan tersebut penulis analisis sesuai dengan prinsip kerja sama yang dikemukakan oleh Grice dengan metode analisis isi. Menurut Grice (Wijana, 1996:46) “Dalam rangka melaksanakan prinsip kerja sama itu, setiap penutur harus mematuhi 4 maksim percakapan, yakni maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim cara/pelaksanaan.” Namun, pada kenyataannya dalam percakapan masih banyak peserta tutur yang mengabaikan keempat maksim tersebut khususnya dalam program Mata Najwa *Bara di Markas Jaksa* di Trans 7.

Berikut ini penulis menganalisis pelanggaran maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim cara/pelaksanaan dalam tuturan antara pemandu acara dan narasumber dalam program Mata Najwa pada tema *Bara di Markas Jaksa* di saluran televisi Trans 7 yang telah diunduh dari *youtube*.

##### **4.1.2.1 Bentuk-Bentuk Pelanggaran Maksim Kuantitas**

Data pada tahap ini diperoleh berdasarkan hasil dokumentasi, simak, dan catat terhadap tuturan pemandu acara (Najwa Sihab) dengan bintang tamunya yang terjadi di program Mata Najwa pada tema *Bara di Markas Jaksa*. Bentuk pelanggaran maksim kuantitas diperoleh dengan menganalisis pasangan tuturan dan konteks yang melatarbelakangi munculnya tuturan. Pasangan tuturan yang tergolong pada pelanggaran maksim kuantitas diberi kode, kemudian dibandingkan berdasarkan pemaknaan yang sama.

Maksim kuantitas menginginkan supaya partisipan menyumbangkan informasi secukupnya serta tidak berlebihan dalam menyampaikan informasi yang diperlukan oleh mitra tutur. Setiap tuturan yang berisi informasi yang secukupnya dan sesuai dengan apa yang diharapkan penutur dapat dikatakan pematuhan maksim kuantitas. Namun, apabila informasi yang diberikan berlebihan atau melebihi dari yang diminta maka dapat dikatakan melanggar maksim kuantitas. Pelanggaran tersebut dapat dilihat di bawah ini.

Konteks : Tuturan ini terjadi di awal pembukaan acara pada sekmen satu. Partisipan dalam tuturan ini berjumlah dua orang, yakni Najwa Sihab sebagai pemandu acara dan Hary Setiyono seorang (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Ham Jakarta Selatan) sebagai salah satu narasumber di acara Mata Najwa. Tujuan percakapan tersebut adalah untuk mengetahui kabar dari Hary Setiyono yang akan dimintai keterangan terkait terbakarnya gedung Kejaksaan Agung. Tuturan ini bermula saat pemandu acara (Najwa Sihab) mulai membuka diskusi dan menyapa semua narasumber salah satunya Hary Setiyono tersebut, sehingga terjadilah percakapan sebagai berikut.

NS :“Empat hari setelah kebakaran melanda markas jaksa, spekulasi masih terus bermunculan penyebab kebakaranpun masih jadi ttttttpengusutan kasus kebakaran ini, hadir di studio mata Najwa kepala pusat penerangan dan hukum kejaksaan agung Hary Setiono. Selamat malam Pak Hary”.

HS :”Selamat malam, salam sehat untuk semuanya” (1)

Tuturan (1) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim kuantitas. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban HS yang berlebihan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim kuantitas tidak menginginkan mitra tutur memberikan informasi yang kurang maupun berlebihan. Dalam tuturan (1) terlihat bahwa HS berlebihan dalam menjawab pertanyaan NS yang seharusnya HS cukup menjawab *Selamat malam*, karena tuturan tersebut sudah memadai untuk menjawab pertanyaan NS. Namun dalam data (1) HS



menambahkan ucapan *Salam sehat untuk semuanya* yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim kuantitas.

Konteks: Tuturan ini terjadi di awal pembukaan acara. Partisipan dalam tuturan ini berjumlah dua orang, yakni Najwa Sihab sebagai pemandu acara dan Kurnia Ramadhana seorang (Peneliti Indonesian Korupsion Was) sebagai salah satu narasumber dalam program Mata Najwa yang akan dimintai keterangan terkait terbakarnya gedung Kejaksaan Agung dan beberapa kasus korupsi. Tuturan ini bermula saat Najwa mulai membuka diskusi dan menyapa semua narasumber salah satunya Kurnia Ramadhana tersebut, sehingga terjadilah percakapan sebagai berikut.

NS :“Hadir teman saya peneliti indonesian korupsion was atau ICW Kurnia Ramadana. Selamat malam Kurnia”

KR :“Selamat malam Mba Nana, selamat malam semuanya” (2)

Tuturan (2) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice.

Maksim yang dilanggar adalah maksim kuantitas. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban KR yang berlebihan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim kuantitas tidak menginginkan mitra tutur memberikan informasi yang kurang maupun berlebihan. Dalam tuturan (2) terlihat bahwa KR berlebihan dalam menjawab pertanyaan NS yang seharusnya KR cukup menjawab *Selamat malam*, karena tuturan tersebut sudah memadai untuk menjawab pertanyaan NS. Namun pada data (2) KR menambahkan ucapan *Selamat malam semuanya* yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim kuantitas.

Konteks : Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dan Muhammad Mahfud MD seorang (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Ham) sebagai salah satu narasumber dalam program Mata Najwa yang akan dimintai keterangan terkait terbakarnya gedung Kejaksaan Agung. Tujuan dari tuturan ini adalah untuk mengetahui kabar dari Mahfud. Tuturan ini bermula saat Najwa mulai membuka diskusi dan menyapa semua narasumber salah satunya Muhammad Mahfud MD, sehingga terjadilah percakapan sebagai berikut.

NS :“Saya juga sudah terhubung lewat video *call* dengan menteri koordinator politik hukum dan ham Muhammad Mahfud Md. “Selamat malam, *assalamualaikum* Pak Mahfud”  
MM :“*Walaikumsalam*, Najwa dan semuanya, Hari, Mas Bonyamin, Mas Ramadani.” (3)

Tuturan (3) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim kuantitas. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban MM yang berlebihan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim kuantitas tidak menginginkan mitra tutur memberikan informasi yang kurang maupun berlebihan. Dalam tuturan (3) terlihat bahwa MM berlebihan dalam menjawab pertanyaan NS yang seharusnya MM cukup menjawab *Selamat malam* atau *Walaikumsalam*, karena tuturan tersebut sudah memadai untuk menjawab pertanyaan NS. Namun pada percakapan di atas, MM menambahkan ucapan *Najwa dan semuanya, Hari, Mas Bonyamin, Mas Ramadani*, yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim kuantitas.

Konteks : Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dan Muhammad Mahfud MD seorang (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Ham) sebagai salah satu narasumber dalam program Mata Najwa yang akan dimintai keterangan terkait terbakarnya gedung Kejaksaan Agung. Tuturan ini bermula saat Najwa mulai memberi pertanyaan kepada salah satu narasumbernya yang dihubungi melalui panggilan video yaitu Muhammad Mahfud MD adapun percakapannya seperti di bawah ini.

NS: “Terima kasih sudah bergabung Pak Mahfud. Pak saya mau langsung *to the point* ya Pak Mahfud karnakan anda bahkan pada malam saat terjadi kebakaran langsung berani menyebut dan menjamin berkas-berkas perkara aman 100% tidak akan mengganggu proses penanganan perkara, keyakinan Pak Mahfud dari mana Pak? bahkan sudah disebutkan pada saat kebakarannya masih terjadi”.

MM: “Karena saya langsung berhubungan dengan Jaksa Agung dan jampidum, itu gimana perkara-perkara yang sedang ditangguh. Oo jauh Pak, bukan disitu kalau berkas perkara, gitu. Jadi yang saya jamin aman tu jamak perkara yang sedang ditangani yang

pada saat itu sering disebut ada dua. Satu, soal Djoko Chandra dan Pinangki, yang kedua soal Jiwasraya (4)

Tuturan MM dalam tuturan (4) di atas yang menjawab pertanyaan dari NS termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim kuantitas. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban MM yang panjang dan berlebihan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim kuantitas tidak menginginkan mitra tutur memberikan informasi yang kurang maupun berlebihan. Dalam tuturan (4) terlihat bahwa MM yang memeberikan respons yang sangat panjang dan berlebihan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim kuantitas. Seharusnya MM cukup menjawab sampai *Karena saya langsung berhubungan dengan Jaksa Agung dan Jampidum*. Karena, tuturan tersebut sudah memadai untuk menjawab pertanyaan NS.

Konteks : Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab selaku pemandu acara dan Mahfud MD pada segmen pertama. Najwa bertanya apakah tidak terpikirkan oleh Mahfud tentang ketidak wajaran melihat besarnya kebakaran yang terjadi. Sehingga terjadilah percakapan seperti dibawah ini.

NS: “Tapi.. Pak Mahfud pertanyaan saya apakah Pak Mahfud sendiri tidak terlintas dibenak Pak Mahfud mungkin saja ada ketidak wajaran, tidak pernah terlintas sama sekali Pak? Melihat besarnya kebakaran.

MM: “Semula terlintas, semula terlintas karena begini saya tidak tau kebakarannya, tiba-tiba itu ada telpon, Kejaksaan Agung kebakaran lalu saya liat televisi sudah parah lalu saya baca di media di medsos macam-macam ada kecurigaan saya juga ikut curiga gitu, terlintas, lalu saya telpon Jaksa Agung gimana Pak. Ooo Pak saya ada di tengah-tengah, gimana tu perkara-perkara itu gitu, aman.. oo aman saya terus telpon Fadil Sumana juga aman, lalu saya katakan saya terlintas ndak mungkinlah tidak telintas, kalo itu bohong kalo (8)

Tuturan (8) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim kuantitas. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban MM yang berlebihan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim kuantitas tidak menginginkan mitra tutur memberikan informasi yang kurang maupun berlebihan. Dalam data tuturan (8) terlihat bahwa MM berlebihan dalam menjawab pertanyaan NS yang seharusnya MM cukup menjawab *Semula terlintas*, karena tuturan tersebut sudah memadai untuk menjawab pertanyaan NS. Namun dalam data (8) MM justru menambahkan kontribusi berlebihan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim kuantitas.

Konteks : Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab selaku pemandu acara dan Mahfud MD pada segmen pertama. Najwa bertanya apakah tidak terpikirkan oleh Mahfud tentang ketidak wajaran melihat besarnya kebakaran yang terjadi. Sehingga terjadilah percakapan seperti dibawah ini.

NS: “Apa Pak Mahfud, boleh saya tau Pak lintasan pertama dibenak karena mungkin saja itu yang benar Pak, hans Pak Mahfud apa? waktu terlintasnya ini dibakar.

MM: “Ya lintasan pertama karena sedang nangani perkara itu jangan-jangan ini ada yang sengaja orang dalam, kan gitu itu saya kira siapa aja bisa mengira begitu, manusiawi saya juga mengira begitu tetapi sesudah telpon itu, Pak gedungnya jauh yang diseberang sana itu kalo gedung yang nangani perkara itu begitu.  
(9)

Tuturan (9) di atas yang menjawab pertanyaan dari NS termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim kuantitas. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban MM yang berlebihan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim kuantitas tidak menginginkan mitra tutur memberikan informasi yang kurang maupun berlebihan. Dalam tuturan (9) MM memeberikan respon

yang sangat panjang dan berlebihan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim kuantitas. Seharusnya MM dalam data (9) cukup menjawab *Ya lintasan pertama karena sedang nangani perkara itu jangan-jangan ini ada yang sengaja orang dalam*, karena tuturan tersebut sudah memadai untuk menjawab pertanyaan NS. Namun, dalam data (9) MM justru menambahkan tuturan *kan gitu itu saya kira siapa aja bisa mengira begitu, manusiawi saya juga mengira begitu tetapi sesudah telpon itu, Pak gedungnya jauh yang diseberang sana itu kalo gedung yang nangani perkara itu begitu*. Yang tidak diutuhkan NS sehingga menyebabkan pelanggaran maksim kuantitas.

Konteks : Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab selaku pemandu acara dan Kurnia Ramadhana (Peneliti ICW) pada segmen kedua. Najwa bertanya mengenai pernyataan Kurnia yang sebelumnya menyebutkan tentang gelar perkara. Sehingga terjadilah percakapan seperti dibawah ini.

NS: “Ini spesifik gelar perkara terhadap?”

KR: “Gelar perkara kasus suap surat jalan dan reknotis, itu kabarnya sih mengundang KPK tapi sampai hari ini kok terlihat seperti kejaksaan agung menutup diri, itu yang ada” (20)

Tuturan (20) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim kuantitas. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban KR yang berlebihan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim kuantitas tidak menginginkan mitra tutur memberikan informasi yang kurang maupun berlebihan. Dalam tuturan (20) terlihat bahwa KR berlebihan dalam menjawab pertanyaan NS yang seharusnya KR cukup menjawab *Gelar perkara kasus suap surat jalan dan reknotis*, karena tuturan tersebut sudah memadai untuk menjawab pertanyaan NS.

Namun pada data (20) KR menambahkan ungkapan berlebihan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim kuantitas.

Konteks : Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab dan Mahfud MM pada sekmen kedua. Tuturan ini adalah tuturan penutup, lalu Najwa mengucapkan terima kasih kepada Mahfud, seperti pada percakapan di bawah ini.

NS: “Baik, baik Pak Mahfud terimakasih waktu anda untuk Mata Najwa malam ini Pak,

MM: “Makasih Najwa, jumpa lagi di lain waktu” (37)

Tuturan (37) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim kuantitas. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban MM yang berlebihan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim kuantitas tidak menginginkan mitra tutur memberikan informasi yang kurang maupun berlebihan. Dalam tuturan (37) *Makasih Najwa, jumpa lagi di lain waktu* terlihat bahwa MM berlebihan dalam menjawab pertanyaan NS yang seharusnya MM cukup menjawab *Makasih Najwa*. Namun pada percakapan di atas, MM menambahkan ucapan *Jumpa lagi di lain waktu* yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim kuantitas.

Konteks : Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab dan Mahfud MM pada sekmen kedua. Tuturan ini adalah tuturan penutup, lalu Najwa basa-basi kepada Mahfud, seperti pada percakapan di bawah ini.

NS: “Sehat-sehat terus ya Pak”

MM: “Alhamdulillah sehat, terimakasih Najwa dan semuanya juga sehat-sehat” (38)

Tuturan (38) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim kuantitas. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban MM yang berlebihan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim kuantitas tidak

menginginkan mitra tutur memberikan informasi yang kurang maupun berlebihan. Dalam tuturan (38) terlihat bahwa MM berlebihan dalam menjawab pertanyaan NS yang seharusnya MM cukup menjawab *Alhamdulillah sehat terimakasih Najwa*. Namun pada percakapan di atas, MM menambahkan ucapan *Semuanya juga sehat-sehat* yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim kuantitas.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najawa Shihab dan Satriadi Gunawan pada sekmen ketiga. Tuturan ini adalah percakapan pertama antara Najwa dan Satriadi, Najwa menceritakan kronologi pemadaman kebakaran yang terjadi di Gedung Kejaksaan, kemudian menyapa Satriadi Gunawan, seperti pada percakapan di bawah ini.

NS: “Yak membutuhkan waktu kurang lebih 11 jam untuk bisa menaklukkan api di gedung kejaksaan agung yang terbakar 65 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan bagaimana api bisa menghanguskan seluruh gedung utama kejaksaan, sudah hadir di *Mata Najwa* kepala dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan GULKARMAT provinsi DKI Jakarta hadir Bapak, saya mengundang Pak Satria Digunawan yang akrab disapa Pak Bili, selamat malam Pak Bili”

SG: “Selamat malam Mba Nana, salam sejahtera untuk kita semua” (41)

Tuturan (41) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim kuantitas. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban SG yang berlebihan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim kuantitas tidak menginginkan mitra tutur memberikan informasi yang kurang maupun berlebihan. Dalam tuturan (41) terlihat bahwa SG berlebihan dalam menjawab pertanyaan NS yang seharusnya SG cukup menjawab *Selamat malam Mba Nana*. Namun pada percakapan di atas, SG menambahkan ucapan *Salam sejahtera untuk kita semua* yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim kuantitas.

Konteks : Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab dan Satriadi Gunawan pada sekmen ketiga. Tuturan ini adalah percakapan pertama antara Najwa dan Satriadi, Najwa menceritakan kronologi pemadaman kebakaran yang terjadi di Gedung Kejaksaan, kemudian menyapa Satriadi Gunawan, seperti pada percakapan di bawah ini.

NS: “Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa Pak”

SG: “Sama-sama Mba Nana, terimakasih juga telah mengundang saya”  
(42)

Tuturan (42) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim kuantitas. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban SG yang berlebihan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim kuantitas tidak menginginkan mitra tutur memberikan informasi yang kurang maupun berlebihan. Dalam tuturan (42) terlihat bahwa SG berlebihan dalam menjawab pertanyaan NS yang seharusnya SG cukup menjawab *Sama-sama Mba Nana*. Namun pada percakapan di atas, SG menambahkan ucapan *Terimakasih juga telah mengundang saya* yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim kuantitas.

Konteks : Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dan Fatmawati Lestari (Pakar *Fire Safety* FKM UI Depok Jawa Barat) pada sekmen ketiga. Tuturan ini adalah percakapan pertama antara Najwa dan Fatmawati, Najwa mengatakan bahwa ia sudah terhubung melalui video *call* dengan Fatmawati Lestari seorang pakar fairsevti dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, kemudian Najwa menyapa Fatmawati, seperti pada percakapan di bawah ini.

NS: “Saya juga terhubung dari luar dengan Ibu Fatma Lestari pakar fairsevti dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, selamat malam Bu Fatma”

FL: “Selamat malam Mba Nana, selamat malam juga semuanya” (43)

Tuturan (43) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim kuantitas. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban FL yang berlebihan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja



sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim kuantitas tidak menginginkan mitra tutur memberikan informasi yang kurang maupun berlebihan. Dalam tuturan (43) terlihat bahwa FL berlebihan dalam menjawab pertanyaan NS yang seharusnya FL cukup menjawab *Selamat malam Mba Nana*. Namun pada percakapan di atas, FL menambahkan ucapan *Selamat malam juga semuanya* yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim kuantitas.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najawa Shihab sebagai pemandu acara dan Satriadi Gunawan (Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta) pada sekmen ketiga. Tuturan ini adalah percakapan lanjutan antara Najwa dan Satriadi, Najwa memutar sebuah video kebakaran pemberian dari Satriadi, lalu Najwa mengajukan pertanyaan tentang apakah benar titik mula api cepat menjalar karena kondisi gedung yang sudah tua, seperti pada percakapan di bawah ini.

NS: “Tapi ketika kemudian masuk kedalam itu titik api dimula memang dari lantai 6 dan cepat sekali menjalar ke titik-titik yang lain itu karena kondisi gedungnya yang tadi anda katakan?”

SG: “Betul, jadi pada saat jam tepatnya sekitar jam 7.10 menit itu sampai dengan jam 12 kita bisa mengantisipasi melokalisir satu setengah gedung utama kejaksaan agung itu, hanya pas jam 1 tepatnya itu *flash over* terjadi di lantai 6 kemudian merambat sampai ke sisi selatan gedung kejaksaan agung. (46)

Tuturan (46) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim kuantitas. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban SG yang berlebihan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim kuantitas tidak menginginkan mitra tutur memberikan informasi yang kurang maupun berlebihan. Dalam tuturan (46) terlihat bahwa SG berlebihan dalam menjawab pertanyaan NS yang seharusnya SG cukup menjawab sampai *Betul*, karena tuturan tersebut sudah memadai untuk menjawab pertanyaan NS. Namun pada percakapan data (46) SG

memberikan kontribusi berlebihan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim kuantitas.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najawa Shihab sebagai pemandu acara dan Satriadi Gunawan (Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta) pada sekmen ketiga. Tuturan ini adalah percakapan lanjutan antara Najwa dan Satriadi, sebelumnya Satriadi menyebutkan tentang *flash over*, kemudian, Najwa mengajukan pertanyaan tentang apa istilah dari *flash over* tersebut, seperti pada percakapan di bawah ini.

NS: “Apa istilahnya Pak *flash over* itu?”

SG: “*Flahs over* itu ada pengaruh dari asap, pengaruh asap yang bisa mangakibatkan panas nah itu juga merambat sampai ke sebelah sisi selatan gedung kejaksaan agung. (47)”

Tuturan (47) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim kuantitas. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban SG yang berlebihan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim kuantitas tidak menginginkan mitra tutur memberikan informasi yang kurang maupun berlebihan. Dalam tuturan (47) terlihat bahwa SG berlebihan dalam menjawab pertanyaan NS yang seharusnya SG cukup menjawab *Flahs over itu ada pengaruh dari asap*, karena tuturan tersebut sudah memadai untuk menjawab pertanyaan NS. Namun, pada data (47) percakapan di atas, SG menambahkan ucapan *Pengaruh asap yang bisa mangakibatkan panas nah itu juga merambat sampai ke sebelah sisi selatan gedung kejaksaan agung* yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim kuantitas.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najawa Shihab sebagai pemandu acara dan Satriadi Gunawan (Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta) pada sekmen ketiga. Tuturan ini adalah percakapan lanjutan antara Najwa dan Satriadi, Najwa kembali mengajukan pertanyaan berdasarkan dari pengalaman Satriadi apakah

kebakaran di gedung Jaksa Agung termasuk kebaran yang besar, seperti pada percakapan di bawah ini.

NS: “Dari pengalaman anda memadamkan kebakaran, ini termasuk yang besar Pak?

SG: “Besar, termasuk besar ini karena satu gedung ada 6 lantai memanjang areanya cukup luas dan cukup besar, dan api juga dengan cepat merambat ke bagian yang lainnya” (48)

Tuturan (48) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim kuantitas. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban SG yang berlebihan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim kuantitas tidak menginginkan mitra tutur memberikan informasi yang kurang maupun berlebihan. Dalam tuturan (48) terlihat bahwa SG berlebihan dalam menjawab pertanyaan NS yang seharusnya SG cukup menjawab sampai *Besar, termasuk besar*, karena tuturan tersebut sudah memadai untuk menjawab pertanyaan NS. Namun, pada percakapan data (48) di atas, SG memberikan kontribusi berlebihan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim kuantitas.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najawa Shihab sebagai pemandu acara dan Satriadi Gunawan (Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta) pada sekmen keempat. Tuturan ini tujuannya untuk mengetahui hal-hal apa saja yang meliputi dalam investigasi. Najwa mengajukan pertanyaan tersebut kepada Satriadi. Namun, satriadi tidak mengetahui hal tersebut, sehingga terjadilah percakapan seperti di bawah ini.

NS: “Hmm jadi anda tidak dilibatkan ni oleh, oleh Puslabfor tidak dimintai nasehat juga tidak dimintai masukan sebagai orang yang sehari-hari urusan dengan api?

SG: “Tidak Mba Nana, saya hanya melakukan tugas saya dengan mengerahkan semua anggota saya untuk turun ke TKP (53)

Tuturan (53) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim kuantitas. Pelanggaran tersebut tergambar

dari jawaban SG yang berlebihan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim kuantitas tidak menginginkan mitra tutur memberikan informasi yang kurang maupun berlebihan. Dalam tuturan (53) terlihat bahwa SG berlebihan dalam menjawab pertanyaan NS yang seharusnya SG cukup menjawab sampai *Tidak Mba Nana*, karena tuturan tersebut sudah memadai untuk menjawab pertanyaan NS. Namun, pada percakapan data (53) SG menambahkan informasi berlebihan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim kuantitas.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najawa Shihab sebagai pemandu acara dan Satriadi Gunawan (Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta) pada sekmen keempat. Tuturan ini adalah tuturan lanjutan dari tuturan sebelumnya mengenai hal-hal yang dilakukan dalam investigasi. Najwa kembali bertanya kepada Satriadi. Sehingga terjadilah percakapan seperti di bawah ini.

NS: “Ada rasa gemas mungkin”

SG: “Ya, pasti ada rasa, tapi ya manakala dibutuhkan kami siap” (55)

Tuturan (55) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim kuantitas. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban SG yang berlebihan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim kuantitas tidak menginginkan mitra tutur memberikan informasi yang kurang maupun berlebihan. Dalam tuturan (55) terlihat bahwa SG berlebihan dalam menjawab pertanyaan NS yang seharusnya SG cukup menjawab sampai *Ya pasti ada rasa*, karena tuturan tersebut sudah memadai untuk menjawab pertanyaan NS. Namun, pada percakapan data (55) SG menambahkan informasi berlebihan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim kuantitas.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dan Fatmawati Lestari Fatmawati Lestari (Pakar Fire Safety FKM UI Depok Jawa Barat) Najwa kemabali bertanya kepada Fatma karena sebelumnya Najwa bertanya kepada Satriadi apakah dalam investigasi sengaja dibakar atau disabotase bisa diketahui dan Satriadi menjawab bisa, lalu Najwa bertanya hal yang sama kepada Fatmawati. Seperti percakapan di bawah ini.

NS: “Oke saya ingin ke Bu Fatma, Buk Fatma jadi dugaan sabotase kalau memang ada itu sesungguhnya bisa ditemukan dalam penyelidikan kasus-kasus seperti ini Buk?”

FL: “Betul sekali Mba Nana, jadi kita menggunakan sains dengan mengambil sampel dari tempat lokasi kejadian kebakaran kemudian dibawa ke laboratorium untuk membutikan apakah disitu ada jejak-jejak apabila terjadi sabotase misalnya jejak-jejak adakah hidrokarbon karena di sebuah perkantoran tentunya jejak hidrokarbon ini tidak ada sebagai sumber bahan bakar, kalau disitu ditemukan ada jejak-jejak hidrokarbon maka ada kemungkinan di bakar, tetapi kalau itu tidak ada maka murni karena terbakar begitu. Kemudian, disamping itu juga bisa terlihat dari material-material yang merupakan sumber dari selain bahan bakar kemudian juga dari sumbernya dari dimana lokasi pertama api itu bisa terjadi dari pola kebakarannya itu semua bisa ditemukan di investigasi dan didalam sebuah investigasi sebetulnya bisa saja melibatkan ahli ataupun melibatkan damkar atau melibatkan ekspert, witnes, atau saksi untuk bisa merangkum hasil investigasi tersebut secara lebih komprehensif” (57)

Tuturan (57) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice.

Maksim yang dilanggar adalah maksim kuantitas. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban FL yang berlebihan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim kuantitas tidak menginginkan mitra tutur memberikan informasi yang kurang maupun berlebihan. Dalam tuturan (57) terlihat bahwa FL berlebihan dalam menjawab pertanyaan NS yang seharusnya FL cukup menjawab *Betul Mba Nana*, karena tuturan tersebut sudah memadai untuk menjawab pertanyaan dari NS. Namun, pada percakapan

data (57) FL menambahkan kontribusi berlebihan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim kuantitas.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najawa Shihab sebagai pemandu acara dan Hary Setyono (Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan) pada sekmen keempat. Sebelumnya Satriadi membahas tentang standarisasi pengamanan proteksi kebakaran, lalu Najwa bertanya kepada Hary karena dia adalah seorang Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan. Kenapa sistem proteksi tersebut tidak ada di gedung Jaksa Agung. Seperti percakapan di bawah ini.

NS: “Itu karena memang sesuatu yang tidak pernah dirasa perlu atau karena lalai saja atau karena tidak sempat atau kenapa Pak?”

HS: “Ya barang kali lalai saja, mungkin sudah beranggapan oo ini masuk cagar budaya maka pengelolaannya sesuai dengan standar yang ada di dalam pengelolaan cagar budaya, nah tadi saya katakan bahwa kenapa kami mengatakan itu cagar budaya di tahun 2018 tadi yang sudah saya sampaikan nah tentunya kalau itu masuk di dalam kawasan cagar budaya saya pikir perlakuannya juga harus memenuhi standar pengamanan untuk cagar budaya dan barang kali kami sebagai yang menempati tentu juga pemerintah provinsi DKI yang seharusnya juga peduli terhadap gedung-gedung yang sudah ditetapkan masuk di dalam kawasan itu. (60)”

Tuturan (60) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim kuantitas. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban HS yang berlebihan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim kuantitas tidak menginginkan mitra tutur memberikan informasi yang kurang maupun berlebihan. Dalam tuturan (60) terlihat bahwa HS berlebihan dalam menjawab pertanyaan NS yang seharusnya HS cukup menjawab sampai *Ya barang kali lalai saja*, karena tuturan tersebut sudah memadai untuk menjawab pertanyaan NS. Namun, pada percakapan data (60) HS menambahkan tuturan berlebihan yang tidak dibutuhkan NS sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim kuantitas.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dan Barita Simanjuntak (Ketua Komisi Kejaksaan) pada sekmen keempat. Sekmen empat Najwa mewawancarai Barita melalui video *call* terkait spekulasi penanganan kasus Djoko Tjandra. Lalu Najwa menyapa Barita Seperti percakapan di bawah ini.

NS: “Yak kebakaran gedung kejaksaan memicu spekulasi terkait penanganan kasus Djoko Tjandra yang melibatkan Jaksa Pinangki, selain narasumber di studio kita sudah terhubung dengan ketua komisi kejaksaan Barita Simanjuntak, selamat malam Pak Barita.

PB: “Selamat malam Mba Nana, selamat malam Pak Arsep, Pak Mas Boyamin, Mas kurnia. (65)

Tuturan (65) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice.

Maksim yang dilanggar adalah maksim kuantitas. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban PB yang berlebihan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim kuantitas tidak menginginkan mitra tutur memberikan informasi yang kurang maupun berlebihan. Dalam tuturan (65) terlihat bahwa PB berlebihan dalam menjawab pertanyaan NS yang seharusnya PB cukup menjawab *Selamat malam Mba Nana*. Namun pada percakapan di atas, PB menambahkan ucapan *Selamat malam Pak Arsep, Pak Mas Boyamin, Mas Kurnia* yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim kuantitas.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dan Barita Simanjuntak (Ketua Komisi Kejaksaan) pada sekmen ke-lima. Sekmen lima Najwa mewawancarai Barita melalui video *call* terkait spekulasi penanganan kasus Djoko Tjandra. Lalu Najwa menyapa Barita Seperti percakapan di bawah ini.

NS: “Baik sebelum ke anda saya mau ke maki dulu Bonyamin yang sejak awal mengawal kasus ini, apa *to the point*. Jadi anda tidak percaya jaksa Pinangki bekerja sendirian pasti ada orang lain yang terlibat.

BS: “Iyalah, masak dalam konteks itu menerima suap pemberi gak ada, ini ngarangnya bukan main ini kejaksaan agung ini. (66)

Tuturan (66) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim kuantitas. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban BS yang berlebihan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim kuantitas tidak menginginkan mitra tutur memberikan informasi yang kurang maupun berlebihan. Dalam tuturan (66) terlihat bahwa BS berlebihan dalam menjawab pertanyaan NS yang seharusnya BS cukup menjawab sampai *Iyalah*. Namun pada percakapan data (66) BS menambahkan ucapan *Masak dalam konteks itu menerima suap pemberi gak ada, ini ngarangnya bukan main ini kejaksaan agung ini yang* menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim kuantitas.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dan Barita Simanjuntak (Ketua Komisi Kejaksaan) dalam sekmen ke-enam. Pada sekmen ini Najwa meminta klarifikasi kepada Barita tentang komisi independen yang belum mendapat akses untuk memeriksa Jaksa Pinangki, seperti percakapan di bawah ini.

NS: “Iyaaak saya ingin ke Pak Barita komisi kejaksaan, perlu ditekankan jadi ini komisi kejaksaan komisi independen yang memang sejak awal menerima laporan masyarakat dan berniat memeriksa Jaksa Pinangki tetapi kemudian dikatakan tidak perlu diperiksa karena sudah diperiksa internal dan sampai sekarang juga masih belum dapat akses untuk memeriksa langsung Jaksa Pinangki, begitu Pak Barita?”

PB: “Yak betul, tapi saya perlu sampaikan bahwa kami melaksanakan pasal 4 A peraturan presiden NO 18 tahun 2011 yang mengatakan wewenang komisi kejaksaan adalah menerima dan menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat tentang kinerja dan perilaku jaksa dalam melakukan tugas dan wewenangnya. Itu makanya kami mengundang untuk didengarkan penjelasan dan keterangannya kami belum masuk tahapan pemeriksaan masih meminta penjelasan dan keterangan, itu perlu di sampaikan sehingga klir buat kita bahwa komisi kejaksaan melakukan tugasnya berdasarkan peraturan presiden Mbak Nana. (74)”



Tuturan (74) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim kuantitas. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban PB yang berlebihan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim kuantitas tidak menginginkan mitra tutur memberikan informasi yang kurang maupun berlebihan. Dalam tuturan (74) terlihat bahwa PB berlebihan dalam menjawab pertanyaan NS yang seharusnya PB cukup menjawab sampai *Yak betul*, karena tuturan tersebut sudah memadai untuk menjawab pertanyaan NS. Namun pada percakapan data (74) PB menambahkan kontribusi berlebihan yang tidak dibutuhkan oleh NS yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim kuantitas.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dan Barita Simanjuntak (Ketua Komisi Kejaksaan) dalam sekmen ke-enam. Tuturan ini adalah tuturan lanjutan dari tuturan sebelumnya. Najwa kembali bertanya kepada Barita tentang akses komisi kejaksaan untuk mendapatkan hasil laporan, dan tidak ada hal yang ditutupi oleh Jaksa Agung, seperti percakapan di bawah ini.

NS: “Pak Barita, apakah mendapatkan akses itu, karena tadi di awal Pak Mahfud MD mengatakan bahwa seharusnya komisi kejaksaan bisa juga mendapatkan akses tidak perlu menunggu 2 minggu untuk mendapatkan laporan, apakah memang merasa ada ketidak ada tertupi kejaksaan agung tidak membuka ke komisi kejaksaan, betulkah kesan itu?”

PB: “Iya, karena pertama kami mengundang oknum jaksa P itu tanggal 27 juli tidak datang tanpa alasan tanggal 30 juli kami undang kedua juga tidak datang. Namun kami mendapatkan surat dari atasannya bahwa karena pemeriksaan pengawasan sudah berjalan sehingga artinya komisi kejaksaan tidak perlu memeriksa lagi. Itu sebabnya sesuai dengan pasal 4 C peraturan presiden kami meminta laporan hasil pemeriksaannya sebab itu wewenang komisi kalau kami tidak bisa periksa. Kasih dong mana LHP nya karena LHP ini diperlukan supaya kami bisa menjawab ini maki, Mas Bonyamin inikan kejar terus ni, mana hak dia itu sebagai pelapor harus kita sampaikan untuk memberi jawaban itu kami harus membutuhkan dokumen itu.  
(75)

Tuturan (75) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim kuantitas. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban PB yang berlebihan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim kuantitas tidak menginginkan mitra tutur memberikan informasi yang kurang maupun berlebihan. Dalam tuturan (75) terlihat bahwa PB berlebihan dalam menjawab pertanyaan NS yang seharusnya PB cukup menjawab sampai *Iya*, karena tuturan tersebut sudah memadai untuk menjawab pertanyaan dari NS. Namun, pada percakapan data (75) PB menambahkan kontribusi berlebihan yang tidak dibutuhkan oleh NS yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim kuantitas.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dan Hary Setyono (Ketua Penerangan Hukum Kejaksaan Agung) dalam sekmen tujuh. Pada sekmen ini Bonyamin membahas tentang pengaduannya terhadap Jaksa Agung yang belum juga ditindak lanjuti. Kemudian, Najwa sebagai pemandu acara mengajukan pertanyaan kepada Hary Setyono karena ia seorang KEPUSPENKUM KEJAKSAAN AGUNG, seperti percakapan di bawah ini.

NS: “Oke, apakah akan ada rencana memeriksa internal kejaksaan sendiri, apakah misalnya akan memeriksa jaksa agungnya sendiri karena namanya disebut-sebut akan memeriksa mantan jam intel Janmarinka karena namanya disebut-sebut?”

HS: “Yak, sebagaimana kita ketahui bahwa sudah ada penyidikan terhadap jaksa PSM tentu penyidikan akan lebih kuat apakah diperoleh dari keterangan para saksi ataupun tersangka untuk mengait ke masalah itu oleh karena itu ini sudah cukup kuat sudah dilakukan penyidikan saya kira itu lebih dipertekankan. (81)”

Tuturan (81) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim kuantitas. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban HS yang berlebihan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim kuantitas tidak menginginkan mitra tutur memberikan informasi yang kurang maupun berlebihan.

Dalam tuturan (81) terlihat bahwa HS berlebihan dalam menjawab pertanyaan NS yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim kuantitas.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dan Barita Simanjuntak (Ketua Komisi Kejaksaan) dalam sekmen tujuh. Peristiwa tutur ini terjadi saat Najwa sebagai pemandu acara mengatakan bahwa waktu program Mata Najwa telah habis dan mengucapkan salam kepada Barita sebagai salam penutup, seperti percakapan di bawah ini.

NS: “Mohon maaf Pak Barita waktunya sudah habis kita juga akan mendorong supaya komisi kejaksaan bisa dapat akses untuk memeriksa karena sekali lagi ini komisi independen yang perlu untuk mewakili publik menjawab berbagai spekulasi yang ada. Selamat bekerja Pak Barita kita akan dorong terus supaya komisi kejaksaan terus”

PB: “Terimakasih, sip selamat kerja kembali Nana dan semuanya” (83)

Tuturan (83) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim kuantitas. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban PB yang berlebihan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim kuantitas tidak menginginkan mitra tutur memberikan informasi yang kurang maupun berlebihan. Dalam tuturan (83) terlihat bahwa PB berlebihan dalam menjawab pertanyaan NS yang seharusnya HS cukup menjawab *Terima kasih*. Namun pada percakapan di atas, HS menambahkan ucapan *Sip selamat kerja kembali Nana dan semuanya* yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim kuantitas.

#### 4.1.2.2 Bentuk-Bentuk Pelanggaran Maksim Kualitas

Maksim kualitas menginginkan supaya partisipan menyampaikan informasi sesuai dengan faktanya. Kontribusi yang diberikan oleh peserta percakapan hendaknya disertai dengan bukti-bukti yang ada. Bertutur tanpa adanya bukti yang memadai dapat dikatakan telah melanggar maksim kualitas.

Tuturan antara pemandu acara dan narasumber dalam program Mata Najwa pada tema *Bara di Markas Jaksa* di Trans 7 yang telah penulis kumpulkan datanya, maka penulis akan klasifikasikan tuturan yang termasuk ke dalam pelanggaran maksim kualitas sebagai berikut.

Konteks : Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dan Mahfud MD dalam sekmen satu. Pada segmen ini Najwa Shihab sebagai pemandu acara mengajukan pertanyaan kepada Mahfud MD tentang kejanggalan-kejanggalan yang terjadi pada kasus Novel Baswedan lalu Mahfud menjawab, dan kemudian direspons kembali oleh Najwa, sehingga terjadilah percakapan seperti dibawah ini.

MM: “Ya itulah, itulah kalau orang berbohong orang akan tidak percaya silahkan, tetapi kalau saya ndak akan berbohong, saya katakan tidak mungkin bisa maksudnya, tidak mungkin sekarang ini orang pemerintah berbohong artinya tidak mungkin bisa, lalu orang bisa begitu percaya aja kepada kebohongan itu, tetap itu akan menjadi perdebatan puplik kalau mau berbohong, gitu kan”

NS: “Pak Mahfud tapi lagi-lagi kalaupun misalnya tidak mungkin bisa berbohong dalam beberapa kasus kita lihat mungkin saja bukan berbohong tetapi menutup mata atas kejanggalan yang jelas-jelas nyata terlihat Pak, sekali lagi saya mengambil contoh kasus Novel Baswedan, tidak berbohong mungkin tetapi yang ada di depan mata tidak diakui” (13)

Tuturan (13) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim kualitas. Pelanggaran tersebut tergambar dari pernyataan NS yang tidak sebenarnya. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim kualitas mewajibkan setiap peserta percakapan mengatakan hal yang sebenarnya,

didasarkan pada bukti-bukti yang memadai. Pernyataan yang diberikan NS dalam data (13) *Kita lihat mungkin saja bukan berbohong tetapi menutup mata* merupakan bentuk pernyataan yang tidak sebenarnya sebab tidak mungkin dalam menyelidiki kasus dengan keadaan menutup mata. Sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim kualitas. Menutup mata yang dimaksud NS dalam tuturan (13) adalah *Acuh* atau *tidak ingin tahu*.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Mahfud MD (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Ham) dan Najwa Shihab sebagai pemandu acara. Dalam sekmen dua. Pada sekmen ini topik yang dibahas adalah tentang persetujuan Mahfud MD untuk mengundang KPK dalam melakukan penyelidikan. Sebelumnya Bonyamin meminta untuk persetujuan Mahfud langsung diimplementasikan dan menghubungi Jaksa Agung, lalu di respons oleh Mahfud dan Najwa, seperti percakapan di bawah ini.

MM: “Itu, tu tinggal cara saya hahahhhahhaa”

NS: “Yang jelas, ini sudah terbuka dan disaksikan jutaan orang jadi seharusnya ini sudah” (26)

Tuturan (26) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim kualitas. Pelanggaran tersebut tergambar dari pernyataan NS menyebutkan yang tidak sebenarnya yaitu tuturan *Disaksikan jutaan orang* pada data (26). Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim kualitas mewajibkan setiap peserta percakapan mengatakan hal yang sebenarnya, didasarkan pada bukti-bukti yang memadai. Pernyataan yang diberikan NS dalam data (26) merupakan pernyataan yang tidak sebenarnya, tidak adanya bukti yang menunjukkan bahwa yang menyaksikan acara tersebut mencapai jutaan orang sehingga menyebabkan pelanggaran maksim kualitas.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Mahfud MD (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Ham) dan Najwa Shihab sebagai pemandu acara. Dalam sekmen dua. Pada sekmen ini topik yang dibahas adalah tentang persetujuan Mahfud MD untuk mengundang KPK dalam melakukan penyelidikan. Sebelumnya Bonyamin meminta untuk persetujuan Mahfud langsung diimplementasikan dan menghubungi Jaksa Agung, lalu di respons oleh Mahfud dan Najwa, seperti percakapan di bawah ini.

NS: “Yang jelas, ini sudah terbuka dan disaksikan jutaan orang jadi seharusnya ini sudah”

MM: “Iya disaksikan jutaan orang dan bisa disampaikan juga oleh Pak Hari kan” (27)

Tuturan (27) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim kualitas. Pelanggaran tersebut tergambar dari respons MM menyebutkan hal yang tidak sebenarnya yaitu tuturan *Disaksikan jutaan orang* pada data (27). Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim kualitas mewajibkan setiap peserta percakapan mengatakan hal yang sebenarnya, didasarkan pada bukti-bukti yang memadai. Respons yang diberikan MM dalam data (27) merupakan pernyataan yang tidak sebenarnya, tidak adanya bukti yang menunjukkan bahwa yang menyaksikan acara tersebut mencapai jutaan orang. Sehingga menyebabkan pelanggaran terhadap maksim kualitas.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Mahfud MD (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Ham) dan Najwa Shihab sebagai pemandu acara. Dalam sekmen dua. Pada sekmen ini topik yang dibahas adalah tentang persetujuan Mahfud MD untuk mengundang KPK dalam melakukan penyelidikan. Sebelumnya Bonyamin meminta untuk persetujuan Mahfud langsung diimplementasikan dan menghubungi Jaksa Agung, lalu di respons oleh Mahfud dan Najwa, seperti percakapan di bawah ini.

MM: “Iya disaksikan jutaan orang dan bisa disampaikan juga oleh Pak Hari kan”

NS: “Jaksa agung yang menyaksikan Mata Najwa saya tau sedang nonton jadi Pak Jaksa Agung tolong di dengar itu Pak Mahfud MD. Pak Mahfud” (28)

Tuturan (28) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim kualitas. Pelanggaran tersebut tergambar dari respons NS menyebutkan hal yang tidak sebenarnya yaitu tuturan *Jaksa Agung yang menyaksikan Mata Najwa saya tau sedang nonton* pada data (28). Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim kualitas mewajibkan setiap peserta percakapan mengatakan hal yang sebenarnya, didasarkan pada bukti-bukti yang memadai. Respons yang diberikan NS dalam data (28) merupakan pernyataan yang tidak sebenarnya, tidak adanya bukti yang menunjukkan bahwa Jaksa Agung juga nonton Mata Najwa. Sehingga menyebabkan pelanggaran terhadap maksim kualitas.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Mahfud MD (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Ham) dan Najwa Shihab sebagai pemandu acara. Dalam sekmen dua. Pada sekmen ini topik yang dibahas adalah tentang persetujuan Mahfud MD untuk mengundang KPK dalam melakukan penyelidikan. Sebelumnya Bonyamin meminta untuk persetujuan Mahfud langsung diimplementasikan dan menghubungi Jaksa Agung, lalu di respons oleh Mahfud dan Najwa, seperti percakapan di bawah ini.

NS: “Tapi seharusnya apakah bisa jeruk makan jeruk pak?”

MM: “Ndak papa jeruk makan jeruk (hahaha)” (32)

Tuturan (32) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim kualitas. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban MM menyebutkan yang tidak sebenarnya. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim kualitas mewajibkan setiap peserta percakapan mengatakan hal yang sebenarnya,

didasarkan pada bukti-bukti yang memadai. Jawaban yang diberikan MM dalam data (32) *Ndak papa jeruk makan jeruk* merupakan jawaban yang tidak sebenarnya, mana bisa jeruk makan jeruk. Hal tersebut menyebabkan pelanggaran maksim kualitas.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dan Bonyamin Saiman (Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) dalam sekmen lima. Pada sekmen ini Bonyamin mengatakan tentang kepandaian Pinangki mancatut banyak orang. Lalu Najwa mengajukan pertanyaan kepada Bonyamin mengenai Pernyataan yang ia katakan, seperti percakapan di bawah ini.

NS: “Mencatut atau,”

BS: “Ya itu nanti bisa anu dimaknai ke kanan dan ke kiri gitu” (69)

Tuturan (69) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim kualitas. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban BS menyebutkan yang tidak sebenarnya. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim kualitas mewajibkan setiap peserta percakapan mengatakan hal yang sebenarnya, didasarkan pada bukti-bukti yang memadai. Jawaban yang diberikan BS dalam data (69) *Bisa anu dimaknai ke kanan dan ke kiri gitu*, merupakan jawaban yang tidak sebenarnya, mana bisa kasus korupsi dimaknai ke kanan dan ke kiri. Hal tersebut menyebabkan pelanggaran terhadap maksim kualitas.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Hary Setyono (kepala pusat penerangan hukum kejaung) dan Bonyamin Saiman (Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) dalam sekmen lima. Pada sekmen ini Hary meminta kesempatan kepada Najwa untuk menjawab pertanyaan dari Kurnia yang bertanya tentang bagaimana puplick akan percaya jika Jaksa Agung tidak menunjukkan upaya dalam penegakan hukum. Setelah menjawab pertanyaan dari Kurnia. Kemudian, Bonyamin juga mengajukan pertanyaan kepada Hary seperti percakapan di bawah ini.



HS: “Nana boleh saya jawab ya, saya belum selesai dalam penanganan perkara itukan bai proses tgl 4 diserahkan bidang pengawasan tgl 7 kalau tidak salah penyidikan tgl 11 ditangkap 12 ditahan. Kemudian untuk memanggil memeriksa seseorang siapa kawan berbuat kemudian pemberinya siapa inikan bai proses artinya apa ketika seseorang di panggil menggunakan haknya tidak adil tentukan bai proses dan hari ini kita periksa 3 orang termasuk Djoko Tjandra kemudian juga dari Garuda juga dari salah satu diluar mobil BMW oleh karena itu tolong dukung kami berikan masukan kami dan kami akan buktikan itu.

BS: “Misalnya berandai-andai Pak, berandai inikan sebenarnya bisa jadi penyidiknya pengen cepat terus kemudian ada tangan-tangan tidak terlihat atau tangan-tangan yang lebih kuat meminta untuk tidak cepat-cepat ada gak Pak? Ini” (73)

Tuturan (73) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim kualitas. Pelanggaran tersebut tergambar dari pernyataan BS menyebutkan yang tidak sebenarnya. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim kualitas mewajibkan setiap peserta percakapan mengatakan hal yang sebenarnya, didasarkan pada bukti-bukti yang memadai. Pernyataan yang diberikan BS dalam data (73) *Tangan-tangan tidak terlihat atau tangan-tangan yang lebih kuat*, merupakan respons yang tidak sebenarnya, mana ada tangan yang tidak terlihat semua tangan pasti terlihat. Hal tersebut menyebabkan pelanggaran terhadap maksim kualitas.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Hary Setyono (kepala pusat penerangan hukum kejakung) dan Kurnia Ramadhana (Peneliti ICW) dalam sekmen tujuh. Peristiwa tuturan ini sebelumnya Najwa sebagai pemandu acara mengajukan pertanyaan kepada Hary tentang sikap resmi kejaksaan agung ketika nama pimpinan tertingginya disebut-sebut terlibat dalam kasus korupsi yang langsung di jawab oleh Hary. Kemudian Kurniawan melontarkan *steatmen*, seperti percakapan di bawah ini.

HS: “Nah itu tadi tergantung pimpinan dalam arti Pak Barita Simanjuntak untuk berkomunikasi”

KR: “Jadi semua menutup diri Mbak Nana, ada menutup diri tentang komisi kejaksaan, tidak pernah mengundang KPK untuk melakukan gelar perkara jadi klir sekali kejaksaan agung ingin melokalisir kasus jaksa Piangki Sirna Malasari” (80)

Tuturan (80) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim kualitas. Pelanggaran tersebut tergambar dari pernyataan KR menyebutkan yang tidak sebenarnya. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim kualitas mewajibkan setiap peserta percakapan mengatakan hal yang sebenarnya, didasarkan pada bukti-bukti yang memadai. Pernyataan yang diberikan KR dalam data (80) *Jadi semua menutup diri Mbak Nana, ada menutup diri tentang komisi kejaksaan*, merupakan respons yang tidak sebenarnya, apa yang dimaksud menutup diri. Hal tersebut menyebabkan pelanggaran terhadap maksim kualitas.

#### **4.1.2.3 Bentuk-Bentuk Pelanggaran Maksim Relevansi**

Maksim relevansi menginginkan supaya partisipan memberikan kontribusi yang sesuai dengan topik pembicaraan. Tuturan yang disampaikan harus relevan dengan apa yang dibicarakan apabila tuturan yang disampaikan tidak sesuai dengan apa yang sedang dibicarakan maka dapat dikatakan telah melanggar maksim relevansi. Tuturan antara pemandu acara dan narasumber dalam program Mata Najwa *Bara di Markas Jaksa* di trans 7 yang telah penulis kumpulkan datanya, lalu penulis akan mengklasifikasi tuturan yang tergolong ke dalam pelanggaran maksim relevansi sebagai berikut.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dan Muhammad Mahfud MD seorang (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Ham) dalam sekmen satu. Tuturan ini bermula saat Najwa memberi pertanyaan tentang argumen yang diyakini Mahfud karena bisa saja Argumennya itu salah, adapun percakapannya seperti di bawah ini.

NS: “Pak Mahfud karena kemudiannya bisa saja, kemudian argumennya jadi Pak Mahfud yakin hanya sebatas pernyataan sepihak yang dikeluarkan oleh pihak Kejaksaan Agung”

MM: “Saya sudah katakan Pak gitu, saya katakan Pak kita nda bisa berbohong sekarang, nda mungkin berbohong ke masyarakat kita berbohong sekarang besok lusa akan dibuka oleh Bonyamin itu saya bilang. Oleh sebab itu jangan main-main RSM sekarang tu lebih canggih, Bonyamin tu suka menghubungi istri-istri Jaksa itu minta fotonya hahaha sehingga foto-foto yang rahasia dia punya tu. Saya bilang jangan main-main.” (5)

Tuturan (5) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim relevansi. Pelanggaran tersebut tergambar dari respons MM pada tuturan (5) bukanlah kontribusi yang relevan dengan pernyataan NS. Kontribusi MM justru tidak sejalan dengan apa yang disampaikan oleh NS. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim relevansi menginginkan supaya partisipan memberikan kontribusi yang sesuai dengan topik pembicaraan. Respons MM tersebut tetap bisa dikatakan relevan dengan pernyataan NS yaitu untuk menjelaskan keyakinannya atas argumen yang ia lontarkan. Namun, Respons MM dalam data (5) tidak ditemukan jawaban tentang keyakinan atas argumen yang ia berikan, sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim relevansi.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dan Mahfud MD (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Ham) dalam sekmen satu. Peristiwa tutur ini bermula saat Najwa bertanya tentang ketidak wajarannya terbakarnya gedung Jaksa Agung, seperti percakapan di bawah ini.

NS: “Pak...Pak Mahfud, iya. Sebelum masuk ke bohong berbohong karena itu juga menarik, tapi saya ingat Andakan sempat mengatakan terbuka kaget bahwa kebakarannya besar sekali, cepat sekali, jadi jujur Pak Mahfud ke saya malam ini memang adakan di benak Pak Mahfud? mungkin saja ada ketidak wajaran dari bara yang muncul di markas Jaksa ini”

MM: “Oo begini, saya katakan masyarakat jangan berspekulasi kan itukan ada di TV ya, spekulasi apa Pak, spekulasi yang saya baca di medsos itu, itu nda masuk akal gitu, lalu media itu banyak yang menulis kata Mahfud MD terbakarnya nda masuk akal, padahal saya mengutip medsos, yang berkembang ketika itu masyarakat mengatakan di medsos itu, ini ndak masuk akal kok dari lantai enam turun ke-empat turun ke-lima, masa kalo listrik separah itu, itu kata masyarakat. Oleh sebab itu saya katakan jangan berspekulasi lah, spekulasi apa, ya itu yang ada di masyarakat bahwa kok turun dari lantai enam ke-empat ke-tiga. (6)

Tuturan (6) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim relevansi. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban MM pada tuturan (6) bukanlah kontribusi yang relevan dengan tuturan yang dikemukakan oleh NS. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim relevansi menginginkan supaya partisipan memberikan kontribusi yang sesuai dengan topik pembicaraan. Dalam tuturan data (6) MM memberikan jawaban yang tidak relevan dengan pertanyaan NS, terlihat pada tuturan *Oo begini, saya katakan masyarakat jangan berspekulasi kan itukan ada di TV ya, spekulasi apa Pak, spekulasi yang saya baca di medsos itu, itu nda masuk akal gitu, lalu media itu banyak yang menulis kata Mahfud MD terbakarnya nda masuk akal, padahal saya mengutip medsos, yang berkembang ketika itu masyarakat mengatakan di medsos itu, ini ndak masuk akal kok dari lantai enam turun ke-empat turun ke-lima, masa kalo listrik separah itu, itu kata masyarakat. Oleh sebab itu saya katakan jangan berspekulasi lah, spekulasi apa, ya itu yang ada di masyarakat*

*bahwa kok turun dari lantai enam ke-empat ke-tiga*, Jawaban MM tersebut tetap bisa dikatakan relevan dengan pertanyaan NS yaitu untuk menjelaskan kecurigaan terhadap kebakaran yang terjadi. Namun, tuturan MM dalam data (6) tidak ditemukan jawaban tentang ketidak wajarannya kebakaran tersebut, sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim relevansi.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dan Mahfud MD (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Ham) dalam sekmen dua. Sekmen ini Najwa kembali menghubungi Mahfud melalui video *call*. Lalu Najwa mengajukan pertanyaan kepada Mahfud tentang pernyataan Mahfud yang menyebutkan bahwa pemerintah tidak mungkin berbohong. Seperti percakapan di bawah ini.

NS: “Bara di markas Jaksa, saya akan kembali menghubungi menkopulhukam bapak Muhammad Mahfud MD, Pak Mahfud anda berkali-kali menyebutkan tidak mungkin pemerintah menyembunyikan sesuatu dalam situasi seperti ini, pertanyaannya Pak, pemerintah itu maksudnya presiden Jokowi, atau menkopulhukamnya Pak Mahfud MD atau aparat-aparat dibawahnya Pak?”

MM: “Semua menurut saya kalau pemerintah main-main, kalau pemerintah berani berarti dia melanggar sebuah ketidak mungkinan dia lakukan, karena tidak ada yang disembunyikan sekarang ini, oleh sebab itu jangan berspekulasi karena kalau anda berbohong hari ini menyembunyikan sesuatu anda tidak akan bisa tidur mencari alasan baru untuk besok, oleh sebab itu kalau saya katakan saja bahwa tidak mungkin dan yang saya katakan yang saya yakini hari ini, karena seumpama saya apa, misalnya besok harus ketemu orang lagi ya saya tidak mencari kebohongan baru, jadi sekarang siapapun pejabat jangan coba berbohonglah, nanti akan ketahuan” (11)

Tuturan (11) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim relevansi. Pelanggaran tersebut tergambar dari respons MM yang kurang sesuai atau kurang relevan dengan pertanyaan yang dikemukakan oleh NS. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim relevansi menginginkan supaya

partisipasi memberikan kontribusi yang sesuai dengan topik pembicaraan. Dalam tuturan data (11) MM memberikan jawaban melenceng dari pertanyaan NS, terlihat pada data tuturan (11) *Semua menurut saya kalau pemerintah main-main, kalau pemerintah berani berarti dia melanggar sebuah ketidak mungkinan dia lakukan, karena tidak ada yang disembunyikan sekarang ini, oleh sebab itu jangan berspekulasi karena kalau anda berbohong hari ini.* Respons MM tersebut tetap bisa dikatakan relevan dengan pertanyaan NS yaitu untuk menjelaskan siapa yang berbohong. Namun, tuturan MM dalam data (11) tidak ditemukan jawaban dari pertanyaan NS, sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim relevansi.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dan Mahfud MD (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Ham) dalam sekmen dua. Peristiwa tutur ini bermula saat Najwa merespons jawaban Mahfud tentang bohong-berbohong dan penilaian puplick terhadap kasus-kasus yang pernah terjadi sebelumnya. Kemudian, Najwa bertanya kepada Mahfud Seperti percakapan di bawah ini.

NS: “Akhirnya selesai habis di spekulasi puplik Pak dan peran negara yang seharusnya bisa lebih jauh dari situ kita tidak lihat apakah ini akan berulang lagi dikasus ini Pak Mahfud?”

MM: “Kalau saya tidak akan berakhir di kasus ini saya kan sakarang koordinator, ini mentri koordinator saya akan mengkoordinir kemana arahnya perkara ini saya akan pertanggungjawabkan ke puplik, sehingga nantik kalau terpaksa loh kok di bawah beda saya akan beda ndak papa, kalau memang ada yang akan berbohong dibawah. (14)

Tuturan (14) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim relevansi. Pelanggaran tersebut tergambar dari respons MM pada tuturan (14) bukanlah kontribusi yang relevan dengan pertanyaan yang diberikan oleh NS. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. NS hanya bertanya tentang apakah kasus korupsi Djoko

Thjandra akan berakhir sama dengan kasus-kasus yang sebelumnya pernah terjadi bukan bertanya tentang dirinya. Dalam tuturan data (14) MM memberikan jawaban melenceng dari pertanyaan NS, terlihat pada data tuturan (14) *Kalau saya tidak akan berakhir di kasus ini saya kan sakarang koordinator, ini menteri koordinator saya akan mengkoordinir kemana arahnya perkara ini saya akan pertanggungjawabkan ke puplik*. Jawaban MM tersebut tetap bisa dikatakan relevan dengan pertanyaan NS yaitu untuk menjelaskan peran negara terhadap kasus-kasus yang terjadi. Namun, tuturan MM dalam data (14) tidak ditemukan jawaban dari pertanyaan NS, sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim relevansi. Grice menyatakan bahwa dalam maksim relevansi menginginkan supaya partisipan memberikan kontribusi yang sesuai dengan topik pembicaraan.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dan Mahfud MD (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Ham) dalam sekmen dua. Peristiwa tutur ini bermula saat Najwa mengajukan pertanyaan kepada Mahfud tentang apakah puplik harus percaya begitu saja kejaksan berani memeriksa keluarganya sendiri, kemudian Najwa kembali mengajukan pertanyaan pendapat Mahfud sebagai Kemenpolhukam. Seperti percakapan di bawah ini.

NS: “Kalau Pak Mahfud sendiri bagaimana saya bertanya pendapat anda sebagai kemenkopulhukam Pak, apakah anda memang merasa kejaksan tidak bisa memeriksa keluarganya sendiri apalagi kalau mungkin memeriksa Jaksa Agungnya langsung?”

MM: “Ndak itu tidak fer, kalau saya sebagai atasan saya harus bicara atas nama kesatuan pemerintah tapi saya orang di luar KPK kalau KPK mau ambil, ambil” (17)

Tuturan (17) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim relevansi. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban MM pada tuturan (17) bukanlah jawaban yang relevan dengan pertanyaan yang diberikan oleh NS. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip

kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim relevansi menginginkan supaya partisipan memberikan kontribusi yang sesuai dengan topik pembicaraan. Dalam tuturan data (17) MM memberikan jawaban melenceng dari pertanyaan NS, terlihat pada data tuturan (17) *Ndak itu tidak fer, kalau saya sebagai atasan saya harus bicara atas nama kesatuan pemerintah tapi saya orang di luar KPK kalau KPK mau ambil, ambil*. Jawaban MM tersebut tetap bisa dikatakan relevan dengan pertanyaan NS yaitu tentang pendapat MM sebagai Menkopulhukam. Namun, tuturan MM dalam data (17) tidak ditemukan jawaban dari pertanyaan NS, sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim relevansi.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dan Kurnia Ramadhana (Peneliti ICW) dalam sekmen dua. Peristiwa tutur ini bermula saat Najwa mengajukan pertanyaan kepada Kurnia terkait pernyataan Mahfud MD. Seperti percakapan di bawah ini.

NS: “Tadi Pak Mahfud mengatakan kewenangan itu ada pada KPK, apakah anda berharap menkopulhukam bisa, karena tadi katanya tidak boleh ni”

KR: “Saya akan masuk disini sekaligus mengkritisi kejaksaan agung, Mbak Nana pekan lalu bareskrim secara terbuka mengundang KPK untuk mengadakan gelar perkara tapi Kejaksaan Agung saya tidak tau, saya belum pernah melihat ada pemberitaan kejaksaan agung mengundang KPK untuk gelar perkara, dan sampai hari ini pun kejaksaan agung” (19)

Tuturan (19) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim relevansi. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban KR pada tuturan (19) bukanlah jawaban yang relevan dengan pertanyaan yang diberikan oleh NS. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim relevansi menginginkan supaya partisipan memberikan kontribusi yang sesuai dengan topik



pembicaraan. Dalam tuturan data (19) KR memberikan jawaban melenceng dari pertanyaan NS, terlihat pada data tuturan (19) *Saya akan masuk disini sekaligus mengkritisi kejaksaan agung, Mbak Nana pekan lalu bareskrim secara terbuka mengundang KPK untuk mengadakan gelar perkara tapi kejaksaan agung saya tidak tau.* Jawaban KR tersebut tetap bisa dikatakan relevan dengan pertanyaan NS yaitu tentang harapan KR menkopulhukam untuk mengundang KPK. Namun, tuturan KR dalam data (19) tidak ditemukan jawaban dari pertanyaan NS, sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim relevansi.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Bonyamin Saiman (Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) dan Mahfud Md (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Ham) dalam sekmen dua. Peristiwa tutur ini bermula saat Bonyamin meminta Mahfud untuk mengundang KPK dalam menyelidiki kasus korupsi Djoko Tjandra lalu Mahfud merespons sambil tertawa, seperti percakapan di bawah ini.

BS: “Persetujuan ini mohon di implementasikan habis ini atau besok mengontak Jaksa Agung eh tolong dong diajak ajalah KPK begitu”

MM: “Itu, tu tinggal cara saya hahahhhahhaa” (24)

Tuturan (24) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim relevansi. Pelanggaran tersebut tergambar dari pernyataan MM pada tuturan (24) yang tidak cocok dengan pernyataan yang disampaikan oleh BS. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim relevansi menginginkan supaya partisipan memberikan kontribusi yang sesuai dengan topik pembicaraan. Dalam tuturan (24) *Itu, tu tinggal cara saya hahahhhahhaa,* yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim relevansi.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dan Bonyamin Saiman (Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) dalam sekmen dua. Peristiwa tutur ini bermula saat Najwa merespons

pernyataan yang dilontarkan oleh Mahfud yaitu tentang persetujuan Mahfud untuk mengundang KPK dalam menyelidiki kasus korupsi Djoko Tjandra. Kemudian, Bonyamin melontarkan pernyataan seperti di bawah ini.

NS: “Jaksa Agung yang menyaksikan Mata Najwa saya tau sedang nonton jadi Pak Jaksa Agung tolong di dengar itu Pak Mahfud MD. Pak Mahfud”

BS: “Jadi ini model orang solo ujung ujungnya nuntutnya juga, ujungnya ya nusuk juga Pak Mahfud jadi tolong dipahami.” (29)

Tuturan (29) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice.

Maksim yang dilanggar adalah maksim relevansi. Pelanggaran tersebut tergambar dari pernyataan BS pada tuturan (29) yang tidak relevan dengan topik pembicaraan yang sedang diperbincangkan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim relevansi menginginkan supaya partisipan memberikan kontribusi yang sesuai dengan topik pembicaraan. Dalam data tuturan (29) terlihat bahwa BS melenceng dari topik pembahasan, sebelumnya NS dan MM membahas tentang pengimplikasian mengontak jaksa agung untuk mengajak KPK dalam perkara yang sedang terjadi, namun BS melontarkan pernyataan yang tidak berkaitan dengan pembicaraan sebelumnya yaitu *Jadi ini model orang solo ujung ujungnya nuntutnya juga, ujungnya ya nusuk juga Pak Mahfud jadi tolong dipahami*, yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim relevansi.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Mahfud MD (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Ham) dan Najwa Shihab sebagai pemandu acara dalam sekmen dua. Peristiwa tutur ini bermula saat Mahfud menjawab pertanyaan Najwa yaitu tentang apakah Mahfud melihat kejaksaan akan berani memeriksa jaksa agung atas kasus Djoko Tjandra. Kemudian, Najwa melontarkan tuturan seperti percakapan di bawah ini.

MM: “Itu sudah substansi perkara saya ndak boleh masuk tanyakan ke Pak Hari Setiyono aja ada di situ, saya ndak boleh masuk ke situ, karena Nana kan tau sendiri”

NS: “Tapi seharusnya apakah bisa jeruk makan jeruk pak?” (31)

Tuturan (31) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim relevansi. Pelanggaran tersebut tergambar dari pertanyaan NS pada data (31) yang tidak relevan dengan topik pembahasan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim relevansi menginginkan supaya partisipan memberikan kontribusi yang sesuai dengan topik pembicaraan. Dalam data tuturan (31) *Tapi seharusnya apakah bisa jeruk makan jeruk pak*, tidak berkaitan dengan pembicaraan sebelumnya yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim relevansi.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Mahfud MD (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Ham) dan Najwa Shihab sebagai pemandu acara dalam sekmen dua. Peristiwa tutur ini bermula saat Najwa melontarkan tuturan yang tidak sesuai dengan topik pembicaraan yaitu tentang apakah bisa jeruk makan jeruk, lalu Mahfud merespons Najwa dengan candaan sambil tertawa. Kemudian Najwa kembali memberikan pertanyaan kepada Mahfud seperti percakapan di bawah ini.

NS: “Yakin ya Pak bisa”

MM: “Pertanyaannya terlalu main-main sih”(34)

Tuturan (34) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim relevansi. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban MM pada data (34) yang tidak relevan dengan topik pembahasan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim relevansi menginginkan supaya partisipan memberikan kontribusi yang sesuai dengan topik pembicaraan. Dalam data tuturan (34) *Pertanyaannya terlalu main-main sih*, tidak berkaitan dengan pembicaraan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim relevansi.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Mahfud MD (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Ham) dan Najwa Shihab sebagai pemandu acara dalam sekmen dua. Peristiwa tutur ini bermula saat Najwa mengajukan pertanyaan tentang pemeriksaan kasus Jaksa Agung yang berkaitan dengan kasus Djoko Tjandra, seperti percakapan di bawah ini.

NS: “Kita masih bisa percaya bahwa tidak akan sungkan-sungkan anak buah Jaksa Agung memeriksa bos besarnya untuk perkara yang dikaitkan dengan Djoko Tjandra Pak?”

MM: “Seluruh rakyat Indonesia mulai dari presiden sama rakyat kecil sampai rakyat kecil sama pikirannya semua harus terbuka saya tadi baru bertemu presiden” (35)

Tuturan (35) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice.

Maksim yang dilanggar adalah maksim relevansi. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban MM pada data (35) yang tidak relevan dengan topik pembahasan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim relevansi menginginkan supaya partisipan memberikan kontribusi yang sesuai dengan topik pembicaraan. Dalam data tuturan (35) *Seluruh rakyat Indonesia mulai dari presiden sama rakyat kecil sampai rakyat kecil sama pikirannya semua harus terbuka saya tadi baru bertemu presiden*, tidak berkaitan dengan pembicaraan. Jawaban MM tetap bisa dikatakan relevan. Namun, dari jawaban MM tersebut pertanyaan NS masih belum terjawab yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim relevansi.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Mahfud MD (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Ham) dan Najwa Shihab sebagai pemandu acara dalam sekmen dua. Peristiwa tutur ini terjadi saat Najwa akan mengakhiri perbincangannya dengan Mahfud sebelumnya Najwa mengucapkan terima kasih kepada Mahfud, kemudian direspons oleh Mahfud seperti percakapan di bawah ini.

MM: “Alhamdulillah sehat, terimakasih Najwa dan semuanya juga sehat-sehat”

NS: “Kita tunggu bagaimana jeruk makan jeruknya ya Pak ya” (39)

Tuturan (39) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim relevansi. Pelanggaran tersebut tergambar dari pernyataan NS pada data (39) yang tidak relevan dengan topik pembahasan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim relevansi menginginkan supaya partisipan memberikan kontribusi yang sesuai dengan topik pembicaraan. Dalam data tuturan (39) *Kita tunggu bagaimana jeruk makan jeruknya ya Pak ya* tidak berkaitan dengan pembicaraan sebelumnya yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim relevansi.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Mahfud MD (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Ham) dan Najwa Shihab sebagai pemandu acara dalam sekmen dua. Peristiwa tutur ini terjadi saat Najwa akan mengakhiri perbincangannya dengan Mahfud, sebelum perbincangan berakhir Najwa mengatakan tentang jeruk makan jeruk, seperti percakapan di bawah ini.

NS: “Kita tunggu bagaimana jeruk makan jeruknya ya Pak ya”

MM: “Salam Abi Quraish Shibab ya” (40)

Tuturan (40) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim relevansi. Pelanggaran tersebut tergambar dari ungkapan MM pada data (40) yang tidak relevan dengan topik pembahasan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim relevansi menginginkan supaya partisipan memberikan kontribusi yang sesuai dengan topik pembicaraan. Dalam data tuturan (40) *Salam Abi Quraish Shibab ya*, tidak berkaitan dengan pembicaraan sebelumnya yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim relevansi.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dan Satriadi Gunawan (Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta) dalam sekmen tiga. Peristiwa tutur ini terjadi saat Najwa mengajukan pertanyaan kepada Satriadi tentang sistem proteksi yang ada di Gedung Jaksa Agung. Seperti percakapan di bawah ini.

NS: “Apakah di dalam ada alat-alat pemadam yang sempat berfungsi atau sama sekali tidak ada?”

SG: “Pada saat itu sudah terbakar jadi mungkin kita akan liat nanti hasil porenfis dari kepolisian seperti apa gitu.(45)”

Tuturan (45) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice.

Maksim yang dilanggar adalah maksim relevansi. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban SG pada data (45) yang tidak relevan dengan pertanyaan NS. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim relevansi menginginkan supaya partisipan memberikan kontribusi yang sesuai dengan topik pembicaraan. Dalam data tuturan (45) *Pada saat itu sudah terbakar jadi mungkin kita akan liat nanti hasil porenfis dari kepolisian seperti apa gitu* tidak relevan dengan pertanyaan NS, lain yang ditanya lain pula yang dijawab sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim relevansi.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dan Hary Setyono (Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung) dalam sekmen tiga. Peristiwa tutur ini bermula dari tuturan yang diungkapkan oleh Fatma Lestari yaitu tentang tidak berfungsinya sistem proteksi yang ada di gedung Jaksa Agung. Kemudian, Najwa kembali mengajukan pertanyaan kepada Hary tentang sistem proteksi karena pertanyaan sebelumnya belum terjawab oleh Hary, sehingga terjadilah percakapan seperti di bawah ini.

NS: “Oke, tapi yang gedung utamanya yang di depan yang kita lihat itu yang terbakar, nah pertanyaannya tadi Pak, apakah memang tidak ada sistem proteksi kebakaran atau yang bisa mendeteksi?”

HS: “Yak, sepengetahuan saya karena gedung ini kemarin saya katakan bahwa masuk dikawasan pemukiman kemarin memang dikatakan ini belum sebagai gedung cakar budaya tetapi sudah masuk

kawasan pemukiman, kenapa? Karena ketika kami pengen mempercantik gedung itu di tahun 2018 itu ditegur oleh dinas pariwisata tidak boleh begini tidak boleh begitu sehingga ketika dilakukan itu ada berita acara yang ditandatangani oleh pengawas cagar budaya” (49)

Tuturan (49) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim relevansi. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban HS pada data (49) yang tidak relevan dengan topik pertanyaan NS. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim relevansi menginginkan supaya partisipan memberikan kontribusi yang sesuai dengan topik pembicaraan. Dalam data tuturan (49) *Yak, sepengetahuan saya karena gedung ini kemarin saya katakan bahwa masuk dikawasan pemukiman kemarin memang dikatakan ini belum sebagai gedung cakar budaya tetapi sudah masuk kawasan pemukiman*, tuturan tersebut tetap bisa dikatakan relevan dengan pertanyaan NS. Namun, tuturan HS dalam data (49) tidak ditemukan jawaban apakah memang tidak ada sistem proteksi kebakaran atau yang bisa mendeteksi kebakaran, sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim relevansi.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dan Hary Setyono (Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung) dalam sekmen empat. Peristiwa tutur ini bermula dari tuturan yang disampaikan oleh Satriadi Gunawan ia menyebutkan standarisasi bagaimana pengamanan proteksi kebakaran di gedung itu ada 4. Kemudian, Najwa mengajukan pertanyaan kepada Hary seperti percakapan di bawah ini.

NS: “Oke. Pak Hari tapi yang jelas gedung kejaksaan yang terbakar belum diasuransikan ya Pak?”

HS: “Sepengetahuan saya memang demikian” (58)

Tuturan (58) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim relevansi. Pelanggaran tersebut tergambar

dari jawaban HS pada data (58) tidak memiliki relevansi dengan apa yang ditanyakan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim relevansi menginginkan supaya partisipan memberikan kontribusi yang sesuai dengan topik pembicaraan. Dalam data tuturan (58) tidak berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan NS lain yang ditanya lain pula yang dijawab sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim relevansi.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dan Bonyamin Saiman (Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) dalam sekmen empat. Peristiwa tutur ini bermula pada saat Hary menjelaskan tentang asuransi gedung kawasan yang termasuk cagar budaya. Kemudian, Najwa memberi pernyataan yang direspons oleh Bonyamin seperti percakapan di bawah ini.

NS: “Hmm oke tapi yang jelas sekarang karena tidak di asuransi maka kerugiannya ini kalau dari direktur jendral kekayaan negara itu nilai gedungnya 161 milyar Pak dan itu akan masuk ke APBN di 2021 kalau sekarang katanya belum di anggarkan jadi memang ini kerugian yang kerugian yang besar, kerugian yang besar”

BS: “Ya tapi bagaimana mungkin meminta orang lain peduli anda sendiri tidak peduli Pak Hari? (63)

Tuturan (63) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim relevansi. Pelanggaran tersebut tergambar dari tuturan BS pada data (63) yang tidak relevan dengan topik pembicaraan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim relevansi menginginkan supaya partisipan memberikan kontribusi yang sesuai dengan topik pembicaraan. Dalam data tuturan (63) tidak berkaitan dengan pembahasan yang sedang dibicarakan sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim relevansi.



Konteks: Tuturan ini terjadi antara Bonyamin Saiman (Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) dan dan Hary Setyono (Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan) dalam sekmen empat. Peristiwa tutur ini terjadi saat Bonyamin membahas tentang sistem proteksi yang tidak berfungsi di gedung Jaksa Agung. Sehingga, terjadilah percakapan seperti di bawah ini.

BS: “Bukan, infeksi keselamatan itu lo, saya hanya kapan terakhir dilakukan? Itu aja”

HS: “Ya, oleh karena itu kami akan lakukan cek itu” (64)

Tuturan (64) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim relevansi. Pelanggaran tersebut tergambar dari tuturan HS pada data (64) yang tidak relevan dengan topik pembicaraan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim relevansi menginginkan supaya partisipan memberikan kontribusi yang sesuai dengan topik pembicaraan. Dalam data tuturan (64) tidak berkaitan dengan pertanyaan yang diberikan oleh BS sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim relevansi.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dan Bonyamin Saiman (Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) dalam sekmen lima. Peristiwa tutur ini terjadi saat Bonyamin mengatakan bahwa Jaksa Agung mengarang tentang kasus suap yang menerima ada sedangkan pemberi tidak ada. Kemudian, Najwa mengajukan pertanyaan kepada Bonyamin seperti percakapan di bawah ini.

NS: “Bukan yang memberi, maksud saya apakah mungkin Jaksa eslon empat bisa bertemu dengan buron kakap dan menjanjikan macam-macam sampai menjanjikan fatwa.

BS: “Ya sementara ini masih apa, istilah saya kepandaian Pinangki itu aja mancatut banyak orang (67)

Tuturan (67) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim relevansi. Pelanggaran tersebut tergambar dari tuturan BS pada data (67) yang tidak relevan dengan pertanyaan NS. Hal

tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim relevansi menginginkan supaya partisipan memberikan kontribusi yang sesuai dengan topik pembicaraan. Dalam data tuturan (67) *Ya sementara ini masih apa, istilah saya kepandaian Pinangki itu aja mancatut banyak orang*, tuturan tersebut tetap bisa dikatakan relevan dengan pertanyaan NS. Namun, tidak ditemukannya jawaban apakah mungkin jaksa eslon empat bisa bertemu dengan buron kakap dan menjanjikan macam-macam sampai menjanjikan fatwa, sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim relevansi.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Bonyamin Saiman (Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) dan dan Hary Setyono (Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan) dalam sekmen lima. Peristiwa tutur ini terjadi saat Hary menutur tentang keseriusan Jaksa Agung dalam menangani perkara kasus suap yang terjadi. Kemudian, Bonyamin menuturkan celetukan seperti percakapan di bawah ini.

BS: “Penanganan perkara korupsikan cepat utamakan dari yang lain”

HS: “Kan tidak boleh omongan di warung kopi kemudian jadi berkas kemudian dipaksakan untuk menjadi berkas kan alat bukti Pak”  
(72)

Tuturan (72) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice.

Maksim yang dilanggar adalah maksim relevansi. Pelanggaran tersebut tergambar dari tuturan HS pada data (72) yang tidak relevan dengan topik pembicaraan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim relevansi menginginkan supaya partisipan memberikan kontribusi yang sesuai dengan topik pembicaraan. Dalam data tuturan (72) tidak berkaitan dengan pertanyaan yang diberikan oleh BS sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim relevansi.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dan Bonyamin Saiman (Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) dalam sekmen lima. Peristiwa tutur ini terjadi pada saat Najwa meminta Barita Simanjuntak untuk memberikan komentarnya tentang

pemeriksaan pelaku suap. Kemudian tuturan Najwa direspons oleh Bonyamin seperti percakapan di bawah ini.

NS: “Baik, Pak Barita silahkan, karena kemudian ini juga bisa menjadi preseden menunjukkan bahwa memang ada keengganan dari kejaksaan agung untuk diperiksa atau diawasi oleh pihak independen.”

BS: “Buka aja Pak Barita” (76)

Tuturan (76) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim relevansi. Pelanggaran tersebut tergambar dari tuturan BS pada data (76) yang tidak relevan dengan topik pembicaraan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim relevansi menginginkan supaya partisipan memberikan kontribusi yang sesuai dengan topik pembicaraan. Dalam data tuturan (76) tidak berkaitan dengan pertanyaan yang diberikan oleh NS. BS mengatakan *Buka aja Pak Barita* dari tuturan tersebut tidak tau apa yang dibuka, sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim relevansi.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dengan Barita Simanjuntak (Ketua Komisi Kejaksaan Jakarta Timur) dalam sekmen enam. Peristiwa tutur ini bermula saat Najwa meminta Barita untuk langsung menjawab pertanyaannya tanpa berbelit-belit. Sehingga terjadilah percakapan seperti di bawah ini.

NS: “Pak Barita waktu saya mepet sekali, boleh langsung jawab *to the point* saja Pak, karena saya mau membahas yang lain, betul atau tidak itu tidak bisa memanggil jampidung?”

PB: “Nah selanjutnya kamikan menindak lanjuti supaya kami mengundang meminta keterangan kepada kejaksaan tinggi direktur DPWEL dan aspidung DKI itu yang kami tidak lagi di ijinan untuk kami mintai keterangan” (77)

Tuturan (77) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim relevansi. Pelanggaran tersebut tergambar dari tuturan PB pada data (77) yang tidak relevan dengan topik pembicaraan. Hal

tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim relevansi menginginkan supaya partisipan memberikan kontribusi yang sesuai dengan topik pembicaraan. Dalam data tuturan (77) tidak berkaitan dengan pertanyaan yang diberikan oleh NS sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim relevansi.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Hary Setyono (Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung) dengan Bonyamin Saiman (Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) dalam sekmen tujuh. Peristiwa tutur ini bermula saat Kurnia bertanya kepada Hary tentang apakah Kejaksaan Agung membuka pintu kepada KPK untuk terlibat dalam menangani kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Kemudian, Hary dan Bonyamin merespons tuturan Kurnia seperti percakapan di bawah ini.

HS: “Yak, yaak menurut kami itu ada namanya korsup, saya pikir semua terbuka, semua terbuka dan mudah-mudahan kedepan juga seperti itu harapan kita”.

BS: “Nana sebagai sama-sama barangkali santrinya Gusbahaudin Nursalim rembang ini saya kembalikan ke spiritual jadi kebakaran itu bisa jadi tanda kutip karena doa kita ini hanya berdoa memohon keselamatan tapi tindakan-tindakan kita bukan bagian dari doa, bukan bagian dari menjalankan tugas ini bukan bagian dari doa artinya apa kalau doa, berarti tulus melakukan tugasnya tulus keterbukaan, tulus untuk kebaikan dan kebaikan negeri ini juga sebagai bendera saya yang merah putih saya melakukan ini sebagai sumbangsih saya kepada negara ini untuk tidak runtuh Pak. Jadi, inilah kejaksaan agung nampaknya doanya itu hanya doa memohon keselamatan tapi tidak disertai dengan doa-doa yang melakukan tugas dengan tulus dengan kebaikan tidak ada selingkuh, selingkuh arti luas arti sempit itu, sehingga cctv itu khawatir saya dibakar atau terbakar karena ada selingkuh baik arti luas maupun arti sempit, demikian” (82)

Tuturan (82) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice.

Maksim yang dilanggar adalah maksim relevansi. Pelanggaran tersebut tergambar dari tuturan BS pada data (82) yang tidak relevan dengan topik pembicaraan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa

dalam maksim relevansi menginginkan supaya partisipan memberikan kontribusi yang sesuai dengan topik pembicaraan. Dalam data tuturan (82) tidak berkaitan dengan topik pembicaraan sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim relevansi.

#### **4.1.2.4 Bentuk-Bentuk Pelanggaran Maksim Cara/pelaksanaan**

Maksim cara/pelaksanaan mengharuskan setiap peserta percakapan berbicara secara langsung, tidak kabur, tidak taksa, dan tidak berlebih-lebihan sehingga tidak menimbulkan pertanyaan baru. Tuturan yang disampaikan harus singkat, padat dan jelas, apabila tuturan yang disampaikan kabur atau membingungkan maka dapat dikatakan telah melanggar maksim cara/pelaksanaan.

Tuturan antara pembawa acara dan narasumber dalam program Mata Najwa *Bara di Markas Jaksa* di trans 7 yang telah penulis kumpulkan datanya, lalu penulis akan mengklasifikasi tuturan yang tergolong ke dalam pelanggaran maksim cara/pelaksanaan sebagai berikut.

Konteks : Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dengan Mahfud MD seorang (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Ham Jakarta Selatan) mereka berbincang secara virtual dalam sekmen satu. Peristiwa tutur ini bermula saat Najwa bertanya tentang ketidak wajaran terbakarnya gedung Jaksa Agung. Kemudian, Najwa merespon jawaban dari Mahfud seperti percakapan di bawah ini.

MM: “Oo begini, saya katakan masyarakat jangan berspekulasi, itukan ada di TV ya, spekulasi apa Pak, spekulasi yang saya baca di medsos itu, itu nda masuk akal gitu, lalu media itu banyak yang menulis kata Mahfud MD terbakarnya nda masuk akal, padahal saya mengutip medsos, yang berkembang ketika itu masyarakat mengatakan di medsos itu, ini ndak masuk akal kok dari lantai enam turun ke-empat turun ke-lima, masa kalo listrik separah itu, itu kata masyarakat. Oleh sebab itu saya katakan jangan berspekulasi lah, spekulasi apa, ya itu yang ada di masyarakat bahwa kok turun dari lantai enam ke-empat ke-tiga.

NS: “Tapi dari pengamatan Pak maaf” (7)

Tuturan (7) di atas dapat dikatakan melanggar prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim cara/pelaksanaan. Dikatakan melanggar karena kadar kejelasannya rendah dan kadar kekaburannya sangat tinggi. Menurut Grice dalam maksim cara/pelaksanaan partisipan diminta bertutur secara langsung, jelas, dan tidak kabur. Kalimat *Tapi dari pengamatan Pak maaf* sama sekali tidak memberikan kejelasan tentang apa yang sebenarnya diminta oleh mitra tutur. Oleh karena itu, maknanya pun menjadi sangat kabur. Dikatakan demikian karena kalimat itu bisa ditafsirkan dengan bermacam-macam dan dapat mendatangkan banyak persepsi penafsiran karena dalam tuturan tersebut tidak dijelaskan apa sebenarnya yang diminta oleh NS. Pelanggaran tersebut terjadi karena ketidaklangsungannya dalam berbicara.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab selaku pemandu acara dan Mahfud MD seorang (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Ham Jakarta Selatan) mereka berbincang secara virtual dalam sekmen satu. Najwa memberikan pernyataan bahwa kejadian seperti kebakaran di gedung vital milik negara sering terjadi di saat sedang menangani kasus korupsi. Kemudian, Mahfud merespons pernyataan Najwa seperti percakapan di bawah ini.

NS: “Karena misalnya Pak kebakaran di gedung vital milik negara ditengah pengusutan kasus besar inikan bukan pertama kali terjadi, kita tau misalnya tahun 97 di gedung BI, kemudian juga di gedung BPKP juga pernah, kemudian di gedung kementerian ESDM tiba-tiba terbakar ketika sedang menyelidiki kasus yang melibatkan menteri ESDM Ketika itu jadi ada presedenya terbakar atau dokumen yang dalam tanda kutip RAIP atau di raipkan terjadi di tengah-tengah pengusutan kasus yang besar, Pak kemonpuluhkam”

MM: “Iya iya makanya tadi saya terlintas gitu hehehe... kan sudah saya bilang keterlintasan keingat ke yang lain-lain juga, saya dulukan di luar. Jadi juga saya ingat ke yang lain-lain. tapi sesudah berkomunikasi, saya kemudian mengatakan ya sudah jangan berspekulasi kita serahkan ke polisi kan gitu, ha polisinya juga langsung saya telepon Pak apa Pak IPDA Hamasid, Pak ini

dibuka Pak siap, kami lurus tegak, tegak lurus melaksanakan konstitusi dan hukum gitu, kami pasti profesional. Saya ingatkan lagi jangan main-main dengan masyarakat sekarang, kita akan ketahuan kalau bohong sedikit sekarang, orang ndak bohong aja dibilang bohong saya bilang begitu heheheh” (10)

Tuturan (10) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim cara/pelaksanaan. Pelanggaran tersebut tergambar pada respons yang diberikan oleh MM sangat panjang dan berbelit-belit bahkan MM juga menjelaskan apa yang tidak menjadi pertanyaan NS. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim cara/pelaksanaan mengharuskan setiap peserta tutur berbicara secara langsung, tidak kabur, tidak taksa, dan tidak berlebih-lebihan. Dalam data tuturan (10) *Kan sudah saya bilang keterlintasan keingat ke yang lain-lain juga, saya dulukan di luar, jadi juga saya ingat ke yang lain-lain* terlihat bahwa MM memberikan pernyataan yang tidak jelas sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim cara/pelaksanaan.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dan Mahfud MD (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Ham) dalam sekmen dua. Sekmen ini Najwa kembali menghubungi Mahfud melalui video *call* dan berbincang secara virtual. Peristiwa tutur ini bermula saat Najwa memberikan pertanyaan kepada Mahfud tentang pernyataan Mahfud yang menyebutkan bahwa pemerintah tidak mungkin berbohong. Seperti percakapan di bawah ini.

NS: “Ketika disebut pemerintah tidak mungkin menyembunyikan sesuatu atau aparat-aparat dalam hal ini aparat kepolisian atau aparat penegak hukum tidak mungkin menyembunyikan sesuatu, tapi tidak usah jauh-jauh pak, kasus Novel Baswedan, jelas-jelas ada kejanggalan disitu, puplik berteriak, puplik membongkar tapi tidak ditelusuri dan dalihnya sudah sesuai proses hukum jadi agak sulit untuk meminta puplik percaya ketika yang di depan mata seperti Novel Baswedan saja tidak”

MM: “Ya itulah, itulah kalau orang berbohong orang akan tidak percaya silahkan, tetapi kalau saya ndak akan berbohong, saya

katakan tidak mungkin bisa maksudnya, tidak mungkin sekarang ini orang pemerintah berbohong artinya tidak mungkin bisa, lalu orang bisa begitu percaya aja kepada kebohongan itu, tetap itu akan menjadi perdebatan puplik kalau mau berbohong, gitu kan” (12)

Tuturan (12) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim cara/pelaksanaan. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban MM pada tuturan (12) respons yang diberikan oleh MM sangat panjang dan berbelit-belit bahkan MM juga menjelaskan apa yang tidak menjadi pertanyaan NS. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim cara/pelaksanaan mengharuskan setiap peserta tutur berbicara secara langsung, tidak kabur dan tidak berlebihan. Dalam tuturan (12) terlihat bahwa MM memberikan pernyataan yang kabur dan tidak jelas seperti kalimat *Itulah kalau orang berbohong orang akan tidak percaya silahkan, tetapi kalau saya ndak akan berbohong, saya katakan tidak mungkin bisa maksudnya, tidak mungkin sekarang ini orang pemerintah berbohong artinya tidak mungkin bisa, lalu orang bisa begitu percaya aja kepada kebohongan itu, tetap itu akan menjadi perdebatan puplik kalau mau berbohong, gitu kan*. Pernyataan tersebut membuat mitra tutur menjadi bingung untuk memaknai maksud tuturan yang disampaikan oleh MM sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim cara/pelaksanaan.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dan Mahfud MD (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Ham) dalam sekmen dua. Mereka berbincang secara virtual. Peristiwa tutur ini bermula saat Najwa bertanya apa pendapat Mahfud tentang pemeriksaan kasus korupsi yang mengaitkan oknum jaksa, seperti percakapan di bawah ini.

NS: “Pak Mahfud sampai sejauh apakah anda akan mendorong KPK atau institusi di luar Kejaksaan Agung yang masuk dan memeriksa



kasus yang saat ini ditangani Kejaksaan Agung menyangkut oknum jaksa Pak?

MM: “Itu tidak perlu dorongan seorang minfo itu adalah haknya KPK kalau KPK mau ambil alih ndak boleh jaksa agung menolak, ndak boleh menkopulhukam menolak itu berdasar pasal 8 dan pasal 9 UU KPK bagaimana anda minta dorongan ke saya, saya tidak akan mendorong dan tidak akan menghalangi itu haknya KPK sepenuhnya, KPKnya mau gak, kalau KPK mau silahkan aja itu UU yang mengatakan begitu, bukan saya bukan anda.” (15)

Tuturan (15) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice.

Maksim yang dilanggar adalah maksim cara/pelaksanaan. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban MM pada tuturan (15) yang memberikan kontribusi yang tidak jelas dan berlebih-lebihan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim cara/pelaksanaan mengharuskan setiap peserta tutur berbicara secara langsung, tidak kabur dan tidak berlebih-lebihan. Dalam tuturan (15) terlihat bahwa MM memberikan ungkapan yang tidak jelas dan berlebih-lebihan sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim cara/pelaksanaan.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dan Mahfud MD (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Ham) dalam sekmen dua. Mereka berbincang secara virtual. Peristiwa tutur ini bermula saat Najwa bertanya apa pendapat Mahfud tentang apakah khalayak ramai akan percaya dengan proses pemeriksaan keluarga Jaksa yang terjerat kasus korupsi, seperti percakapan di bawah ini.

NS: “Apakah perlu atau apakah menurut anda puplik harus percaya begitu saja kejaksaan berani memeriksa keluarganya sendiri?”

MM: “Terserah puplik dan terserah juga kejaksaannya mau transparan apa ndak dan terserah KPK mau ambil apa tidak. KPK punya hak kan” (16)

Tuturan (16) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice.

Maksim yang dilanggar adalah maksim cara/pelaksanaan. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban MM pada tuturan (16) yang memberikan jawaban yang

taksa. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim cara/pelaksanaan mengharuskan setiap peserta tutur berbicara secara langsung, tidak taksa dan tidak berlebih-lebihan. Dalam tuturan (16) terlihat bahwa MM memberikan jawaban yang meragukan, sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim cara/pelaksanaan.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dengan Kurnia Ramadhana seorang (Peneliti ICW) dalam sekmen dua. Peristiwa tutur ini bermula saat Najwa bertanya kepada Kurnia tentang apakah dalam pemeriksaan kasus korupsi Djoko Thjandra harus melibatkan KPK. Kemudian, direspons oleh Kurnia seperti percakapan di bawah ini.

NS: “Saya ingin ke Pak Mahfud ada Kurnia dari ICW saya ingin tau karena ICW yang sejak awal bilang KPK harus masuk karena melihat rasanya sulit untuk, untuk kejaksaan memeriksa kasus ini”

KR: “Iya.. saya tadi mau bahas soal bohong atau tidak bohong ya Mbak Nana, kita masih mengingat masih ditahun ini sebenarnya dua kali pemerintah diduga memberikan kabar yang tidak benar bukan hanya novel Baswedan bulan januari ada kasus Harun Masiku apa kata bawahan Pak Mahfud saat itu, Harun Masiku tidak berada di Indonesia, padahal beberapa waktu kemudian pernyataan itu diralat. Yang kedua kasus Djoko Tjandra bawahan Pak Mahfud juga mengatakan tidak ada data perlintasan atas nama Djoko Tjandra faktanya orangnya ada mendapatkan berbagai prefilip sampai pada mendaftarkan upaya hukum luar biasa. Yang kedua soal tadi apakah persoalan hukum terbatas pada dokumen perkara kalau kita melihat kasus yang ada di kejaksaan agung yang melibatkan jaksa Pinangki Sirna Malasari oke klim kejaksaan dokumennya berbeda gedung akan tetapi ada bukti petunjuk berupa CCTV yang ada diruangan jaksa Pinangki kemana sekarang, pastikan hangus, jadi jangan terlalu cepat menyimpulkan apalagi kalau kasus hukum hanya melandaskan pada dokumen ada banyak alat bukti lain yang juga masih kita pertanyakan hari ini kepada kejaksaan agung dan ICW sejak awal mendorong agar KPK terlibat dalam penyelidikan terbakarnya gedung kejaksaan agung kenapa Mbak Nana? karena kita khawatir inikan apakah ini tidak disengaja atau ini disengajakan dua itu saja opsiannya. Kami ingin KPK masuk kalau memang nanti terbukti ada pihak-pihak entah itu oknum internal kejaksaan agung atau di luar Kejaksaan Agung

yang berupaya untuk menghentikan perkara-perkara besar maka dapat di sangka dengan pasal 21 oprasaljastis. Karena tadi Mbak Nana sampaikan kita agak sulit percaya kalau penegak hukum A menangani perkara yang melibatkan oknum penegak hukum A juga lebih bagus ambil tarik netral biar KPK yang masuk. Itu pointnya Mba Nana. (18)

Tuturan (18) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim cara/pelaksanaan. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban KR pada tuturan (18) respons yang diberikan oleh KR sangat panjang dan berbelit-belit bahkan KR juga menjelaskan apa yang tidak menjadi pertanyaan NS. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim cara/pelaksanaan mengharuskan setiap peserta tutur berbicara secara langsung, tidak kabur dan tidak berlebihan. Dalam tuturan (18) terlihat bahwa KR memberikan ungkapan yang tidak jelas serta berlebihan, sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim cara/pelaksanaan.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Kurnia Ramadhana seorang (Peneliti ICW) dengan Mahfud MD (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Ham) dalam sekmen dua. Mereka berbincang secara virtual. Peristiwa tutur ini bermula saat Kurnia menjawab pertanyaan dari Najwa tentang kelar perkara apa. Kemudian, Mahfud merespon tuturan Kurnia seperti percakapan di bawah ini.

KR: “Gelar perkara kasus suap surat jalan dan reknotis, itu kabarnya sih mengundang KPK tapi sampai hari ini kok terlihat seperti kejaksaan agung menutup diri, itu yang ada”

MM: “Jadi kalau begitu, benar dong saya bahwa sekarang ini pejabat ndak bisa berbohong buktinya tadi disampaikan oleh Mas Kurnia, dulu ada orang yang bilang Masiku ndak ada ternyata bohongkan militas, kemudian katanya Djoko Tjandra bohong ternyata masuk, kan berarti saya sudah benar bilang, jangan berbohong sekarang ini masyarakat akan tau, dimana salahnya” (21)

Tuturan (21) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim cara/pelaksanaan. Pelanggaran tersebut tergambar dari respons MM pada tuturan (21) respons yang diberikan oleh MM sangat panjang dan berbelit-belit bahkan MM juga menjelaskan apa yang tidak menjadi pertanyaan NS. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim cara/pelaksanaan mengharuskan setiap peserta tutur berbicara secara langsung, tidak taksa, tidak berlebih-lebihan serta runut. Dalam tuturan (21) terlihat bahwa MM memberikan kontribusi yang taksa dan berlebih sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim cara/pelaksanaan.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Kurnia Ramadhana seorang (Peneliti ICW) dengan Mahfud MD (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Ham) dalam sekmen dua, mereka berbincang secara virtual. Peristiwa tutur ini bermula saat Kurnia merespons jawaban Mahfud tentang pemerintah tidak mungkin bisa berbohong dalam menangani kasus-kasus korupsi karena masyarakat akan tau jika pemerintah berbohong. Kemudian, Mahfud kembali merespons pernyataan Kurnia seperti percakapan di bawah ini.

KR: “Dan sanksi orang yang berbohong itu sampai hari ini tidak ada Prof Mahfud itu yang kita sesalkan kalau tidak ada *phanismen* yang tegas dari presiden maka bukan tidak mungkin orang itu akan berbohong dimasa yang akan datang terlebih terhadap penegakan hukum di bawah kewenangan profesor Mahfud MD. Itu yang kita khawatir Pak Mahfud”

MM: “Konteksnya bukan itu, konteksnya yang saya katakan tidak mungkin sekarang orang bisa berbohong buktinya anda sudah tunjukkan buktinya itu bohong ketahuan juga, nah soal itu nanti soal lain ada, ada proses-proses internal kan sudah ada tindakan-tindakan juga tu, cuma tindakan menurut anda beda menurut tindakan pemerintah, misalnya saya contoh begini, di keminkoham dirjennya dicopot, wah anda curiga lagi, namanya sudah curiga oo itu bukan itu gitu terus gimana dong kan begitu, nanti aja yang Djoko Tjandra juga semuanya ditangani siapa yang melayani dia pergi sudah ditangani semua terus apalagi yang mau

dilakukan, apakah mau melanggar hukum kita ini, ikut saran anda gitu wah itu yang ditangkap kapolrinya gitu misalnya, kan harus yang, kan sudah ada bukti bahwa yang berbohong ternyata salah ditindak ha gitu, lagi pula kasus Harun Masiku tukang bukan bukan di pemerintah ya itukan di KPK” (22)

Tuturan (22) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim cara/pelaksanaan. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban MM pada tuturan (22) yang memberikan kontribusi yang taksa serta berlebihan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim cara/pelaksanaan mengharuskan setiap peserta tutur berbicara secara langsung, tidak taksa serta tidak berlebih-lebihan. Dalam tuturan (22) terlihat bahwa MM memberikan kontribusi yang taksa dan berlebihan membuat mitra tutur menjadi bingung untuk memaknai maksud tuturan yang disampaikan MM, sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim cara/pelaksanaan.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dengan Bonyamin Saiman seorang (Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) dalam sekmen dua. Peristiwa tutur ini bermula saat Najwa merespon jawaban Mahfud tentang KPK tidak boleh mencampuri urusan pemerintah, dan kemudian Najwa meminta Bonyamin untuk menyampaikan argumennya tentang jawaban Mahfud tersebut. Seperti percakapan di bawah ini.

NS: “Baik, Pak Mahfud, Pak Bonyamin silahkan anda mau menyampaikan apa?”

BS: “Sederhana Pak Mahfud mengajukan permohonan ajalah, Pak Mahfud atas kewenangan yang dimiliki memberikan arahan menghimbau atau tanda kutip lebih tinggi memerintah, jaksa agung untuk dalam ekspose, istilah di kejaksaan itu ekspose bukan gelar perkara, ketika pada posisi nanti di arahkan mengundang KPK, biar menjawab keraguan ini jadi Pak Mahfud saya yakin tidak akan menyalahi kewenangan dan tidak akan intervensi karena jaksa agung adalah di bawah pemerintahan, jadi diarahkan ajalah dihimbau saya yakin kalau Pak Mahfud nyentil jaksa agungnya eh

tolong itu KPK di undang ajalah dalam ekspose ini hal yang sederhana dan gampang dilakukan Pak Mahfud, demikian terimakasih.” (23)

Tuturan (23) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim cara/pelaksanaan. Pelanggaran tersebut tergambar pada tuturan (23) respons yang diberikan oleh BS sangat panjang dan berbelit-belit bahkan MM juga menjelaskan apa yang tidak menjadi pertanyaan NS. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim cara/pelaksanaan mengharuskan setiap peserta tutur berbicara secara langsung, tidak taksa, tidak berlebih-lebihan serta runut. Dalam tuturan (23) terlihat bahwa BS memberikan kontribusi yang tidak langsung serta berlebihan sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim cara/pelaksanaan.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Mahfud MD seorang (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Ham) dengan Najwa Shihab sebagai pemandu acara dalam sekmen dua. Mereka berbincang secara virtual. Peristiwa tutur ini bermula saat Mahfud merespons pernyataan Bonyamin ia meminta menghubungi Jaksa Agung untuk mengimplentasikan persetujuan Mahfud mengundang KPK dalam menangani kasus korupsi Djoko Tjandra. Kemudian, pernyataan Bonyamin tersebut direspons oleh Mahfud dan Najwa. Seperti percakapan di bawah ini.

MM: “Itu, tu tinggal cara saya hahahhhahhaa”

NS : “Yang jelas, ini sudah terbuka dan disaksikan jutaan orang jadi seharusnya ini sudah”. (25)

Tuturan (25) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim cara/pelaksanaan. Pelanggaran tersebut tergambar dari respons NS pada tuturan (25) memberikan kontribusi yang taksa. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim cara/pelaksanaan mengharuskan setiap peserta tutur

berbicara secara langsung, tidak taksa serta tidak berlebih-lebihan. Dalam tuturan (25) terlihat bahwa NS memberikan kontribusi yang taksa, sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim cara/pelaksanaan.

Konteks : Tuturan ini terjadi antara Najawa Shihab dan Mahfud MM pada sekmen kedua. Sebelum pembicaraan berakhir dan sambungan video dengan Mahfud MD ditutup karena Mahfud MD tidak hadir langsung di studio makanya dihubungi melalui video *call*, Najwa mengajukan pertanyaan penutup untuk Mahfud MD tentang temuan bukti yang dilakukan investigasi kasus korupsi Jaksa Pinangki, seperti pada percakapan di bawah ini.

NS: “Baik, Pak Mahfud pertanyaan penutup Pak Mahfud yang jelas publik sempat dikagetkan oleh beberapa temuan yang dilakukan investigasi yang dilakukan media maupun investigasi yang dilakukan oleh sebutlah maki begitu ya, salah satunya adalah dugaan bahwa jaksa Pinangki itu melapor kepada Jaksa Agung pertemuannya dengan Djoko Tjandra di luar negeri, Jaksa Pinangki bahkan sempat video *call* dengan Jaksa Agung melapor sudah dil begitu, itu dugaan-dugaan yang muncul, apakah anda melihat kejaksaan akan berani memeriksa Jaksa Agung atas kasus ini Pak Mahfud?”

MM: “Itu sudah substansi perkara saya ndak boleh masuk tanyakan ke Pak Hari Setiyono aja ada di situ, saya ndak boleh masuk ke situ, karena Nana kan tau sendiri” (30)

Tuturan (30) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim cara/pelaksanaan. Pelanggaran terhadap maksim cara/pelaksanaan karena respons yang diberikan oleh MM tidak secara langsung menjawab pertanyaan NS. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim cara/pelaksanaan mengharuskan setiap peserta tutur berbicara secara langsung, tidak kabur, tidak taksa, dan tidak berlebih-lebihan.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Mahfud MD seorang (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Ham) dengan Najwa Shihab sebagai pemandu acara dalam sekmen dua. Mereka berbincang secara virtual. Peristiwa tutur ini bermula saat Mahfud merespons pertanyaan Najwa tentang apakah bisa jeruk makan jeruk, yang dimaksud jeruk makan jeruk adalah apakah bisa Jaksa Agung memeriksa oknum Jaksanya yang terlibat kasus korupsi Djoko Tjhandra. Kemudian pertanyaan Najwa direspon oleh Mahfud sambil tertawa seperti percakapan di bawah ini.

MM: “Ndak papa jeruk makan jeruk (hahahaha)”

NS : “Yakin ya Pak bisa, jadi kita” (33)

Tuturan (33) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim cara/pelaksanaan. Pelanggaran tersebut tergambar dari respons NS pada tuturan (33) memberikan kontribusi yang taksa. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim cara/pelaksanaan mengharuskan setiap peserta tutur berbicara secara langsung, tidak taksa serta tidak berlebih-lebihan. Dalam tuturan (33) *Yakin ya Pak bisa, jadi kita* terlihat bahwa NS memberikan kontribusi yang taksa, sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim cara/pelaksanaan.

Konteks : Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab dan Mahfud MM pada sekmen kedua. Sebelumnya Mahfud mengatakan bahwa ia bertemu dengan presiden lalu Najwa mengajukan pertanyaan, seperti pada percakapan di bawah ini.

NS: “Presiden bilang apa Pak?”

MM: “Saya bilang Pak ini yang ribut-ribut sabtu kemarin orang mempersoalkan orang 546 milyar seakan-akan itu digelapkan, itu ndak benar sesudah itu dijelaskan bahwa itu ndak benar sudah ada bukti otentiknya orang mempertanyakan lagi, la dulu kan 900 laputusan mahkamah agungnya 546 gitu, yang 300nya silahkan dipersoalkan lagi tapi yang putusan mahkamah agung 546 yang diributkan sampe sore sampe saya menjelaskan itu ni masih ada di meja saya ni bukti-buktinya ni, bahwa itu sudah selesai, ha kata presiden Pak Mahfud profesional aja, kita jangan takut, buka sejujur-jujurnya begitu kalau presiden selalu. (36)



Tuturan (36) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim cara/pelaksanaan. Pelanggaran tersebut tergambar pada tuturan (36) respons yang diberikan oleh MM sangat panjang dan berbelit-belit bahkan MM juga menjelaskan apa yang tidak menjadi pertanyaan NS. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim cara/pelaksanaan mengharuskan setiap peserta tutur berbicara secara langsung, tidak taksa, tidak berlebih-lebihan serta runut. Dalam tuturan (36) terlihat bahwa MM memberikan kontribusi yang berlebihan sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim cara/pelaksanaan.

Konteks : Tuturan ini terjadi antara Najawa Shihab sebagai pemandu acara dan Satriadi Gunawan (Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta) pada sekmen ketiga. Tuturan ini adalah percakapan lanjutan antara Najwa dan Satriadi, Najwa memutar sebuah video kebakaran pemberian dari Satriadi, lalu Najwa mengucapkan terimakasih atas video yang diberikan oleh Satriadi lanjut mengajukan pertanyaan, seperti pada percakapan di bawah ini.

NS: “Yak terima kasih atas video itu Pak Bili jadi persisnya anda dan teman-teman mendapatkan info dari orang yang datang justru kemarkas?”

SG :“Betul, jadi pertama kita dapat berita terjadinya kebakaran yaitu dari warga yang datang ke pos terdekat, yaitu pos Kebayoran baru tepatnya sekitar jam 7 lewat 10 menit, kemudian langsung kita luncurkan 4 unit dan pada saat di TKP sudah ada 3 selasar dari gedung utama kejaksaan agung sisi sebelah utara sudah terbakar nah itu langsung kita tambahkan lagi unit terakhir sampai dengan 65 unit dengan jumlah personil sekitar 325 orang.” (44)

Tuturan (44) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim kuantitas. Pelanggaran tersebut tergambar pada tuturan (44) respons yang diberikan oleh SG sangat panjang dan berbelit-belit bahkan SG juga menjelaskan apa yang tidak menjadi pertanyaan NS. Hal

tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim kuantitas tidak menginginkan mitra tutur memberikan informasi yang kurang maupun berlebihan. Dalam tuturan (44) terlihat bahwa SG berlebihan dalam menjawab pertanyaan NS yang seharusnya SG cukup menjawab sampai *Betul*. Namun pada percakapan di atas, SG memberikan kontribusi berlebihan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim kuantitas.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dengan Hary Setyono seorang (Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan) dalam sekmen tiga. Peristiwa tutur ini bermula saat Najwa kembali bertanya kepada Hary tentang sistem proteksi yang ada di Gedung Jaksa Agung karena pertanyaan Najwa belum terjawab oleh Hary. Seperti percakapan di bawah ini.

NS: “Oke, pertanyaannya Pak itu belum menjawab pertanyaan saya Pak Hari, apakah ada sistem proteksi itu Pak?”

HS: “Iya saya mau masuk ke sana” (50)

Tuturan (50) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim cara/pelaksanaan. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban HS pada tuturan (50) yang berbicara secara tidak langsung kepada NS. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim cara/pelaksanaan mengharuskan setiap peserta tutur berbicara secara langsung, tidak kabur dan tidak berlebih-lebihan. Dalam tuturan (50) *Iya saya mau masuk ke sana* terlihat bahwa HS berbicara secara tidak langsung, sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim cara/pelaksanaan.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dan Hary Setyono Hary Setyono (Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan) pada sekmen ketiga. Tuturan ini tujuannya untuk mengetahui apakah sistem proteksi dan sebagainya ada atau tidak di gedung Jaksa Agung, sebelumnya Najwa sudah meminta kepada Hary

untuk langsung menjawab. Namun, Hary belum menjawab pertanyaan Najwa, sehingga terjadilah percakapan seperti di bawah ini.

NS: “Oke, pertanyaannya Pak itu belum menjawab pertanyaan saya Pak Hari, apakah ada sistem proteksi itu Pak?”

HS: “Ya tentu di dalam pemeliharaan gedung itu ada proteksi terhadap keamanan gedung itu sepanjang yang saya ketahui ada istilahnya apar park ya, apar di tiap-tiap jarak sekian meter kemudian juga yang saya ketahui peringatan dini katakanlah sedangkan spengler karena tinggi gedung juga ruangan itu saya ketahui cukup tinggi hanya di beberapa bagian saja yang saya tau ini ya, tetapi secara umum saya tidak tau, tetapi ada seperti itu, nah nanti mungkin dari bapak damkar yang sudah melakukan itu bisa lebih lengkap lagi” (51)

Tuturan (51) di atas dapat dikatakan melanggar prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim cara/pelaksanaan. Dikatakan melanggar karena respons yang diberikan sangat panjang dan berbelit HS juga tidak langsung menjawab pertanyaan NS. Menurut Grice dalam maksim cara/pelaksanaan partisipan diminta bertutur secara langsung, jelas, tidak kabur, dan berlebihan. Pelanggaran tersebut terjadi karena ketidaklangsungannya dalam berbicara.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dengan Satriadi Gunawan seorang (Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta) dalam sekmen empat. Peristiwa tutur ini bermula saat Najwa berbincang dengan Satriadi tentang cerita dibalik terbakarnya gedung Kejaksaan Agung. Seperti percakapan di bawah ini.

NS: “Yaaak dalam kasus seperti ini Pak Bili investigasi itu biasanya meliputi apa-apa saja?”

SG: “Yaak, jadi kalau investigasi itu kewenangan dari puslapolri ya, kalau pemadam kebakaran memang posisinya pada saat itu hanya operasi bagaimana segera tuntas kebakaran yang terjadi di TKP itu.” (52)

Tuturan (52) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim cara/pelaksanaan. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban SG pada tuturan (52) yang memberikan kontribusi yang

berlebihan kepada NS. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim cara/pelaksanaan mengharuskan setiap peserta tutur berbicara secara langsung, tidak kabur dan tidak berlebih-lebihan. Dalam tuturan (52) terlihat bahwa SG memberikan kontribusi yang berlebihan sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim cara/pelaksanaan.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dengan Satriadi Gunawan seorang (Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta) dalam sekmen empat. Peristiwa tutur ini bermula saat Najwa bertanya tentang kenapa Satriadi tidak dilibatkan dalam investigasi kebakaran Gedung Jaksa Agung. Seperti percakapan di bawah ini.

NS: “Kenapa ya pak?”

SG: “Memang aturannya seperti itu mungkin” (54)

Tuturan (54) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim cara/pelaksanaan. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban SG pada tuturan (54) yang memberikan kontribusi yang taksa kepada NS. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim cara/pelaksanaan mengharuskan setiap peserta tutur berbicara secara langsung, tidak kabur, tidak taksa, dan tidak berlebih-lebihan. Dalam tuturan (54) *Memang aturannya seperti itu mungkin* terlihat bahwa SG memberikan kontribusi yang taksa sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim cara/pelaksanaan.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dengan Satriadi Gunawan seorang (Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta) dalam sekmen empat. Peristiwa tutur ini bermula saat Najwa mengajukan pertanyaan kepada Satriadi tentang apa yang akan Satriadi lakukan apabila diberi tugas untuk melakukan investigasi atas kebakaran yang terjadi di Gedung Jaksa Agung. Seperti percakapan di bawah ini.

NS: “Oke, saya membutuhkan anda malam ini untuk menjawab Pak, jadi kalau bapak di beri tugas wewenang investigasi biasanya apa sih yang diperiksa untuk tau ini tu sebetulnya tidak wajar kebakarannya.?”

SG: “Yaa kita pasti nyari titik utama titik pertama dari api tu dari mana di lantai berapa dan itu kita akan telusuri, kita akan telusuri biasanya ada berkas-berkas yang memang pasti ada titik utama itu di lantai berapa, nah itu perambatannya kemana arahnya nah itu nanti kita” (56)

Tuturan (56) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim cara/pelaksanaan. Pelanggaran tersebut tergambar dari respons SG pada tuturan (56) respons yang diberikan oleh SG sangat panjang dan berbelit-belit bahkan SG juga menjelaskan apa yang tidak menjadi pertanyaan NS. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim cara/pelaksanaan mengharuskan setiap peserta tutur berbicara secara langsung, tidak kabur dan tidak berlebihan. Dalam tuturan (56) terlihat bahwa SG memberikan kontribusi yang berlebihan sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim cara/pelaksanaan.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dengan Hary Setyono seorang (Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan) dalam sekmen empat. Peristiwa tutur ini bermula saat Najwa merespons jawaban dari Hary dan kemudian kembali bertanya tentang asuransi Gedung Jaksa Agung. Seperti percakapan di bawah ini.

NS: “Oke. Pak Hari tapi yang jelas gedung kejaksaan yang terbakar belum diasuransikan ya Pak?”

HS: “Sepengetahuan saya memang demikian” (59)

Tuturan (59) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim cara/pelaksanaan. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban HS pada tuturan (59) yang memberikan kontribusi yang

taksa kepada NS. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim cara/pelaksanaan mengharuskan setiap peserta tutur berbicara secara langsung, tidak kabur, tidak taksa, dan tidak berlebih-lebihan. Dalam tuturan (59) *Sepengetahuan saya memang demikian* terlihat bahwa HS memberikan kontribusi yang taksa sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim cara/pelaksanaan.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dengan Hary Setyono seorang (Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan) dalam sekmen empat. Peristiwa tutur ini bermula saat Najwa dan Hary membahas tentang asuransi Gedung Jaksa Agung dan Hary membantah bahwa Gedung tersebut termasuk kawasan cagar budaya. Kemudian, Najwa kembali membantah pernyataan Hary tersebut. Sehingga, terjadilah percakapan di bawah ini.

NS: “Kawasan-kawasan cagar budaya Pak tapi gedungnya bukan, gedungnya tidak Pak”

HS: “Dibawahnya lagi perlakuan terhadap kawasan budaya sama dengan cagar budaya makanya bacanya jangan” (61)

Tuturan (61) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim cara/pelaksanaan. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban HS pada tuturan (61) yang memberikan kontribusi yang taksa kepada NS. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim cara/pelaksanaan mengharuskan setiap peserta tutur berbicara secara langsung, tidak kabur, tidak taksa, dan tidak berlebih-lebihan. Dalam tuturan (61) *Makanya bacanya jangan* terlihat bahwa HS memberikan kontribusi yang taksa sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim cara/pelaksanaan.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dengan Hary Setyono seorang (Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan) dalam sekmen empat. Peristiwa tutur ini bermula saat Najwa dan Hary membahas tentang asuransi Gedung Jaksa Agung dan Hary membantah

bahwa Gedung tersebut termasuk kawasan cagar budaya. Kemudian, Najwa kembali bertanya kepada Hary. Sehingga, terjadilah percakapan di bawah ini.

NS: “Jadi artinya tidak perlu di asuransi”

HS: “Nah contohnya tadi saya katakan di 2018 tadi kita katakan mau direnovasi di tegur itu ditandatangani oleh pengawas cagar budaya nah siapa yang seharusnya mengansuransikan, ha itu kira-kira” (62)

Tuturan (62) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim cara/pelaksanaan. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban HS pada tuturan (62) yang memberikan kontribusi yang berlebihan kepada NS. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim cara/pelaksanaan mengharuskan setiap peserta tutur berbicara secara langsung, tidak kabur dan tidak berlebih-lebihan. Dalam tuturan (62) terlihat bahwa HS memberikan kontribusi yang berlebihan sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim cara/pelaksanaan.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Bonyamin Saiman (Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) dengan Najwa Shihab sebagai pemandu acara dalam sekmen lima. Peristiwa tutur ini bermula saat Najwa membahas tentang Bonyamin yang tidak percaya Jaksa Pinangki bekerja sendirian pasti ada orang lain yang terlibat. Kemudian, Bonyamin merespons pertanyaan Najwa seperti percakapan di bawah ini.

BS: “Ya sementara ini masih apa, istilah saya kepandaian Pinangki itu aja mancatut banyak orang”

NS: “Mencatut atau, atau” (68)

Tuturan (68) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim cara/pelaksanaan. Pelanggaran tersebut tergambar dari respons NS pada tuturan (68) yang memberikan kontribusi yang taksa kepada BS. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim cara/pelaksanaan mengharuskan setiap

peserta tutur berbicara secara langsung, tidak kabur dan tidak berlebih-lebihan. Dalam tuturan (68) terlihat bahwa NS memberikan kontribusi yang taksa sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim cara/pelaksanaan.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dengan Bonyamin Saiman (Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) dalam sekmen lima. Peristiwa tutur ini bermula saat Najwa membahas tentang Bonyamin yang tidak percaya Jaksa Pinangki bekerja sendirian pasti ada orang lain yang terlibat. Kemudian, Najwa merespons jawaban Bonyamin yang tampak meragukan yaitu “Ya itu nanti bisa anu dimaknai ke kanan dan ke kiri gitu”. Sehingga terjadilah percakapan di bawah ini.

NS: “Anda jadi hati-hati ni Pak Bonyamin”

BS: “Ya kan nanti kan bisa menjadi bersedia dicabut kan ada, kan gitu kan malah udah cabut aja nama ku juga ada nanti, itu lo jadi artinya bukan hati-hati kan saya harus koridor hukum karena sebagai detektek patikelir begitu jadi ya harus pada posisi meskipun saya sejak awal kalimat dugaan tapi lebih banyak terbukti gitu lo.(70)

Tuturan (70) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim cara/pelaksanaan. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban BS pada tuturan (70) yang memberikan kontribusi yang tidak jelas, kabur serta berlebih. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim cara/pelaksanaan mengharuskan setiap peserta tutur berbicara secara langsung, tidak kabur dan tidak berlebih-lebihan. Dalam tuturan (70) terlihat bahwa BS memberikan kontribusi yang tidak jelas, taksa dan berlebih, sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim cara/pelaksanaan.



Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dengan Bonyamin Saiman (Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) dalam sekmen lima. Peristiwa tutur ini bermula saat Najwa membahas tentang Bonyamin yang menemukan beberapa bukti dan melaporkan ke Jaksa Agung. Kemudian, Bonyamin merespon pernyataan Najwa seperti percakapan di bawah ini.

NS: “Oke karena kan kemudian ada dokumen yang menyebutkan bahwa melapor ke Jaksa Agung dua kali soal pertemuannya menggelar video *call* dan sebagainya, ee itu, itu sesuatu yang memang hasil temuan anda juga ya terjadi atau bagaimana?”

BS: “Gak itu temuan tempo kalau itu saya mengakui karena, saya posisi bahwa Pinangki itu memang pergi keluar negeri terus kemudian Djoko Tjandra itu pasti tidak mudah percaya seorang jaksa yang bukan bidangnya eslonnya bawah terus kemudian bisa dipercaya oleh Djoko Tjandra tanpa sesuatu yang akan diberitahukan dia, baik secara rahasia maupun secara terbuka kepada Djoko Tjandra bahwa saya itu begini lo dekat dengan A dekat dengan B itu, sehingga saya akan bisa memberikan bantuan kepada anda bebas dari hukum untuk mengajukan permohonan fatwa, permohonan fatwa ini akan didukung dari sisi yang kemudian bisa jadi akan didukung oleh instansinya dia, dan dia bisa mencatut level tertinggi, nah tapi mencatut itu bisa juga memang, bersedia dicatut atau malah menyuruh dicatut kan begitukan. (71)”

Tuturan (71) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim cara/pelaksanaan. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban BS pada tuturan (71) yang memberikan kontribusi yang berlebihan kepada NS. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim cara/pelaksanaan mengharuskan setiap peserta tutur berbicara secara langsung, tidak kabur dan tidak berlebih-lebihan. Dalam tuturan (71) terlihat bahwa BS memberikan kontribusi yang berlebihan, sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim cara/pelaksanaan.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dengan Hary Setyono seorang (Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan) dalam sekmen enam. Peristiwa tutur ini bermula saat Najwa merespons jawaban dari Barita yang menceritakan tentang proses pemeriksaan oknum Jaksa Agung yang terlibat. Kemudian, Najwa mengajukan pertanyaan kepada Hary seperti percakapan di bawah ini.

NS: “Oke, berarti betul ya, berarti betul kalau begitu sekarang Pak Hari tolong dijawab karena ini tanda-tanda dulu tidak mau sekarang tidak mau dibuka anda tadi bilang percayakanlah kepada kejaksaan, bagaimana mau percaya kalau ada keengganan seperti ini Pak Hari?”

HS: “Yak baik, memang betul ada perpres 18 tahun 2011 tentang komisi kejaksaan di pasal 4 tadi juga disampaikan komisi kejaksaan berwenang menerima laporan dan menindaklanjuti tetapi perpres tersebut ada tambahannya mungkin Pak Ketua komisi kejaksaan belum menyampaikan tadi saya sampaikan ada MOYU antara komisi kejaksaan dengan bidang pengawasan kalau tidak atau dengan kejaksaan jadi apabila ada laporan pengaduan yang ditujukan ke komisi kejaksaan itu komisi kejaksaan melakukan rapat kalau tidak salah yang saya baca untuk menyerahkan kepada bidang pengawasan atau kejaksa agung untuk dilakukan pemeriksaan oleh bidang pengawasan. Apabila dalam pemeriksaan itu tidak sempurna dan sebagainya maka komisi kejaksaan bisa mengambil alih atau menambahi seperti yang disampaikan oleh Pak Bonyamin tadi dan seterusnya, itu kira-kira.” (78)

Tuturan (78) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice.

Maksim yang dilanggar adalah maksim cara/pelaksanaan. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban HS pada tuturan (78) respons yang diberikan oleh HS sangat panjang dan juga berbelit-belit. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim cara/pelaksanaan mengharuskan setiap peserta tutur berbicara secara langsung, tidak kabur dan tidak berlebih-lebihan. Dalam tuturan (78) terlihat bahwa HS memberikan kontribusi yang runtut dan berkepanjangan sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim cara/pelaksanaan.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Bonyamin Saiman seorang (Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) dengan Hary Setyono (Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan) dalam sekmen tujuh. Peristiwa tutur ini bermula saat Najwa memberikan pertanyaan tentang bagaimana sikap Jaksa Agung karena Jaksa tertingginya terlibat kasus korupsi. Kemudian, Hary menceritakan bahwa pihaknya melakukan pemeriksaan tetapi masih mau klarifikasi dulu tentang kasus korupsi Djoko Tjandra yang melibatkan Jaksa Pinangki. Seperti percakapan di bawah ini.

HS: “Mudah-mudahan ndak lah, mudah-mudahan ndak”

BS: “Berarti boleh masuk? (79)”

Tuturan (79) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim cara/pelaksanaan. Pelanggaran tersebut tergambar dari respons BS pada tuturan (79) yang memberikan kontribusi yang taksa. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim cara/pelaksanaan mengharuskan setiap peserta tutur berbicara secara langsung, tidak kabur, tidak taksa, dan tidak berlebihan. Dalam tuturan (79) *Berarti boleh masuk* terlihat bahwa BS memberikan kontribusi yang taksa dalam tuturan tersebut tidak jelas yang dimaksud boleh masuk itu apa, sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim cara/pelaksanaan.

Pada bagian ini dipaparkan temuan alasan pelanggaran prinsip kerja sama Grice yang terdiri dari maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim cara/pelaksanaan. Berdasarkan data tuturan yang telah penulis peroleh dari program Mata Najwa *Bara di Markas Jaksa* di Trans 7 yang diunduh dari *youtube*, data tuturan tersebut penulis analisis sesuai dengan prinsip kerja sama yang dikemukakan oleh Grice dengan metode analisis isi. Setelah dilakukan analisis data, ditemukan sejumlah konsep yang berkaitan dengan alasan pelanggaran maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim cara/pelaksanaan. Untuk lebih rinci akan dipaparkan di bawah ini.

#### **4.1.2.5 Alasan Pelanggaran Maksim Kuantitas**

Data pada tahap ini diperoleh berdasarkan hasil dokumentasi, simak, dan catat terhadap tuturan pemandu acara (Najwa Sihab) dengan bintang tamunya yang terjadi di program Mata Najwa pada tema *Bara di Markas Jaksa*. Alasan pelanggaran maksim kuantitas diperoleh dengan menganalisis pasangan tuturan dan konteks yang melatarbelakangi munculnya tuturan. Pasangan tuturan yang tergolong pada pelanggaran maksim kuantitas diberi kode, kemudian dibandingkan berdasarkan pemaknaan yang sama lalu ditentukan alasan dari pelanggaran tersebut.

Setelah dianalisis pelanggaran terhadap maksim kuantitas ditemukan 25 pasang tuturan yang melanggar, dari 25 pasang tuturan yang melanggar ditemukan 5 kategori alasan pelanggaran maksim kuantitas di antaranya: keramahan, kesantunan, keakraban, penolakan, dan berbagi informasi. Penjelasan lebih rinci terkait kategori-kategori tersebut dapat dilihat di bawah ini.

## 1. Alasan pelanggaran maksim kuantitas karena “keramahan”

Konteks: Tuturan ini terjadi di awal pembukaan acara pada sekmen satu. Partisipan dalam tuturan ini berjumlah dua orang, yakni Najwa Sihab sebagai pemandu acara dan Hary Setiyono seorang (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Ham Jakarta Selatan) sebagai salah satu narasumber di acara Mata Najwa. Tujuan percakapan tersebut adalah untuk mengetahui kabar dari Hary Setiyono yang akan dimintai keterangan terkait terbakarnya gedung Kejaksaan Agung. Tuturan ini bermula saat pemandu acara (Najwa Sihab) mulai membuka diskusi dan menyapa semua narasumber salah satunya Hary Setiyono tersebut, sehingga terjadilah percakapan sebagai berikut.

NS :“Empat hari setelah kebakaran melanda markas jaksa, spekulasi masih terus bermunculan penyebab kebakaranpun masih jadi tanda tanya, bagaimana perkembangan terkini terkait pengusutan kasus kebakaran ini, hadir di studio mata Najwa kepala pusat penerangan dan hukum kejaksaan agung Hary Setiono. Selamat malam Pak Hary”.

HS : ”Selamat malam, salam sehat untuk semuanya” (1)

Alasan pelanggaran maksim kuantitas yang terjadi pada tuturan (1) di atas karena HS ingin terlihat lebih ramah. Fatmawati (2020: 125) Merumuskan delapan kategori konsep-konsep alasan pelanggaran maksim kuantitas termasuk keramahan dan kesantunan. Hal tersebut tegambar pada tuturan HS yang memberikan penambahan informasi yang tidak dibutuhkan oleh NS yaitu *Salam sehat untuk semuanya*, pada tuturan tersebut menunjukkan keramahan dan kesantunan karena memberikan doa kepada orang lain baik itu untuk NS, narasumber, maupun penontonnya yang tergambar pada kata *Semuanya*.

Konteks :Tuturan ini terjadi di awal pembukaan acara. Partisipan dalam tuturan ini berjumlah dua orang, yakni Najwa Sihab sebagai pemandu acara dan Kurnia Ramadhana seorang (Peneliti Indonesian Korupsion Was) sebagai salah satu narasumber dalam program Mata Najwa yang akan dimintai keterangan terkait terbakarnya gedung Kejaksaan Agung dan beberapa kasus korupsi. Tuturan ini bermula saat Najwa mulai membuka diskusi dan menyapa semua narasumber salah satunya Kurnia Ramadhana tersebut, sehingga terjadilah percakapan sebagai berikut.

NS :“Hadir teman saya peneliti indonesian korupsi was atau ICW Kurnia Ramadana. Selamat malam Kurnia”

KR :“Selamat malam Mba Nana, selamat malam semuanya” (2)

Alasan pelanggaran maksim kuantitas yang terjadi pada tuturan (2) di atas karena KR ingin terlihat lebih ramah. Fatmawati (2020:125) Merumuskan delapan kategori konsep-konsep alasan pelanggaran maksim kuantitas salah satu di antaranya adalah keramahan. Hal tersebut tergambar pada tuturan KR yang memberikan penambahan informasi yang tidak dibutuhkan oleh NS yaitu *Selamat malam semuanya* pada tuturan tersebut menunjukkan keramahan karena memberikan sapaan kepada orang lain baik itu untuk NS, narasumber, maupun penontonnya yang tergambar pada kata *Semuanya*.

Konteks : Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab dan Mahfud MM pada sekmen kedua. Tuturan ini adalah tuturan penutup, lalu Najwa mengucapkan terima kasih kepada Mahfud, seperti pada percakapan di bawah ini.

NS: “Baik, baik Pak Mahfud terimakasih waktu anda untuk Mata Najwa malam ini Pak,

MM: “Makasih Najwa, jumpa lagi di lain waktu” (37)

Alasan pelanggaran maksim kuantitas yang terjadi pada tuturan (37) di atas karena MM terlihat ramah. Hal tersebut tergambar pada respons MM pada kalimat *Jumpa lagi di lain waktu*. Kalimat tersebut menandakan keramahan. Sejalan dengan Fatmawati (2020:123—125) menyebutkan bahwa salah satu alasan pelanggaran maksim kuantitas adalah keramahan.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab dan Satriadi Gunawan pada sekmen ketiga. Tuturan ini adalah percakapan pertama antara Najwa dan Satriadi, Najwa menceritakan kronologi pemadaman kebakaran yang terjadi di Gedung Kejaksaan, kemudian menyapa Satriadi Gunawan, seperti pada percakapan di bawah ini.

NS: “Yak membutuhkan waktu kurang lebih 11 jam untuk bisa menaklukkan api di gedung kejaksaan agung yang terbakar 65 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan bagaimana api bisa

menghanguskan seluruh gedung utama Kejaksaan, sudah hadir di *Mata Najwa* kepala dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan GULKARMAT provinsi DKI Jakarta hadir Bapak, saya mengundang Pak Satria Digunawan yang akrab disapa Pak Bili, selamat malam Pak Bili”

SG: “Selamat malam Mba Nana, salam sejahtera untuk kita semua” (41)

Alasan pelanggaran maksim kuantitas yang terjadi pada tuturan (41) di atas karena SG ingin terlihat lebih ramah. Hal tersebut tegambar pada tuturan SG yang memberikan penambahan informasi yang tidak dibutuhkan oleh NS yaitu *Salam sejahtera untuk kita semua* pada tuturan tersebut menunjukkan keramahan dan kesantunan karena memberikan doa kepada orang lain baik itu untuk NS, narasumber, maupun penontonnya yang tergambar pada kalimat *Untuk kita semua*. Sejalan dengan Fatmawati (2020:123—125) menyebutkan bahwa alasan pelanggaran maksim kuantitas adalah keramahan dan kesantunan.

Konteks : Tuturan ini terjadi antara Najawa Shihab dan Satriadi Gunawan pada sekmen ketiga. Tuturan ini adalah percakapan pertama antara Najwa dan Satriadi, Najwa menceritakan kronologi pemadaman kebakaran yang terjadi di Gedung Kejaksaan, kemudian menyapa Satriadi Gunawan, seperti pada percakapan di bawah ini.

NS: “Terima kasih sudah hadir di *Mata Najwa* Pak”

SG: “Sama-sama Mba Nana, terima kasih juga telah mengundang saya”  
(42)

Alasan pelanggaran maksim kuantitas yang terjadi pada tuturan (42) di atas karena SG terlihat lebih ramah. Hal tersebut tegambar pada tuturan SG yang tidak dibutuhkan oleh NS yaitu *Terimakasih juga telah mengundang saya* pada tuturan tersebut menunjukkan bahwa SG ramah terhadap Najwa dengan mengucapkan Terima kasih. Sejalan dengan Fatmawati (2020:123—125) menyebutkan bahwa salah satu alasan pelanggaran maksim kuantitas adalah keramahan.

Konteks : Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dan Fatmawati Lestari (Pakar *Fire Safety* FKM UI Depok Jawa Barat) pada sekmen ketiga. Tuturan ini adalah percakapan pertama antara Najwa dan Fatmawati, Najwa mengatakan bahwa ia sudah terhubung melalui *video call* dengan Fatmawati Lestari seorang pakar *fire safety* dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, kemudian Najwa menyapa Fatmawati, seperti pada percakapan di bawah ini.

NS: “Saya juga terhubung dari luar dengan Ibu Fatma Lestari pakar *fire safety* dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, selamat malam Bu Fatma”

FL: “Selamat malam Mba Nana, selamat malam juga semuanya” (43)

Alasan pelanggaran maksim kuantitas yang terjadi pada tuturan (43) di atas karena FL ingin terlihat lebih ramah. Hal tersebut tergambar pada tuturan FL yang memberikan penambahan informasi yang tidak dibutuhkan oleh NS yaitu *Selamat malam juga semuanya* pada tuturan tersebut menunjukkan keramahan dan kesantunan karena memberikan salam atau sapaan kepada orang lain baik itu untuk NS, narasumber, maupun penontonnya yang tergambar pada kata *Semuanya*. Sejalan dengan Fatmawati (2020:123—125) menyebutkan bahwa alasan pelanggaran maksim kuantitas adalah keramahan dan kesantunan.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dan Satriadi Gunawan (Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta) pada sekmen keempat. Tuturan ini adalah tuturan lanjutan dari tuturan sebelumnya mengenai hal-hal yang dilakukan dalam investigasi. Najwa kembali bertanya kepada Satriadi. Sehingga terjadilah percakapan seperti di bawah ini.

NS: “Ada rasa gemas mungkin”

SG: “Ya, pasti ada rasa, tapi ya manakala dibutuhkan kami siap” (55)

Alasan pelanggaran maksim kuantitas yang terjadi pada tuturan (55) di atas karena SG terlihat lebih ramah dalam menjawab pertanyaan NS. Hal tersebut tergambar pada tuturan (55) *Tapi ya manakala dibutuhkan kami siap*. Fatmawati (2020:125) menyatakan bahwa terdapat 8 konsep pelanggaran maksim kuantitas salah satu di antaranya adalah keramahan.



Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dan Barita Simanjuntak (Ketua Komisi Kejaksaan) pada sekmen keempat. Sekmen empat Najwa mewawancarai Barita melalui video *call* terkait spekulasi penanganan kasus Djoko Tjandra. Lalu Najwa menyapa Barita Seperti percakapan di bawah ini.

NS: “Yak kebakaran gedung kejaksaan memicu spekulasi terkait penanganan kasus Djoko Tjandra yang melibatkan Jaksa Pinangki, selain narasumber di studio kita sudah terhubung dengan ketua komisi kejaksaan Barita Simanjuntak, selamat malam Pak Barita.

PB: “Selamat malam Mba Nana, selamat malam Pak Arsep, Pak Mas Boyamin, Mas kurnia. (65)

Alasan pelanggaran maksim kuantitas yang terjadi pada tuturan (65) di atas karena PB ingin terlihat lebih ramah. Hal tersebut tegambar pada tuturan PB yang memberikan penambahan informasi yang tidak dibutuhkan oleh NS yaitu *Selamat malam Pak Arsep, Pak Mas Boyamin, Mas kurnia* pada tuturan tersebut menunjukkan keramahan karena menyapa orang lain selain NS. Fatmawati (2020:125) menyatakan bahwa terdapat 8 konsep pelanggaran maksim kuantitas salah satu di antaranya adalah keramahan.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dan Barita Simanjuntak (Ketua Komisi Kejaksaan) dalam sekmen tujuh. Peristiwa tutur ini terjadi saat Najwa sebagai pemandu acara mengatakan bahwa waktu program Mata Najwa telah habis dan mengucapkan salam kepada Barita sebagai salam penutup, seperti percakapan di bawah ini.

NS: “Mohon maaf Pak Barita waktunya sudah habis kita juga akan mendorong supaya komisi kejaksaan bisa dapat akses untuk memeriksa karena sekali lagi ini komisi independen yang perlu untuk mewakili publik menjawab berbagai spekulasi yang ada. Selamat bekerja Pak Barita kita akan dorong terus supaya komisi kejaksaan terus”

PB: “Terimakasih, sip selamat kerja kembali Nana dan semuanya” (83)

Alasan pelanggaran maksim kuantitas yang terjadi pada tuturan (83) di atas karena PB ingin terlihat lebih ramah dan santun. Hal tersebut tegambar pada tuturan Hary yang memberikan penambahan informasi yang tidak dibutuhkan

oleh NS yaitu *Sip selamat kerja kembali Nana dan semuanya* pada tuturan tersebut menunjukkan keramahan karena selamat kepada orang lain baik itu untuk NS, narasumber, maupun penontonnya yang tergambar pada kata *Semuanya*. Fatmawati (2020:125) menyatakan bahwa terdapat 8 konsep pelanggaran maksimum kuantitas salah satu di antaranya adalah keramahan.

## 2. Alasan pelanggaran maksimum kuantitas karena “kesantunan”

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dan Muhammad Mahfud MD seorang (Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM) sebagai salah satu narasumber dalam program *Mata Najwa* yang akan dimintai keterangan terkait terbakarnya gedung Kejaksaan Agung. Tujuan dari tuturan ini adalah untuk mengetahui kabar dari Mahfud. Tuturan ini bermula saat Najwa mulai membuka diskusi dan menyapa semua narasumber salah satunya Muhammad Mahfud MD, sehingga terjadilah percakapan sebagai berikut.

NS :“Saya juga sudah terhubung lewat *video call* dengan menteri koordinator politik hukum dan ham Muhammad Mahfud Md. “Selamat malam, *assalamualaikum* Pak Mahfud”

MM :“*Walaikumsalam*, Najwa dan semuanya, Hari, Mas Bonyamin, Mas Ramadani.” (3)

Alasan pelanggaran maksimum kuantitas yang terjadi pada tuturan (3) di atas karena MM ingin terlihat santun. Fatmawati (2020: 125) Merumuskan delapan kategori konsep-konsep alasan pelanggaran maksimum kuantitas termasuk keramahan dan kesantunan. Hal tersebut tergambar pada tuturan MM pada tuturan (3) yang memberikan penambahan informasi yang tidak dibutuhkan oleh NS yaitu *Najwa dan semuanya, Hari, Mas Bonyamin, Mas Ramadhan* pada tuturan tersebut menunjukkan keramahan dan kesantunan karena memberikan sapaan kepada orang lain tidak hanya untuk NS. Tetapi, untuk narasumber, maupun penontonnya juga yang tergambar pada kata *Semuanya*.

Konteks : Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab dan Mahfud MM pada sekmen kedua. Tuturan ini adalah tuturan penutup, lalu Najwa basa-basi kepada Mahfud, seperti pada percakapan di bawah ini.

NS: “Sehat-sehat terus ya Pak”

MM: “Alhamdulillah sehat, terimakasih Najwa dan semuanya juga sehat-sehat” (38)

Alasan pelanggaran maksim kuantitas yang terjadi pada tuturan (38) di atas karena MM ingin terlihat lebih santun. Hal tersebut tergambar pada tuturan MM yang memberikan penambahan informasi yang tidak dibutuhkan oleh NS yaitu *Semuanya juga sehat-sehat* pada tuturan tersebut menunjukkan keramahan dan kesantunan karena memberikan doa kepada orang lain baik itu untuk NS, narasumber, maupun penontonnya yang tergambar pada kata *Semuanya*. Sejalan dengan Fatmawati (2020:123—125) menyebutkan bahwa alasan pelanggaran maksim kuantitas adalah keramahan dan kesantunan.

### 3. Alasan pelanggaran maksim kuantitas karena “berbagi informasi”

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dan Muhammad Mahfud MD seorang (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Ham) sebagai salah satu narasumber dalam program Mata Najwa yang akan dimintai keterangan terkait terbakarnya gedung Kejaksaan Agung. Tuturan ini bermula saat Najwa mulai memberi pertanyaan kepada salah satu narasumbernya yang dihubungi melalui panggilan video yaitu Muhammad Mahfud MD adapun percakapannya seperti di bawah ini.

NS: “Terima kasih sudah bergabung Pak Mahfud. Pak saya mau langsung *to the point* ya Pak Mahfud karnakan anda bahkan pada malam saat terjadi kebakaran langsung berani menyebut dan menjamin berkas-berkas perkara aman 100% tidak akan mengganggu proses penanganan perkara, keyakinan Pak Mahfud dari mana Pak? bahkan sudah disebutkan pada saat kebakarannya masih terjadi”.

MM: “Karena saya langsung berhubungan dengan Jaksa Agung dan jampidum, itu gimana perkara-perkara yang sedang ditangguh. Oo jauh Pak, bukan disitu kalau berkas perkara, gitu. Jadi yang saya jamin aman tu jamak perkara yang sedang ditangani yang

pada saat itu sering disebut ada dua. Satu, soal Djoko Chandra dan Pinangki, yang kedua soal Jiwasraya (4)

Alasan pelanggaran maksim kuantitas yang terjadi pada tuturan (4) di atas karena MM ingin berbagi informasi. Hal tersebut tergambar pada tuturan (4) MM yang memberikan informasi bahwa ia berbicara langsung dengan jaksa agung yang mana hal tersebut tidak dibutuhkan NS pada saat itu. Sejalan dengan pendapat Fatmawati (2020:125) yang merumuskan delapan kategori konsep-konsep alasan pelanggaran maksim kuantitas salah satunya adalah berbagi informasi.

Konteks : Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab selaku pemandu acara dan Mahfud MD pada segmen pertama. Najwa bertanya apakah tidak terpikirkan oleh Mahfud tentang ketidak wajaran melihat besarnya kebakaran yang terjadi. Sehingga terjadilah percakapan seperti dibawah ini.

NS: “Apa Pak Mahfud, boleh saya tau Pak lintasan pertama dibenak karena mungkin saja itu yang benar Pak, hans Pak Mahfud apa? waktu terlintasnya ini dibakar.

MM: “Ya lintasan pertama karena sedang nangani perkara itu jangan-jangan ini ada yang sengaja orang dalam, kan gitu itu saya kira siapa aja bisa mengira begitu, manusiawi saya juga mengira begitu tetapi sesudah telpon itu, Pak gedungnya jauh yang diseberang sana itu kalo gedung yang nangani perkara itu begitu.  
(9)

Alasan pelanggaran maksim kuantitas pada data tuturan (9) di atas karena MM menambahkan informasi pendukung untuk tuturannya agar NS mendapatkan informasi yang selengkap-lengkapnyanya. Hal tersebut tergambar pada data tuturan (9) *Itu saya kira siapa aja bisa mengira begitu, manusiawi saya juga mengira begitu tetapi sesudah telpon itu, Pak gedungnya jauh yang diseberang sana itu kalo gedung yang nangani perkara itu begitu.* Fatmawati (2020:126)

menyebutkan bahwa salah satu alasan pelanggaran maksim kuantitas karena adanya keinginan untuk berbagi informasi dalam percakapan.

Konteks : Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab selaku pemandu acara dan Kurnia Ramadhana (Peneliti ICW) pada segmen kedua. Najwa bertanya mengenai pernyataan Kurnia yang sebelumnya menyebutkan tentang gelar perkara. Sehingga terjadilah percakapan seperti dibawah ini.

NS: “Ini spesifik gelar perkara terhadap?”

KR: “Gelar perkara kasus suap surat jalan dan reknotis, itu kabarnya sih mengundang KPK tapi sampai hari ini kok terlihat seperti kejaksaan agung menutup diri, itu yang ada” (20)

Alasan pelanggaran maksim kuantitas pada data tuturan (20) di atas karena MM menambahkan informasi pendukung untuk tuturannya agar NS mendapatkan informasi yang selengkap-lengkapnyanya. Hal tersebut tergambar pada tuturan KR (20) yaitu *Itu kabarnya sih mengundang KPK tapi sampai hari ini kok terlihat seperti kejaksaan agung menutup diri, itu yang ada*. Berdasarkan tuturan tersebut KR ingin NS lebih tahu atas informasi yang ia sampaikan. Sejalan dengan Fatmawati (2020: 126) menyebutkan bahwa salah satu alasan pelanggaran maksim kuantitas karena adanya keinginan untuk berbagi informasi dalam percakapan.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dan Satriadi Gunawan (Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta) pada sekmen ketiga. Tuturan ini adalah percakapan lanjutan antara Najwa dan Satriadi, Najwa memutar sebuah video kebakaran pemberian dari Satriadi, lalu Najwa mengajukan pertanyaan tentang apakah benar titik mula api cepat menjalar karena kondisi gedung yang sudah tua, seperti pada percakapan di bawah ini.

NS: “Tapi ketika kemudian masuk kedalam itu titik api dimula memang dari lantai 6 dan cepat sekali menjalar ke titik-titik yang lain itu karena kondisi gedungnya yang tadi anda katakan?”

SG: “Betul, jadi pada saat jam tepatnya sekitar jam 7.10 menit itu sampai dengan jam 12 kita bisa mengantisipasi melokalisir satu

setengah gedung utama kejaksaan agung itu, hanya pas jam 1 tepatnya itu *flash over* terjadi di lantai 6 kemudian merambat sampai ke sisi selatan gedung kejaksaan agung. (46)

Alasan terjadinya pelanggaran maksim kuantitas pada data (46) karena SG menceritakan proses saat memadamkan kebakaran, hal itu dilakukan supaya NS mendapatkan informasi yang lengkap. Hal tersebut tergambar pada kalimat *Jadi pada saat jam tepatnya sekitar jam 7.10 menit itu sampai dengan jam 12 kita bisa mengantisipasi melokalisir satu setengah gedung utama kejaksaan agung itu, hanya pas jam 1 tepatnya itu flash over terjadi di lantai 6 kemudian merambat sampai ke sisi selatan gedung kejaksaan agung.* Sejalan dengan Fatmawati (2020:126) menyebutkan bahwa salah satu alasan pelanggaran maksim kuantitas karena adanya keinginan untuk berbagi informasi dalam percakapan.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najawa Shihab sebagai pemandu acara dan Satriadi Gunawan (Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta) pada sekmen ketiga. Tuturan ini adalah percakapan lanjutan antara Najwa dan Satriadi, sebelumnya Satriadi menyebutkan tentang *flash over*, kemudian, Najwa mengajukan pertanyaan tentang apa istilah dari *flash over* tersebut, seperti pada percakapan di bawah ini.

NS: “Apa istilahnya Pak *flash over* itu?”

SG: “*Flahs over* itu ada pengaruh dari asap, pengaruh asap yang bisa mengakibatkan panas nah itu juga merambat sampai ke sebelah sisi selatan gedung kejaksaan agung. (47)

Alasan pelanggaran maksim kuantitas yang terjadi pada tuturan (47) di atas karena SG terlihat berbagi informasi. Hal tersebut tergambar pada tuturan SG yang memberikan informasi yang tidak dibutuhkan oleh NS yaitu *Pengaruh asap yang bisa mengakibatkan panas nah itu juga merambat sampai ke sebelah sisi selatan gedung kejaksaan agung* pada tuturan tersebut menunjukkan suatu informasi yang diberikan oleh SG supaya NS lebih tahu. Sejalan dengan

Fatmawati (2020:126) menyebutkan bahwa salah satu alasan pelanggaran maksim kuantitas karena adanya keinginan untuk berbagi informasi dalam percakapan.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najawa Shihab sebagai pemandu acara dan Satriadi Gunawan (Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta) pada sekmen ketiga. Tuturan ini adalah percakapan lanjutan antara Najwa dan Satriadi, Najwa kembali mengajukan pertanyaan berdasarkan dari pengalaman Satriadi apakah kebakaran di gedung Jaksa Agung termasuk kebaran yang besar, seperti pada percakapan di bawah ini.

NS: “Dari pengalaman anda memadamkan kebakaran, ini termasuk yang besar Pak?”

SG: “Besar, termasuk besar ini karena satu gedung ada 6 lantai memanjang areanya cukup luas dan cukup besar, dan api juga dengan cepat merambat ke bagian yang lainnya” (48)

Alasan pelanggaran maksim kuantitas yang terjadi pada tuturan (48) di atas karena SG terlihat berbagi informasi. Hal tersebut tergambar pada tuturan SG yang menceritakan kondisi gedung Jaksa Agung pada saat api merambat ke bagian gedung yang lainnya. Hal tersebut tergambar pada data tuturan (48) *Satu gedung ada 6 lantai memanjang areanya cukup luas dan cukup besar, dan api juga dengan cepat merambat ke bagian yang lainnya*. Kalimat tersebut disampaikan supaya NS mendapatkan informasi selengkap-lengkapny sehingga tidak bertanya lagi. Sejalan dengan Fatmawati (2020: 126) menyebutkan bahwa salah satu alasan pelanggaran maksim kuantitas karena adanya keinginan untuk berbagi informasi dalam percakapan.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najawa Shihab sebagai pemandu acara dan Satriadi Gunawan (Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta) pada sekmen keempat. Tuturan ini tujuannya untuk mengetahui hal-hal apa saja yang meliputi dalam investigasi. Najwa mengajukan pertanyaan tersebut kepada Satriadi. Namun, satriadi tidak mengetahui hal tersebut, sehingga terjadilah percakapan seperti di bawah ini.

NS: “Hmm jadi anda tidak dilibatkan ni oleh, oleh Puslabfor tidak dimintai nasehat juga tidak dimintai masukan sebagai orang yang sehari-hari urusan dengan api?”

SG: “Tidak Mba Nana, saya hanya melakukan tugas saya dengan mengerahkan semua anggota saya untuk turun ke TKP (53)”

Alasan pelanggaran maksim kuantitas yang terjadi pada tuturan (53) di atas karena SG berbagi informasi dengan menambahkan tuturan lain di luar pertanyaan NS. Hal tersebut tergambar pada kalimat *Saya hanya melakukan tugas saya dengan mengerahkan semua anggota saya untuk turun ke TKP*. Supaya NS lebih tahu, Fatmawati (2020:126) menjelaskan bahwa salah satu alasan pelanggaran maksim kuantitas adalah adanya keinginan untuk berbagi informasi.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najawa Shihab sebagai pemandu acara dan Fatmawati Lestari Fatmawati Lestari (Pakar Fire Safety FKM UI Depok Jawa Barat) Najwa kemabali bertanya kepada Fatma karena sebelumnya Najwa bertanya kepada Satriadi apakah dalam investigasi sengaja dibakar atau disabotase bisa diketahui dan Satriadi menjawab bisa, lalu Najwa bertanya hal yang sama kepada Fatmawati. Seperti percakapan di bawah ini.

NS: “Oke saya ingin ke Bu Fatma, Buk Fatma jadi dugaan sabotase kalau memang ada itu sesungguhnya bisa ditemukan dalam penyelidikan kasus-kasus seperti ini Buk?”

FL: “Betul sekali Mba Nana, jadi kita menggunakan sains dengan mengambil sampel dari tempat lokasi kejadian kebakaran kemudian dibawa ke laboratorium untuk membutikan apakah disitu ada jejak-jejak apabila terjadi sabotase misalnya jejak-jejak adakah hidrokarbon karena di sebuah perkantoran tentunya jejak hidrokarbon ini tidak ada sebagai sumber bahan bakar, kalau disitu ditemukan ada jejak-jejak hidrokarbon maka ada kemungkinan di bakar, tetapi kalau itu tidak ada maka murni karena terbakar begitu. Kemudian, disamping itu juga bisa terlihat dari material-material yang merupakan sumber dari selain bahan bakar kemudian juga dari sumbernya dari dimana lokasi pertama api itu bisa terjadi dari pola kebakarannya itu semua bisa ditemukan di investigasi dan didalam sebuah investigasi sebetulnya bisa saja melibatkan ahli



ataupun melibatkan damkar atau melibatkan ekspert, witnes, atau saksi untuk bisa merangkum hasil investigasi tersebut secara lebih komprehensif” (57)

Alasan pelanggaran maksim kuantitas yang terjadi pada tuturan (57) di atas karena FL memberikan informasi bahwa sabotase bisa ditemukan dalam penyelidikan menggunakan sains. Hal tersebut tergambar pada data tuturan FL (57) *Kita menggunakan sains dengan mengambil sampel dari tempat lokasi kejadian kebakaran kemudian dibawa ke laboratorium untuk membutikan apakah disitu ada jejak-jejak apabila terjadi sabotase misalnya jejak-jejak adakah hidrokarbon karena di sebuah perkantoran tentunya jejak hidrokarbon ini tidak ada sebagai sumber bahan bakar.* Fatmawati (2020:126) menjelaskan bahwa salah satu alasan pelanggaran maksim kuantitas adalah adanya keinginan untuk berbagi informasi.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najawa Shihab sebagai pemandu acara dan Hary Setyono (Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan) pada sekmen keempat. Sebelumnya Satriadi membahas tentang standarisasi pengamanan proteksi kebakaran, lalu Najwa bertanya kepada Hary karena dia adalah seorang Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan. Kenapa sistem proteksi tersebut tidak ada di gedung Jaksa Agung. Seperti percakapan di bawah ini.

NS: “Itu karena memang sesuatu yang tidak pernah dirasa perlu atau karena lalai saja atau karena tidak sempat atau kenapa Pak?”

HS: “Ya barang kali lalai saja, mungkin sudah beranggapan oo ini masuk cagar budaya maka pengelolaannya sesuai dengan standar yang ada di dalam pengelolaan cagar budaya, nah tadi saya katakan bahwa kenapa kami mengatakan itu cagar budaya di tahun 2018 tadi yang sudah saya sampaikan nah tentunya kalau itu masuk di dalam kawasan cagar budaya saya pikir perlakuannya juga harus memenuhi standar pengamanan untuk cagar budaya dan barang kali kami sebagai yang menempati tentu juga pemerintah provinsi DKI yang seharusnya juga peduli terhadap gedung-gedung yang sudah ditetapkan masuk di dalam kawasan itu. (60)

Alasan pelanggaran maksim kuantitas yang terjadi pada tuturan (60) di atas karena HS menambahkan informasi pendukung atas jawabannya. Hal tersebut tergambar pada data tuturan HS (60) *Mungkin sudah beranggapan oo ini masuk cagar budaya maka pengelolaannya sesuai dengan standar yang ada di dalam pengelolaan cagar budaya.* Fatmawati (2020:126) menjelaskan bahwa salah satu alasan pelanggaran maksim kuantitas adalah adanya keinginan untuk berbagi informasi.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dan Barita Simanjuntak (Ketua Komisi Kejaksaan) dalam sekmen ke-enam. Pada sekmen ini Najwa meminta klarifikasi kepada Barita tentang komisi independen yang belum mendapat akses untuk memeriksa Jaksa Pinangki, seperti percakapan di bawah ini.

NS: “Iyaaak saya ingin ke Pak Barita komisi kejaksaan, perlu ditekankan jadi ini komisi kejaksaan komisi independen yang memang sejak awal menerima laporan masyarakat dan berniat memeriksa Jaksa Pinangki tetapi kemudian dikatakan tidak perlu diperiksa karena sudah diperiksa internal dan sampai sekarang juga masih belum dapat akses untuk memeriksa langsung Jaksa Pinangki, begitu Pak Barita?”

PB: “Yak betul, tapi saya perlu sampaikan bahwa kami melaksanakan pasal 4 A peraturan presiden NO 18 tahun 2011 yang mengatakan wewenang komisi kejaksaan adalah menerima dan menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat tentang kinerja dan perilaku jaksa dalam melakukan tugas dan wewenangnya. Itu makanya kami mengundang untuk didengarkan penjelasan dan keterangannya kami belum masuk tahapan pemeriksaan masih meminta penjelasan dan keterangan, itu perlu di sampaikan sehingga klir buat kita bahwa komisi kejaksaan melakukan tugasnya berdasarkan peraturan presiden Mbak Nana. (74)”

Alasan pelanggaran maksim kuantitas yang terjadi pada tuturan (74) di atas karena BS terlihat menambahkan tuturan lain di luar pertanyaan yang diajukan oleh NS. Hal tersebut tergambar pada data tuturan (74) *Tapi saya perlu sampaikan bahwa kami melaksanakan pasal 4 A peraturan presiden NO 18 tahun*

2011 yang mengatakan wewenang komisi kejaksaan adalah menerima dan menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat tentang kinerja dan perilaku jaksa dalam melakukan tugas dan wewenangnya. Kalimat tersebut dituturkan supaya NS mendapatkan informasi yang lengkap. Fatmawati (2020:126) menjelaskan bahwa salah satu alasan pelanggaran maksim kuantitas adalah adanya keinginan untuk berbagi informasi.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dan Hary Setyono (Ketua Penerangan Hukum Kejaksaan Agung) dalam sekmen tujuh. Pada sekmen ini Bonyamin membahas tentang pengaduannya terhadap Jaksa Agung yang belum juga ditindak lanjuti. Kemudian, Najwa sebagai pemandu acara mengajukan pertanyaan kepada Hary Setyono karena ia seorang KEPUSPENKUM KEJAKSAAN AGUNG, seperti percakapan di bawah ini.

NS: “Oke, apakah akan ada rencana memeriksa internal kejaksaan sendiri, apakah misalnya akan memeriksa jaksa agungnya sendiri karena namanya disebut-sebut akan memeriksa mantan jam intel Janmarinka karena namanya disebut-sebut?”

HS: “Yak, sebagaimana kita ketahui bahwa sudah ada penyidikan terhadap jaksa PSM tentu penyidikan akan lebih kuat apakah diperoleh dari keterangan para saksi ataupun tersangka untuk mengait ke masalah itu oleh karena itu ini sudah cukup kuat sudah dilakukan penyidikan saya kira itu lebih dipertekankan. (81)”

Alasan pelanggaran maksim kuantitas yang terjadi pada tuturan (81) di atas karena BS menambahkan tuturan lain diluar pertanyaan. Hal tersebut tergambar pada data tuturan (81) *Kita ketahui bahwa sudah ada penyidikan terhadap jaksa PSM tentu penyidikan akan lebih kuat apakah diperoleh dari keterangan para saksi ataupun tersangka untuk mengait ke masalah itu oleh karena itu ini sudah cukup kuat sudah dilakukan penyidikan saya kira itu lebih dipertekankan.* Kalimat tersebut dituturkan supaya NS lebih tahu. Fatmawati (2020:126) menjelaskan bahwa salah satu alasan pelanggaran maksim kuantitas adalah adanya keinginan untuk berbagi informasi.

#### 4. Alasan pelanggaran maksim kuantitas karena “keakraban”

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab selaku pemandu acara dan Mahfud MD pada segmen pertama. Najwa bertanya apakah tidak terpikirkan oleh Mahfud tentang ketidak wajaran melihat besarnya kebakaran yang terjadi. Sehingga terjadilah percakapan seperti dibawah ini.

NS: “Tapi.. Pak Mahfud pertanyaan saya apakah Pak Mahfud sendiri tidak terlintas dibenak Pak Mahfud mungkin saja ada ketidak wajaran, tidak pernah terlintas sama sekali Pak? Melihat besarnya kebakaran.

MM: “Semula terlintas, semula terlintas karena begini saya tidak tau kebakarannya, tiba-tiba itu ada telpon, Kejaksaan Agung kebakaran lalu saya liat televisi sudah parah lalu saya baca di media di medsos macam-macam ada kecurigaan saya juga ikut curiga gitu, terlintas, lalu saya telpon Jaksa Agung gimana Pak. Ooo Pak saya ada di tengah-tengah, gimana tu perkara-perkara itu gitu, aman. Oo aman saya terus telpon Fadil Sumana juga aman, lalu saya katakan saya terlintas ndak mungkin lah tidak telintas, kalo itu bohong kalo (8)

Alasan pelanggaran maksim kuantitas yang terjadi pada tuturan (8) di atas karena MM terlihat menambah topik pembicaraan, supaya lebih bersosialisasi, lebih akrab makanya ada penambambahan informasi. Hal tersebut tegambar pada tuturan MM yang memberikan penambahan informasi yang tidak dibutuhkan oleh NS yang terdapat pada tuturan (8) yang menyatakan *Karena begini saya tidak tau kebakarannya, tiba-tiba itu ada telpon, kejaksaan agung kebakaran lalu saya liat televisi sudah parah lalu saya baca di media di medsos macam-macam ada kecurigaan saya juga ikut curiga gitu, terlintas, lalu saya telpon jaksa agung.* Fatmawati (2020:127) menyebutkan bahwa keakraban menjadi salah satu alasan pelanggaran terhadap maksim kuantitas.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dan Barita Simanjuntak (Ketua Komisi Kejaksaan) dalam sekmen ke-enam. Tuturan ini adalah tuturan lanjutan dari tuturan sebelumnya. Najwa kembali bertanya kepada Barita tentang akses komisi kejaksaan untuk

mendapatkan hasil laporan, dan tidak ada hal yang ditutupi oleh Jaksa Agung, seperti percakapan di bawah ini.

NS: “Pak Barita, apakah mendapatkan akses itu, karena tadi di awal Pak Mahfud MD mengatakan bahwa seharusnya komisi kejaksaan bisa juga mendapatkan akses tidak perlu menunggu 2 minggu untuk mendapatkan laporan, apakah memang merasa ada ketidak ada tertutupi kejaksaan agung tidak membuka ke komisi kejaksaan, betulkah kesan itu?”

PB: “Iya, karena pertama kami mengundang oknum Jaksa P itu tanggal 27 juli tidak datang tanpa alasan tanggal 30 juli kami undang kedua juga tidak datang. Namun kami mendapatkan surat dari atasannya bahwa karena pemeriksaan pengawasan sudah berjalan sehingga artinya komisi kejaksaan tidak perlu memeriksa lagi. Itu sebabnya sesuai dengan pasal 4 C peraturan presiden kami meminta laporan hasil pemeriksaannya sebab itu wewenang komisi kalau kami tidak bisa periksa. Kasih dong mana LHP nya karena LHP ini diperlukan supaya kami bisa menjawab ini maki, Mas Bonyamin inikan kejar terus ni, mana hak dia itu sebagai pelapor harus kita sampaikan untuk memberi jawaban itu kami harus membutuhkan dokumen itu.  
(75)

Alasan pelanggaran maksim kuantitas yang terjadi pada tuturan (75) di atas karena BS menambahkan tuturan lain dengan menceritakan hal-hal di luar pertanyaan yang diajukan oleh NS, itu dilakukan oleh BS supaya terlihat lebih akrab. Hal tersebut tergambar pada data tuturan (75) *Karena pertama kami mengundang oknum jaksa P itu tanggal 27 juli tidak datang tanpa alasan tanggal 30 Juli kami undang kedua juga tidak datang*. Fatmawati (2020:125) menyatakan bahwa salah satu alasan pelanggaran maksim kuantitas adalah keakraban.

##### 5. Alasan pelanggaran maksim kuantitas karena “penolakan”

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najawa Shihab sebagai pemandu acara dan Barita Simanjuntak (Ketua Komisi Kejaksaan) pada sekmen ke-lima. Sekmen lima Najwa mewawancarai Barita melalui video *call* terkait spekulasi penanganan kasus Djoko Tjandra. Lalu Najwa menyapa Barita Seperti percakapan di bawah ini.

NS: “Baik sebelum ke anda saya mau ke maki dulu Bonyamin yang sejak awal mengawal kasus ini, apa *to the point*. Jadi anda tidak percaya jaksa Pinangki bekerja sendirian pasti ada orang lain yang terlibat.

BS: “Iyalah, masak dalam konteks itu menerima suap pemberi gak ada, ini ngarangnya bukan main ini kejaksanaan agung ini. (66)

Alasan pelanggaran maksim kuantitas yang terjadi pada tuturan (66) di atas karena informasi yang diberikan BS tidak mendukung tuturan NS. Hal tersebut tergambar pada data tuturan (66) *Masak dalam konteks itu menerima suap pemberi gak ada, ini ngarangnya bukan main ini kejaksanaan agung ini*. Kalimat tersebut menandakan bahwa BS menolak pernyataan NS. Fatmawati (2020:125) menyatakan bahwa alasan pelanggaran maksim kuantitas terdiri dari 8 konsep salah satu di antaranya adalah penolakan.

#### **4.1.2.6 Alasan Pelanggaran Maksim Kualitas**

Data pada tahap ini diperoleh berdasarkan hasil dokumentasi, simak, dan catat terhadap tuturan pemandu acara (Najwa Sihab) dengan bintang tamunya yang terjadi di program Mata Najwa pada tema *Bara di Markas Jaksa*. Alasan pelanggaran maksim kualitas diperoleh dengan menganalisis pasangan tuturan dan konteks yang melatarbelakangi munculnya tuturan. Pasangan tuturan yang tergolong pada pelanggaran maksim kualitas diberi kode, kemudian diabandingkan berdasarkan pemaknaan yang sama lalu ditentukan alasan dari pelanggaran tersebut.

Setelah dianalisis pelanggaran terhadap maksim kualitas ditemukan 8 pasang tuturan yang melanggar, dari 8 pasang tuturan yang melanggar ditemukan 5 kategori alasan pelanggaran maksim kualitas di antaranya: humor, sindiran, mengelak, provokasi, dan tidak tahu jawaban pasti. Selain alasan tersebut, maksim

kualitas jarang dilanggar karena program Mata Najwa termasuk acara yang membahas sesuatu yang formal dan ditonton oleh banyak orang. Maka dari itu baik pemandu acara maupun bintang tamu harus profesional dan berbicara sesuai dengan faktanya. Penjelasan lebih rinci terkait kategori-kategori tersebut dapat dilihat di bawah ini.

#### 1. Pelanggaran maksim kualitas karena “humor”

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Mahfud MD (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Ham) dan Najwa Shihab sebagai pemandu acara. Dalam sekmen dua. Pada sekmen ini topik yang dibahas adalah tentang persetujuan Mahfud MD untuk mengundang KPK dalam melakukan penyelidikan. Sebelumnya Bonyamin meminta untuk persetujuan Mahfud langsung diimplementasikan dan menghubungi Jaksa Agung, lalu di respons oleh Mahfud dan Najwa, seperti percakapan di bawah ini.

NS: “Tapi seharusnya apakah bisa jeruk makan jeruk pak?”  
MM : “Ndak papa jeruk makan jeruk (hahaha)” (32)

Alasan pelanggaran maksim kualitas dalam data (32) tersebut karena MM menciptakan humor agar suasana menjadi lebih santai. Hal tersebut tergambar dari tuturan MM pada data (32) yaitu *Ndak pa jeruk makan jeruk (hahahhahahaha)*”. Sejalan dengan Rochmawati (2017:156) mengatakan bahwa humor dan lelucon akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran prinsip kerja sama Grice.

#### 2. Pelanggaran maksim kualitas karena “sindiran”

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Hary Setyono (kepala pusat penerangan hukum kejaung) dan Bonyamin Saiman (Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) dalam sekmen lima. Pada sekmen ini Hary meminta kesempatan kepada Najwa untuk menjawab pertanyaan dari Kurnia yang bertanya tentang bagaimana puplick akan percaya jika Jaksa Agung tidak menunjukkan upaya dalam penegakan hukum. Setelah menjawab pertanyaan dari Kurnia. Kemudian, Bonyamin juga mengajukan pertanyaan kepada Hary seperti percakapan di bawah ini.

HS: “Nana boleh saya jawab ya, saya belum selesai dalam penanganan perkara itukan bai proses tgl 4 diserahkan bidang pengawasan tgl 7 kalau tidak salah penyidikan tgl 11 ditangkap 12 ditahan. Kemudian untuk memanggil memeriksa seseorang siapa kawan berbuat kemudian pemberinya siapa inikan bai proses artinya apa ketika seseorang di panggil menggunakan haknya tidak adil tentukan bai proses dan hari ini kita periksa 3 orang termasuk Djoko Tjandra kemudian juga dari Garuda juga dari salah satu diluar mobil BMW oleh karena itu tolong dukung kami berikan masukan kami dan kami akan buktikan itu.

BS: “Misalnya berandai-andai Pak, berandai inikan sebenarnya bisa jadi penyidiknya pengen cepat terus kemudian ada tangan-tangan tidak terlihat atau tangan-tangan yang lebih kuat meminta untuk tidak cepat-cepat ada gak Pak? Ini” (73)

Alasan pelanggaran maksim kualitas dalam data (73) tersebut karena BS menggunakan kata sindiran. Hal tersebut tergambar dari tuturan BS pada data (73) yaitu ada *Tangan-tangan tidak terlihat atau tangan-tangan yang lebih kuat*. Kalimat tersebut dituturkan supaya HS berpikir dengan sindiran yang diberikan oleh BS. Maksud dari kalimat sindiran tersebut adalah orang yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi. Fatmawati (2020:130) menyatakan bahwa pelanggaran maksim kualitas yang terjadi dalam situasi serius dilakukan sebagai bentuk sindiran.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Hary Setyono (kepala pusat penerangan hukum kejakugan) dan Kurnia Ramadhana (Peneliti ICW) dalam sekmen tujuh. Peristiwa tuturan ini sebelumnya Najwa sebagai pemandu acara mebgajukan pertanyaan kepada Hary tentang sikap resmi kejaksaan agung ketika nama pimpinan tertingginya disebut-sebut terlibat dalam kasus korupsi yang langsung di jawab oleh Hary. Kemudian Kurniawan melontarkan steatmen, seperti percakapan di bawah ini.

HS: “Nah itu tadi tergantung pimpinan dalam arti Pak Barita Simanjuntak untuk berkomunikasi”

KR: “Jadi semua menutup diri Mbak Nana, ada menutup diri tentang komisi kejaksaan, tidak pernah mengundang KPK untuk melakukan gelar perkara jadi klir sekali kejaksaan agung ingin melokalisir kasus jaksa Piangki Sirna Malasari” (80)



Alasan pelanggaran maksim kualitas dalam data (80) tersebut karena KR menggunakan kata sindiran. Hal tersebut tergambar dari tuturan KR pada data (80) yaitu ada *Jadi semua menutup diri Mbak Nana, ada menutup diri tentang komisi kejaksaan*. Kalimat tersebut dituturkan supaya HS berpikir dengan sindiran yang diberikan oleh KR. Maksud pada kalimat sindiran tersebut adalah orang yang tidak bertanggung jawab atas tugas-tugas yang harus dilakukannya. Fatmawati (2020:130) menyatakan bahwa pelanggaran maksim kualitas yang terjadi dalam situasi serius dilakukan sebagai bentuk sindiran.

### 3. Pelanggaran maksim kualitas karena “mengelak”

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dan Bonyamin Saiman (Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) dalam sekmen lima. Pada sekmen ini Bonyamin mengatakan tentang kepandaian Pinangki mancatut banyak orang. Lalu Najwa mengajukan pertanyaan kepada Bonyamin mengenai Pernyataan yang ia katakan, seperti percakapan di bawah ini.

NS: “Mencatut atau,”

BS: “Ya itu nanti bisa anu dimaknai ke kanan dan ke kiri gitu” (69)

Tuturan (69) di atas termasuk pelanggaran maksim kualitas. Namun, alasan pelanggarannya berbeda dari apa yang sudah disampaikan teori. Teori menyebutkan bahwa alasan pelanggaran maksim kualitas adalah karena humor atau lelucon, dan penolakan. Namun ternyata, berdasarkan data (69) ditemukan alasan pelanggaran maksim kualitas disebabkan karena BS mengelak atau mencari alasan dalam merespons pertanyaan NS. Hal tersebut tergambar pada kalimat *Bisa anu dimaknai ke kanan dan ke kiri gitu*.

#### 4. Pelanggaran maksim kualitas karena “provokasi”

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dan Mahfud MD dalam sekmen satu. Pada segmen ini Najwa Shihab sebagai pemandu acara mengajukan pertanyaan kepada Mahfud MD tentang kejanggalan-kejanggalan yang terjadi pada kasus Novel Baswedan lalu Mahfud menjawab, dan kemudian direspons kembali oleh Najwa, sehingga terjadilah percakapan seperti dibawah ini.

MM: “Ya itulah, itulah kalau orang berbohong orang akan tidak percaya silahkan, tetapi kalau saya ndak akan berbohong, saya katakan tidak mungkin bisa maksudnya, tidak mungkin sekarang ini orang pemerintah berbohong artinya tidak mungkin bisa, lalu orang bisa begitu percaya aja kepada kebohongan itu, tetap itu akan menjadi perdebatan publik kalau mau berbohong, gitu kan”

NS: “Pak Mahfud tapi lagi-lagi walaupun misalnya tidak mungkin bisa berbohong dalam beberapa kasus kita lihat mungkin saja bukan berbohong tetapi menutup mata atas kejanggalan yang jelas-jelas nyata terlihat Pak, sekali lagi saya mengambil contoh kasus Novel Baswedan, tidak berbohong mungkin tetapi yang ada di depan mata tidak diakui” (13)

Tuturan (13) termasuk pelanggaran maksim kualitas. Namun, pelanggarannya berbeda dari apa yang sudah disampaikan oleh teori. Teori menyebutkan bahwa alasan pelanggaran maksim kualitas adalah karena humor atau lelucon, dan penolakan. Namun ternyata, berdasarkan data (13) ditemukan bahwa pelanggaran maksim kualitas disebabkan oleh provokasi. Hal tersebut tergambar pada kalimat *Sekali lagi saya mengambil contoh kasus Novel Baswedan, tidak berbohong mungkin tetapi yang ada di depan mata tidak diakui.*

#### 5. Pelanggaran maksim kualitas karena “tidak tahu jawaban pasti”

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Mahfud MD (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Ham) dan Najwa Shihab sebagai pemandu acara. Dalam sekmen dua. Pada sekmen ini topik yang dibahas adalah tentang persetujuan Mahfud MD untuk mengundang KPK dalam melakukan penyelidikan. Sebelumnya Bonyamin meminta untuk persetujuan Mahfud langsung diimplementasikan dan menghubungi Jaksa Agung,

lalu di respons oleh Mahfud dan Najwa, seperti percakapan di bawah ini.

MM: “Itu, tu tinggal cara saya hahahhhahhaa”

NS: “Yang jelas, ini sudah terbuka dan disaksikan jutaan orang jadi seharusnya ini sudah” (26)

Alasan pelanggaran maksim kualitas dalam data (26) tersebut karena NS memperkirakan bahwa yang menonton sebanyak itu dengan mengatakan hal yang tidak sebenarnya. Hal tersebut dilakukan oleh NS karena tidak memiliki jawaban yang pasti. Seharusnya NS mengatakan *Ditonton oleh banyak orang* tanpa menambahkan kata jutaan.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Mahfud MD (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Ham) dan Najwa Shihab sebagai pemandu acara. Dalam sekmen dua. Pada sekmen ini topik yang dibahas adalah tentang persetujuan Mahfud MD untuk mengundang KPK dalam melakukan penyelidikan. Sebelumnya Bonyamin meminta untuk persetujuan Mahfud langsung diimplementasikan dan menghubungi Jaksa Agung, lalu di respons oleh Mahfud dan Najwa, seperti percakapan di bawah ini.

NS: “Yang jelas, ini sudah terbuka dan disaksikan jutaan orang jadi seharusnya ini sudah”

MM: “Iya disaksikan jutaan orang dan bisa disampaikan juga oleh Pak Hari kan” (27)

Alasan pelanggaran maksim kualitas dalam data (27) tersebut karena MM memperkirakan bahwa yang menonton sebanyak itu dengan mengatakan hal yang tidak sebenarnya. Hal tersebut dilakukan oleh NS karena tidak memiliki jawaban yang pasti. Seharusnya NS mengatakan *Ditonton oleh banyak orang* tanpa menambahkan kata jutaan.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Mahfud MD (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Ham) dan Najwa Shihab sebagai pemandu acara. Dalam sekmen dua. Pada sekmen ini topik yang dibahas adalah tentang persetujuan Mahfud MD untuk mengundang KPK dalam melakukan

penyelidikan. Sebelumnya Bonyamin meminta untuk persetujuan Mahfud langsung diimplementasikan dan menghubungi Jaksa Agung, lalu di respons oleh Mahfud dan Najwa, seperti percakapan di bawah ini.

MM: “Iya disaksikan jutaan orang dan bisa disampaikan juga oleh Pak Hari kan”

NS: “Jaksa agung yang menyaksikan Mata Najwa saya tau sedang nonton jadi Pak jaksa agung tolong di dengar itu Pak Mahfud MD. Pak Mahfud” (28)

Alasan pelanggaran maksim kualitas dalam data (28) tersebut karena NS yakin bahwa Jaksa Agung juga nonton acara Mata Najwa, namun pada kenyataannya belum tentu Jaksa Agung nonton karena tidak ada bukti Jaksa Agung sedang menonton Mata Najwa. Sehingga NS tidak memiliki jawaban yang pasti. Seharusnya NS mengatakan *Mungkin Jaksa Agung juga sedang menonton Mata Najwa* tanpa menggunakan kata yakin yang seolah-oleh Jaksa Agung memang menonton Mata Najwa padahal belum pasti.

#### **4.1.2.7 Alasan Pelanggaran Maksim Relevansi**

Data pada tahap ini diperoleh berdasarkan hasil dokumentasi, simak, dan catat terhadap tuturan pemandu acara (Najwa Sihab) dengan bintang tamunya yang terjadi di program Mata Najwa pada tema *Bara di Markas Jaksa*. Alasan pelanggaran maksim relevansi diperoleh dengan menganalisis pasangan tuturan dan konteks yang melatarbelakangi munculnya tuturan. Pasangan tuturan yang tergolong pada pelanggaran maksim relevansi diberi kode, kemudian diabandingkan berdasarkan pemaknaan yang sama lalu ditentukan alasan dari pelanggaran tersebut.

Setelah dianalisis pelanggaran terhadap maksim relevansi ditemukan 23 pasang tuturan yang melanggar, dari 23 pasang tuturan yang melanggar

ditemukan 11 kategori alasan pelanggaran maksim kuantitas di antaranya: humor, memerintah, pembelaan diri, menegaskan, mengelak, tidak tahu jawaban pasti, penolakan, mengejek, keakraban, basa-basi, dan kesal. Penjelasan lebih rinci terkait kategori-kategori tersebut dapat dilihat di bawah ini.

#### 1. Pelanggaran maksim relevansi karena “humor”

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dan Muhammad Mahfud MD seorang (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Ham) dalam sekmen satu. Tuturan ini bermula saat Najwa memberi pertanyaan tentang argumen yang diyakini Mahfud karena bisa saja Argumennya itu salah, adapun percakapannya seperti di bawah ini.

NS: “Pak Makfud karena kemudian bisa saja, kemudian argumennya jadi Pak Mahfud yakin hanya sebatas pernyataan sepihak yang dikeluarkan oleh pihak Kejaksaan Agung”

MM: “Saya sudah katakan Pak gitu, saya katakan Pak kita nda bisa berbohong sekarang, nda mungkin berbohong ke masyarakat kita berbohong sekarang besok lusa akan dibuka oleh Bonyamin itu saya bilang. Oleh sebab itu jangan main-main RSM sekarang tu lebih canggih, Bonyamin tu suka menghubungi istri-istri Jaksa itu minta fotonya hahaha sehingga foto-foto yang rahasia dia punya tu. Saya bilang jangan main-main.” (5)

Alasan pelanggaran maksim relevansi yang terjadi pada tuturan (5) di atas karena MM menciptakan humor. Chaer (2010) menyatakan bahwa alasan terjadinya pelanggaran maksim prinsip kerja sama disebabkan oleh beberapa hal salah satunya adalah adanya kemauan untuk menciptakan situasi menjadi santai atau menimbulkan efek humor. Hal tersebut tegambar pada tuturan MM yaitu *Bonyamin tu suka menghubungi istri-istri jaksa itu minta fotonya hahaha sehingga foto-foto yang rahasia dia punya tu saya bilang jangan main-main.*

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Mahfud MD (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Ham) dan Najwa Shihab sebagai pemandu acara dalam sekmen dua. Peristiwa tutur ini bermula saat Mahfud menjawab pertanyaan Najwa yaitu tentang apakah Mahfud melihat kejaksaan akan

berani memeriksa jaksa agung atas kasus Djoko Tjandra. Kemudian, Najwa melontarkan tuturan seperti percakapan di bawah ini.

MM: “Itu sudah substansi perkara saya ndak boleh masuk tanyakan ke Pak Hari Setiyono aja ada di situ, saya ndak boleh masuk ke situ, karena Nana kan tau sendiri”

NS: “Tapi seharusnya apakah bisa jeruk makan jeruk pak?” (31)

Alasan pelanggaran maksim relevansi yang terjadi pada tuturan (31) di atas karena NS terlihat menciptakan humor supaya percakapan terlihat lebih santai. Hal tersebut tegambar pada tuturan NS yaitu *Apakah bisa jeruk makan jeruk Pak?*. Sejalan dengan Chaer (2010) bahwa alasan terjadinya pelanggaran prinsip kerja sama disebabkan oleh beberapa hal salah satu di antaranya adalah adanya kemauan untuk menciptakan situasi menjadi santai atau menimbulkan efek humor.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Mahfud MD (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Ham) dan Najwa Shihab sebagai pemandu acara dalam sekmen dua. Peristiwa tutur ini terjadi saat Najwa akan mengakhiri perbincangannya dengan Mahfud sebelumnya Najwa mengucapkan terima kasih kepada Mahfud, kemudian di respons oleh Mahfud seperti percakapan di bawah ini.

MM: “Alhamdulillah sehat, terimakasih Najwa dan semuanya juga sehat-sehat”

NS: “Kita tunggu bagaimana jeruk makan jeruknya ya Pak ya” (39)

Alasan pelanggaran maksim relevansi yang terjadi pada tuturan (39) di atas karena NS terlihat menciptakan humor supaya percakapan terlihat lebih santai. Hal tersebut tegambar pada tuturan NS yaitu *Kita tunggu bagaimana jeruk makan jeruknya ya Pak*. Chaer (2010) bahwa alasan terjadinya pelanggaran prinsip kerja sama disebabkan oleh beberapa hal salah satu di antaranya adalah adanya kemauan untuk menciptakan situasi menjadi santai atau menimbulkan efek humor.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Bonyamin Saiman (Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) dan dan Hary Setyono (Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan) dalam sekmen lima. Peristiwa tutur ini terjadi saat Hary menutur tentang keseriusan Jaksa Agung dalam menangani perkara kasus suap yang terjadi. Kemudian, Bonyamin menuturkan celetukan seperti percakapan di bawah ini.

BS: “Penanganan perkara korupsi cepat utamakan dari yang lain”

HS: “Kan tidak boleh omongan di warung kopi kemudian jadi berkas kemudian dipaksakan untuk menjadi berkas kan alat bukti Pak”  
(72)

Alasan pelanggaran maksim relevansi yang terjadi pada tuturan (72) karena HS terlihat merespon pernyataan BS dengan candaan. Hal tersebut tergambar pada data tuturan (72) *Kan tidak boleh omongan di warung kopi kemudian jadi berkas kemudian dipaksakan untuk menjadi berkas kan alat bukti Pak*. Fatmawati (2020:132) menyebutkan bahwa bercanda merupakan salah satu alasan terjadinya pelanggaran pada maksim relevansi.

## 2. Pelanggaran maksim relevansi karena “memerintah”

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dan Bonyamin Saiman (Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) dalam sekmen lima. Peristiwa tutur ini terjadi pada saat Najwa meminta Barita Simanjuntak untuk memberikan komentarnya tentang pemeriksaan pelaku suap. Kemudian tuturan Najwa direspons oleh Bonyamin seperti percakapan di bawah ini.

NS: “Baik, Pak Barita silahkan, karena kemudian ini juga bisa menjadi preseden menunjukkan bahwa memang ada keengganan dari kejaksan agung untuk diperiksa atau diawasi oleh pihak independen.”

BS: “Buka aja Pak Barita” (76)

Tuturan (76) di atas termasuk pelanggaran maksim relevansi. Namun, alasan pelanggarannya berbeda dari apa yang sudah disampaikan teori. Teori menyebutkan bahwa alasan pelanggaran maksim relevansi adalah karena humor atau lelucon, dan penolakan. Namun ternyata, berdasarkan data tuturan (76) ditemukan alasan pelanggaran maksim relevansi disebabkan karena BS

memerintah PB untuk menjelaskan semua perkaranya. Hal tersebut tergambar pada kalimat *Buka aja Pak Barita*.

### 3. Pelanggaran maksim relevansi karena “pembelaan diri”

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dan Mahfud MD (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Ham) dalam sekmen dua. Peristiwa tutur ini bermula saat Najwa merespons jawaban Mahfud tentang bohong-berbohong dan penilaian puplik terhadap kasus-kasus yang pernah terjadi sebelumnya. Kemudian, Najwa bertanya kepada Mahfud seperti percakapan di bawah ini.

NS: “Akhirnya selesai habis di spekulasi puplik Pak dan peran negara yang seharusnya bisa lebih jauh dari situ kita tidak lihat apakah ini akan berulang lagi dikasus ini Pak Mahfud?”

MM: “Kalau saya tidak akan berakhir di kasus ini saya kan sakarang koordinator, ini mentri koordinator saya akan mengkoordinir kemana arahnya perkara ini saya akan pertanggungjawabkan ke puplik, sehingga nantik kalau terpaksa loh kok di bawah beda saya akan beda ndak papa, kalau memang ada yang akan berbohong dibawah. (14)

Tuturan (14) di atas termasuk pelanggaran maksim relevansi. Namun, alasan pelanggarannya berbeda dari apa yang sudah disampaikan teori. Teori menyebutkan bahwa alasan pelanggaran maksim relevansi adalah karena humor atau lelucon, dan penolakan. Namun ternyata, berdasarkan data tuturan (14) ditemukan alasan pelanggaran maksim relevansi disebabkan karena MM terlihat melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri. Hal tersebut tergambar pada kalimat *Kalau saya tidak akan berakhir di kasus ini saya kan sakarang koordinator*.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Bonyamin Saiman (Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) dan dan Hary Setyono (Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung) dalam sekmen empat. Peristiwa tutur ini terjadi saat Bonyamin membahas tentang sistemproteksi yang tidak berfungsi di gedung Jaksa Agung. Sehingga, terjadilah percakapan seperti di bawah ini.



BS: “Bukan, infeksi keselamatan itu lo, saya hanya kapan terakhir dilakukan? Itu aja”

HS: “Ya, oleh karena itu kami akan lakukan cek itu” (64)

Tuturan (64) di atas termasuk pelanggaran maksim relevansi. Namun, alasan pelanggarannya berbeda dari apa yang sudah disampaikan teori. Teori menyebutkan bahwa alasan pelanggaran maksim relevansi adalah karena humor atau lelucon, dan penolakan. Namun ternyata, berdasarkan data tuturan (64) ditemukan alasan pelanggaran maksim relevansi disebabkan karena HS melakukan pembelaan terhadap dirinya atas apa yang telah ia sampaikan. Hal tersebut tergambar pada kalimat *Ya, oleh karena itu kami akan lakukan cek itu*, jawaban HS tersebut menandakan bahwa ia tidak memahami pertanyaan BS karena lain yang ditanya lain pula jawaban.

#### 4. Pelanggaran maksim relevansi karena “menegaskan”

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dan Mahfud MD (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Ham) dalam sekmen satu. Peristiwa tutur ini bermula saat Najwa bertanya tentang ketidak wajaran terbakarnya gedung Jaksa Agung, seperti percakapan di bawah ini.

NS: “Pak...Pak Mahfud, iya. Sebelum masuk ke bohong berbohong karena itu juga menarik, tapi saya ingat Andakan sempat mengatakan terbuka kaget bahwa kebakarannya besar sekali, cepat sekali, jadi jujur Pak Mahfud ke saya malam ini memang adakan di benak Pak Mahfud? mungkin saja ada ketidak wajaran dari bara yang muncul di markas Jaksa ini”

MM: “Oo begini, saya katakan masyarakat jangan berspekulasi kan itukan ada di TV ya, spekulasi apa Pak, spekulasi yang saya baca di medsos itu, itu nda masuk akal gitu, lalu media itu banyak yang menulis kata Mahfud MD terbakarnya nda masuk akal, padahal saya mengutip medsos, yang berkembang ketika itu masyarakat mengatakan di medsos itu, ini ndak masuk akal kok dari lantai enam turun ke-empat turun ke-lima, masa kalo listrik separah itu, itu kata masyarakat. Oleh sebab itu saya katakan jangan berspekulasi lah, spekulasi apa, ya itu

yang ada di masyarakat bahwa kok turun dari lantai enam ke-empat ke-tiga. (6)

Alasan pelanggaran maksim relevansi yang terjadi pada tuturan (6) di atas karena ingin berbagi informasi untuk menegaskan jawabannya. Fatmawati (2020:131) merumuskan 22 konsep alasan pelanggaran maksim relevansi salah satu di antaranya adalah untuk menegaskan. Hal tersebut tegambar pada tuturan MM yaitu *Saya katakan masyarakat jangan berspekulasi kan itukan ada di TV.*

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dan Kurnia Ramadhana (Peneliti ICW) dalam sekmen dua. Peristiwa tutur ini bermula saat Najwa mengajukan pertanyaan kepada Kurnia terkait pernyataan Mahfud MD. Seperti percakapan di bawah ini.

NS: “Tadi Pak Mahfud mengatakan kewenangan itu ada pada KPK, apakah anda berharap menkopulhukam bisa, karena tadi katanya tidak boleh ni”

KR: “Saya akan masuk disini sekaligus mengkritisi kejaksaan agung, Mbak Nana pekan lalu bareskrim secara terbuka mengundang KPK untuk mengadakan gelar perkara tapi Kejaksaan Agung saya tidak tau, saya belum pernah melihat ada pemberitaan kejaksaan agung mengundang KPK untuk gelar perkara, dan sampai hari ini pun kejaksaan agung” (19)

Alasan pelanggaran maksim relevansi yang terjadi pada tuturan (19) di atas karena KR terlihat berbagi informasi kepada NS. Hal tersebut tegambar pada kalimat *Mbak Nana pekan lalu bareskrim secara terbuka mengundang KPK untuk mengadakan gelar perkara*, Tuturan tersebut menandakan KR memberitahu NS bahwa Bareskrim minggu lalu mengundang KPK untuk melakukan gelar perkara. Berbeda dari apa yang disampaikan teori bahwa berbagi informasi merupakan salah satu alasan pelanggaran maksim kuantitas. Namun, setelah diteliti pada data (19) ditemukan bahwa berbagi informasi juga menjadi salah satu alasan terjadinya pelanggaran pada maksim relevansi.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Mahfud MD (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Ham) dan Najwa Shihab sebagai pemandu acara dalam sekmen dua. Peristiwa tutur ini bermula saat Najwa mengajukan pertanyaan tentang pemeriksaan kasus Jaksa Agung yang berkaitan dengan kasus Djoko Tjandra, seperti percakapan di bawah ini.

NS: “Kita masih bisa percaya bahwa tidak akan sungkan-sungkan anak buah Jaksa Agung memeriksa bos besarnya untuk perkara yang dikaitkan dengan Djoko Tjandra Pak?”

MM: “Seluruh rakyat Indonesia mulai dari presiden sama rakyat kecil sampai rakyat kecil sama pikirannya semua harus terbuka saya tadi baru bertemu presiden” (35)

Pelanggaran yang disebabkan karena ingin berbagi informasi tidak hanya terjadi pada maksim kuantitas. Akan tetapi, setelah diteliti pada data (35) ditemukan bahwa berbagi informasi juga menjadi alasan terjadinya pelanggaran maksim relevansi. Alasan berbagi informasi itu supaya NS lebih tahu. Hal tersebut tergambar pada kalimat *Saya tadi baru bertemu presiden* MM memberitahu NS bahwa ia baru saja bertemu dengan Pak presiden.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dengan Barita Simanjuntak (Ketua Komisi Kejaksaan Jakarta Timur) dalam sekmen enam. Peristiwa tutur ini bermula saat Najwa meminta Barita untuk langsung menjawab pertanyaannya tanpa berbelit-belit. Sehingga terjadilah percakapan seperti di bawah ini.

NS: “Pak Barita waktu saya mepet sekali, boleh langsung jawab *to the point* saja Pak, karena saya mau membahas yang lain, betul atau tidak itu tidak bisa memanggil jampidung?”

PB: “Nah selanjutnya kamikan menindak lanjuti supaya kami mengundang meminta keterangan kepada kejaksaan tinggi direktur DPWEL dan aspidung DKI itu yang kami tidak lagi di ijinan untuk kami mintai keterangan” (77)

Alasan pelanggaran maksim relevansi yang terjadi pada tuturan (77) terlihat PB menegaskan jawabannya. Hal tersebut tergambar pada kalimat *Nah selanjutnya kamikan menindak lanjuti supaya kami mengundang meminta keterangan kepada kejaksaan tinggi direktur DPWEL dan aspidung DKI itu yang*

*kami tidak lagi di ijinan untuk kami mintai keterangan.* Fatmawati (2020:132) menyebutkan bahwa penegasan merupakan salah satu alasan terjadinya pelanggaran pada maksim relevansi.

#### 5. Pelanggaran maksim relevansi karena “mengelak”

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dan Hary Setyono (Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung) dalam sekmen tiga. Peristiwa tutur ini bermula dari tuturan yang diungkapkan oleh Fatma Lestari yaitu tentang tidak berfungsinya sistem proteksi yang ada di gedung Jaksa Agung. Kemudian, Najwa kembali mengajukan pertanyaan kepada Hary tentang sistem proteksi karena pertanyaan sebelumnya belum terjawab oleh Hary, sehingga terjadilah percakapan seperti di bawah ini.

NS: “Oke, tapi yang gedung utamanya yang di depan yang kita lihat itu yang terbakar, nah pertanyaannya tadi Pak, apakah memang tidak ada sistem proteksi kebakaran atau yang bisa mendeteksi?”

HS: “Yak, sepengetahuan saya karena gedung ini kemarin saya katakan bahwa masuk dikawasan pemukiman kemarin memang dikatakan ini belum sebagai gedung cakar budaya tetapi sudah masuk kawasan pemukiman, kenapa? Karena ketika kami pengen mempercantik gedung itu di tahun 2018 itu ditegur oleh dinas pariwisata tidak boleh begini tidak boleh begitu sehingga ketika dilakukan itu ada berita acara yang ditandatangani oleh pengawas cagar budaya” (49)

Tuturan (49) di atas termasuk pelanggaran maksim relevansi. Namun, alasan pelanggarannya berbeda dari apa yang sudah disampaikan teori. Teori menyebutkan bahwa alasan pelanggaran maksim relevansi adalah karena humor atau lelucon, dan penolakan. Namun ternyata, berdasarkan data tuturan (49) ditemukan alasan pelanggaran maksim relevansi disebabkan karena HS berusaha mencari alasan atau mengelak dari pertanyaan NS. Hal tersebut terjadi karena NS sudah bertanya berulang kali dengan pertanyaan yang sama namun belum di jawab oleh HS, HS selalu membahas ke hal-hal yang lain.

6. Pelanggaran maksim relevansi karena “tidak tahu jawaban pasti”

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dan Mahfud MD (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Ham) dalam sekmen dua. Sekmen ini Najwa kembali menghubungi Mahfud melalui *video call*. Lalu Najwa mengajukan pertanyaan kepada Mahfud tentang pernyataan Mahfud yang menyebutkan bahwa pemerintah tidak mungkin berbohong. Seperti percakapan di bawah ini.

NS: “Bara di markas Jaksa, saya akan kembali menghubungi menkopulhukam bapak Muhammad Mahfud MD, Pak Mahfud anda berkali-kali menyebutkan tidak mungkin pemerintah menyembunyikan sesuatu dalam situasi seperti ini, pertanyaannya Pak, pemerintah itu maksudnya presiden Jokowi, atau menkopulhukamnya Pak Mahfud MD atau aparat-aparat dibawahnya Pak?”

MM: “Semua menurut saya kalau pemerintah main-main, kalau pemerintah berani berarti dia melanggar sebuah ketidak mungkinan dia lakukan, karena tidak ada yang disembunyikan sekarang ini, oleh sebab itu jangan berspekulasi karena kalau anda berbohong hari ini menyembunyikan sesuatu anda tidak akan bisa tidur mencari alasan baru untuk besok, oleh sebab itu kalau saya katakan saja bahwa tidak mungkin dan yang saya katakan yang saya yakini hari ini, karena seumpama saya apa, misalnya besok harus ketemu orang lagi ya saya tidak mencari kebohongan baru, jadi sekarang siapapun pejabat jangan coba berbohonglah, nanti akan ketahuan” (11)

Tuturan (11) di atas termasuk pelanggaran maksim relevansi. Namun, alasan pelanggarannya berbeda dari apa yang sudah disampaikan teori. Teori menyebutkan bahwa alasan pelanggaran maksim relevansi adalah karena humor atau lelucon, dan penolakan. Namun ternyata, berdasarkan data tuturan (11) ditemukan alasan pelanggaran maksim relevansi disebabkan karena MM membuat informasi yang disampaikan menjadi samar. Hal tersebut tegambar pada kalimat *Semua menurut saya kalau pemerintah main-main, kalau pemerintah berani berarti dia melanggar sebuah ketidak mungkinan dia lakukan, karena tidak ada*

*yang disembunyikan sekarang ini.* Tuturan tersebut kurang jelas, yang dimaksud ketidak mungkinan itu apa.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dan Satriadi Gunawan (Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta) dalam sekmen tiga. Peristiwa tutur ini terjadi saat Najwa mengajukan pertanyaan kepada Satriadi tentang sistem proteksi yang ada di Gedung Jaksa Agung. Seperti percakapan di bawah ini.

NS: “Apakah di dalam ada alat-alat pemadam yang sempat berfungsi atau sama sekali tidak ada?”

SG: “Pada saat itu sudah terbakar jadi mungkin kita akan liat nanti hasil porsif dari kepolisian seperti apa gitu.”(45)

Tuturan (45) di atas termasuk pelanggaran maksim relevansi. Namun, alasan pelanggarannya berbeda dari apa yang sudah disampaikan teori. Teori menyebutkan bahwa alasan pelanggaran maksim relevansi adalah karena humor atau lelucon, dan penolakan. Namun ternyata, berdasarkan data tuturan (45) ditemukan alasan pelanggaran maksim relevansi disebabkan karena SG tidak mengetahui jawaban pasti tentang ada atau tidaknya alat pemadam yang berfungsi saat kebakaran. Hal tersebut tergambar pada kalimat *Pada saat itu sudah terbakar jadi mungkin kita akan liat nanti hasil porsif dari kepolisian seperti apa gitu.*

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dan Hary Setyono (Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung) dalam sekmen empat. Peristiwa tutur ini bermula dari tuturan yang disampaikan oleh Satriadi Gunawan ia menyebutkan standarisasi bagaimana pengamanan proteksi kebakaran di gedung itu ada 4. Kemudian, Najwa mengajukan pertanyaan kepada Hary seperti percakapan di bawah ini.

NS: “Oke. Pak Hari tapi yang jelas gedung kejaksaan yang terbakar belum diasuransikan ya Pak?”

HS: “Sepengetahuan saya memang demikian” (58)

Tuturan (58) di atas termasuk pelanggaran maksim relevansi. Namun, alasan pelanggarannya berbeda dari apa yang sudah disampaikan teori. Teori

menyebutkan bahwa alasan pelanggaran maksim relevansi adalah karena humor atau lelucon, dan penolakan. Namun ternyata, berdasarkan data tuturan (58) ditemukan alasan pelanggaran maksim relevansi disebabkan karena HS tidak tahu jawaban pasti sehingga menjawab pertanyaan NS dengan tuturan lain. Hal tersebut tergambar pada kalimat *Sepengetahuan saya memang demikian*.

#### 7. Alasan pelanggaran maksim relevansi karena “penolakan”

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dan Mahfud MD (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Ham) dalam sekmen dua. Peristiwa tutur ini bermula saat Najwa mengajukan pertanyaan kepada Mahfud tentang apakah publik harus percaya begitu saja kejaksaan berani memeriksa keluarganya sendiri, kemudian Najwa kembali mengajukan pertanyaan pendapat Mahfud sebagai Kemenpolhukam. Seperti percakapan di bawah ini.

NS: “Kalau Pak Mahfud sendiri bagaimana saya bertanya pendapat anda sebagai kementerian hukum Pak, apakah anda memang merasa kejaksaan tidak bisa memeriksa keluarganya sendiri apalagi kalau mungkin memeriksa Jaksa Agungnya langsung?”

MM: “Ndak itu tidak fer, kalau saya sebagai atasan saya harus bicara atas nama kesatuan pemerintah tapi saya orang di luar KPK kalau KPK mau ambil, ambil” (17)

Alasan pelanggaran maksim relevansi yang terjadi pada tuturan (17) di atas karena MM menolak pertanyaan NS. Hal tersebut tergambar pada data tuturan MM (17) yaitu *Ndak itu tidak fer*. Tuturan tersebut menandakan MM menolak pertanyaan NS yang meminta pendapatnya apakah kejaksaan tidak bisa memeriksa keluarganya sendiri. Fatmawati (2020:133) menyatakan bahwa alasan pelanggaran maksim relevansi yang cukup dominan adalah penolakan.

8. Alasan pelanggaran maksim relevansi karena “mengejek”

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Bonyamin Saiman (Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) dan Mahfud Md (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Ham) dalam sekmen dua. Peristiwa tutur ini bermula saat Bonyamin meminta Mahfud untuk mengundang KPK dalam menyelidiki kasus korupsi Djoko Tjandra lalu Mahfud merespons sambil tertawa, seperti percakapan di bawah ini.

BS: “Persetujuan ini mohon di implementasikan habis ini atau besok mengontak Jaksa Agung eh tolong dong diajak ajalah KPK begitu”

MM: “Itu, tu tinggal cara saya hahahhhahhaa” (24)

Tuturan (24) di atas termasuk pelanggaran maksim relevansi. Namun, alasan pelanggarannya berbeda dari apa yang sudah disampaikan teori. Teori menyebutkan bahwa alasan pelanggaran maksim relevansi adalah karena humor atau lelucon, dan penolakan. Namun ternyata, berdasarkan data tuturan (24) ditemukan alasan pelanggaran maksim relevansi disebabkan karena MM mengejek pernyataan BS. Hal tersebut tegambar pada kalimat *Itu, tu tinggal cara saya hahahhhahhaa*.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Mahfud MD (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Ham) dan Najwa Shihab sebagai pemandu acara dalam sekmen dua. Peristiwa tutur ini bermula saat Najwa melontarkan tuturan yang tidak sesuai dengan topik pembicaraan yaitu tentang apakah bisa jeruk makan jeruk, lalu Mahfud merespons Najwa dengan candaan sambil tertawa. Kemudian Najwa kembali memberikan pertanyaan kepada Mahfud seperti percakapan di bawah ini.

NS: “Yakin ya Pak bisa”

MM: “Pertanyaannya terlalu main-main sih”(34)

Tuturan (34) di atas termasuk pelanggaran maksim relevansi. Namun, alasan pelanggarannya berbeda dari apa yang sudah disampaikan teori. Teori menyebutkan bahwa alasan pelanggaran maksim relevansi adalah karena humor atau lelucon, dan penolakan. Namun ternyata, berdasarkan data tuturan (34)



ditemukan alasan pelanggaran maksim relevansi disebabkan karena MM terlihat mengejek pertanyaan yang diajukan oleh NS. Hal tersebut tergambar pada data tuturan (34) yaitu *Pertanyaannya terlalu main-main sih.*

#### 9. Alasan pelanggaran maksim relevansi karena “keakraban”

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dan Bonyamin Saiman (Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) dalam sekmen dua. Peristiwa tutur ini bermula saat Najwa merespons pernyataan yang dilontarkan oleh Mahfud yaitu tentang persetujuan Mahfud untuk mengundang KPK dalam menyelidiki kasus korupsi Djoko Tjandra. Kemudian, Bonyamin melontarkan pernyataan seperti di bawah ini.

NS: “Jaksa Agung yang menyaksikan *Mata Najwa* saya tau sedang nonton jadi Pak Jaksa Agung tolong di dengar itu Pak Mahfud MD. Pak Mahfud”

BS: “Jadi ini model orang Solo ujung ujungnya nuntutnya juga, ujungnya ya nusuk juga Pak Mahfud jadi tolong dipahami.” (29)

Pelanggaran yang disebabkan karena keakraban tidak hanya terjadi pada maksim kuantitas. Akan tetapi, setelah diteliti pada data (29) ditemukan bahwa keakraban juga menjadi alasan terjadinya pelanggaran maksim relevansi. Alasan keakraban itu karena BS menambah topik pembicaraan supaya lebih bersosialisasi dan terlihat lebih akrab. Hal tersebut tergambar pada data tuturan (29) *Ujung ujungnya nuntutnya juga, ujungnya ya nusuk juga Pak Mahfud jadi tolong dipahami.*

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Hary Setyono (Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan) dengan Bonyamin Saiman (Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) dalam sekmen tujuh. Peristiwa tutur ini bermula saat Kurnia bertanya kepada Hary tentang apakah Kejaksaan Agung membuka pintu kepada KPK untuk terlibat dalam menangani kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Kemudian, Hary dan Bonyamin merespons tuturan Kurnia seperti percakapan di bawah ini.

HS: “Yak, yaak menurut kami itu ada namanya korsup, saya pikir semua terbuka, semua terbuka dan mudah-mudahan kedepan juga seperti itu harapan kita”.

BS: “Nana sebagai sama-sama barangkali santrinya Gusbahaudin Nursalim rembang ini saya kembalikan ke spiritual jadi kebakaran itu bisa jadi tanda kutip karena doa kita ini hanya berdoa memohon keselamatan tapi tindakan-tindakan kita bukan bagian dari doa, bukan bagian dari menjalankan tugas ini bukan bagian dari doa artinya apa kalau doa, berarti tulus melakukan tugasnya tulus keterbukaan, tulus untuk kebaikan dan kebaikan negeri ini juga sebagai bendera saya yang merah putih saya melakukan ini sebagai sumbangsih saya kepada negara ini untuk tidak runtuh Pak. Jadi, inilah kejaksaan agung nampaknya doanya itu hanya doa memohon keselamatan tapi tidak disertai dengan doa-doa yang melakukan tugas dengan tulus dengan kebaikan tidak ada selingkuh, selingkuh arti luas arti sempit itu, sehingga cctv itu khawatir saya dibakar atau terbakar karena ada selingkuh baik arti luas maupun arti sempit, demikian” (82)

Pelanggaran yang disebabkan karena keakraban tidak hanya terjadi pada maksim kuantitas. Akan tetapi, setelah diteliti pada data (82) ditemukan bahwa keakraban juga menjadi alasan terjadinya pelanggaran maksim relevansi. Alasan keakraban itu karena BS menambah topik pembicaraan supaya lebih bersosialisasi dan terlihat lebih akrab. Hal tersebut tergambar pada kalimat *Nana sebagai sama-sama barangkali santrinya Gusbahaudin Nursalim rembang ini saya kembalikan ke spiritual jadi kebakaran itu bisa jadi tanda kutip karena doa kita ini hanya berdoa memohon keselamatan tapi tindakan-tindakan kita bukan bagian dari doa.*

#### 10. Pelanggaran maksim relevansi karena “basa-basi”

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Mahfud MD (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Ham) dan Najwa Shihab sebagai pemandu acara dalam sekmen dua. Peristiwa tutur ini terjadi saat Najwa akan mengakhiri perbincangannya dengan Mahfud, sebelum perbincangan berakhir Najwa mengatakan tentang jeruk makan jeruk, seperti percakapan di bawah ini.

NS: “Kita tunggu bagaimana jeruk makan jeruknya ya Pak ya”

MM: “Salam Abi Quraish Shibab ya” (40)

Pelanggaran yang disebabkan karena basa-basi tidak hanya terjadi pada maksim cara/pelaksanaan. Akan tetapi, setelah diteliti pada data (40) ditemukan bahwa basa-basi juga menjadi alasan terjadinya pelanggaran maksim relevansi. Alasan basa-basi tersebut supaya terlihat santun. Hal tersebut tergambar pada tuturan MM yaitu *Salam Abi Quraish Shibab ya*.

#### 11. Pelanggaran maksim relevansi karena “kesal”

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dan Bonyamin Saiman (Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) dalam sekmen empat. Peristiwa tutur ini bermula pada saat Hary menjelaskan tentang asuransi gedung kawasan yang termasuk cagar budaya. Kemudian, Najwa memberi pernyataan yang direspons oleh Bonyamin seperti percakapan di bawah ini.

NS: “Hmm oke tapi yang jelas sekarang karena tidak di asuransi maka kerugiannya ini kalau dari direktur jendral kekayaan negara itu nilai gedungnya 161 milyar Pak dan itu akan masuk ke APBN di 2021 kalau sekarang katanya belum di anggarkan jadi memang ini kerugian yang kerugian yang besar, kerugian yang besar”

BS: “Ya tapi bagaimana mungkin meminta orang lain peduli anda sendiri tidak peduli Pak Hari? (63)

Tuturan (63) di atas termasuk pelanggaran maksim relevansi. Namun, alasan pelanggarannya berbeda dari apa yang sudah disampaikan teori. Teori menyebutkan bahwa alasan pelanggaran maksim relevansi adalah karena humor atau lelucon, dan penolakan. Namun ternyata, berdasarkan data tuturan (63) ditemukan alasan pelanggaran maksim relevansi disebabkan karena BS terlihat kesal terhadap jawaban HS. Hal tersebut tergambar pada kalimat *Ya tapi bagaimana mungkin meminta orang lain peduli anda sendiri tidak peduli Pak Hari?*

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dan Bonyamin Saiman (Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) dalam sekmen lima. Peristiwa tutur ini terjadi saat Bonyamin mengatakan bahwa Jaksa Agung mengarang tentang kasus suap yang menerima ada sedangkan pemberi tidak ada. Kemudian, Najwa mengajukan pertanyaan kepada Bonyamin seperti percakapan di bawah ini.

NS: “Bukan yang memberi, maksud saya apakah mungkin Jaksa eslon empat bisa bertemu dengan buron kakap dan menjanjikan macam-macam sampai menjanjikan fatwa.

BS: “Ya sementara ini masih apa, istilah saya kepandaian Pinangki itu aja mancatut banyak orang (67)

Alasan pelanggaran maksim relevansi yang terjadi pada tuturan (67) karena BS menghindari tuturan langsung, menjawab pertanyaan NS dengan tuturan lain. Hal tersebut tergambar pada kalimat *Istilah saya kepandaian Pinangki itu aja mancatut banyak orang*. Fatmawati (2020:132) menyebutkan bahwa salah satu alasan terjadinya pelanggaran terhadap maksim relevansi adalah menghindari tuturan langsung.

#### **4.1.2.8 Alasan Pelanggaran Maksim Cara/Pelaksanaan**

Data pada tahap ini diperoleh berdasarkan hasil dokumentasi, simak, dan catat terhadap tuturan pemandu acara (Najwa Sihab) dengan bintang tamunya yang terjadi di program Mata Najwa pada tema *Bara di Markas Jaksa*. Alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan diperoleh dengan menganalisis pasangan tuturan dan konteks yang melatarbelakangi munculnya tuturan. Pasangan tuturan yang tergolong pada pelanggaran maksim cara/pelaksanaan diberi kode, kemudian diabanding-bandingkan berdasarkan pemaknaan yang sama lalu ditentukan alasan dari pelanggaran tersebut, yang akan diuraikan di bawah ini.

Setelah dianalisis pelanggaran terhadap maksim cara/pelaksanaan ditemukan 27 pasang tuturan yang melanggar, dari 27 pasang tuturan yang

melanggar ditemukan 10 kategori alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan di antaranya: kesantunan, mengelak, menyangkal, tuturan tidak langsung, berbagi informasi, penolakan, memerintah, tidak tahu jawaban pasti, basa-basi, dan kesal. Penjelasan lebih rinci terkait kategori-kategori tersebut dapat dilihat di bawah ini.

#### 1. Alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan karena “kesantunan”

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dengan Mahfud MD seorang (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Ham Jakarta Selatan) mereka berbincang secara virtual dalam sekmen satu. Peristiwa tutur ini bermula saat Najwa bertanya tentang ketidak wajaran terbakarnya gedung Jaksa Agung. Kemudian, Najwa merespon jawaban dari Mahfud seperti percakapan di bawah ini.

MM: “Oo begini, saya katakan masyarakat jangan berspekulasi, itukan ada di TV ya, spekulasi apa Pak, spekulasi yang saya baca di medsos itu, itu nda masuk akal gitu, lalu media itu banyak yang menulis kata Mahfud MD terbakarnya nda masuk akal, padahal saya mengutip medsos, yang berkembang ketika itu masyarakat mengatakan di medsos itu, ini ndak masuk akal kok dari lantai enam turun ke-empat turun ke-lima, masa kalo listrik separah itu, itu kata masyarakat. Oleh sebab itu saya katakan jangan berspekulasi lah, spekulasi apa, ya itu yang ada di masyarakat bahwa kok turun dari lantai enam ke-empat ke-tiga.

NS: “Tapi dari pengamatan Pak maaf” (7)

Alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan pada tuturan (7) di atas karena NS merespons jawaban MM dengan santun. Hal tersebut tergambar pada kata *Pak maaf*. Fatmawati (2020:137) mengatakan bahwa salah satu alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan adalah berkaitan dengan kesantunan.

#### 2. Alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan karena “mengelak”

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab selaku pemandu acara dan Mahfud MD seorang (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Ham Jakarta Selatan) mereka berbincang secara virtual dalam sekmen satu. Najwa memberikan pernyataan bahwa kejadian seperti kebakaran di gedung vital milik negara sering terjadi di saat sedang menangani kasus korupsi. Kemudian, Mahfud merespons pernyataan Najwa seperti percakapan di bawah ini.

NS: “Karena misalnya Pak kebakaran di gedung vital milik negara ditengah pengusutan kasus besar inikan bukan pertama kali terjadi, kita tau misalnya tahun 97 di gedung BI, kemudian juga di gedung BPKP juga pernah, kemudian di gedung kementerian ESDM tiba-tiba terbakar ketika sedang menyelidiki kasus yang melibatkan menteri ESDM Ketika itu jadi ada presedennya terbakar atau dokumen yang dalam tanda kutip RAIP atau di raipkan terjadi di tengah-tengah pengusutan kasus yang besar, Pak kemonpuluhkam”

MM: “Iya iya makanya tadi saya terlintas gitu hehehe... kan sudah saya bilang keterlintasan keingat ke yang lain-lain juga, saya dulukan di luar. Jadi juga saya ingat ke yang lain-lain. tapi sesudah berkomunikasi, saya kemudian mengatakan ya sudah jangan berspekulasi kita serahkan ke polisi kan gitu, ha polisinya juga langsung saya telepon Pak apa Pak IPDA Hamasid, Pak ini dibuka Pak siap, kami lurus tegak, tegak lurus melaksanakan konstitusi dan hukum gitu, kami pasti profesional. Saya ingatkan lagi jangan main-main dengan masyarakat sekarang, kita akan ketahuan kalau bohong sedikit sekarang, orang ndak bohong aja dibilang bohong saya bilang begitu heheheh” (10)

Respons yang diberikan oleh MM tergolong pada pelanggaran maksim cara/pelaksanaan. Fatmawati (2020:138) menyebutkan bahwa alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan terjadi karena bingung memberikan jawaban, lupa, gugup, empati, basa-basi, dan rahasia. Namun ternyata, berdasarkan data pelanggaran maksim cara/pelaksanaan yang terjadi pada tuturan (10) di luar dari apa yang disebutkan oleh teori yaitu karena MM sengaja mencari alasan untuk mengelak. Hal tersebut tegambar pada tuturan MM data (10) yaitu *Kan sudah saya bilang keterlintasan keingat ke yang lain-lain juga, saya dulukan di luar. Jadi juga saya ingat ke yang lain-lain.* Seharusnya MM memberikan tanggapan yang jelas agar tidak melanggar maksim cara/pelaksanaan.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dengan Hary Setyono seorang (Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan) dalam sekmen empat. Peristiwa tutur ini bermula saat Najwa dan Hary

membahas tentang asuransi Gedung Jaksa Agung dan Hary membantah bahwa Gedung tersebut termasuk kawasan cagar budaya. Kemudian, Najwa kembali bertanya kepada Hary. Sehingga, terjadilah percakapan di bawah ini.

NS: “Jadi artinya tidak perlu di asuransi”

HS: “Nah contohnya tadi saya katakan di 2018 tadi kita katakan mau direnovasi di tegur itu ditandatangani oleh pengawas cagar budaya nah siapa yang seharusnya mengansuransikan, ha itu kira-kira” (62)

Respons yang diberikan oleh MM pada tuturan (62) tergolong pada pelanggaran maksim cara/pelaksanaan. Namun, alasan pelanggarannya berbeda dari apa yang disampaikan teori. Teori menyebutkan bahwa alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan terjadi karena bingung memberikan jawaban, Basa-basi dan Tuturan tidak langsung. Namun ternyata, berdasarkan data pelanggaran maksim cara/pelaksanaan alasan pelanggaran karena HS terlihat mengelak dari pertanyaan NS. Hal tersebut tergambar pada tuturan *2018 tadi kita katakan mau direnovasi di tegur itu ditandatangani oleh pengawas cagar budaya nah siapa yang seharusnya mengansuransikan.*

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dengan Bonyamin Saiman (Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) dalam sekmen lima. Peristiwa tutur ini bermula saat Najwa membahas tentang Bonyamin yang tidak percaya Jaksa Pinangki bekerja sendirian pasti ada orang lain yang terlibat. Kemudian, Najwa merespons jawaban Bonyamin yang tampak meragukan yaitu “Ya itu nanti bisa anu dimaknai ke kanan dan ke kiri gitu”. Sehingga terjadilah percakapan di bawah ini.

NS: “Anda jadi hati-hati ni Pak Bonyamin”

BS: “Ya kan nanti kan bisa menjadi bersedia dicabut kan ada, kan gitu kan malah udah cabut aja nama ku juga ada nanti, itu lo jadi artinya bukan hati-hati kan saya harus koridor hukum karena sebagai detektek patikelir begitu jadi ya harus pada posisi meskipun saya sejak awal kalimat dugaan tapi lebih banyak terbukti gitu lo (70)

Respons yang diberikan oleh MM pada tuturan (70) tergolong pada pelanggaran maksim cara/pelaksanaan. Namun, alasan pelanggarannya berbeda dari apa yang disampaikan teori. Teori menyebutkan bahwa alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan terjadi karena Bingung memberikan jawaban, Basa-basi dan Tuturan tidak langsung. Namun ternyata, berdasarkan data pelanggaran maksim cara/pelaksanaan alasan pelanggaran karena BS mencari alasan berusaha mengelak. Hal tersebut tergambar pada data kalimat *Kan gitu kan malah udah cabut aja nama ku juga ada nanti, itu lo jadi artinya bukan hati-hati kan saya harus koridor hukum karena sebagai detektek patikelir begitu jadi ya harus pada posisi meskipun saya sejak awal kalimat dugaan tapi lebih banyak terbukti gitu lo.*

### 3. Alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan karena “menyangkal”

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dan Mahfud MD (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Ham) dalam sekmen dua. Sekmen ini Najwa kembali menghubungi Mahfud melalui video *call* dan berbincang secara virtual. Peristiwa tutur ini bermula saat Najwa memberikan pertanyaan kepada Mahfud tentang pernyataan Mahfud yang menyebutkan bahwa pemerintah tidak mungkin berbohong. Seperti percakapan di bawah ini.

NS: “Ketika disebut pemerintah tidak mungkin menyembunyikan sesuatu atau aparat-aparat dalam hal ini aparat kepolisian atau aparat penegak hukum tidak mungkin menyembunyikan sesuatu, tapi tidak usah jauh-jauh pak, kasus Novel Baswedan, jelas-jelas ada kejanggalan disitu, puplik berteriak, puplik membongkar tapi tidak ditelusuri dan dalihnya sudah sesuai proses hukum jadi agak sulit untuk meminta puplik percaya ketika yang di depan mata seperti Novel Baswedan saja tidak”

MM: “Ya itulah, itulah kalau orang berbohong orang akan tidak percaya silahkan, tetapi kalau saya ndak akan berbohong, saya katakan tidak mungkin bisa maksudnya, tidak mungkin sekarang ini orang pemerintah berbohong artinya tidak mungkin bisa, lalu orang bisa begitu percaya aja kepada kebohongan itu, tetap itu akan menjadi perdebatan puplik kalau mau berbohong, gitu kan” (12)



Respons yang diberikan oleh MM pada tuturan (12) tergolong pada pelanggaran maksim cara/pelaksanaan. Namun, alasan pelanggarannya berbeda dari apa yang disampaikan teori. Teori menyebutkan bahwa alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan terjadi karena Bingung memberikan jawaban, Basa-basi dan Tuturan tidak langsung. Namun ternyata, berdasarkan data pelanggaran maksim cara/pelaksanaan alasan pelanggaran karena MM menyangkal pernyataan dari NS. Hal tersebut tegambar pada tuturan MM yang sangat berlebih-lebihan. Seharusnya MM hanya menjawab sampai *Itulah kalau orang berbohong orang akan tidak percaya*.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dan Mahfud MD (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Ham) dalam sekmen dua. Mereka berbincang secara virtual. Peristiwa tutur ini bermula saat Najwa bertanya apa pendapat Mahfud tentang pemeriksaan kasus korupsi yang mengaitkan oknum jaksa, seperti percakapan di bawah ini.

NS: “Pak Mahfud sampai sejauh apakah anda akan mendorong KPK atau institusi di luar Kejaksaan Agung yang masuk dan memeriksa kasus yang saat ini ditangani Kejaksaan Agung menyangkut oknum jaksanya Pak?”

MM: “Itu tidak perlu dorongan seorang minfo itu adalah haknya KPK kalau KPK mau ambil alih ndak boleh jaksa agung menolak, ndak boleh menkopulhukam menolak itu berdasar pasal 8 dan pasal 9 UU KPK bagaimana anda minta dorongan ke saya, saya tidak akan mendorong dan tidak akan menghalangi itu haknya KPK sepenuhnya, KPKnya mau gak, kalau KPK mau silahkan aja itu UU yang mengatakan begitu, bukan saya bukan anda.” (15)

Respons yang diberikan oleh MM tergolong pada pelanggaran maksim cara/pelaksanaan. Fatmawati (2020:138) menyebutkan bahwa alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan terjadi karena bingung memberikan jawaban, lupa, gugup, empati, basa-basi dan rahasia. Namun ternyata, berdasarkan data pelanggaran maksim cara/pelaksanaan yang terjadi pada tuturan (15) di luar dari

apa yang disebutkan oleh teori yaitu karena MM menyangkal pernyataan dari NS. Hal tersebut tegambar pada data (15) tuturan MM sangat berlebih-lebihan. Seharusnya MM hanya menjawab sampai *Itu tidak perlu dorongan seorang minfo itu adalah haknya KPK*.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dengan Bonyamin Saiman (Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) dalam sekmen lima. Peristiwa tutur ini bermula saat Najwa membahas tentang Bonyamin yang menemukan beberapa bukti dan melaporkan ke Jaksa Agung. Kemudian, Bonyamin merespon pernyataan Najwa seperti percakapan di bawah ini.

NS: “Oke karena kan kemudian ada dokumen yang menyebut bahwa melapor ke Jaksa Agung dua kali soal pertemuannya menggelar video *call* dan sebagainya, ee itu, itu sesuatu yang memang hasil temuan anda juga ya terjadi atau bagaimana?”

BS: “Gak itu temuan tempo kalau itu saya mengakui karena, saya posisi bahwa Pinangki itu memang pergi keluar negeri terus kemudian Djoko Tjandra itu pasti tidak mudah percaya seorang jaksa yang bukan bidangnya eslonnya bawah terus kemudian bisa dipercaya oleh Djoko Tjandra tanpa sesuatu yang akan diberitahukan dia, baik secara rahasia maupun secara terbuka kepada Djoko Tjandra bahwa saya itu begini lo dekat dengan A dekat dengan B itu, sehingga saya akan bisa memberikan bantuan kepada anda bebas dari hukum untuk mengajukan permohonan fatwa, permohonan fatwa ini akan didukung dari sisi yang kemudian bisa jadi akan didukung oleh instansinya dia, dan dia bisa mencatut level tertinggi, nah tapi mencatut itu bisa juga memang, bersedia dicatut atau malah menyuruh dicatut kan begitukan. (71)”

Respons yang diberikan oleh MM pada tuturan (71) tergolong pada pelanggaran maksim cara/pelaksanaan. Namun, alasan pelanggarannya berbeda dari apa yang disampaikan teori. Teori menyebutkan bahwa alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan terjadi karena Bingung memberikan jawaban, Basa-basi dan Tuturan tidak langsung. Namun ternyata, berdasarkan data pelanggaran maksim cara/pelaksanaan alasan pelanggaran karena BS membantah pernyataan NS.

Hal tersebut tergambar pada data tuturan (71) *Gak itu temuan tempo kalau itu saya mengakui.*

4. Alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan karena “tuturan tidak langsung”

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dan Mahfud MD (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Ham) dalam sekmen dua. Mereka berbincang secara virtual. Peristiwa tutur ini bermula saat Najwa bertanya apa pendapat Mahfud tentang apakah khalayak ramai akan percaya dengan proses pemeriksaan keluarga Jaksa yang terjerat kasus korupsi, seperti percakapan di bawah ini.

NS: “Apakah perlu atau apakah menurut anda puplik harus percaya begitu saja kejaksanaan berani memeriksa keluarganya sendiri?”

MM: “Terserah puplik dan terserah juga kejaksaannya mau transparan apa ndak dan terserah KPK mau ambil apa tidak. KPK punya hak kan” (16)

Alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan yang terjadi pada tuturan (16) di atas karena MM terlihat mengindari tuturan langsung dan paham konteks. Hal tersebut tergambar pada tuturannya yaitu *Terserah puplik dan terserah juga kejaksaannya mau transparan apa ndak dan terserah KPK mau ambil apa tidak. KPK punya hak kan*”. Seharusnya MM bertutur secara langsung agar tidak melanggar maksim cara/pelaksanaan. Fatmawati (2020:154—156) mengatakan bahwa salah satu alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan adalah berkaitan dengan tuturan yang disampaikan secara tidak langsung.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Mahfud MD seorang (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Ham) dengan Najwa Shihab sebagai pemandu acara dalam sekmen dua. Mereka berbincang secara virtual. Peristiwa tutur ini bermula saat Mahfud merespons pernyataan Bonyamin ia meminta menghubungi Jaksa Agung untuk mengimplentasikan persetujuan Mahfud mengundang KPK dalam menangani kasus korupsi Djoko Tjandra. Kemudian, pernyataan Bonyamin tersebut direspons oleh Mahfud dan Najwa. Seperti percakapan di bawah ini.

MM: “Itu, tu tinggal cara saya hahahhhahhaa”

NS : “Yang jelas, ini sudah terbuka dan disaksikan jutaan orang jadi seharusnya ini sudah”. (25)

Alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan yang terjadi pada tuturan (25) di atas karena kurangnya kosakata yang disampaikan sehingga menuturkan tuturan secara tidak langsung. Fatmawati (2020:135) memperoleh 36 konsep-konsep alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan salah satu di antaranya adalah kurang kosakata. Hal tersebut tergambar dalam data (25) yaitu *Disaksikan jutaan orang jadi seharusnya ini sudah*. Berdasarkan kalimat tersebut setelah kata sudah seharusnya ada kata penjelas apa yang dimaksud sudah.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Mahfud MD seorang (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Ham) dengan Najwa Shihab sebagai pemandu acara dalam sekmen dua. Mereka berbincang secara virtual. Peristiwa tutur ini bermula saat Mahfud merespons pertanyaan Najwa tentang apakah bisa jeruk makan jeruk, yang dimaksud jeruk makan jeruk adalah apakah bisa Jaksa Agung memeriksa oknum Jaksanya yang terlibat kasus korupsi Djoko Tjandra. Kemudian pertanyaan Najwa direspon oleh Mahfud sambil tertawa seperti percakapan di bawah ini.

MM: “Ndak papa jeruk makan jeruk (hahahaha)”

NS : “Yakin ya Pak bisa, jadi kita” (33)

Alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan yang terjadi pada tuturan (33) di atas karena kurangnya kosakata yang disampaikan sehingga tuturan yang disampaikan tidak langsung. Fatmawati (2020:135) memperoleh 36 konsep-konsep alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan salah satu di antaranya adalah kurang kosakata. Hal tersebut tergambar dalam data (33) yaitu *Yakin ya Pak bisa, jadi kita*. Berdasarkan kalimat tersebut setelah terdapat ketaksaan yang tinggi apa yang yang dimaksud yakin bisa dalam hal apa dan pada kata jadi kita adalah tuturan yang tidak dituturkan sampai selesai sehingga maknanya menjadi taksa.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Bonyamin Saiman (Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) dengan Najwa Shihab sebagai pemandu acara dalam sekmen lima. Peristiwa tutur ini bermula saat Najwa membahas tentang Bonyamin yang tidak percaya Jaksa Pinangki bekerja sendirian pasti ada orang lain yang terlibat. Kemudian, Bonyamin merespons pertanyaan Najwa seperti percakapan di bawah ini.

BS: “Ya sementara ini masih apa, istilah saya kepandaian Pinangki itu aja mancatut banyak orang”

NS: “Mencatut atau, atau” (68)

Alasan terjadinya pelanggaran maksim cara/pelaksanaan pada data (68) karena NS bertutur secara tidak langsung. Hal tersebut tergambar pada tuturan *Mencatut atau, atau* NS bertutur menggantung segingga tuturannya tidak sampai sehingga tuturannya menjadi taksa *mecatut* atau apa yang dimaksud. Fatmawati (2020:154—156) mengatakan bahwa salah satu alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan adalah berkaitan dengan tuturan yang disampaikan secara tidak langsung.

##### 5. Alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan karena “berbagi informasi”

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dengan Kurnia Ramadhana seorang (Peneliti ICW) dalam sekmen dua. Peristiwa tutur ini bermula saat Najwa bertanya kepada Kurnia tentang apakah dalam pemeriksaan kasus korupsi Djoko Thjandra harus melibatkan KPK. Kemudian, direspons oleh Kurnia seperti percakapan di bawah ini.

NS: “Saya ingin ke Pak Mahfud ada Kurnia dari ICW saya ingin tau karena ICW yang sejak awal bilang KPK harus masuk karena melihat rasanya sulit untuk, untuk kejaksan memeriksa kasus ini”

KR: “Iya.. saya tadi mau bahas soal bohong atau tidak bohong ya Mbak Nana, kita masih mengingat masih ditahun ini sebenarnya dua kali pemerintah diduga memberikan kabar yang tidak benar bukan hanya novel Baswedan bulan januari ada kasus Harun Masiku apa kata bawahan Pak Mahfud saat itu, Harun Masiku tidak berada di Indonesia, padahal beberapa waktu kemudian pernyataan itu diralat. Yang kedua kasus Djoko Tjandra bawahan Pak Mahfud juga mengatakan tidak ada data perlintasan atas nama Djoko

Tjandra faktanya orangnya ada mendapatkan berbagai profilip sampai pada mendaftarkan upaya hukum luar biasa. Yang kedua soal tadi apakah persoalan hukum terbatas pada dokumen perkara kalau kita melihat kasus yang ada di Kejaksaan Agung yang melibatkan jaksa Pinangki Sirna Malasari oke klim Kejaksaan dokumennya berbeda gedung akan tetapi ada bukti petunjuk berupa CCTV yang ada diruangan jaksa Pinangki kemana sekarang, pastikan hangus, jadi jangan terlalu cepat menyimpulkan apalagi kalau kasus hukum hanya melandaskan pada dokumen ada banyak alat bukti lain yang juga masih kita pertanyakan hari ini kepada Kejaksaan Agung dan ICW sejak awal mendorong agar KPK terlibat dalam penyelidikan terbakarnya gedung Kejaksaan Agung kenapa Mbak Nana? karena kita khawatir inikan apakah ini tidak disengaja atau ini disengajakan dua itu saja opsiannya. Kami ingin KPK masuk kalau memang nanti terbukti ada pihak-pihak entah itu oknum internal Kejaksaan Agung atau di luar Kejaksaan Agung yang berupaya untuk menghentikan perkara-perkara besar maka dapat di sangka dengan pasal 21 oprasaljastis. Karena tadi Mbak Nana sampaikan kita agak sulit percaya kalau penegak hukum A menangani perkara yang melibatkan oknum penegak hukum A juga lebih bagus ambil tarik netral biar KPK yang masuk. Itu pointnya Mba Nana. (18)

Pelanggaran yang disebabkan karena keinginan untuk berbagi informasi selain terjadi pada maksim kuantitas dan relevansi, juga terjadi pada maksim cara/pelaksanaan. Dilihat dari data tuturan (18) Alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan di atas terjadi karena KR ingin berbagi informasi supaya NS mendapatkan informasi yang lengkap. Hal tersebut tegambar pada tuturan KR yang memberi informasi tentang kabar pemerintah berbohong dengan memberikan kabar yang tidak benar tentang kasus korupsi Novel Baswedan dan Djoko Thjandra.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Kurnia Ramadhana seorang (Peneliti ICW) dengan Mahfud MD (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Ham) dalam sekmen dua. Mereka berbincang secara virtual. Peristiwa tutur ini bermula saat Kurnia menjawab pertanyaan dari Najwa tentang kelar perkara apa. Kemudian, Mahfud merespon tuturan Kurnia seperti percakapan di bawah ini.

KR: “Gelar perkara kasus suap surat jalan dan reknotis, itu kabarnya sih mengundang KPK tapi sampai hari ini kok terlihat seperti kejaksaan agung menutup diri, itu yang ada”

MM: “Jadi kalau begitu, benar dong saya bahwa sekarang ini pejabat ndak bisa berbohong buktinya tadi disampaikan oleh Mas Kurnia, dulu ada orang yang bilang Masiku ndak ada ternyata bohongkan militas, kemudian katanya Djoko Tjandra bohong ternyata masuk, kan berarti saya sudah benar bilang, jangan berbohong sekarang ini masyarakat akan tau, dimana salahnya” (21)

Respons yang diberikan oleh MM pada tuturan (21) tergolong pada pelanggaran maksim cara/pelaksanaan. Namun, alasan pelanggarannya berbeda dari apa yang disampaikan teori. Teori menyebutkan bahwa alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan terjadi karena Bingung memberikan jawaban, Basa-basi dan Tuturan tidak langsung. Namun ternyata, berdasarkan data pelanggaran maksim cara/pelaksanaan alasan pelanggaran karena MM terlihat berbagi informasi terhadap apa yang disampaikan sebelumnya yaitu tentang orang yang berbohong dengan bertutur secara berlebihan.

Konteks : Tuturan ini terjadi antara Najawa Shihab dan Mahfud MM pada sekmen kedua. Sebelum pembicaraan berakhir dan sambungan video dengan Mahfud MD ditutup karena Mahfud MD tidak hadir langsung di studio makanya dihubungi melalui video *call*, Najwa mengajukan pertanyaan penutup untuk Mahfud MD tentang temuan bukti yang dilakukan investigasi kasus korupsi Jaksa Pinangki, seperti pada percakapan di bawah ini.

NS: “Baik, Pak Mahfud pertanyaan penutup Pak Mahfud yang jelas puplik sempat dikagetkan oleh beberapa temuan yang dilakukan investigasi yang dilakukan media maupun investigasi yang dilakukan oleh sebutlah maki begitu ya, salah satunya adalah dugaan bahwa jaksa Pinangki itu melapor kepada Jaksa Agung

pertemuannya dengan Djoko Tjandra di luar negeri, Jaksa Pinangki bahkan sempat *video call* dengan Jaksa Agung melapor sudah dil begitu, itu dugaan-dugaan yang muncul, apakah anda melihat kejaksaan akan berani memeriksa Jaksa Agung atas kasus ini Pak Mahfud?

MM: “Itu sudah substansi perkara saya ndak boleh masuk tanyakan ke Pak Hari Setiyono aja ada di situ, saya ndak boleh masuk ke situ, karena Nana kan tau sendiri” (30)

Pelanggaran yang disebabkan karena keinginan untuk berbagi informasi selain terjadi pada maksim kuantitas dan relevansi, juga terjadi pada maksim cara/pelaksanaan. Dilihat dari data tuturan (30) Alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan di atas terjadi karena MM ingin berbagi informasi supaya NS lebih tahu. Hal tersebut tegambar pada tuturan MM yang memberi informasi bahwa Hary Setyono lebih tau permasalahan yang ditanyakan oleh NS.

Konteks : Tuturan ini terjadi antara Najawa Shihab dan Mahfud MM pada sekmen kedua. Sebelumnya Mahfud mengatakan bahwa ia bertemu dengan presiden lalu Najwa mengajukan pertanyaan, seperti pada percakapan di bawah ini.

NS: “Presiden bilang apa Pak?”

MM: “Saya bilang Pak ini yang ribut-ribut sabtu kemarin orang mempersoalkan orang 546 milyar seakan-akan itu digelapkan, itu ndak benar sesudah itu dijelaskan bahwa itu ndak benar sudah ada bukti otentiknya orang mempertanyakan lagi, la dulu kan 900 laputusan mahkamah agungnya 546 gitu, yang 300nya silahkan dipersoalkan lagi tapi yang putusan mahkamah agung 546 yang diributkan sampe sore sampe saya menjelaskan itu ni masih ada di meja saya ni bukti-buktinya ni, bahwa itu sudah selesai, ha kata presiden Pak Mahfud profesional aja, kita jangan takut, buka sejujur-jujurnya begitu kalau presiden selalu. (36)

Pelanggaran yang disebabkan karena keinginan untuk berbagi informasi selain terjadi pada maksim kuantitas dan relevansi, juga terjadi pada maksim cara/pelaksanaan. Dilihat dari data tuturan (36) Alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan di atas terjadi karena MM ingin berbagi informasi dengan



meenjelaskan pembicaraannya dengan Presiden. Hal tersebut tergambar pada kalimat *Saya bilang Pak ini yang ribut-ribut sabtu kemarin orang mempersoalkan orang 546 milyar seakan-akan itu digelapkan, itu ndak benar sesudah itu dijelaskan bahwa itu ndak benar sudah ada bukti otentiknya.*

Konteks : Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dan Satriadi Gunawan (Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta) pada sekmen ketiga. Tuturan ini adalah percakapan lanjutan antara Najwa dan Satriadi, Najwa memutar sebuah video kebakaran pemberian dari Satriadi, lalu Najwa mengucapkan terimakasih atas video yang diberikan oleh Satriadi lanjut mengajukan pertanyaan, seperti pada percakapan di bawah ini.

NS: “Yak terima kasih atas video itu Pak Bili jadi persisnya anda dan teman-teman mendapatkan info dari orang yang datang justru kemarkas?”

SG :“Betul, jadi pertama kita dapat berita terjadinya kebakaran yaitu dari warga yang datang ke pos terdekat, yaitu pos Kebayoran baru tepatnya sekitar jam 7 lewat 10 menit, kemudian langsung kita luncurkan 4 unit dan pada saat di TKP sudah ada 3 selasar dari gedung utama kejaksanaan agung sisi sebelah utara sudah terbakar nah itu langsung kita tambahkan lagi unit terakhir sampai dengan 65 unit dengan jumlah personil sekitar 325 orang.” (44)

Pelanggaran yang disebabkan karena keinginan untuk berbagi informasi selain terjadi pada maksim kuantitas dan relevansi, juga terjadi pada maksim cara/pelaksanaan. Dilihat dari data tuturan (44) Alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan di atas terjadi karena SG terlihat berbagi informasi. Hal tersebut tergambar pada tuturan SG yang menceritakan awal mulanya mendapat kabar kebakaran gedung jaksa agung. Hal tersebut tergambar pada data tuturan (44) *Jadi pertama kita dapat berita terjadinya kebakaran yaitu dari warga yang datang ke pos terdekat.*

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dan Hary Setyono Hary Setyono (Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan) pada sekmen ketiga. Tuturan ini tujuannya untuk mengetahui apakah sistem proteksi dan sebagainya ada atau tidak di gedung Jaksa Agung, sebelumnya Najwa sudah meminta kepada Hary untuk langsung menjawab. Namun, Hary belum menjawab pertanyaan Najwa, sehingga terjadilah percakapan seperti di bawah ini.

NS: “Oke, pertanyaannya Pak itu belum menjawab pertanyaan saya Pak Hari, apakah ada sistem proteksi itu Pak?”

HS: “Ya tentu di dalam pemeliharaan gedung itu ada proteksi terhadap keamanan gedung itu sepanjang yang saya ketahui ada istilahnya apar park ya, apar di tiap-tiap jarak sekian meter kemudian juga yang saya ketahui peringatan dini katakanlah sedangkan spengler karena tinggi gedung juga ruangan itu saya ketahui cukup tinggi hanya di beberapa bagian saja yang saya tau ini ya, tetapi secara umum saya tidak tau, tetapi ada seperti itu, nah nanti mungkin dari bapak damkar yang sudah melakukan itu bisa lebih lengkap lagi”  
(51)

Pelanggaran yang disebabkan karena keinginan untuk berbagi informasi selain terjadi pada maksim kuantitas dan relevansi, juga terjadi pada maksim cara/pelaksanaan. Dilihat dari data tuturan (51) Alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan di atas terjadi karena HS terlihat menambah informasi dalam jawabannya. Hal tersebut regambar pada tuturan data (51) *Nah nanti mungkin dari bapak damkar yang sudah melakukan itu bisa lebih lengkap lagi*, HS seolah melemparkan pertanyaan NS kepada Bapak damkar.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dengan Satriadi Gunawan seorang (Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta) dalam sekmen empat. Peristiwa tutur ini bermula saat Najwa mengajukan pertanyaan kepada Satriadi tentang apa yang akan Satriadi lakukan apabila diberi tugas untuk melakukan investigasi atas kebakaran yang terjadi di Gedung Jaksa Agung. Seperti percakapan di bawah ini.

NS: “Oke, saya membutuhkan anda malam ini untuk menjawab Pak, jadi kalau bapak di beri tugas wewenang investigasi biasanya apa sih yang diperiksa untuk tau ini tu sebetulnya tidak wajar kebakarannya.?”

SG: “Yaa kita pasti nyari titik utama titik pertama dari api tu dari mana di lantai berapa dan itu kita akan telusuri, kita akan telusuri biasanya ada berkas-berkas yang memang pasti ada titik utama itu di lantai berapa, nah itu perambatannya kemana arahnya nah itu nanti kita” (56)

Pelanggaran yang disebabkan karena keinginan untuk berbagi informasi selain terjadi pada maksim kuantitas dan relevansi, juga terjadi pada maksim cara/pelaksanaan. Dilihat dari data tuturan (56) Alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan di atas terjadi karena SG menegaskan jawabannya dengan menjelaskan dan menceritakan secara berkepanjangan. Hal tersebut tergambar pada data tuturan (56) *Kita pasti nyari titik utama titik pertama dari api tu dari mana di lantai berapa dan itu kita akan telusuri, kita akan telusuri biasanya ada berkas-berkas yang memang pasti ada titik utama itu di lantai berapa, nah itu perambatannya kemana arahnya nah itu nanti kita.*

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dengan Hary Setyono seorang (Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan) dalam sekmen enam. Peristiwa tutur ini bermula saat Najwa merespons jawaban dari Barita yang menceritakan tentang proses pemeriksaan oknum Jaksa Agung yang terlibat. Kemudian, Najwa mengajukan pertanyaan kepada Hary seperti percakapan di bawah ini.

NS: “Oke, berarti betul ya, berarti betul kalau begitu sekarang Pak Hari tolong dijawab karena ini tanda-tanda dulu tidak mau sekarang tidak mau dibuka anda tadi bilang percayakanlah kepada kejaksaan, bagaimana mau percaya kalau ada keengganan seperti ini Pak Hari?”

HS: “Yak baik, memang betul ada perpres 18 tahun 2011 tentang komisi kejaksaan di pasal 4 tadi juga disampaikan komisi kejaksaan berwenang menerima laporan dan menindaklanjuti tetapi perpres tersebut ada tambahannya mungkin Pak Ketua komisi kejaksaan belum menyampaikan tadi saya sampaikan ada MOYU antara komisi kejaksaan dengan bidang pengawasan kalau tidak atau dengan kejaksaan jadi apabila ada laporan pengaduan yang ditujukan ke komisi kejaksaan itu komisi kejaksaan melakukan rapat kalau tidak salah yang saya baca untuk menyerahkan kepada

bidang pengawasan atau kejaksa agung untuk dilakukan pemeriksaan oleh bidang pengawasan. Apabila dalam pemeriksaan itu tidak sempurna dan sebagainya maka komisi kejaksanaan bisa mengambil alih atau menambahi seperti yang disampaikan oleh Pak Bonyamin tadi dan seterusnya, itu kira-kira.” (78)

Pelanggaran yang disebabkan karena keinginan untuk berbagi informasi selain terjadi pada maksim kuantitas dan relevansi, juga terjadi pada maksim cara/pelaksanaan. Dilihat dari data tuturan (78) Alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan di atas terjadi karena HS menambahkan tuturan lain di luar pertanyaan yang diajukan oleh NS. Hal tersebut tergambar pada data tuturan (78) *Memang betul ada perpres 18 tahun 2011 tentang komisi kejaksanaan di pasal 4 tadi juga disampaikan komisi kejaksanaan berwenang menerima laporan dan menindaklanjuti tetapi perpres tersebut ada tambahannya mungkin Pak Ketua komisi kejaksanaan belum menyampaikan tadi saya sampaikan ada MOYU antara komisi kejaksanaan dengan bidang pengawasan.*

#### 6. Alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan karena”penolakan”

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Kurnia Ramadhana seorang (Peneliti ICW) dengan Mahfud MD (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Ham) dalam sekmen dua, mereka berbincang secara virtual. Peristiwa tutur ini bermula saat Kurnia mersepons jawaban Mahfud tentang pemerintah tidak mungkin bisa berbohong dalam menangani kasus-kasus korupsi karena masyarakat akan tau jika pemerintah berbohong. Kemudian, Mahfud kembali merespons pernyataan Kurnia seperti percakapan di bawah ini.

KR: “Dan sanksi orang yang berbohong itu sampai hari ini tidak ada Prof Mahfud itu yang kita sesalkan kalau tidak ada *phanismen* yang tegas dari presiden maka bukan tidak mungkin orang itu akan berbohong dimasa yang akan datang terlebih terhadap penegakan hukum di bawah kewenangan profesor Mahfud MD. Itu yang kita khawatir Pak Mahfud”

MM: “Konteksnya bukan itu, konteksnya yang saya katakan tidak mungkin sekarang orang bisa berbohong buktinya anda sudah

tunjukkan buktinya itu bohong ketahuan juga, nah soal itu nanti soal lain ada, ada proses-proses internal kan sudah ada tindakan-tindakan juga tu, cuma tindakan menurut anda beda menurut tindakan pemerintah, misalnya saya contoh begini, di keminkoham dirjennya dicopot, wah anda curiga lagi, namanya sudah curiga oo itu bukan itu gitu terus gimana dong kan begitu, nanti aja yang Djoko Tjandra juga semuanya ditangani siapa yang melayani dia pergi sudah ditangani semua terus apalagi yang mau dilakukan, apakah mau melanggar hukum kita ini, ikut saran anda gitu wah itu yang ditangkap kapolrinya gitu misalnya, kan harus yang, kan sudah ada bukti bahwa yang berbohong ternyata salah ditindak ha gitu, lagi pula kasus Harun Masiku bukan bukan di pemerintah ya itukan di KPK” (22)

Pelanggaran yang disebabkan karena penolakan selain terjadi pada maksim relevansi, juga terjadi pada maksim cara/pelaksanaan. Dilihat dari data tuturan (22) Alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan di atas terjadi karena MM menolak pernyataan yang disampaikan oleh KR. Hal tersebut tergambar dalam data (22) yaitu *Konteksnya bukan itu, konteksnya yang saya katakan tidak mungkin sekarang orang bisa berbohong buktinya anda sudah tunjukkan buktinya itu bohong ketahuan juga.*

#### 7. Alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan karena “memerintah”

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dengan Bonyamin Saiman seorang (Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) dalam sekmen dua. Peristiwa tutur ini bermula saat Najwa merespon jawaban Mahfud tentang KPK tidak boleh mencampuri urusan pemerintah, dan kemudian Najwa meminta Bonyamin untuk menyampaikan argumennya tentang jawaban Mahfud tersebut. Seperti percakapan di bawah ini.

NS: “Baik, Pak Mahfud, Pak Bonyamin silahkan anda mau menyampaikan apa?”

BS: “Sederhana Pak Mahfud mengajukan permohonan ajalah, Pak Mahfud atas kewenangan yang dimiliki memberikan arahan menghimbau atau tanda kutip lebih tinggi memerintah, jaksa agung untuk dalam ekspose, istilah di kejaksaan itu ekspose bukan gelar

perkara, ketika pada posisi nanti di arahkan mengundang KPK, biar menjawab keraguan ini jadi Pak Mahfud saya yakin tidak akan menyalahi kewenangan dan tidak akan intervensi karena jaksa agung adalah di bawah pemerintahan, jadi diarahkan ajalah dihimbau saya yakin kalau Pak Mahfud nyentil jaksa agungnya eh tolong itu KPK di undang ajalah dalam ekspose ini hal yang sederhana dan gampang dilakukan Pak Mahfud, demikian terimakasih.” (23)

Respons yang diberikan oleh MM pada tuturan (23) tergolong pada pelanggaran maksim cara/pelaksanaan. Namun, alasan pelanggarannya berbeda dari apa yang disampaikan teori. Teori menyebutkan bahwa alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan terjadi karena Bingung memberikan jawaban, Basa-basi dan Tuturan tidak langsung. Namun ternyata, berdasarkan data pelanggaran maksim cara/pelaksanaan alasan pelanggaran karena BS terlihat memerintah MM, hal tersebut tergambar kalimat *Di arahkan mengundang KPK, biar menjawab keraguan ini jadi Pak Mahfud saya yakin tidak akan menyalahi kewenangan dan tidak akan intervensi karena jaksa agung adalah di bawah pemerintahan, jadi diarahkan ajalah dihimbau saya yakin kalau Pak Mahfud nyentil jaksa agungnya eh tolong itu KPK di undang ajalah dalam ekspose ini hal yang sederhana dan gampang dilakukan Pak Mahfud.*

#### 8. Alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan “tidak tahu jawaban pasti”

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dengan Hary Setyono seorang (Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan) dalam sekmen tiga. Peristiwa tutur ini bermula saat Najwa kembali bertanya kepada Hary tentang sistem proteksi yang ada di Gedung Jaksa Agung karena pertanyaan Najwa belum terjawab oleh Hary. Seperti percakapan di bawah ini.

NS: “Oke, pertanyaannya Pak itu belum menjawab pertanyaan saya Pak Hari, apakah ada sistem proteksi itu Pak?”

HS: “Iya saya mau masuk ke sana” (50)

Respons yang diberikan oleh MM pada tuturan (50) tergolong pada pelanggaran maksim cara/pelaksanaan. Namun, alasan pelanggarannya berbeda dari apa yang disampaikan teori. Teori menyebutkan bahwa alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan terjadi karena Bingung memberikan jawaban, Basa-basi dan Tuturan tidak langsung. Namun ternyata, berdasarkan data pelanggaran maksim cara/pelaksanaan alasan pelanggaran karena HS tidak memiliki jawaban yang pasti apakah sistem proteksi benar ada atau tidak di gedung kejaksaan sehingga bertutur secara tidak langsung. Hal tersebut tergambar pada data tuturan HS (50) tidak langsung menjawab pertanyaan dari NS.

Konteks: Tuturan ini Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dengan Satriadi Gunawan seorang (Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta) dalam sekmen empat. Peristiwa tutur ini bermula saat Najwa bertanya tentang kenapa Satriadi tidak dilibatkan dalam investigasi kebakaran Gedung Jaksa Agung. Seperti percakapan di bawah ini.

NS: “Kenapa ya pak?”

SG: “Memang aturannya seperti itu mungkin” (54)

Respons yang diberikan oleh MM pada tuturan (54) tergolong pada pelanggaran maksim cara/pelaksanaan. Namun, alasan pelanggarannya berbeda dari apa yang disampaikan teori. Teori menyebutkan bahwa alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan terjadi karena Bingung memberikan jawaban, Basa-basi dan Tuturan tidak langsung. Namun ternyata, berdasarkan data pelanggaran maksim cara/pelaksanaan alasan pelanggaran karena SG tidak memiliki jawaban yang pasti atas pertanyaan yang diajukan oleh NS. Hal tersebut tergambar pada data tuturan (54) *Memang aturannya seperti itu mungkin* dari kalimat tersebut kata *mungkin* adalah jawaban yang tidak pasti atau ambigu bisa iya bisa juga tidak. Seharusnya SG cukup menjawab *Memang aturannya seperti itu*, tanpa menambahkan kata *mungkin*.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dengan Hary Setyono seorang (Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan) dalam sekmen empat. Peristiwa tutur ini bermula saat Najwa merespons jawaban dari Hary dan kemudian kembali bertanya tentang asuransi Gedung Jaksa Agung. Seperti percakapan di bawah ini.

NS: “Oke. Pak Hari tapi yang jelas gedung kejaksaan yang terbakar belum diasuransikan ya Pak?”

HS: “Sepengetahuan saya memang demikian” (59)

Respons yang diberikan oleh MM pada tuturan (59) tergolong pada pelanggaran maksim cara/pelaksanaan. Namun, alasan pelanggarannya berbeda dari apa yang disampaikan teori. Teori menyebutkan bahwa alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan terjadi karena Bingung memberikan jawaban, Basa-basi dan Tuturan tidak langsung. Namun ternyata, berdasarkan data pelanggaran maksim cara/pelaksanaan alasan pelanggaran karena HS tidak memiliki jawaban yang pasti atas pertanyaan yang diajukan oleh NS. Hal tersebut tergambar pada data tuturan (59) *Sepengetahuan saya memang demikian* dari kalimat tersebut adalah jawaban yang tidak pasti atau ambigu bisa iya bisa juga tidak. Seharusnya HS cukup menjawab *Belum diasurasi* atau *sudah diasurasi* namun karena HS tidak tau pasti jawabannya sehingga ia menututurkan *Sepengetahuan saya memang demikian*.

#### 9. Alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan karena “basa-basi”

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dengan Satriadi Gunawan seorang (Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta) dalam sekmen empat. Peristiwa tutur ini bermula saat Najwa berbincang dengan Satriadi tentang cerita dibalik terbakarnya gedung Kejaksaan Agung. Seperti percakapan di bawah ini.

NS: “Yaaak dalam kasus seperti ini Pak Bili investigasi itu biasanya meliputi apa-apa saja?”

SG: “Yaak, jadi kalau investigasi itu kewenangan dari puslapolri ya, kalau pemadam kebakaran memang posisinya pada saat itu hanya operasi bagaimana segera tuntas kebakaran yang terjadi di TKP itu.” (52)



Alasan terjadinya pelanggaran maksim cara/pelaksanaan pada data (52) karena SG terlihat basa-basi kepada NS terkait kesantunan. Hal tersebut tergambar pada kalimat *Jadi kalau investigasi itu kewenangan dari puslapolri ya, kalau pemadam kebakaran memang posisinya pada saat itu hanya operasi bagaimana segera tuntas*. SG menceritakan bahwa untuk investigasi itu bukan kewenangan dari dia melainkan kewenangan puslapolri. Fatmawati (2020:138) menyebutkan bahwa basa-basi merupakan salah satu alasan terjadinya pelanggaran pada maksim cara/pelaksanaan.

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Bonyamin Saiman seorang (Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) dengan Hary Setyono (Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan) dalam sekmen tujuh. Peristiwa tutur ini bermula saat Najwa memberikan pertanyaan tentang bagaimana sikap Jaksa Agung karena Jaksa tertingginya terlibat kasus korupsi. Kemudian, Hary menceritakan bahwa pihaknya melakukan pemeriksaan tetapi masih mau klarifikasi dulu tentang kasus korupsi Djoko Tjandra yang melibatkan Jaksa Pinangki. Seperti percakapan di bawah ini.

HS: “Mudah-mudahan ndak lah, mudah-mudahan ndak”

BS: “Berarti boleh masuk? (79)”

Alasan terjadinya pelanggaran maksim cara/pelaksanaan pada data (79) karena BS terlihat paham konteks. Fatmawati (2020:135) memperoleh tiga puluh enam konsep alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan salah satu di antaranya adalah paham konteks. Hal tersebut tergambar pada data tuturan (79) *Berarti boleh masuk*.

10. Alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan karena “kesal”

Konteks: Tuturan ini terjadi antara Najwa Shihab sebagai pemandu acara dengan Hary Setyono seorang (Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan) dalam sekmen empat. Peristiwa tutur ini bermula saat Najwa dan Hary membahas tentang asuransi Gedung Jaksa Agung dan Hary membantah bahwa Gedung tersebut termasuk kawasan cagar budaya. Kemudian,

Najwa kembali membantah pernyataan Hary tersebut. Sehingga, terjadilah percakapan di bawah ini.

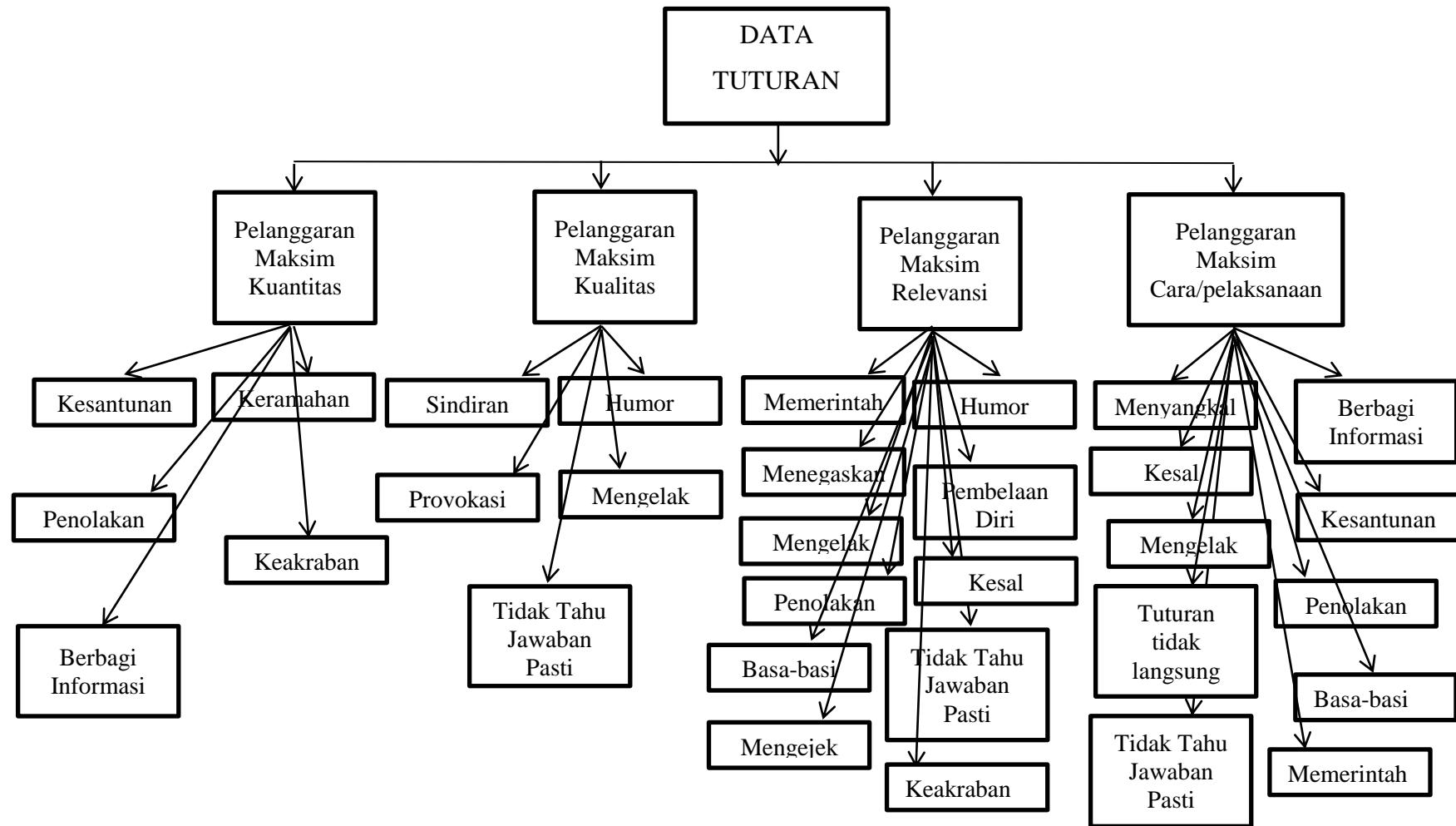
NS: “Kawasan-kawasan cagar budaya Pak tapi gedungnya bukan, gedungnya tidak Pak”

HS: “Dibawahnya lagi perlakuan terhadap kawasan budaya sama dengan cagar budaya makanya bacanya jangan” (61)

Respons yang diberikan oleh MM pada tuturan (61) tergolong pada pelanggaran maksim cara/pelaksanaan. Namun, alasan pelanggarannya berbeda dari apa yang disampaikan teori. Teori menyebutkan bahwa alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan terjadi karena Bingung memberikan jawaban, Basa-basi dan Tuturan tidak langsung. Namun ternyata, berdasarkan data pelanggaran maksim cara/pelaksanaan alasan pelanggaran karena HS kesal atas pernyataan yang diberikan oleh NS. Hal tersebut tergambar pada data tuturan (61) *Dibawahnya lagi perlakuan terhadap kawasan budaya sama dengan cagar budaya makanya bacanya jangan*, dari kalimat tersebut HS terlihat kesal yang ditandai pada kalimat *makanya bacanya jangan*. Tuturan tersebut tidak dituturkan sampai selesai sehingga menggantung *jangan apa?*.

Berdasarkan dua masalah yang penulis angkat, penulis menemukan sejumlah pelanggaran maksim prinsip kerja sama Grice dan alasan pelanggaran maksim prinsip kerja sama Grice. Untuk lebih rinci berikut penulis paparkan bagan 4.1 lihat di bawah ini.

Bagan 4.1 Pelanggaran Maksim Prinsip Kerja Sama Grice dan Alasan Terjadinya Pelanggaran Maksim Prinsip Kerja Sama Grice



## **4.2 Pembahasan**

Pada bagian ini, penulis menginterpretasi hasil pengolahan data mengenai pelanggaran dan alasan terjadinya pelanggaran prinsip kerja sama Grice tuturan Najwa Shihab dan Bintang tamunya dalam program Mata Najwa *Bara di Markas Jaksa* di Trans 7.

### **4.2.1 Pembahasan Hasil Penelitian Data Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice dan Alasan Pelanggarannya**

Berdasarkan analisis data, ditemukan sejumlah bentuk pelanggaran maksimum prinsip kerja sama Grice dan alasan pelanggaran maksimum prinsip kerja sama Grice. Dari keempat maksimum prinsip kerja sama Grice, maksimum yang paling banyak dilanggar adalah maksimum cara/pelaksanaan. Sedangkan maksimum yang paling sedikit dilanggar adalah maksimum kualitas. Dari 83 data tuturan ditemukan 25 tuturan yang melanggar maksimum kuantitas dengan 5 kategori alasan pelanggaran. Untuk maksimum kualitas, dari 83 data tuturan ditemukan 8 tuturan yang melanggar maksimum kualitas dengan 5 kategori alasan pelanggaran. Untuk maksimum relevansi, dari 83 tuturan ditemukan 23 tuturan yang melanggar maksimum relevansi dengan 11 kategori alasan pelanggaran. Selanjutnya, dari 83 data tuturan ditemukan 27 tuturan yang melanggar maksimum cara/pelaksanaan dengan 10 kategori alasan pelanggaran.

Fakta tersebut sejalan dengan pernyataan Fajrin dan Rohmadi (2016) yang menyatakan bahwa pelanggaran prinsip kerja sama Grice terjadi pada semua maksimum. Hal tersebut membuktikan bahwa maksimum dalam prinsip kerja sama Grice tidak bisa diterapkan secara universal pada semua bahasa. Hal tersebut terlepas dari budaya yang ada pada setiap bahasa yang digunakan. Hal tersebut sejalan dengan Murray (2009) dalam artikelnya menyebutkan bahwa cara dari

seseorang untuk mematuhi atau melanggar batas-batas maksim dan efek komunikatif yang dicapai, akan bervariasi berdasarkan bahasa dan budaya yang digunakan.

Bagi masyarakat Indonesia, pelanggaran terhadap prinsip kerja sama Grice, justru untuk menjaga kesantunan dalam berkomunikasi. Komunikasi yang selalu menerapkan prinsip kerja sama Grice, bagi masyarakat Indonesia justru dianggap mengabaikan prinsip kesantunan. Hal tersebut menandakan bahwa terdapat perbedaan tipe prinsip kerja sama yang berlaku bagi masyarakat di Indonesia.

Budaya yang berbeda antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya menyebabkan perbedaan dalam menerapkan prinsip kerja sama. Oleh karena itu, prinsip kerja sama Grice tidak bisa dipaksa secara keseluruhan untuk diterapkan pada bahasa tertentu. Apabila diterapkan maka akan terjadi pelanggaran. Selain masalah budaya, konteks percakapan juga menjadi penyebab pelanggaran maksim prinsip kerja sama. Pada situasi tertentu, prinsip kerja sama tidak memungkinkan untuk dipatuhi. Bahkan, apabila dipaksakan untuk dipatuhi justru akan membuat percakapan menjadi tidak natural.

Terkait dengan alasan pelanggaran prinsip kerja sama, Jazeri (2008:151) menyebutkan bahwa dalam sebuah percakapan, pelanggaran maksim sering tidak terelakkan, pelanggaran tersebut terjadi karena unsur kesengajaan dan unsur ketidak sengajaan. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian ini, pelanggaran pada maksim prinsip kerja sama Grice disebabkan oleh beberapa alasan baik itu alasan secara pribadi maupun alasan yang berkaitan dengan budaya. Berdasarkan pembahasan di atas, berikut ini dipaparkan secara rinci

pembahasan pelanggaran maksim prinsip kerja sama Grice dan alasan pelanggarannya.

#### **4.2.1.1 Pembahasan Pelanggaran Maksim Kuantitas Prinsip Kerja Sama Grice dan Alasan Pelanggarannya**

Berdasarkan hasil penelitian, pelanggaran terhadap maksim kuantitas yang terdapat dalam program Mata Najwa *Bara di Markas Jaksa* di Trans 7 terdapat sebanyak 25 tuturan yang melanggar dari 271 tuturan keseluruhan. Tuturan yang mematuhi maksim kuantitas dalam prinsip kerja sama Grice tidak memerlukan penambahan informasi pendukung. Partisipan tutur cukup memberikan apa yang diminta oleh mitra tuturnya. Konsep tersebut tidak relevan dengan budaya tutur masyarakat di Indonesia. Masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan basa-basi yang cukup tinggi. Tidak hanya itu, sikap ramah–tamah yang dimiliki masyarakat Indonesia juga menyebabkan konsep maksim kuantitas prinsip kerja sama Grice berbeda dengan yang ada di Indonesia khususnya dalam program Mata Najwa *Bara di Markas Jaksa* di Trans 7.

Berdasarkan pernyataan di atas hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam program Mata Najwa *Bara di Markas Jaksa* di Trans 7 bentuk pelanggaran maksim kuantitas berupa kebiasaan bintang tamu memberikan penambahan informasi pendukung untuk memperkuat respons utama yang akan disampaikannya, dan bintang tamu juga sering memberikan informasi yang minim. Selain itu, pemberian pertanyaan yang minim dari pemandu acara juga bentuk pelanggaran pada maksim kuantitas. Terkait bentuk pelanggaran maksim kuantitas di atas Chaer (2010) menyatakan bahwa terjadinya pelanggaran maksim kuantitas prinsip kerja sama disebabkan karena adanya kemauan dari partisipan untuk memberikan kontribusi yang berlebihan dalam berbicara.

Pembahasan di atas sejalan dengan pernyataan Herawati (2013) mengemukakan bahwa penerapan maksim kuantitas akan berkaitan secara budaya dan akan berbeda jika diamati dalam budaya tutur masyarakat Indonesia. Hal tersebut dikarenakan makna kuantitas yang ada di Indonesia berbeda dengan makna kuantitas yang dimaksud oleh Grice.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian. Secara garis besar alasan pelanggaran dari maksim kuantitas disebabkan oleh beberapa alasan di antaranya: keramahan, kesantunan, keakraban, penolakan, dan berbagi informasi. Alasan pelanggaran tersebut didukung oleh hasil penelitian Pratiwi (2013) yang menyatakan bahwa pelanggaran maksim prinsip kerja sama Grice bertujuan untuk pengembangan alur cerita. Pernyataan tersebut bisa diartikan sebagai upaya untuk mengembangkan suatu percakapan.

Alasan pelanggaran maksim kuantitas dalam program Mata Najwa *Bara di Markas Jaksa* di Trans 7 banyak ditemukan karena adanya keinginan dari bintang tamu untuk berbagi pengetahuan, informasi, dan wawasan kepada mitra tuturnya. Hal tersebut dilakukan supaya mitra tutur mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh. Informasi yang lengkap tersebut diharapkan dapat memenuhi keingintahuan mitra tutur tentang hal yang ditanyakan atau yang sedang dibicarakan. Hal tersebut juga tidak terlepas dari usaha untuk menunjukkan kesantunan.

Hal yang perlu dipahami bahwa pelanggaran maksim prinsip kerja sama Grice tidak serta-merta menyebabkan kekacauan dalam komunikasi. Hasil penelitian membuktikan bahwa percakapan tetap berjalan dengan baik. Peserta tutur tetap memahami apa yang dibicarakan meskipun terjadi pelanggaran maksim

mitra tutur bahkan tidak mempermasalahkan. Hal tersebut dianggap hal yang lazim terjadi bagi masyarakat Indonesia, tidak lain halnya berkaitan dengan budaya.

#### **4.2.1.2 Pembahasan Pelanggaran Maksim Kualitas Prinsip Kerja Sama Grice dan Alasan Pelanggarannya**

Berdasarkan hasil penelitian, Dari keempat maksim prinsip kerja sama Grice dalam program Mata Najwa maksim kualitas termasuk maksim yang jarang dilanggar dan yang paling sedikit dilanggar yaitu sebanyak 8 tuturan yang melanggar dari 271 tuturan keseluruhan. Hal tersebut dikarena program Mata Najwa termasuk acara yang membahas sesuatu yang formal dan ditonton oleh banyak orang. Maka dari itu baik pemandu acara maupun bintang tamu harus profesional dan berbicara sesuai dengan faktanya.

Meskipun demikian, dalam program Mata Najwa *Bara di Markas Jaksa* di Trans 7 hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pelanggaran maksim kualitas sering terjadi karena tuturan yang disampaikan secara tidak fakta. Dalam situasi formal, partisipan tutur wajib menyampaikan tuturan yang mengandung informasi yang benar dan sesuai dengan fakta. Tuturan yang tidak sesuai dengan fakta biasanya sering terjadi pada dua situasi yaitu situasi santai dan situasi serius. Fatmawati (2020:151) menyebutkan bahwa tuturan kooperatif bisa terwujud dengan mengatakan sesuatu yang sesuai fakta dan bisa juga tidak sesuai dengan fakta.

Berdasarkan pengamatan, penulis juga mencatat bahwa bentuk pelanggaran maksim kualitas juga berupa kebiasaan bintang tamu dalam menjawab pertanyaan dengan melebih-lebihkan suatu peristiwa. Pelanggaran maksim kualitas juga berupa pemberian respons yang tidak utuh. Respons yang



tidak utuh ini terjadi karena penutur tidak menjawab secara keseluruhan apa yang menjadi pertanyaan mitra tutur, sehingga tuturan yang disampaikan menjadi tidak sesuai dengan fakta. Selain itu, bintang tamu Najwa Shihab juga mempunyai kebiasaan memberikan respons dengan bercanda. Bagi masyarakat Indonesia hal-hal yang telah disebutkan di atas sudah biasa terjadi. Namun, pada prinsipnya hal tersebut sudah melanggar prinsip kerja sama Grice.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian. Secara garis besar alasan pelanggaran dari maksim kualitas dalam program Mata Najwa *Bara di Markas Jaksa* disebabkan oleh beberapa alasan, yakni: humor, sindiran, mengelak, provokasi, dan tidak tahu jawaban pasti. Rochmawati (2017:156) mengatakan bahwa humor atau lelucon akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran maksim kualitas prinsip kerja sama Grice.

Selain itu, dalam program Mata Najwa pelanggaran pada maksim kualitas ditemukan beberapa alasan pelanggaran yang berbeda dari apa yang disebutkan teori. Teori menyebutkan bahwa alasan pelanggaran maksim kualitas adalah karena humor atau lelucon, dan penolakan. Namun, berdasarkan data setelah diteliti ditemukan alasan seperti memprovokasi, menyindir, mengelak, dan jawaban yang tidak pasti. Berdasarkan data, alasan provokasi muncul karena terlihat bintang tamu dalam merespons pertanyaan pemandu acara dengan menyudutkan bintang tamu yang lain. Menyindir muncul karena dalam sindiran dianggap efektif untuk memberikan dampak secara langsung bagi mitra tutur. Sedangkan, mengelak muncul karena bintang tamu merespons dengan tuturan lain diluar dari apa yang dipertanyakan.

Perlu dipahami bahwa pelanggaran yang terjadi pada maksim kualitas di atas adalah hal yang biasa terjadi bagi Masyarakat tutur di Indonesia. Pelanggaran tersebut justru sengaja dilakukan untuk menimbulkan efek tertentu. Hasil penelitian membuktikan bahwa percakapan tetap berjalan dengan baik meskipun terjadi pelanggaran maksim prinsip kerja sama Grice.

#### **4.2.1.3 Pembahasan Pelanggaran Maksim Relevansi Prinsip Kerja Sama Grice dan Alasan Pelanggarannya**

Berdasarkan hasil penelitian, pelanggaran terhadap maksim relevansi yang terdapat dalam program Mata Najwa *Bara di Markas Jaksa* di Trans 7 terdapat sebanyak 23 tuturan yang melanggar dari 271 tuturan keseluruhan. Dalam maksim relevansi hasil penelitian menunjukkan ada dua konsep penting yang perlu dipahami. Pertama adalah kecocokan secara tuturan, artinya stimulus yang diberikan oleh penutur harus relevan secara makna dengan respons yang diberikan mitra tutur. Kedua yaitu kecocokan secara konteks, apabila stimulus tidak relevan dengan respons, bisa saja jika dikaitkan dengan konteks hal tersebut menjadi sangat relevan.

Berdasarkan pengamatan peneliti, dalam program Mata Najwa pelanggaran maksim relevansi bisa berupa respons yang diberikan oleh bintang tamu atau mitra tutur tidak mendukung informasi yang disampaikan oleh pemandu acara atau penutur. Pelanggaran maksim relevansi juga bisa dalam bentuk bintang tamu memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan pertanyaan. Selain itu, bentuk pelanggaran maksim relevansi juga karena bintang tamu merespons tuturan dengan candaan. Dengan melibatkan humor dalam percakapan, suasana akan menjadi lebih santai dan akrab. Namun, humor membuat tuturan terkesan tidak relevan. Hal tersebut diperkuat oleh Chaer (2010)

menyebutkan bahwa pelanggaran maksim prinsip kerja sama disebabkan adanya kemauan untuk menciptakan situasi menjadi santai atau menimbulkan efek humor

Pelanggaran yang terjadi pada maksim relevansi Grice, bukan berarti percakapan menjadi gagal. Ada kalanya tuturan yang terkesan tidak relevan jika dilakukan interpretasi yang tepat maka akan sangat relevan. Hal tersebut sejalan dengan Peter (2000) yang menyebutkan bahwa pelanggaran yang terjadi pada suatu maksim, pasti ada implikatur untuk menyelamatkan tuturan supaya tidak menjadi kontribusi yang salah dalam percakapan.

Selanjutnya, dalam program Mata Najwa pelanggaran maksim relevansi juga terjadi karena alasan tertentu. Alasan pelanggaran yang paling dominan adalah candaan atau humor. Wujud candaan yang dipilih adalah adanya keinginan untuk bercanda dan membuat suasana menjadi lebih asyik. Berdasarkan hasil penelitian, dalam maksim relevansi humor merupakan satu dari sekian alasan yang menyebabkan pelanggaran maksim relevansi Grice. Humor yang terdapat dalam program Mata Najwa bisa muncul dalam bentuk mengejek mitra tutur. Namun, kedekatan secara persona dan kemampuan memahami konteks percakapan, membuat percakapan tetap berjalan dengan baik. Humor dilakukan supaya menciptakan suasana yang lebih santai. Hal tersebut sejalan dengan Chaer (2010) yang menyebutkan bahwa menciptakan situasi menjadi santai atau menimbulkan efek humor merupakan salah satu penyebab pelanggaran maksim prinsip kerja sama Grice. Pada situasi tertentu, humor juga bisa terjadi dalam tuturan dengan orang yang lebih tua atau dewasa tetapi dalam konteks yang sama-sama dipahami.

Selain humor, dalam program Mata Najwa juga ditemukan beberapa alasan di luar dari apa yang disebutkan teori. Teori menyebutkan bahwa alasan pelanggaran maksim relevansi adalah karena humor atau lelucon, dan penolakan. Berdasarkan data dan setelah diteliti alasan pelanggaran maksim relevansi juga terjadi kerana beberapa hal di antaranya yakni: menegaskan, memerintah, basa-basi, mengelak, mengejek, keakraban, pembelaan diri, kesal, dan tidak tahu jawaban pasti.

#### **4.2.1.4 Pembahasan Pelanggaran Maksim Cara/Pelaksanaan Prinsip Kerja Sama Grice dan Alasan Pelanggarannya**

Berdasarkan hasil penelitian, Dari keempat maksim prinsip kerja sama Grice dalam program Mata Najwa maksim cara/pelaksanaan termasuk maksim yang paling sering dilanggar dan yang paling banyak dilanggar yaitu sebanyak 27 tuturan yang melanggar dari 271 tuturan keseluruhan. Berdasarkan pengamatan peneliti, terdapat beberapa bentuk pelanggaran pada maksim cara/pelaksanaan di antaranya. Pertama, bintang tamu sering memberikan informasi yang berlebih dari yang sebenarnya diminta oleh pemandu acara. Kedua, bintang tamu juga memiliki kebiasaan memberikan informasi tambahan dalam bertutur membuat tuturan menjadi panjang yang berujung pada pelanggaran maksim cara/pelaksanaan. Ketiga, bintang tamu juga memberikan respons yang tidak sesuai dengan pertanyaan, berupa tuturan penyangkalan atau berkilah untuk mendukung jawabannya, bentuk penyangkalan ini seperti bintang tamu tidak langsung menjawab apa yang ditanyakan oleh pemandu acara. Keempat, pelanggaran maksim cara/pelaksanaan juga sering terjadi berupa pemberian respons melalui alasan. Pemberian respons berupa alasan ini bisa melalui tuturan yang panjang.

Fenomena tersebut tentu bertolak belakang dengan maksim kuantitas dan maksim cara/pelaksanaan yang dikemukakan oleh Grice. Namun, secara budaya bagi bintang tamu dalam program Mata Najwa memberikan informasi yang banyak serta berbasa-basi dianggap lebih santun, ramah, dan lebih menghargai mitra tutur. Pembahasan di atas sejalan dengan pernyataan Handono (2017) yang menyebutkan bahwa pelanggaran pada maksim prinsip kerja sama Grice bukan berarti mengacaukan suatu percakapan, pelanggaran tersebut justru disengaja untuk menimbulkan efek tertentu.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian, pelanggaran maksim cara/pelaksanaan Grice karena alasan yang berkaitan dengan budaya kesantunan. Alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan disebabkan oleh beberapa kategori di antaranya yaitu: kesantunan, mengelak, menyangkal, tuturan tidak langsung, berbagi informasi, penolakan, memerintah, tidak tahu jawaban pasti, basa-basi dan kesal. Pelanggaran yang disebabkan karena keinginan untuk berbagi informasi selain terjadi pada maksim kuantitas dan relevansi, juga terjadi pada maksim cara/pelaksanaan. Hal tersebut terkait kebiasaan bintang tamu selalu menambahkan tuturan lain di luar pertanyaan yang diajukan oleh pemandu acara.

Kecenderungan bintang tamu menggunakan tuturan yang panjang, taksa, dan cenderung berbelit-belit adalah upaya agar tuturan yang disampaikan terkesan santun. Nurfaedah dan Suwatri Jura (2020:680) menyebutkan bahwa kesantunan adalah aturan perilaku yang ditetapkan dan disepakati bersama oleh suatu masyarakat tertentu yang dipengaruhi oleh tata cara, adat ataupun budaya yang berlaku dalam masyarakat. Upaya supaya tuturan menjadi santun tersebut justru menjadi penyebab terjadinya pelanggaran pada maksim cara/pelaksanaan.

Berdasarkan hasil penelitian, meskipun terjadi pelanggaran mitra tutur tidak memperlmasalahkannya dan percakapan tetap berjalan dengan baik.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran pada prinsip kerja sama Grice merupakan hal yang lazim terjadi. Perbedaan budaya membuat prinsip kerja sama Grice tidak bisa diterapkan secara universal pada semua bahasa khususnya yang terjadi dalam program Mata Najwa *Bara di Markas Jaksa* di Trans 7. Pelanggaran pada prinsip kerja sama Grice bukanlah suatu keburukan dalam berkomunikasi, pelanggaran tersebut justru diperlukan karena pengaruh budaya yang ada pada bahasa. Simpulan di atas diperkuat dengan pernyataan H. Tupan dan Natalia (2008) menyebutkan bahwa maksim prinsip kerja sama dalam komunikasi, dalam beberapa situasi tidak dipatuhi secara sengaja dengan alasan-alasan individu. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Suryani (2015:5) yang menyebutkan bahwa maksim yang digagas oleh Grice tidak selalu dipatuhi oleh partisipan, pada situasi tertentu maksim-maksim prinsip kerja sama dilanggar untuk tujuan tertentu. Sejalan dengan Jazeri (2008:151) juga menyebutkan bahwa dalam sebuah percakapan, pelanggaran maksim sering tidak terelakkan, pelanggaran tersebut terjadi karena unsur kesengajaan dan unsur ketidaksengajaan.

## BAB V

### SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

#### 5.1 Simpulan

Setelah dilakukan analisis data, dapat disimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut. Dari keempat maksim prinsip kerja sama Grice, maksim yang paling banyak dilanggar adalah maksim cara/pelaksanaan. Sedangkan maksim yang paling sedikit dilanggar adalah maksim kualitas. Maksim kualitas jarang dilanggar karena program Mata Najwa termasuk acara yang membahas sesuatu yang formal dan ditonton oleh banyak orang. Maka dari itu baik pemandu acara maupun bintang tamu harus profesional dan berbicara sesuai dengan faktanya.

Bentuk pelanggaran maksim prinsip kerja sama Grice dari 83 data tuturan terdapat 25 tuturan yang melanggar maksim kuantitas dengan 5 kategori alasan pelanggarannya, kelima kategori tersebut yakni: keramahan, kesantunan, keakraban, penolakan, dan berbagi informasi. Untuk maksim kualitas terdapat 8 tuturan yang melanggar dengan 5 kategori alasan pelanggarannya, kelima kategori tersebut yakni: humor, sindiran, mengelak, provokasi, dan tidak tahu jawaban pasti. Selanjutnya, untuk maksim relevansi terdapat 23 tuturan yang melanggar maksim relevansi dengan 11 kategori alasan pelanggarannya, kesebelas kategori tersebut di antaranya: humor, memerintah, pembelaan diri, menegaskan, mengelak, basa-basi, kesal, penolakan, mengejek, keakraban, dan tidak tahu jawaban pasti, dan untuk maksim cara/pelaksanaan terdapat 27 tuturan yang melanggar maksim cara/pelaksanaan dengan 10 kategori alasan pelanggarannya, kesepuluh kategori tersebut di antaranya: kesantunan, mengelak, menyangkal,

tuturan tidak langsung, berbagi informasi, penolakan, memerintah, basa-basi, kesal, dan tidak tahu jawaban pasti.

Pelanggaran yang terjadi pada maksim-maksim prinsip kerja sama Grice tuturan antara pemandu acara dengan bintang tamu dalam program *Mata Najwa Bara di Markas Jaksa* di Trans 7 merupakan wujud dari budaya tutur bagi masyarakat di Indonesia. Prinsip kerja sama Grice tidak bisa diterapkan secara keseluruhan. Pola maksim prinsip kerja sama Grice berbeda dengan budaya tutur masyarakat Indonesia.

Dalam maksim kuantitas menginginkan supaya partisipan menyumbangkan informasi secukupnya serta tidak berlebihan dalam menyampaikan informasi yang diperlukan oleh mitra tutur. Dalam program *Mata Najwa* memberikan informasi tambahan dalam percakapan merupakan bentuk dari kesantunan dalam berbahasa. Berdasarkan maksim kualitas, partisipan harus menyampaikan sesuatu sesuai dengan fakta. Namun dalam konteks tertentu, dalam program *Mata Najwa* tuturan yang tidak sebenarnya justru sering terjadi untuk menimbulkan efek humor supaya mencairkan suasana. Hal tersebut dikarenakan masyarakat Indonesia yang mempunyai kebiasaan suka bercanda. Dalam maksim relevansi ada dua konsep penting yang perlu diperhatikan, yakni relevansi secara tuturan serta makna dan relevansi secara konteks serta makna. Berdasarkan maksim cara/pelaksanaan kecenderungan bintang tamu menggunakan tuturan yang panjang, taksa, dan cenderung berbelit-belit adalah upaya agar tuturan yang disampaikan terkesan santun. Upaya supaya tuturan menjadi santun tersebut justru menjadi penyebab pelanggaran maksim cara/pelaksanaan.



Berdasarkan hasil penelitian, meskipun terjadi pelanggaran mitra tutur tidak memperlmasalahkannya dan percakapan tetap berjalan dengan baik. Pelanggaran pada prinsip kerja sama Grice merupakan hal yang lazim terjadi. Perbedaan budaya membuat prinsip kerja sama Grice tidak bisa diterapkan secara universal pada semua bahasa khususnya yang terjadi dalam program Mata Najwa *Bara di Markas Jaksa* di Trans 7. Pelanggaran pada prinsip kerja sama Grice bukanlah suatu keburukan dalam berkomunikasi, pelanggaran tersebut justru diperlukan karena pengaruh budaya yang ada pada suatu bahasa.

## **5.2 Implikasi**

Setelah ditemukan bahwa terdapat pelanggaran, dan alasan terjadinya pelanggaran. Hasil penelitian ini nantinya bisa diterapkan disekolah. Adapun penerapannya guru harus bisa berkomunikasi kepada siswa dengan menerapkan prinsip kerja sama yang relevan dengan budaya yang ada di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya Indonesia adalah masyarakat yang lebih suka kalau berbicara dengan menambahkan informasi penjelas. Oleh karena itu, guru dalam menjelaskan sesuatu harus secara detail, karena orang Indonesia suka dengan penyampaian yang detail, jadi di dalam kelas guru harus menyampaikan materi secara detail, jangan hanya sebatas-sebatas saja. Karena hasil penelitian menunjukkan pelanggaran menurut Grice justru manifestasi bagi budaya tutur masyarakat di Indonesia.

Implikasi untuk maksim kualitas guru harus menyampaikan suatu yang benar. Meskipun dalam situasi tertentu seperti marah, guru bisa menggunakan cara-cara tertentu. Ketika guru merasa tidak sesuai dengan apa yang dilakukan siswa atau merasa tidak sepakat dengan perilaku siswa. Oleh karena itu, carilah

tuturan yang penyampaiannya dengan baik supaya guru tidak menjadi guru yang dibenci. Kemudian, untuk maksim relevansi implikasinya bertuturlah dengan sesuai dengan apa yang sedang dibicarakan. Guru harus berusaha untuk selalu membina relevansi tuturan dengan siswa, apa yang ditanyakan oleh siswa sampaikanlah supaya relevan.

Selanjutnya, implikasi untuk maksim cara. Guru juga harus memilih cara yang paling tepat untuk menyampaikan informasi kepada siswa, terutama pada saat ada hal-hal yang sifatnya geram dan tidak suka guru harus menggunakan cara yang tepat. Walaupun Grice menyebutkan *to the point* namun bagi masyarakat Indonesia itu tidak perlu. Justru dengan menggunakan tuturan tidak langsung siswa lebih paham dengan apa yang dimaksud.

### **5.3 Rekomendasi**

Peneliti telah berusaha untuk menyelesaikan dan menyajikan hasil penelitian ini dengan sebaik-baiknya. Dikarenakan dalam penelitian ini penulis meneliti dalam bentuk acara formal yaitu berupa program Mata Najwa. Jadi, untuk peneliti berikutnya penulis merekomendasikan untuk melakukan penelitian yang serupa yaitu tentang pelanggaran prinsip kerja sama tetapi yang diteliti adalah komunikasi langsung di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dikarenakan, kehidupan masyarakat sehari-hari komunikasinya jauh lebih real dan lebih bisa mengeksplor percakapan secara natural.

## DAFTAR RUJUKAN

- Achsani, Ferdian. 2019. *Pematuhan dan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama dalam Komunikasi Siswa-siswi MAN 1 Surakarta*. Jurnal Tarling, vol. II, no. 2. file:///C:/Users/user/Downloads/2921-Article%20Text-6251-1-10-20190731%20(2).pdf. Diakses 05 Desember 2020.
- Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Depok: Rajawali Pers.
- Chaer, Abdul. (2010). *Kesantunan Berbahasa*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Darma, Yoce Aliah. 2014. *Analisis Wacana Kritis*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Djajasudarma, Fatimah. 2006. *Wacana; Pemahaman, dan Hubungan Antarunsur*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Fajrin, R., & Muhammad Rohmadi. (2016). Pelanggaran Prinsip Kerja Sama dan Pematuhan Prinsip Kesantunan dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMK Pelayaran “Akpelni” Semarang. *Jurnal S2 Pendidikan Bahasa Indonesia*, 1(1), 100–112.
- Fatmawati, 2020. “Prinsip Kerja Sama dalam Peristiwa Tutar Masyarakat Riau (Penelitian Grounded Theory di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Islam Riau)”. *Disertasi*. Jakarta: Ilmu Pendidikan Bahasa, Universitas Negeri Jakarta.
- Fauziah, dkk. 2018. *Pelanggaran Prinsip Kerja Sama dalam Tuturan Diskusi Kelas Bahasa Indonesia*. Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Volume 3 Nomor 2. file:///C:/Users/user/Downloads/722-1838-1-PB.pdf. Diakses 05 Desember 2020.
- Gunawan, Imam. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif;Teori & Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Handono, S. (2017). Implikatur Kampanye Politik dalam Kain Rentang di Ruang Publik. *Aksara*, 29(2), 253–266.
- Herawati, A. (2013). the Cooperative Principle: Is Grice’S Theory Suitable To Indonesian Language Culture? *Lingua Cultura*, 7(1), 43–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.21512/lc.v7i1.417>.
- Hestiyana. 2016. *Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Dalam Wacana Humor Kisah-Kisah Sarawin*. Jurnal Undas Vol 12. Nomor 1. file:///C:/Users/user/Downloads/544-1331-1-SM%20(1).pdf. Diakses 05 Desember 2020.
- H. Tupan, A., & Natalia, H. (2008). The Multiple Violations of Conversational Maxims in Lying Done By the Characters in Some

- Episodes of Desperate Housewives. *K@Ta*, 10(1), 63–78.  
<https://doi.org/10.9744/kata.10.1.63-78>.
- Jazeri. 2008. *Realisasi Prinsip Kerjasama Dalam Sebuah Interaksi*. Jurnal diksi Vol 15 No 2 Juli. STAIN Tulungagung.  
<https://journal.uny.ac.id/index.php/diksi/article/view/6603/5663>. Diakses 18 Januari 2021.
- Lili, Zhan. 2012. Understanding Humor Based on the Incongruity Theory and the Cooperative Principle. *Studies in Literature and Language*, 7(8).  
 file:///C:/Users/user/Downloads/2472-3199-3-PB.pdf. Diakses 15 Januari 2021.
- Merri Silvia Basri, Dkk. 2021. *Kesantunan Berbahasa: Studi pada Pembelajaran Daring*. Vol 7. No 1. <https://e-journal.my.id/onoma/article/view/625/1039>. Diakses 11 Juni 2021.
- M.S, Mahsun. 2005. *Metode Penelitian Bahasa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Murray, N. (2009). Pragmatics, awareness raising, and the cooperative principle. *ELT Journal*. <https://doi.org/10.1093/elt/ccp056>.
- Nadar, F.X. 2013. *Pragmataik&Penelitian Pragmatik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nurfaedah dan Suwatri Jura. 2020. *Analisis Kesantunan Proses Komunikasi Mahasiswa dengan Dosen melalui Aplikasi Whatsapp terhadap Efektifitas Penggunaan Bahasa*. Vol 6. No 2. <https://ejournal.my.id/onoma/article/view/427/346>. Diakses 11 Juni 2021.
- Peter, G. (2000). (*Hodder ArnoldPublication*) *Peter Grundy – Doing Pragmatics-Routledge (2000).pdf*. London: Arnold.
- Pratiwi, D. P. E., Bertaha, N. L. S., Sudipa, I. N., & Laksana, I. K. D. (2015). Violation of Conversation Maxim on TV Advertisements. *EJournal of Linguistik*, 9, 101–116
- Rahardi, Kunjana. 2005. *Pragmatik Kesantunan Imperatif Bahasa Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Rani, Abdul, dkk. 2006. *Analisis Wacana*. Malang: Bayumedia.
- Rochmawati, Dyah. 2017. Pragmatic and Rhetorical Strategies in the English-Written Jokes. *Indonesian Journal of Applied Linguistics*, 7(1), 149-159.  
 file:///C:/Users/user/Downloads/6868-13756-1-PB.pdf. Diakses 15 Januari 2021.
- Sari, dan Asmendri. 2020. *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*. Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA. ISSN: 2715-470X (Online), 2477-6181. Vol 6. No (1). Hal 41-45.

- Setiawan, dkk. 2017. *Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Percakapan Dalam Acara Mata Najwa Di Metro Tv*. Jurnal Korpus, Vol. I, No. I. file:///C:/Users/user/Downloads/3121-5616-1-SM%20(3).pdf. Diunduh 06 Oktober 2020.
- Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sitoyo dan Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Suryani, Intan. 2015. "Analisis Pelanggaran Prinsip Kerja Sama dalam Acara Talkshow Hitam Putih di Trans 7". *Skripsi*. Pekanbaru: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Islam Riau.
- Ustari, Pipit. 2019. "Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Dan Implikatur Percakapan Dalam Acara Waktu Indonesia Bercanda Di Net Tv". *Skripsi*. Semarang: Bahasa Dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Semarang. [https://lib.unnes.ac.id/33793/1/2111415009\\_Optimized.pdf](https://lib.unnes.ac.id/33793/1/2111415009_Optimized.pdf). Diakses 05 Desember 2020.
- Wijana, I Dewa Putu. 1996. *Dasar-dasar Pragmatik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Yule, George. 2006. *Pragmatik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL	
	agung Hary Setiono. Selamat malam Pak Hary”. HS: ”Selamat malam, salam sehat untuk semuanya” (1)														berlebihan. Dalam tuturan (1) terlihat bahwa HS berlebihan dalam menjawab pertanyaan NS yang seharusnya HS cukup menjawab <i>Selamat malam</i> , karena tuturan tersebut sudah memadai untuk menjawab pertanyaan NS. Namun dalam data (1) HS menambahkan ucapan <i>Salam sehat untuk semuanya</i> yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim kuantitas. Alasan pelanggaran maksim kuantitas yang terjadi pada tuturan (1) di atas karena HS ingin terlihat lebih ramah. Fatmawati (2020: 125) Merumuskan delapan kategori konsep-konsep alasan pelanggaran maksim kuantitas termasuk keramahan dan kesantunan. Hal tersebut tegambar pada tuturan HS yang

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL	
															memberikan penambahan informasi yang tidak dibutuhkan oleh NS yaitu <i>Salam sehat untuk semuanya</i> , pada tuturan tersebut menunjukkan keramahan dan kesantunan karena memberikan doa kepada orang lain baik itu untuk NS, narasumber, maupun penontonnya yang tergambar pada kata <i>Semuanya</i> .
2	NS: "Hadir teman saya peneliti Indonesian korupsi was atau ICW Kurnia Ramadana. Selamat malam Kurnia" KR: "Selamat malam Mba Nana, selamat malam semuanya" (2)	✓						✓							Tuturan (2) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim kuantitas. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban KR yang berlebihan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim kuantitas tidak menginginkan mitra tutur memberikan informasi yang kurang maupun berlebihan. Dalam tuturan



NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis		
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL			
																	<p>(2) terlihat bahwa KR berlebihan dalam menjawab pertanyaan NS yang seharusnya KR cukup menjawab <i>Selamat malam</i>, karena tuturan tersebut sudah memadai untuk menjawab pertanyaan NS. Namun pada data (2) KR menambahkan ucapan <i>Selamat malam semuanya</i> yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim kuantitas.</p> <p>Alasan pelanggaran maksim kuantitas yang terjadi pada tuturan (2) di atas karena KR ingin terlihat lebih ramah. Fatmawati (2020:125) Merumuskan delapan kategori konsep-konsep alasan pelanggaran maksim kuantitas salah satu di antaranya adalah keramahan. Hal tersebut tegambar pada tuturan KR yang memberikan</p>

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL	
															penambahan informasi yang tidak dibutuhkan oleh NS yaitu <i>Selamat malam semuanya</i> pada tuturan tersebut menunjukkan keramahan karena memberikan sapaan kepada orang lain baik itu untuk NS, narasumber, maupun penontonnya yang tergambar pada kata <i>Semuanya</i> .
3	<p>NS: “Saya juga sudah terhubung lewat video <i>call</i> dengan menteri koordinator politik hukum dan HAM Muhammad Mahfud Md. “Selamat malam, assalamualaikum Pak Mahfud”</p> <p>MM: “Walaikumsalam, Najwa dan semuanya, Hari, Mas Bonyamin, Mas Ramadani.” (3)</p>	✓							✓						Tuturan (3) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim kuantitas. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban MM yang berlebihan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim kuantitas tidak menginginkan mitra tutur memberikan informasi yang kurang maupun berlebihan. Dalam tuturan (3) terlihat bahwa MM

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL	
															<p>berlebihan dalam menjawab pertanyaan NS yang seharusnya MM cukup menjawab <i>Selamat malam</i> atau <i>Walaikumsalam</i>, karena tuturan tersebut sudah memadai untuk menjawab pertanyaan NS. Namun pada percakapan di atas, MM menambahkan ucapan <i>Najwa dan semuanya, Hari, Mas Bonyamin, Mas Ramadani</i>, yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim kuantitas.</p> <p>Alasan pelanggaran maksim kuantitas yang terjadi pada tuturan (3) di atas karena MM ingin terlihat lebih santun. Fatmawati (2020: 125) Merumuskan delapan kategori konsep-konsep alasan pelanggaran maksim kuantitas termasuk keramahan dan kesantunan. Hal tersebut tegambar pada tuturan MM pada tuturan (3) yang memberikan</p>

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL	
															penambahan informasi yang tidak dibutuhkan oleh NS yaitu <i>Najwa dan semuanya, Hari, Mas Bonyamin, Mas Ramadhan</i> pada tuturan tersebut menunjukkan keramahan dan kesantunan karena memberikan sapaan kepada orang lain tidak hanya untuk NS. Tetapi, untuk narasumber, maupun penontonnya juga yang tergambar pada kata <i>Semuanya</i> .
4	NS: “Terima kasih sudah bergabung Pak Mahfud. Pak saya mau langsung <i>to the point</i> ya Pak Mahfud karnakan anda bahkan pada malam saat terjadi kebakaran langsung berani menyebut dan menjamin berkas-berkas perkara aman 100% tidak akan mengganggu proses penanganan perkara, keyakinan Pak	✓				✓									Tuturan MM dalam tuturan (4) di atas yang menjawab pertanyaan dari NS termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim kuantitas. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban MM yang panjang dan berlebihan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim kuantitas tidak

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL	
	<p>Mahfud dari mana Pak? bahkan sudah disebutkan pada saat kebakarannya masih terjadi”.</p> <p>MM:“Karena saya langsung berhubungan dengan Jaksa Agung dan Jampidum, itu gimana perkara-perkara yang sedang ditangguh. Oo jauh Pak, bukan disitu kalau berkas perkara, gitu. Jadi yang saya jamin aman tu jamak perkara yang sedang ditangani yang pada saat itu sering disebut ada dua. Satu, soal Djoko Chandra dan Pinangki, yang kedua soal Jiwasraya.(4)</p>														<p>menginginkan mitra tutur memberikan informasi yang kurang maupun berlebihan. Dalam tuturan (4) terlihat bahwa MM yang memeberikan respons yang sangat panjang dan berlebihan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksimum kuantitas. Seharusnya MM cukup menjawab sampai <i>Karena saya langsung berhubungan dengan Jaksa Agung dan Jampidum</i>. Karena, tuturan tersebut sudah memadai untuk menjawab pertanyaan NS.</p> <p>Alasan pelanggaran maksimum kuantitas yang terjadi pada tuturan (4) di atas karena MM ingin berbagi informasi. Hal tersebut tegambar pada tuturan (4) MM yang memberikan informasi bahwa ia berbicara langsung dengan jaksa agung yang mana hal</p>

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL	
															tersebut tidak dibutuhkan NS pada saat itu. Sejalan dengan pendapat Fatmawati (2020:125) yang merumuskan delapan kategori konsep-konsep alasan pelanggaran maksim kuantitas salah satunya adalah berbagi informasi.
5	<p>NS:“Jadi, Pak Makfud karena kemudian bisa saja, kemudian argumennya jadi Pak Mahfud yakin hanya sebatas pernyataan sepihak yang dikeluarkan oleh pihak Kejaksaan Agung?</p> <p>MM :“Saya sudah katakan Pak gitu, saya katakan Pak kita nda bisa berbohong sekarang, nda mungkin berbohong ke masyarakat kita berbohong sekarang besok lusa akan dibuka oleh Bonyamin itu saya bilang. Oleh</p>			✓							✓			Tuturan (5) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim relevansi. Pelanggaran tersebut tergambar dari respons MM pada tuturan (5) bukanlah kontribusi yang relevan dengan pernyataan NS. Kontribusi MM justru tidak sejalan dengan apa yang disampaikan oleh NS. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim relevansi menginginkan supaya partisipan memberikan kontribusi yang sesuai dengan topik	

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL	
	sebab itu jangan main-main RSM sekarang tu lebih canggih, Bonyamin tu suka menghubungi istri-istri Jaksa itu minta fotonya hahaha sehingga foto-foto yang rahasia dia punya tu. Saya bilang jangan main-main.” (5)														<p>pembicaraan. Respons MM tersebut tetap bisa dikatakan relevan dengan pernyataan NS yaitu untuk menjelaskan keyakinannya atas argumen yang ia lontarkan. Namun, Respons MM dalam data (5) tidak ditemukan jawaban tentang keyakinan atas argumen yang ia berikan, sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim relevansi.</p> <p>Alasan pelanggaran maksim relevansi yang terjadi pada tuturan (5) di atas karena MM menciptakan humor. Chaer (2010) menyatakan bahwa alasan terjadinya pelanggaran maksim prinsip kerja sama disebabkan oleh beberapa hal salah satunya adalah adanya kemauan untuk menciptakan situasi menjadi santai atau menimbulkan efek humor.</p>

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis	
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL		
																Hal tersebut tegambar pada tuturan MM yaitu <i>Bonyamin tu suka menghubungi istri-istri jaksa itu minta fotonya hahaha sehingga foto-foto yang rahasia dia punya tu saya bilang jangan main-main.</i>
6	<p>NS:“Pak...Pak Mahfud, iya. Sebelum masuk ke bohong berbohong karena itu juga menarik, tapi saya ingat Andakan sempat mengatakan terbuka kaget bahwa kebakarannya besar sekali, cepat sekali, jadi jujur Pak Mahfud ke saya malam ini memang adakan di benak Pak Mahfud? mungkin saja ada ketidak wajaran dari bara yang muncul di markas Jaksa ini”</p> <p>MM :“Oo begini, saya katakan masyarakat jangan berspekulasi</p>			✓		MENEGASKAN									<p>Tuturan (6) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim relevansi. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban MM pada tuturan (6) bukanlah kontribusi yang relevan dengan tuturan yang dikemukakan oleh NS. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim relevansi menginginkan supaya partisipan memberikan kontribusi yang sesuai dengan topik pembicaraan. Dalam tuturan data (6) MM</p>	



NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice								Analisis	
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA		TTL
	<p>kan itukan ada di TV ya, spekulasi apa Pak, spekulasi yang saya baca di medsos itu, itu nda masuk akal gitu, lalu media itu banyak yang menulis kata Mahfud MD terbakarnya nda masuk akal, padahal saya mengutip medsos, yang berkembang ketika itu masyarakat mengatakan di medsos itu, ini ndak masuk akal kok dari lantai enam turun ke-empat turun ke-lima, masa kalo listrik separah itu, itu kata masyarakat. Oleh sebab itu saya katakan jangan berspekulasi lah, spekulasi apa, ya itu yang ada di masyarakat bahwa kok turun dari lantai enam ke-empat ke-tiga. (6)</p>														<p>memberikan jawaban yang tidak relevan dengan pertanyaan NS, terlihat pada tuturan <i>Oo begini, saya katakan masyarakat jangan berspekulasi kan itukan ada di TV ya, spekulasi apa Pak, spekulasi yang saya baca di medsos itu, itu nda masuk akal gitu, lalu media itu banyak yang menulis kata Mahfud MD terbakarnya nda masuk akal, padahal saya mengutip medsos, yang berkembang ketika itu masyarakat mengatakan di medsos itu, ini ndak masuk akal kok dari lantai enam turun ke-empat turun ke-lima, masa kalo listrik separah itu, itu kata masyarakat. Oleh sebab itu saya katakan jangan berspekulasi lah, spekulasi apa, ya itu yang ada di masyarakat bahwa kok turun dari lantai enam ke-empat ke-tiga, Jawaban MM tersebut tetap bisa dikatakan relevan dengan pertanyaan NS yaitu untuk</i></p>

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL	
															menjelaskan kecurigaan terhadap kebakaran yang terjadi. Namun, tuturan MM dalam data (6) tidak ditemukan jawaban tentang ketidak wajaran kebakaran tersebut, sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim relevansi. Alasan pelanggaran maksim relevansi yang terjadi pada tuturan (6) di atas karena ingin berbagi informasi untuk menegaskan jawabannya. Fatmawati (2020:131) merumuskan 22 konsep alasan pelanggaran maksim relevansi salah satu di antaranya adalah untuk menegaskan. Hal tersebut tegambar pada tuturan MM yaitu <i>Saya katakan masyarakat jangan berspekulasi kan itukan ada di TV.</i>
7	MM : “Oo begini, saya katakan masyarakat				✓				✓						Tuturan (7) di atas

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL	
	<p>jangan berspekulasi, itukan ada di TV ya, spekulasi apa Pak, spekulasi yang saya baca di medsos itu, itu nda masuk akal gitu, lalu media itu banyak yang menulis kata Mahfud MD terbakarnya nda masuk akal, padahal saya mengutip medsos, yang berkembang ketika itu masyarakat mengatakan di medsos itu, ini ndak masuk akal kok dari lantai enam turun ke-empat turun ke-lima, masa kalo listrik separah itu, itu kata masyarakat. Oleh sebab itu saya katakan jangan berspekulasi lah, spekulasi apa, ya</p>														<p>dapat dikatakan melanggar prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim cara/pelaksanaan. Dikatakan melanggar karena kadar kejelasannya rendah dan kadar kekaburannya sangat tinggi. Menurut Grice dalam maksim cara/pelaksanaan partisipan diminta bertutur secara langsung, jelas, dan tidak kabur. Kalimat <i>Tapi dari pengamatan Pak maaf sama sekali tidak memberikan kejelasan tentang apa yang sebenarnya diminta oleh mitra tutur</i>. Oleh karena itu, maknanya pun menjadi sangat kabur. Dikatakan demikian karena kalimat itu bisa ditafsirkan dengan bermacam-macam dan dapat mendatangkan banyak persepsi penafsiran karena dalam tuturan tersebut tidak dijelaskan apa sebenarnya yang diminta oleh NS. Pelanggaran tersebut terjadi</p>

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis	
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL		
	itu yang ada di masyarakat bahwa kok turun dari lantai enam ke-empat ke-tiga. NS : “Tapi dari pengamatan Pak maaf” (7)															karena ketidaklangsungannya dalam berbicara. Alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan pada tuturan (7) di atas karena NS merespons jawaban MM dengan santun. Hal tersebut tergambar pada kata <i>Pak maaf</i> . Fatmawati (2020:137) mengatakan bahwa salah satu alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan adalah berkaitan dengan kesantunan.
8	NS : “Tapi.. Pak Mahfud pertanyaan saya apakah Pak Mahfud sendiri tidak terlintas dibenak Pak Mahfud mungkin saja ada ketidak wajaran, tidak pernah terlintas sama sekali Pak? Melihat besarnya kebakaranran.	✓											✓		Tuturan (8) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim kuantitas. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban MM yang berlebihan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim kuantitas tidak	

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL	
	<p>MM : “Semula terlintas, semula terlintas karena begini saya tidak tau kebakarannya, tiba-tiba itu ada telpon, Kejaksaan Agung kebakaran lalu saya liat televisi sudah parah lalu saya baca di media di medsos macam-macam ada kecurigaan saya juga ikut curiga gitu, terlintas, lalu saya telpon Jaksa Agung gimana Pak. Ooo Pak saya ada di tengah-tengah, gimana tu perkara-perkara itu gitu, aman.. oo aman saya terus telpon Fadil Sumana juga aman, lalu saya katakan saya terlintas ndak mungkin lah tidak telintas, kalo itu bohong kalo (8)</p>														<p>menginginkan mitra tutur memberikan informasi yang kurang maupun berlebihan. Dalam data tuturan (8) terlihat bahwa MM berlebihan dalam menjawab pertanyaan NS yang seharusnya MM cukup menjawab <i>Semula terlintas</i>, karena tuturan tersebut sudah memadai untuk menjawab pertanyaan NS. Namun dalam data (8) MM justru menambahkan kontribusi berlebihan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim kuantitas.</p> <p>Alasan pelanggaran maksim kuantitas yang terjadi pada tuturan (8) di atas karena MM terlihat menambah topik pembicaraan, supaya lebih bersosialisasi, lebih akrab makanya ada penambahan informasi. Hal tersebut tegambar pada tuturan MM yang</p>

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL	
															memberikan penambahan informasi yang tidak dibutuhkan oleh NS yang terdapat pada tuturan (8) yang menyatakan <i>Karena begini saya tidak tau kebakarannya, tiba-tiba itu ada telpon, kejaksaan agung kebakaran lalu saya liat televisi sudah parah lalu saya baca di media di medsos macam-macam ada kecurigaan saya juga ikut curiga gitu, terlintas, lalu saya telpon jaksa agung. Fatmawati (2020:127)</i> menyebutkan bahwa keakraban menjadi salah satu alasan pelanggaran terhadap maksim kuantitas.
9	NS : “Apa Pak Mahfud, boleh saya tau Pak lintasan pertama dibenak karena mungkin saja itu yang benar Pak, hans Pak Mahfud apa? waktu terlintasnya ini	✓				✓									Tuturan (9) di atas yang menjawab pertanyaan dari NS termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim kuantitas. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban MM yang

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL	
	<p>dibakar. MM : “Ya lintasan pertama karena sedang nangani perkara itu jangan-jangan ini ada yang sengaja orang dalam, kan gitu itu saya kira siapa aja bisa mengira begitu, manusiawi saya juga mengira begitu tetapi sesudah telpon itu, Pak gedungnya jauh yang diseberang sana itu kalo gedung yang nangani perkara itu begitu. (9)</p>														<p>berlebihan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim kuantitas tidak menginginkan mitra tutur memberikan informasi yang kurang maupun berlebihan. Dalam tuturan (9) MM memeberikan respon yang sangat panjang dan berlebihan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim kuantitas. Seharusnya MM dalam data (9) cukup menjawab <i>Ya lintasan pertama karena sedang nangani perkara itu jangan-jangan ini ada yang sengaja orang dalam, karena tuturan tersebut sudah memadai untuk menjawab pertanyaan NS. Namun, dalam data (9) MM justru menambahkan tuturan kan gitu itu saya kira siapa aja bisa mengira begitu, manusiawi saya juga mengira begitu tetapi sesudah telpon itu, Pak gedungnya jauh yang</i></p>

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL	
															<p><i>diseberang sana itu kalo gedung yang nangani perkara itu begitu. Yang tidak diutuhkan NS sehingga menyebabkan pelanggaran maksim kuantitas.</i></p> <p>Alasan pelanggaran maksim kuantitas pada data tuturan (9) di atas karena MM menambahkan informasi pendukung untuk tuturannya agar NS mendapatkan informasi yang selengkap-lengkapnyanya. Hal tersebut tergambar pada data tuturan (9) <i>Itu saya kira siapa aja bisa mengira begitu, manusiawi saya juga mengira begitu tetapi sesudah telpon itu, Pak gedungnya jauh yang diseberang sana itu kalo gedung yang nangani perkara itu begitu.</i> Fatmawati (2020:126) menyebutkan bahwa salah satu alasan pelanggaran</p>



NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL	
															maksim kuantitas karena adanya keinginan untuk berbagi informasi dalam percakapan.
10	NS : “Karena misalnya Pak kebakaran di gedung vital milik negara ditengah pengusutan kasus besar inikan bukan pertama kali terjadi, kita tau misalnya tahun 97 di gedung BI, kemudian juga di gedung BPKP juga pernah, kemudian di gedung kementerian ESDM tiba-tiba terbakar ketika sedang menyelidiki kasus yang melibatkan menteri ESDM Ketika itu jadi ada presedenya terbakar atau dokumen yang dalam tanda kutip RAIP atau di raipkan terjadi di				✓	MENGELAK/MENCARI ALASAN									Tuturan (10) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim cara/pelaksanaan. Pelanggaran tersebut tergambar pada respons yang diberikan oleh MM sangat panjang dan berbelit-belit bahkan MM juga menjelaskan apa yang tidak menjadi pertanyaan NS. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim cara/pelaksanaan mengharuskan setiap peserta tutur berbicara secara langsung, tidak kabur, tidak taksa, dan tidak berlebih-lebihan. Dalam data tuturan (10) <i>Kan sudah saya bilang keterlintasan keingat ke</i>

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice								Analisis	
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA		TTL
	<p>tengah-tengah pengusutan kasus yang besar, Pak kemonpuluhukam”</p> <p>MM : “Iya iya makanya tadi saya terlintas gitu hehehe... kan sudah saya bilang keterlintasan keingat ke yang lain-lain juga, saya dulukan di luar. Jadi juga saya ingat ke yang lain-lain. tapi sesudah berkomunikasi, saya kemudian mengatakan ya sudah jangan berspekulasi kita serahkan ke polisi kan gitu, ha polisinya juga langsung saya telepon Pak apa Pak IPDA Hamasid, Pak ini dibuka Pak siap, kami lurus tegak, tegak lurus melaksanakan konstitusi dan</p>														<p>yang lain-lain juga, saya dulukan di luar, jadi juga saya ingat ke yang lain-lain terlihat bahwa MM memberikan pernyataan yang tidak jelas sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim cara/pelaksanaan.</p> <p>Respons yang diberikan oleh MM tergolong pada pelanggaran maksim cara/pelaksanaan. Fatmawati (2020:138) menyebutkan bahwa alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan terjadi karena bingung memberikan jawaban, lupa, gugup, empati, basa-basi dan rahasia. Namun ternyata, berdasarkan data pelanggaran maksim cara/pelaksanaan yang terjadi pada tuturan (10) di luar dari apa yang disebutkan oleh teori yaitu karena MM sengaja mencari alasan untuk mengelak. Hal tersebut</p>

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice								Analisis	
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA		TTL
	hukum gitu, kami pasti profesional. Saya ingatkan lagi jangan main-main dengan masyarakat sekarang, kita akan ketahuan kalau bohong sedikit sekarang, orang ndak bohong aja dibilang bohong saya bilang begitu heheheh” (10)														tegambar pada tuturan MM data (10) yaitu <i>Kan sudah saya bilang keterlintasan keingat ke yang lain-lain juga, saya dulukan di luar. Jadi juga saya ingat ke yang lain-lain.</i> Seharusnya MM memberikan tanggapan yang jelas agar tidak melanggar maksim cara/pelaksanaan.

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice								Analisis	
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA		TTL
						TIDAK TAHU JAWABAN PASTI									
11	<p>NS : “Bara di markas Jaksa, saya akan kembali menghubungi menkopulhukam bapak Muhammad Mahfud MD, Pak Mahfud anda berkali-kali menyebutkan tidak mungkin pemerintah menyembunyikan sesuatu dalam situasi seperti ini, pertanyaannya Pak, pemerintah itu maksudnya presiden Jokowi, atau menkopulhukamnya Pak Mahfud MD atau aparat-aparat dibawahnya Pak?</p> <p>MM : “Semua menurut saya kalau pemerintah main-main, kalau pemerintah berani berarti dia melanggar sebuah ketidak mungkinan</p>			✓		TIDAK TAHU JAWABAN PASTI								<p>Tuturan (11) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim relevansi. Pelanggaran tersebut tergambar dari respons MM yang kurang sesuai atau kurang relevan dengan pertanyaan yang dikemukakan oleh NS. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim relevansi menginginkan supaya partisipan memberikan kontribusi yang sesuai dengan topik pembicaraan. Dalam tuturan data (11) MM memberikan jawaban melenceng dari pertanyaan NS, terlihat pada data tuturan (11) <i>Semua menurut saya kalau pemerintah main-main, kalau pemerintah berani berarti dia melanggar sebuah ketidak mungkinan yang disembunyikan</i></p>	

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice								Analisis	
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA		TTL
	<p>dia lakukan, karena tidak ada yang disembunyikan sekarang ini, oleh sebab itu jangan berspekulasi karena kalau anda berbohong hari ini menyembunyikan sesuatu anda tidak akan bisa tidur mencari alasan baru untuk besok, oleh sebab itu kalau saya katakan saja bahwa tidak mungkin dan yang saya katakan yang saya yakini hari ini, karena seumpama saya apa, misalnya besok harus ketemu orang lagi ya saya tidak mencari kebohongan baru, jadi sekarang siapapun pejabat jangan coba berbohonglah, nanti akan ketahuan” (11)</p>														<p><i>sekarang ini, oleh sebab itu jangan berspekulasi karena kalau anda berbohong hari ini. Respons MM tersebut tetap bisa dikatakan relevan dengan pertanyaan NS yaitu untuk menjelaskan siapa yang berbohong. Namun, tuturan MM dalam data (11) tidak ditemukan jawaban dari pertanyaan NS, sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim relevansi.</i></p> <p><i>Tuturan (11) di atas termasuk pelanggaran maksim relevansi. Namun, alasan pelanggarannya berbeda dari apa yang sudah disampaikan teori. Teori menyebutkan bahwa alasan pelanggaran maksim relevansi adalah karena humor atau lelucon, dan penolakan. Namun ternyata, berdasarkan data tuturan (11) ditemukan alasan pelanggaran maksim relevansi disebabkan</i></p>

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice								Analisis			
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA		TTL		
																	karena MM membuat informasi yang disampaikan menjadi samar. Hal tersebut tegambar pada kalimat <i>Semua menurut saya kalau pemerintah main-main, kalau pemerintah berani berarti dia melanggar sebuah ketidak mungkinan dia lakukan, karena tidak ada yang disembunyikan sekarang ini.</i> Tutaran tersebut kurang jelas, yang dimaksud ketidak mungkinan itu apa.
12	NS : “Ketika disebut pemerintah tidak mungkin menyembunyikan sesuatu atau aparat-aparat dalam hal ini aparat kepolisian atau aparat penegak hukum tidak mungkin menyembunyikan sesuatu, tapi tidak				✓	MENYANGKAL								Tutaran (12) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim cara/pelaksanaan. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban MM pada tuturan (12) respons yang diberikan oleh MM sangat panjang dan berbelit-belit bahkan MM			

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice								Analisis	
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA		TTL
	<p>usah jauh-jauh pak, kasus Novel Baswedan, jelas-jelas ada kejanggalan disitu, puplik berteriak, puplik membongkar tapi tidak ditelusuri dan dalihnya sudah sesuai proses hukum jadi agak sulit untuk meminta puplik percaya ketika yang di depan mata seperti Novel Baswedan saja tidak”</p> <p>MM : “Ya itulah, itulah kalau orang berbohong orang akan tidak percaya silahkan, tetapi kalau saya ndak akan berbohong, saya katakan tidak mungkin bisa maksudnya, tidak mungkin sekarang ini orang pemerintah berbohong artinya</p>														<p>juga menjelaskan apa yang tidak menjadi pertanyaan NS. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim cara/pelaksanaan mengharuskan setiap peserta tutur berbicara secara langsung, tidak kabur dan tidak berlebihan. Dalam tuturan (12) terlihat bahwa MM memberikan pernyataan yang kabur dan tidak jelas seperti kalimat <i>Itulah kalau orang berbohong orang akan tidak percaya silahkan, tetapi kalau saya ndak akan berbohong, saya katakan tidak mungkin bisa maksudnya, tidak mungkin sekarang ini orang pemerintah berbohong artinya</i></p>

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice								Analisis	
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA		TTL
	tidak mungkin bisa, lalu orang bisa begitu percaya aja kepada kebohongan itu, tetap itu akan menjadi perdebatan publik kalau mau berbohong, gitu kan” (12)														<p>Pernyataan tersebut membuat mitra tutur menjadi bingung untuk memaknai maksud tuturan yang disampaikan oleh MM sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim cara/pelaksanaan.</p> <p>Respons yang diberikan oleh MM pada tuturan (12) tergolong pada pelanggaran maksim cara/pelaksanaan. Namun, alasan pelanggarannya berbeda dari apa yang disampaikan teori. Teori menyebutkan bahwa alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan terjadi karena Bingung memberikan jawaban, Basa-basi dan Tuturan tidak langsung. Namun ternyata, berdasarkan data pelanggaran maksim cara/pelaksanaan alasan pelanggaran karena MM menyangkal pernyataan dari NS. Hal tersebut</p>



NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice								Analisis	
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA		TTL
															tegambar pada tuturan MM yang sangat berlebihan. Seharusnya MM hanya menjawab sampai <i>Itulah kalau orang berbohong orang akan tidak percaya.</i>
13	<p>MM : “Ya itulah, itulah kalau orang berbohong orang akan tidak percaya silahkan, tetapi kalau saya ndak akan berbohong, saya katakan tidak mungkin bisa maksudnya, tidak mungkin sekarang ini orang pemerintah berbohong artinya tidak mungkin bisa, lalu orang bisa begitu percaya aja kepada kebohongan itu, tetap itu akan menjadi perdebatan puplik kalau mau berbohong, gitu kan”</p> <p>NS : “Pak Mahfud tapi</p>		✓			PROVOKASI								<p>Tuturan (13) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim kualitas. Pelanggaran tersebut tergambar dari pernyataan NS yang tidak sebenarnya. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim kualitas mewajibkan setiap peserta percakapan mengatakan hal yang sebenarnya, didasarkan pada bukti-bukti yang memadai. Pernyataan yang diberikan NS dalam data (13) <i>Kita lihat mungkin saja bukan berbohong tetapi menutup mata</i> merupakan bentuk pernyataan yang tidak</p>	

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice								Analisis	
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA		TTL
	<p>lagi-lagi walaupun mungkin bisa berbohong dalam beberapa kasus kita lihat mungkin saja bukan berbohong tetapi menutup mata atas kegagalan yang jelas-jelas nyata terlihat Pak, sekali lagi saya mengambil contoh kasus Novel Baswedan, tidak berbohong mungkin tetapi yang ada di depan mata tidak diakui” (13)</p>													<p>sebenarnya sebab tidak mungkin dalam menyelidiki kasus dengan keadaan menutup mata. Sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim kualitas. Menutup mata yang dimaksud NS dalam tuturan (13) adalah <i>Acuh</i> atau <i>tidak ingin tahu</i>.</p> <p>Tuturan (13) termasuk pelanggaran maksim kualitas. Namun, pelanggarannya berbeda dari apa yang sudah disampaikan oleh teori. Teori menyebutkan bahwa alasan pelanggaran maksim kuantitas adalah karena humor atau lelucon, dan penolakan. Namun ternyata, berdasarkan data (13) ditemukan bahwa pelanggaran maksim kualitas disebabkan oleh provokasi. Hal tersebut tergambar pada kalimat <i>Sekali lagi saya mengambil</i></p>	

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice								Analisis	
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA		TTL
															<i>contoh kasus Novel Baswedan, tidak berbohong mungkin tetapi yang ada di depan mata tidak diakui.</i>
14	<p>NS : “Akhirnya selesai habis di spekulasi puplik Pak dan peran negara yang seharusnya bisa lebih jauh dari situ kita tidak lihat apakah ini akan berulang lagi dikasus ini Pak Mahfud?</p> <p>MM : “Kalau saya tidak akan berakhir di kasus ini saya kan sakarang koordinator, ini menteri koordinator saya akan mengkoordinir kemana arahnya perkara ini saya akan pertanggungjawabkan ke puplik, sehingga nantik kalau terpaksa loh kok di bawah beda</p>			✓		PEMBELAAN DIRI								<p>Tuturan (14) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim relevansi. Pelanggaran tersebut tergambar dari respons MM pada tuturan (14) bukanlah kontribusi yang relevan dengan pertanyaan yang diberikan oleh NS. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. NS hanya bertanya tentang apakah kasus korupsi Djoko Thjandra akan berakhir sama dengan kasus-kasus yang sebelumnya pernah terjadi bukan bertanya tentang dirinya. Dalam tuturan data (14) MM memberikan jawaban melenceng dari pertanyaan NS, terlihat pada data tuturan (14) <i>Kalau saya tidak akan berakhir di kasus ini saya</i></p>	

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice										Analisis	
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL			
	saya akan berbeda ndak papa, kalau memang ada yang akan berbohong dibawah. (14)																<p>kan sakarang koordinator, ini mentri koordinator saya akan mengkoordinir kemana arahnya perkara ini saya akan pertanggungjawabkan ke puplik. Jawaban MM tersebut tetap bisa dikatakan relevan dengan pertanyaan NS yaitu untuk menjelaskan peran negara terhadap kasus-kasus yang terjadi. Namun, tuturan MM dalam data (14) tidak ditemukan jawaban dari pertanyaan NS, sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim relevansi. Grice menyatakan bahwa dalam maksim relevansi menginginkan supaya partisipan memberikan kontribusi yang sesuai dengan topik pembicaraan.</p> <p>Tuturan (14) di atas termasuk pelanggaran maksim relevansi. Namun, alasan pelanggarannya berbeda dari apa yang sudah disampaikan teori.</p>

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice								Analisis	
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA		TTL
															Teori menyebutkan bahwa alasan pelanggaran maksim relevansi adalah karena humor atau lelucon, dan penolakan. Namun ternyata, berdasarkan data tuturan (14) ditemukan alasan pelanggaran maksim relevansi disebabkan karena MM terlihat melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri. Hal tersebut tegambar pada kalimat <i>Kalau saya tidak akan berakhir di kasus ini saya kan sakarang koordinator.</i>
15	NS : “Pak Mahfud sampai sejauh apakah anda akan mendorong KPK atau institusi di luar kejaksaan agung yang masuk dan memeriksa kasus yang saat ini ditangani kejaksaan agung menyangkut oknum jaksanya				✓	MENYANGKAL								Tuturan (15) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim cara/pelaksanaan. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban MM pada tuturan (15) yang memberikan kontribusi yang tidak jelas dan berlebih-lebihan. Hal	

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice								Analisis	
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA		TTL
	<p>Pak?</p> <p>MM : “Itu tidak perlu dorongan seorang minfo itu adalah haknya KPK kalau KPK mau ambil alih ndak boleh jaksa agung menolak, ndak boleh menkopulhukam menolak itu berdasar pasal 8 dan pasal 9 UU KPK bagaimana anda minta dorongan ke saya, saya tidak akan mendorong dan tidak akan menghalangi itu haknya KPK sepenuhnya, KPKnya mau gak, kalau KPK mau silahkan aja itu UU yang mengatakan begitu, bukan saya bukan anda.” (15)</p>														<p>tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim cara/pelaksanaan mengharuskan setiap peserta tutur berbicara secara langsung, tidak kabur dan tidak berlebih-lebihan. Dalam tuturan (15) terlihat bahwa MM memberikan ungkapan yang tidak jelas dan berlebih-lebihan sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim cara/pelaksanaan.</p> <p>Respons yang diberikan oleh MM tergolong pada pelanggaran maksim cara/pelaksanaan. Fatmawati (2020:138) menyebutkan bahwa alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan terjadi karena bingung memberikan jawaban, lupa, gugup, empati, basa-basi dan rahasia. Namun ternyata, berdasarkan data pelanggaran maksim</p>

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis		
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL			
																	cara/pelaksanaan yang terjadi pada tuturan (15) di luar dari apa yang disebutkan oleh teori yaitu karena MM menyangkal pernyataan dari NS. Hal tersebut tegambar pada data (15) tuturan MM sangat berlebih-lebihan. Seharusnya MM hanya menjawab sampai <i>Itu tidak perlu dorongan seorang minfo itu adalah haknya KPK.</i>
16	<p>NS : “Apakah perlu atau apakah menurut anda puplik harus percaya begitu saja kejaksaan berani memeriksa keluarganya sendiri?”</p> <p>MM : “Terserah puplik dan terserah juga kejaksaannya mau transparan apa ndak dan terserah KPK mau ambil apa tidak. KPK punya hak kan” (16)</p>				✓									✓			Tuturan (16) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim cara/pelaksanaan. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban MM pada tuturan (16) yang memberikan jawaban yang taksa. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim cara/pelaksanaan

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL	
															<p>mengharuskan setiap peserta tutur berbicara secara langsung, tidak taksa dan tidak berlebih-lebihan. Dalam tuturan (16) terlihat bahwa MM memberikan jawaban yang meragukan, sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim cara/pelaksanaan.</p> <p>Alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan yang terjadi pada tuturan (16) di atas karena MM terlihat mengindari tutur langsung dan paham konteks. Hal tersebut tergambar pada tuturannya yaitu <i>Terserah publik dan terserah juga kejaksaannya mau transparan apa ndak dan terserah KPK mau ambil apa tidak. KPK punya hak kan</i>". Seharusnya MM bertutur secara langsung agar tidak melanggar maksim cara/pelaksanaan.</p>



NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis		
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL			
17	<p>NS : “Kalau Pak Mahfud sendiri bagaimana saya bertanya pendapat anda sebagai kementohukam Pak, apakah anda memang merasa kejaksaan tidak bisa memeriksa keluarganya sendiri apalagi kalau mungkin memeriksa jaksa agungnya langsung?”</p> <p>MM : “Ndak itu tidak fer, kalau saya sebagai atasan saya harus bicara atas nama kesatuan pemerintah tapi saya orang di luar KPK kalau KPK mau ambil, ambil” (17)</p>			✓						✓							<p>Tuturan (17) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim relevansi. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban MM pada tuturan (17) bukanlah jawaban yang relevan dengan pertanyaan yang diberikan oleh NS. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim relevansi menginginkan supaya partisipan memberikan kontribusi yang sesuai dengan topik pembicaraan. Dalam tuturan data (17) MM memberikan jawaban melenceng dari pertanyaan NS, terlihat pada data tuturan (17) <i>Ndak itu tidak fer, kalau saya sebagai atasan saya harus bicara atas nama kesatuan pemerintah tapi saya orang di luar KPK kalau KPK mau ambil, ambil.</i> Jawaban MM tersebut tetap bisa</p>

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL	
															<p>dikatakan relevan dengan pertanyaan NS yaitu tentang pendapat MM sebagai Menkopulhukam. Namun, tuturan MM dalam data (17) tidak ditemukan jawaban dari pertanyaan NS, sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim relevansi.</p> <p>Alasan pelanggaran maksim relevansi yang terjadi pada tuturan (17) di atas karena MM menolak pertanyaan NS. Hal tersebut tegambar pada data tuturan MM (17) yaitu <i>Ndak itu tidak fer</i> Tuturan tersebut menandakan MM menolak pertanyaan NS yang meminta pendapatnya apakah kejaksaan tidak bisa memeriksa keluarganya sendiri.</p>
18	NS : “Saya ingin ke Pak Mahfud ada Kurnia dari ICW saya ingin tau karena ICW yang sejak awal bilang KPK harus				✓	✓									<p>Tuturan (18) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim cara/pelaksanaan.</p>

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL	
	<p>masuk karena melihat rasanya sulit untuk, untuk kejaksaan memeriksa kasus ini”</p> <p>KR : “Iya.. saya tadi mau bahas soal bohong atau tidak bohong ya Mbak Nana, kita masih mengingat masih ditahun ini sebenarnya dua kali pemerintah diduga memberikan kabar yang tidak benar bukan hanya novel Baswedan bulan januari ada kasus Harun Masiku apa kata bawahan Pak Mahfud saat itu, Harun Masiku tidak berada di Indonesia, padahal beberapa waktu kemudian pernyataan itu diralat. Yang kedua kasus Djoko Tjandra bawahan Pak Mahfud juga</p>														<p>Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban KR pada tuturan (18) respons yang diberikan oleh KR sangat panjang dan berbelit-belit bahkan KR juga menjelaskan apa yang tidak menjadi pertanyaan NS. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim cara/pelaksanaan mengharuskan setiap peserta tutur berbicara secara langsung, tidak kabur dan tidak berlebihan. Dalam tuturan (18) terlihat bahwa KR memberikan ungkapan yang tidak jelas serta berlebihan, sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim cara/pelaksanaan.</p> <p>Pelanggaran yang disebabkan karena keinginan untuk berbagi informasi selain terjadi pada maksim kuantitas dan relevansi, juga terjadi pada</p>

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL	
	<p>mengatakan tidak ada data perlintasan atas nama Djoko Tjandra faktanya orangnya ada mendapatkan berbagai prefilip sampai pada mendaftarkan upaya hukum luar biasa. Yang kedua soal tadi apakah persoalan hukum terbatas pada dokumen perkara kalau kita melihat kasus yang ada di kejaksaan agung yang melibatkan jaksa Pinangki Sirna Malasari oke klim kejaksaan dokumennya berbeda gedung akan tetapi ada bukti petunjuk berupa CCTV yang ada diruangan jaksa Pinangki kemana sekarang, pastikan hangus, jadi jangan terlalu cepat</p>														<p>maksim cara/pelaksanaan. Dilihat dari data tuturan (18) Alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan di atas terjadi karena KR ingin berbagi informasi supaya NS mendapatkan informasi yang lengkap. Hal tersebut tegambar pada tuturan KR yang memberi informasi tentang kabar pemerintah berbohong dengan memberikan kabar yang tidak benar tentang kasus korupsi Novel Baswedan dan Djoko Thjandra.</p>

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL	
	<p>menyimpulkan apalagi kalau kasus hukum hanya melandaskan pada dokumen ada banyak alat bukti lain yang juga masih kita pertanyakan hari ini kepada kejaksaan agung dan ICW sejak awal mendorong agar KPK terlibat dalam penyelidikan terbakarnya gedung kejaksaan agung kenapa Mbak Nana? karena kita khawatir inikan apakah ini tidak disengaja atau ini disengajakan dua itu saja opsiannya. Kami ingin KPK masuk kalau memang nanti terbukti ada pihak-pihak entah itu oknum internal kejaksaan agung atau di luar</p>														

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL	
	Kejaksaan Agung yang berupaya untuk menghentikan perkara-perkara besar maka dapat di sangka dengan pasal 21 oprasaljastis. Karena tadi Mbak Nana sampaikan kita agak sulit percaya kalau penegak hukum A menangani perkara yang melibatkan oknum penegak hukum A juga lebih bagus ambil tarik netral biar KPK yang masuk. Itu pointnya Mba Nana. (18)														
19	NS : “Tadi Pak Mahfud mengatakan kewenangan itu ada pada KPK, apakah anda berharap menkopulhukam bisa, karena tadi katanya tidak boleh			✓		MENEGASKAN									Tuturan (19) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim relevansi. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban KR pada tuturan (19) bukanlah

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice								Analisis	
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA		TTL
	<p>ni”  KR : “Saya akan masuk disini sekaligus mengkritisi kejaksaan agung, Mbak Nana pekan lalu bareskrim secara terbuka mengundang KPK untuk mengadakan gelar perkara tapi Kejaksaan Agung saya tidak tau, saya belum pernah melihat ada pemberitaan kejaksaan agung mengundang KPK untuk gelar perkara, dan sampai hari ini pun kejaksaan agung”  (19)</p>														<p>jawaban yang relevan dengan pertanyaan yang diberikan oleh NS. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim relevansi menginginkan supaya partisipan memberikan kontribusi yang sesuai dengan topik pembicaraan. Dalam tuturan data (19) KR memberikan jawaban melenceng dari pertanyaan NS, terlihat pada data tuturan (19) <i>Saya akan masuk disini sekaligus mengkritisi kejaksaan agung, Mbak Nana pekan lalu bareskrim secara terbuka mengundang KPK untuk mengadakan gelar perkara tapi kejaksaan agung saya tidak tau.</i> Jawaban KR tersebut tetap bisa dikatakan relevan dengan pertanyaan NS yaitu tentang harapan KR menkopulhukam untuk mengundang KPK. Namun, tuturan KR dalam data (19)</p>

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice								Analisis	
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA		TTL
															<p>tidak ditemukan jawaban dari pertanyaan NS, sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim relevansi.</p> <p>Alasan pelanggaran maksim relevansi yang terjadi pada tuturan (19) di atas karena KR terlihat berbagi informasi kepada NS untuk menegaskan jawabannya. Hal tersebut tegambar pada kalimat <i>Mbak Nana pekan lalu bareskrim secara terbuka mengundang KPK untuk mengadakan gelar perkara</i>, Tuturan tersebut menandakan KR memberitahu NS bahwa Bareskrim minggu lalu mengundang KPK untuk melakukan gelar perkara. Berbeda dari apa yang disampaikan teori bahwa berbagi informasi merupakan salah satu alasan pelanggaran maksim</p>



NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis		
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL			
																	kuantitas. Namun, setelah diteliti pada data (19) ditemukan bahwa berbagi informasi juga menjadi salah satu alasan terjadinya pelanggaran pada maksim relevansi.
20	<p>NS : “Ini spesifik gelar perkara terhadap?”</p> <p>KR : “Gelar perkara kasus suap surat jalan dan reknotis, itu kabarnya sih mengundang KPK tapi sampai hari ini kok terlihat seperti kejaksaan agung menutup diri, itu yang ada” (20)</p>	✓				✓											<p>Tuturan (20) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim kuantitas. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban KR yang berlebihan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim kuantitas tidak menginginkan mitra tutur memberikan informasi yang kurang maupun berlebihan. Dalam tuturan (20) terlihat bahwa KR berlebihan dalam menjawab pertanyaan NS yang seharusnya KR cukup menjawab <i>Gelar perkara kasus suap surat jalan dan reknotis</i>, karena tuturan</p>

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL	
															<p>tersebut sudah memadai untuk menjawab pertanyaan NS. Namun pada data (20) KR menambahkan ungkapan berlebihan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim kuantitas.</p> <p>Alasan pelanggaran maksim kuantitas pada data tuturan (20) di atas karena MM menambahkan informasi pendukung untuk tuturannya agar NS mendapatkan informasi yang selengkap-lengkapnyanya. Hal tersebut tergambar pada tuturan KR (20) yaitu <i>Itu kabarnya sih mengundang KPK tapi sampai hari ini kok terlihat seperti kejaksaan agung menutup diri, itu yang ada.</i> Berdasarkan tuturan tersebut KR ingin NS lebih tahu atas informasi yang ia sampaikan. Sejalan dengan Fatmawati (2020: 126)</p>

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice										Analisis
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL		
																menyebutkan bahwa salah satu alasan pelanggaran maksim kuantitas karena adanya keinginan untuk berbagi informasi dalam percakapan.
21	<p>KR : “Gelar perkara kasus suap surat jalan dan reknotis, itu kabarnya sih mengundang KPK tapi sampai hari ini kok terlihat seperti kejaksaan agung menutup diri, itu yang ada”</p> <p>MM : “Jadi kalau begitu, benar dong saya bahwa sekarang ini pejabat ndak bisa berbohong buktinya tadi disampaikan oleh Mas Kurnia, dulu ada orang yang bilang Masiku ndak ada ternyata bohongkan militas, kemudian katanya Djoko Tjandra bohong ternyata</p>					✓										<p>Tuturan (21) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim cara/pelaksanaan. Pelanggaran tersebut tergambar dari respons MM pada tuturan (21) respons yang diberikan oleh MM sangat panjang dan berbelit-belit bahkan MM juga menjelaskan apa yang tidak menjadi pertanyaan NS. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim cara/pelaksanaan mengharuskan setiap peserta tutur berbicara secara langsung, tidak taksa, tidak berlebihan serta runut. Dalam</p>

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL	
	masuk, kan berarti saya sudah benar bilang, jangan berbohong sekarang ini masyarakat akan tau, dimana salahnya” (21)														<p>tuturan (21) terlihat bahwa MM memberikan kontribusi yang taksa dan berlebihan sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim cara/pelaksanaan.</p> <p>Respons yang diberikan oleh MM pada tuturan (21) tergolong pada pelanggaran maksim cara/pelaksanaan. Namun, alasan pelanggarannya berbeda dari apa yang disampaikan teori. Teori menyebutkan bahwa alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan terjadi karena Bingung memberikan jawaban, Basa-basi dan Tuturan tidak langsung. Namun ternyata, berdasarkan data pelanggaran maksim cara/pelaksanaan alasan pelanggaran karena MM terlihat memberikan pembenaran terhadap apa yang disampaikan sebelumnya yaitu tentang orang yang berbohong dengan bertutur secara berlebihan untuk berbagi</p>

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL	
															informasi.
22	<p>KR : “Dan sanksi orang yang berbohong itu sampai hari ini tidak ada Prof Mahfud itu yang kita sesalkan kalau tidak ada <i>phanismen</i> yang tegas dari presiden maka bukan tidak mungkin orang itu akan berbohong dimasa yang akan datang terlebih terhadap penegakan hukum di bawah kewenangan profesor Mahfud MD. Itu yang kita khawatir Pak Mahfud”</p> <p>MM : “Konteksnya bukan itu, konteksnya yang saya katakan tidak mungkin sekarang orang bisa berbohong buktinya anda sudah tunjukkan buktinya itu bohong ketahuan</p>				✓					✓					<p>Tuturan (22) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim cara/pelaksanaan. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban MM pada tuturan (22) yang memberikan kontribusi yang taksa serta berlebihan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim cara/pelaksanaan mengharuskan setiap peserta tutur berbicara secara langsung, tidak taksa serta tidak berlebih-lebihan. Dalam tuturan (22) terlihat bahwa MM memberikan kontribusi yang taksa dan berlebihan membuat mitra tutur menjadi bingung untuk memaknai maksud tuturan yang disampaikan MM, sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim cara/pelaksanaan.</p>

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL	
	<p>juga, nah soal itu nanti soal lain ada, ada proses-proses internal kan sudah ada tindakan-tindakan juga tu, cuma tindakan menurut anda beda menurut tindakan pemerintah, misalnya saya contoh begini, di keminkoham dirjennya dicopot, wah anda curiga lagi, namanya sudah curiga oo itu bukan itu gitu terus gimana dong kan begitu, nanti aja yang Djoko Tjandra juga semuanya ditangani siapa yang melayani dia pergi sudah ditangani semua terus apalagi yang mau dilakukan, apakah mau melanggar hukum kita ini, ikut saran anda gitu wah</p>														<p>Pelanggaran yang disebabkan karena penolakan selain terjadi pada maksim relevansi, juga terjadi pada maksim cara/pelaksanaan. Dilihat dari data tuturan (22) Alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan di atas terjadi karena MM menolak pernyataan yang disampaikan oleh KR. Hal tersebut tergambar dalam data (22) yaitu <i>Konteksnya bukan itu, konteksnya yang saya katakan tidak mungkin sekarang orang bisa berbohong buktinya anda sudah tunjukkan buktinya itu bohong ketahuan juga.</i></p>

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL	
	itu yang ditangkap kapolrinya gitu misalnya, kan harus yang, kan sudah ada bukti bahwa yang berbohong ternyata salah ditindak ha gitu, lagi pula kasus Harun Masiku bukan bukan di pemerintah ya itukan di KPK” (22)														
23	NS : “Baik, Pak Mahfud, Pak Bonyamin silahkan anda mau menyampaikan apa?” BS : “Sederhana Pak Mahfud mengajukan permohonan ajalah, Pak Mahfud atas kewenangan yang dimiliki memberikan arahan menghimbau atau tanda kutip lebih tinggi memerintah, jaksa agung untuk dalam ekspose,				✓	MEMERINTAH									Tuturan (23) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim maksim cara/pelaksanaan. Pelanggaran tersebut tergambar pada tuturan (23) respons yang diberikan oleh BS sangat panjang dan berbelit-belit bahkan MM juga menjelaskan apa yang tidak menjadi pertanyaan NS. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice								Analisis	
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA		TTL
	<p>istilah di kejaksaan itu ekspose bukan gelar perkara, ketika pada posisi nanti di arahkan mengundang KPK, biar menjawab keraguan ini jadi Pak Mahfud saya yakin tidak akan menyalahi kewenangan dan tidak akan interpersi karena Jaksa Agung adalah di bawah pemerintahan, jadi diarahkan ajalah dihimbau saya yakin kalau Pak Mahfud nyentil jaksa agungnya eh tolong itu KPK di undang ajalah dalam ekspose ini hal yang sederhana dan gampang dilakukan Pak Mahfud, demikian terimakasih.” (23)</p>														<p>cara/pelaksanaan mengharuskan setiap peserta tutur berbicara secara langsung, tidak taksa, tidak berlebihan serta runut. Dalam tuturan (23) terlihat bahwa BS memberikan kontribusi yang tidak langsung serta berlebihan sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim cara/pelaksanaan.</p> <p>Respons yang diberikan oleh MM pada tuturan (23) tergolong pada pelanggaran maksim cara/pelaksanaan. Namun, alasan pelanggarannya berbeda dari apa yang disampaikan teori. Teori menyebutkan bahwa alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan terjadi karena Bingung memberikan jawaban, Basa-basi dan Tuturan tidak langsung. Namun ternyata, berdasarkan data pelanggaran maksim</p>



NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice								Analisis	
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA		TTL
															cara/pelaksanaan alasan pelanggaran karena BS terlihat memerintah MM, hal tersebut tergambar kalimat <i>Di arahkan mengundang KPK, biar menjawab keraguan ini jadi Pak Mahfud saya yakin tidak akan menyalahi kewenangan dan tidak akan interpersi karena jaksa agung adalah di bawah pemerintahan, jadi diarahkan ajalah dihimbau saya yakin kalau Pak Mahfud nyentil jaksa agungnya eh tolong itu KPK di undang ajalah dalam ekspose ini hal yang sederhana dan gampang dilakukan Pak Mahfud.</i>
24	BS : “Persetujuan ini mohon di implementasikan habis ini atau besok mengontak jaksa agung eh tolong dong diajak ajalah KPK begitu”			✓										MENGEJEK	Tuturan (24) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim relevansi. Pelanggaran tersebut tergambar dari pernyataan MM pada tuturan (24) yang

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice								Analisis	
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA		TTL
	MM : “Itu, tu tinggal cara saya hahahhhahhaa” (24)														tidak cocok dengan pernyataan yang disampaikan oleh BS. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim relevansi menginginkan supaya partisipan memberikan kontribusi yang sesuai dengan topik pembicaraan. Dalam tuturan (24) <i>Itu, tu tinggal cara saya hahahhhahhaa</i> , yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim relevansi. Tuturan (24) di atas termasuk pelanggaran maksim relevansi. Namun, alasan pelanggarannya berbeda dari apa yang sudah disampaikan teori. Teori menyebutkan bahwa alasan pelanggaran maksim relevansi adalah karena humor atau lelucon, dan penolakan. Namun ternyata, berdasarkan data tuturan (24) ditemukan

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis	
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL		
																alasan pelanggaran maksim relevansi disebabkan karena MM mengejek pernyataan BS. Hal tersebut tergambar pada kalimat <i>Itu, tu tinggal cara saya hahahhhahhaa.</i>
25	MM : “Itu, tu tinggal cara saya hahahhhahhaa” NS : “Yang jelas, ini sudah terbuka dan disaksikan jutaan orang jadi seharusnya ini sudah”. (25)				✓									✓	Tuturan (25) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim cara/pelaksanaan. Pelanggaran tersebut tergambar dari respons NS pada tuturan (25) memberikan kontribusi yang taksa. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim cara/pelaksanaan mengharuskan setiap peserta tutur berbicara secara langsung, tidak taksa serta tidak berlebih-lebihan. Dalam tuturan (25) terlihat bahwa NS memberikan kontribusi yang taksa, sehingga menyebabkan	

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL	
															terjadinya pelanggaran terhadap maksim cara/pelaksanaan. Alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan yang terjadi pada tuturan (25) di atas karena kurangnya kosakata yang disampaikan sehingga menuturkan tuturan secara tidak langsung. Fatmawati (2020:135) memperoleh 36 konsep-konsep alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan salah satu di antaranya adalah kurang kosakata. Hal tersebut tergambar dalam data (25) yaitu <i>Disaksikan jutaan orang jadi seharusnya ini sudah</i> . Berdasarkan kalimat tersebut setelah kata sudah seharusnya ada kata penjelas apa yang dimaksud sudah.
26	MM : “Itu, tu tinggal cara saya hahahhhahhaa” NS : “Yang jelas, ini		✓			TIDAK TAHU JAWABAN PASTI									Tuturan (26) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice										Analisis	
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL			
	sudah terbuka dan disaksikan jutaan orang jadi seharusnya ini sudah” (26)																adalah maksim kualitas. Pelanggaran tersebut tergambar dari pernyataan NS menyebutkan yang tidak sebenarnya yaitu tuturan <i>Disaksikan jutaan orang</i> pada data (26). Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim kualitas mewajibkan setiap peserta percakapan mengatakan hal yang sebenarnya, didasarkan pada bukti-bukti yang memadai. Pernyataan yang diberikan NS dalam data (26) merupakan pernyataan yang tidak sebenarnya, tidak adanya bukti yang menunjukkan bahwa yang menyaksikan acara tersebut mencapai jutaan orang sehingga menyebabkan pelanggaran maksim kualitas. Alasan pelanggaran maksim kualitas dalam data (26) tersebut karena NS memperkirakan bahwa

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice								Analisis	
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA		TTL
															yang menonton sebanyak itu dengan mengatakan hal yang tidak sebenarnya. Hal tersebut dilakukan oleh NS karena tidak memiliki jawaban yang pasti. Seharusnya NS mengatakan <i>Ditonton oleh banyak orang</i> tanpa menambahkan kata jutaan.
27	<p>NS : “Yang jelas, ini sudah terbuka dan disaksikan jutaan orang jadi seharusnya ini sudah”</p> <p>MM : “Iya disaksikan jutaan orang dan bisa disampaikan juga oleh Pak Hari kan” (27)</p>		✓			TIDAK TAHU JAWABAN PASTI								<p>Tuturan (27) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim kualitas. Pelanggaran tersebut tergambar dari respons MM menyebutkan hal yang tidak sebenarnya yaitu tuturan <i>Disaksikan jutaan orang</i> pada data (27). Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim kualitas mewajibkan setiap peserta percakapan mengatakan hal yang sebenarnya, didasarkan pada bukti-bukti yang</p>	

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL	
															<p>memadai. Respons yang diberikan MM dalam data (27) merupakan pernyataan yang tidak sebenarnya, tidak adanya bukti yang menunjukkan bahwa yang menyaksikan acara tersebut mencapai jutaan orang. Sehingga menyebabkan pelanggaran terhadap maksim kualitas.</p> <p>Alasan pelanggaran maksim kualitas dalam data (27) tersebut karena MM memperkirakan bahwa yang menonton sebanyak itu dengan mengatakan hal yang tidak sebenarnya. Hal tersebut dilakukan oleh NS karena tidak memiliki jawaban yang pasti. Seharusnya NS mengatakan <i>Ditonton oleh banyak orang</i> tanpa menambahkan kata jutaan.</p>
28	MM : “Iya disaksikan jutaan orang dan bisa disampaikan juga oleh Pak Hari kan”		✓			TIDAK TAHU JAWABAN PASTI									<p>Tuturan (28) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim kualitas.</p>

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice								Analisis				
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA		TTL			
	NS : “Jaksa Agung yang menyaksikan Mata Najwa saya tau sedang nonton jadi Pak Jaksa Agung tolong di dengar itu Pak Mahfud MD. (28)																	<p>Pelanggaran tersebut tergambar dari respons NS menyebutkan hal yang tidak sebenarnya yaitu tuturan <i>Jaksa Agung yang menyaksikan Mata Najwa saya tau sedang nonton</i> pada data (28). Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim kualitas mewajibkan setiap peserta percakapan mengatakan hal yang sebenarnya, didasarkan pada bukti-bukti yang memadai. Respons yang diberikan NS dalam data (28) merupakan pernyataan yang tidak sebenarnya, tidak adanya bukti yang menunjukkan bahwa Jaksa Agung juga nonton Mata Najwa. Sehingga menyebabkan pelanggaran terhadap maksim kualitas.</p> <p>Alasan pelanggaran maksim kualitas dalam data (28) tersebut karena NS yakin bahwa Jaksa Agung</p>



NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis		
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL			
																	juga nonton acara Mata Najwa, namun pada kenyataannya belum tentu Jaksa Agung nonton karena tidak ada bukti Jaksa Agung sedang menonton Mata Najwa. Sehingga NS tidak memiliki jawaban yang pasti. Seharusnya NS mengatakan <i>Mungkin Jaksa Agung juga sedang menonton Mata Najwa</i> tanpa menggunakan kata yakin yang seolah-oleh Jaksa Agung memang menonton Mata Najwa padahal belum pasti.
29	<p>NS : “Jaksa agung yang menyaksikan Mata Najwa saya tau sedang nonton jadi Pak jaksa agung tolong di dengar itu Pak Mahfud MD. Pak Mahfud”</p> <p>BS : “Jadi ini model orang solo ujung ujungnya nuntutnya juga, ujungnya ya</p>			✓									✓				Tuturan (29) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim relevansi. Pelanggaran tersebut tergambar dari pernyataan BS pada tuturan (29) yang tidak relevan dengan topik pembicaraan yang sedang diperbincangkan. Hal tersebut bertentangan

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis		
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL			
	nusuk juga Pak Mahfud jadi tolong dipahami.” (29)																dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim relevansi menginginkan supaya partisipasi memberikan kontribusi yang sesuai dengan topik pembicaraan. Dalam data tuturan (29) terlihat bahwa BS melenceng dari topik pembahasan, sebelumnya NS dan MM membahas tentang pengimplikasian mengontak jaksa agung untuk mengajak KPK dalam perkara yang sedang terjadi, namun BS melontarkan pernyataan yang tidak berkaitan dengan pembicaraan sebelumnya yaitu <i>Jadi ini model orang solo ujung ujungnya nuntutnya juga, ujungnya ya nusuk juga Pak Mahfud jadi tolong dipahami,</i> yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim relevansi. Pelanggaran yang disebabkan karena keakraban

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL	
															tidak hanya terjadi pada maksim kuantitas. Akan tetapi, setelah diteliti pada data (29) ditemukan bahwa keakraban juga menjadi alasan terjadinya pelanggaran maksim relevansi. Alasan keakraban itu karena BS menambah topik pembicaraan supaya lebih bersosialisasi dan terlihat lebih akrab. Hal tersebut tergambar pada data tuturan (29) <i>Ujung ujungnya nuntutnya juga, ujungnya ya nusuk juga Pak Mahfud jadi tolong dipahami.</i>
30	NS : “Baik, Pak Mahfud pertanyaan penutup Pak Mahfud yang jelas puplik sempat dikagetkan oleh beberapa temuan yang dilakukan investigasi yang dilakukan media maupun investigasi yang dilakukan				✓	✓									Tuturan (30) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim cara/pelaksanaan. Pelanggaran terhadap maksim cara/pelaksanaan karena respons yang diberikan oleh MM tidak secara langsung

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL	
	<p>oleh sebutlah maki begitu ya, salah satunya adalah dugaan bahwa jaksa Pinangki itu melapor kepada jaksa agung pertemuannya dengan Djoko Tjandra di luar negeri, Jaksa Pinangki bahkan sempat video <i>call</i> dengan jaksa agung melapor sudah dil begitu, itu dugaan-dugaan yang muncul, apakah anda melihat kejaksaan akan berani memeriksa Jaksa Agung atas kasus ini Pak Mahfud?</p> <p>MM : “Itu sudah substansi perkara saya ndak boleh masuk tanyakan ke Pak Hari Setiyono aja ada di situ, saya ndak boleh masuk ke situ, karena</p>														<p>menjawab pertanyaan NS. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim cara/pelaksanaan mengharuskan setiap peserta tutur berbicara secara langsung, tidak kabur, tidak taksa, dan tidak berlebih-lebihan.</p> <p>Pelanggaran yang disebabkan karena keinginan untuk berbagi informasi selain terjadi pada maksim kuantitas dan relevansi, juga terjadi pada maksim cara/pelaksanaan. Dilihat dari data tuturan (30) Alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan di atas terjadi karena MM ingin berbagi informasi supaya NS lebih tahu. Hal tersebut tegambar pada tuturan MM yang memberi informasi bahwa Hary Setiyono lebih tau permasalahan yang</p>

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis		
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL			
	Nana kan tau sendiri” (30)																ditanyakan oleh NS.
31	MM : “Itu sudah substansi perkara saya ndak boleh masuk tanyakan ke Pak Hari Setiyono aja ada di situ, saya ndak boleh masuk ke situ, karena Nana kan tau sendiri” NS : “Tapi seharusnya apakah bisa jeruk makan jeruk pak?” (31)			✓								✓					<p>Tuturan (31) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim relevansi. Pelanggaran tersebut tergambar dari pertanyaan NS pada data (31) yang tidak relevan dengan topik pembahasan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim relevansi menginginkan supaya partisipan memberikan kontribusi yang sesuai dengan topik pembicaraan. Dalam data tuturan (31) <i>Tapi seharusnya apakah bisa jeruk makan jeruk pak</i>, tidak berkaitan dengan pembicaraan sebelumnya yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim relevansi.</p> <p>Alasan pelanggaran maksim relevansi yang terjadi pada tuturan (31) di</p>

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis		
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL			
																	atas karena NS terlihat menciptakan humor supaya percakapan terlihat lebih santai. Hal tersebut tegambar pada tuturan NS yaitu <i>Apakah bisa jeruk makan jeruk Pak?.</i> Sejalan dengan Chaer (2010) bahwa alasan terjadinya pelanggaran prinsip kerja sama disebabkan oleh beberapa hal salah satu di antaranya adalah adanya kemauan untuk menciptakan situasi menjadi santai atau menimbulkan efek humor.
32	NS : “Tapi seharusnya apakah bisa jeruk makan jeruk pak?” MM : “Ndak papa jeruk makan jeruk (hahaha)” (32)		✓									✓					Tuturan (32) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim kualitas. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban MM menyebutkan yang tidak sebenarnya. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL	
															<p>bahwa dalam maksim kualitas mewajibkan setiap peserta percakapan mengatakan hal yang sebenarnya, didasarkan pada bukti-bukti yang memadai. Jawaban yang diberikan MM dalam data (32) <i>Ndak papa jeruk makan jeruk</i> merupakan jawaban yang tidak sebenarnya, mana bisa jeruk makan jeruk. Hal tersebut menyebabkan pelanggaran maksim kualitas.</p> <p>Alasan pelanggaran maksim kualitas dalam data (32) tersebut karena MM menciptakan humor agar suasana menjadi lebih santai. Hal tersebut tergambar dari tuturan MM pada data (32) yaitu <i>Ndak pa jeruk makan jeruk (hahahhahahaha)</i>". Sejalan dengan Rochmawati (2017:156) mengatakan bahwa humor dan lelucon akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran prinsip kerja sama Grice.</p>

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL	
33	MM : “Ndak papa jeruk makan jeruk (hahahaha)” NS : “Yakin ya Pak bisa, jadi kita” (33)				✓									✓	<p>Tuturan (33) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim cara/pelaksanaan. Pelanggaran tersebut tergambar dari respons NS pada tuturan (33) memberikan kontribusi yang taksa. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim cara/pelaksanaan mengharuskan setiap peserta tutur berbicara secara langsung, tidak taksa serta tidak berlebih-lebihan. Dalam tuturan (33) <i>Yakin ya Pak bisa, jadi kita</i> terlihat bahwa NS memberikan kontribusi yang taksa, sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim cara/pelaksanaan.</p> <p>Alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan</p>



NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL	
															yang terjadi pada tuturan (33) di atas karena kurangnya kosakata yang disampaikan sehingga tuturan yang disampaikan tidak langsung. Fatmawati (2020:135) memperoleh 36 konsep-konsep alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan salah satu di antaranya adalah kurang kosakata. Hal tersebut tergambar dalam data (33) yaitu <i>Yakin ya Pak bisa, jadi kita</i> . Berdasarkan kalimat tersebut setelah terdapat ketaksaan yang tinggi apa yang dimaksud yakin bisa dalam hal apa dan pada kata jadi kita adalah tuturan yang tidak dituturkan sampai selesai sehingga maknanya menjadi taksa.
34	NS : “Yakin ya Pak bisa, jadi...jadi kita” MM : “Pertanyaannya terlalu main-main			✓		MENGEJEK									Tuturan (34) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice								Analisis	
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA		TTL
	sih”(34)														<p>adalah maksim relevansi. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban MM pada data (34) yang tidak relevan dengan topik pembahasan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim relevansi menginginkan supaya partisipan memberikan kontribusi yang sesuai dengan topik pembicaraan. Dalam data tuturan (34) <i>Pertanyaannya terlalu main-main sih</i>, tidak berkaitan dengan pembicaraan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim relevansi.</p> <p>Tuturan (34) di atas termasuk pelanggaran maksim relevansi. Namun, alasan pelanggarannya berbeda dari apa yang sudah disampaikan teori. Teori menyebutkan bahwa alasan pelanggaran maksim relevansi adalah karena</p>

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice								Analisis	
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA		TTL
															humor atau lelucon, dan penolakan. Namun ternyata, berdasarkan data tuturan (34) ditemukan alasan pelanggaran maksim relevansi disebabkan karena MM terlihat mengejek pertanyaan yang diajukan oleh NS. Hal tersebut tergambar pada data tuturan (37) yaitu <i>Pertanyaannya terlalu main-main sih.</i>
35	<p>NS : “Kita masih bisa percaya bahwa tidak akan sungkan-sungkan anak buah jaksa agung memeriksa bos besarnya untuk perkara yang dikaitkan dengan Djoko Tjandra Pak?</p> <p>MM : “Seluruh rakyat indonesia mulai dari presiden sama rakyat kecil sampai rakyat kecil sama pikirannya semua</p>			✓		MENEGASKAN								<p>Tuturan (35) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim relevansi. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban MM pada data (35) yang tidak relevan dengan topik pembahasan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim relevansi menginginkan supaya partisipan memberikan kontribusi yang sesuai</p>	

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice								Analisis	
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA		TTL
	harus terbuka saya tadi baru bertemu presiden” (35)														<p>dengan topik pembicaraan. Dalam data tuturan (35) <i>Seluruh rakyat indonesia mulai dari presiden sama rakyat kecil sampai rakyat kecil sama pikirannya semua harus terbuka saya tadi baru bertemu presiden</i>, tidak berkaitan dengan pembicaraan. Jawaban MM tetap bisa dikatakan relevan. Namun, dari jawaban MM tersebut pertanyaan NS masih belum terjawab yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim relevansi.</p> <p>Pelanggaran yang disebabkan karena ingin berbagi informasi untuk menegaskan tidak hanya terjadi pada maksim kuantitas. Akan tetapi, setelah diteliti pada data (35) ditemukan bahwa berbagi informasi juga menjadi alasan terjadinya pelanggaran maksim relevansi. Alasan berbagi</p>

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice								Analisis	
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA		TTL
															informasi itu supaya NS lebih tahu. Hal tersebut tergambar pada kalimat <i>Saya tadi baru bertemu presiden</i> MM memberitahu NS bahwa ia baru saja bertemu dengan Pak presiden.
36	<p>NS : “Presiden bilang apa Pak?”</p> <p>MM : “Saya bilang Pak ini yang ribut-ribut sabtu kemarin orang orang mempersoalkan orang 546 milyar seakan-akan itu digelapkan, itu ndak benar sesudah itu dijelaskan bahwa itu ndak benar sudah ada bukti otentiknya orang mempertanyakan lagi, la dulu kan 900 laputusan mahkamah agungnya 546 gitu, yang 300nya silahkan</p>				✓	✓									<p>Tuturan (36) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim cara/pelaksanaan. Pelanggaran tersebut tergambar pada tuturan (36) respons yang diberikan oleh MM sangat panjang dan berbelit-belit bahkan MM juga menjelaskan apa yang tidak menjadi pertanyaan NS. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim cara/pelaksanaan mengharuskan setiap peserta tutur berbicara secara langsung, tidak taksa, tidak berlebih-</p>

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL	
	dipersoalkan lagi tapi yang putusan mahkamah agung 546 yang diributkan sampe sore sampe saya menjelaskan itu ni masih ada di meja saya ni bukti-buktinya ni, bahwa itu sudah selesai, ha kata presiden Pak Mahfud profesional aja, kita jangan takut, buka sejujurnya begitu kalau presiden selalu. (36)														lebih serta runut. Dalam tuturan (36) terlihat bahwa MM memberikan kontribusi yang berlebihan sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim cara/pelaksanaan. Pelanggaran yang disebabkan karena keinginan untuk berbagi informasi selain terjadi pada maksim kuantitas dan relevansi, juga terjadi pada maksim cara/pelaksanaan. Dilihat dari data tuturan (36) Alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan di atas terjadi karena MM ingin berbagi informasi dengan meenjelaskan pembicaraannya dengan Presiden. Hal tersebut tergambar pada kalimat <i>Saya bilang Pak ini yang ribut-ribut sabtu kemarin orang mempersoalkan orang 546 milyar seakan-akan itu digelapkan, itu</i>

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice								Analisis	
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA		TTL
															<i>tidak benar sesudah itu dijelaskan bahwa itu tidak benar sudah ada bukti otentiknya.</i>
37	NS : “Baik, baik Pak Mahfud terimakasih waktu anda untuk Mata Najwa malam ini Pak, MM : “Makasih Najwa, jumpa lagi di lain waktu” (37)	✓						✓							Tuturan (37) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim kuantitas. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban MM yang berlebihan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim kuantitas tidak menginginkan mitra tutur memberikan informasi yang kurang maupun berlebihan. Dalam tuturan (37) <i>Makasih Najwa, jumpa lagi di lain waktu</i> terlihat bahwa MM berlebihan dalam menjawab pertanyaan NS yang seharusnya MM cukup menjawab <i>Makasih Najwa</i> . Namun pada percakapan di atas, MM menambahkan ucapan <i>Jumpa lagi di lain</i>

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis	
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL		
																<p>waktu yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim kuantitas. Alasan pelanggaran maksim kuantitas yang terjadi pada tuturan (37) di atas karena MM terlihat ramah. Hal tersebut tergambar pada respons MM pada kalimat <i>Jumpa lagi di lain waktu</i>. Kalimat tersebut menandakan keramahan. Sejalan dengan Fatmawati (2020:123—125) menyebutkan bahwa salah satu alasan pelanggaran maksim kuantitas adalah keramahan.</p>
38	<p>NS : “Sehat-sehat terus ya Pak”  MM : “Alhamdulillah sehat, terimakasih Najwa dan semuanya juga sehat-sehat” (38)</p>	✓						✓								<p>Tuturan (38) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim kuantitas. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban MM yang berlebihan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama</p>



NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis		
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL			
																	<p>Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim kuantitas tidak menginginkan mitra tutur memberikan informasi yang kurang maupun berlebihan. Dalam tuturan (38) terlihat bahwa MM berlebihan dalam menjawab pertanyaan NS yang seharusnya MM cukup menjawab <i>Alhamdulillah sehat terimakasih Najwa</i>. Namun pada percakapan di atas, MM menambahkan ucapan <i>Semuanya juga sehat-sehat</i> yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim kuantitas.</p> <p>Alasan pelanggaran maksim kuantitas yang terjadi pada tuturan (38) di atas karena MM ingin terlihat lebih santun. Hal tersebut tegambar pada tuturan MM yang memberikan penambahan informasi yang tidak dibutuhkan oleh NS yaitu</p>

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis			
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL				
																		<i>Semuanya juga sehat-sehat</i> pada tuturan tersebut menunjukkan keramahan dan kesantunan karena memberikan doa kepada orang lain baik itu untuk NS, narasumber, maupun penontonnya yang tergambar pada kata <i>Semuanya</i> . Sejalan dengan Fatmawati (2020:123—125) menyebutkan bahwa alasan pelanggaran maksim kuantitas adalah keramahan dan kesantunan.
39	MM : “Alhamdulillah sehat, terimakasih Najwa dan semuanya juga sehat-sehat” NS : “Kita tunggu bagaimana jeruk makan jeruknya ya Pak ya” (39)			✓								✓						Tuturan (39) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim relevansi. Pelanggaran tersebut tergambar dari pernyataan NS pada data (39) yang tidak relevan dengan topik pembahasan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim relevansi menginginkan supaya

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL	
															partisipan memberikan kontribusi yang sesuai dengan topik pembicaraan. Dalam data tuturan (39) <i>Kita tunggu bagaimana jeruk makan jeruknya ya Pak ya</i> tidak berkaitan dengan pembicaraan sebelumnya yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim relevansi. Alasan pelanggaran maksim relevansi yang terjadi pada tuturan (39) di atas karena NS terlihat menciptakan humor supaya percakapan terlihat lebih santai. Hal tersebut tegambar pada tuturan NS yaitu <i>Kita tunggu bagaimana jeruk makan jeruknya ya Pak.</i>
40	NS : “Kita tunggu bagaimana jeruk makan jeruknya ya Pak ya” MM : “Salam Abi Quraish Shibab ya” (40)			✓			✓								Tuturan (40) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim relevansi. Pelanggaran tersebut tergambar dari ungkapan

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis	
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL		
																MM pada data (40) yang tidak relevan dengan topik pembahasan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim relevansi menginginkan supaya partisipan memberikan kontribusi yang sesuai dengan topik pembicaraan. Dalam data tuturan (40) <i>Salam Abi Quraish Shibab ya</i> , tidak berkaitan dengan pembicaraan sebelumnya yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim relevansi. Alasan pelanggaran maksim relevansi yang terjadi pada tuturan (40) di atas karena MM terlihat basa-basi. Hal tersebut tegambar pada tuturan MM yaitu <i>Salam Abi Quraish Shibab ya</i> .
41	NS : “Yak membutuhkan waktu kurang lebih 11 jam untuk bisa menaklukkan api di	✓						✓								Tuturan (41) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim kuantitas.

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice								Analisis	
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA		TTL
	<p>gedung kejaksaan agung yang terbakar 65 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan bagaimana api bisa menhanguskan seluruh gedung utama kejaksaan, sudah hadir di mata najwa kepala dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan gulkarmat provinsi DKI Jakarta hadir Bapak, saya mengundang Pak Satria Digunawan yang akrab disapa Pak Bili, selamat malam Pak Bili”</p> <p>SG : “Selamat malam Mba Nana, salam sejahtera untuk kita semua” (41)</p>														<p>Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban SG yang berlebihan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim kuantitas tidak menginginkan mitra tutur memberikan informasi yang kurang maupun berlebihan. Dalam tuturan (41) terlihat bahwa SG berlebihan dalam menjawab pertanyaan NS yang seharusnya SG cukup menjawab <i>Selamat malam Mba Nana</i>. Namun pada percakapan di atas, SG menambahkan ucapan <i>Salam sejahtera untuk kita semua</i> yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim kuantitas.</p> <p>Alasan pelanggaran maksim kuantitas yang terjadi pada tuturan (41) di atas karena SG ingin terlihat lebih ramah. Hal tersebut tegambar pada tuturan SG yang</p>

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL	
															memberikan penambahan informasi yang tidak dibutuhkan oleh NS yaitu <i>Salam sejahtera untuk kita semua</i> pada tuturan tersebut menunjukkan keramahan dan kesantunan karena memberikan doa kepada orang lain baik itu untuk NS, narasumber, maupun penontonnya yang tergambar pada kalimat <i>Untuk kita semua</i> . Sejalan dengan Fatmawati (2020:123—125) menyebutkan bahwa alasan pelanggaran maksim kuantitas adalah keramahan dan kesantunan.
42	NS : “Terima kasih sudah hadir di mata najwa Pak” SG : “Sama-sama Mba Nana, terimakasih juga telah mengundang saya” (42)	✓						✓							Tuturan (42) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim kuantitas. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban SG yang berlebihan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis		
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL			
																	<p>Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim kuantitas tidak menginginkan mitra tutur memberikan informasi yang kurang maupun berlebihan. Dalam tuturan (42) terlihat bahwa SG berlebihan dalam menjawab pertanyaan NS yang seharusnya SG cukup menjawab <i>Sama-sama Mba Nana</i>. Namun pada percakapan di atas, SG menambahkan ucapan <i>Terimakasih juga telah mengundang saya</i> yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim kuantitas.</p> <p>Alasan pelanggaran maksim kuantitas yang terjadi pada tuturan (42) di atas karena SG terlihat lebih ramah. Hal tersebut tegambar pada tuturan SG yang tidak dibutuhkan oleh NS yaitu <i>Terimakasih juga telah mengundang saya</i> pada tuturan tersebut</p>

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL	
															menunjukkan bahwa SG ramah terhadap Najwa dengan mengucapkan Terima kasih. Sejalan dengan Fatmawati (2020:123—125) menyebutkan bahwa salah satu alasan pelanggaran maksim kuantitas adalah keramahan.
43	<p>NS : “Saya juga terhubung dari luar dengan Ibu Fatma Lestari pakar fairsevti dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, selamat malam Bu Fatma”</p> <p>FL : “Selamat malam Mba Nana, selamat malam juga semuanya” (43)</p>	✓						✓							Tuturan (43) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim kuantitas. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban FL yang berlebihan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim kuantitas tidak menginginkan mitra tutur memberikan informasi yang kurang maupun berlebihan. Dalam tuturan (43) terlihat bahwa FL berlebihan dalam menjawab pertanyaan NS



NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL	
															<p>yang seharusnya FL cukup menjawab <i>Selamat malam Mba Nana</i>. Namun pada percakapan di atas, FL menambahkan ucapan <i>Selamat malam juga semuanya</i> yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim kuantitas.</p> <p>Alasan pelanggaran maksim kuantitas yang terjadi pada tuturan (43) di atas karena FL ingin terlihat lebih ramah. Hal tersebut tegambar pada tuturan FL yang memberikan penambahan informasi yang tidak dibutuhkan oleh NS yaitu <i>Selamat malam juga semuanya</i> pada tuturan tersebut menunjukkan keramahan dan kesantunan karena memberikan salam atau sapaan kepada orang lain baik itu untuk NS, narasumber, maupun penontonnya yang</p>

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL	
															tergambar pada kata <i>Semuanya</i> .
44	<p>NS : “Yak terimakasih atas video itu Pak Bili jadi persisnya anda dan teman-teman mendapatkan info dari orang yang datang justru kemarkas?”</p> <p>SG : “Betul, jadi pertama kita dapat berita terjadinya kebakaran yaitu dari warga yang datang ke pos terdekat, yaitu pos Kebayoran baru tepatnya sekitar jam 7 lewat 10 menit, kemudian langsung kita luncurkan 4 unit dan pada saat di TKP sudah ada 3 selasar dari gedung utama kejaksaan agung sisi sebelah utara sudah terbakar nah itu langsung kita</p>				✓	✓									<p>Tuturan (44) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim cara/pelaksanaan. Pelanggaran tersebut tergambar pada tuturan (44) respons yang diberikan oleh SG sangat panjang dan berbelit-belit bahkan SG juga menjelaskan apa yang tidak menjadi pertanyaan NS. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim cara/pelaksanaan mengharuskan setiap peserta tutur berbicara secara langsung, tidak kabur dan tidak berlebihan. Dalam tuturan (44) terlihat bahwa SG berlebihan dalam menjawab pertanyaan NS yang seharusnya SG cukup menjawab sampai <i>Betul</i>. Namun pada percakapan di</p>

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL	
	tambahkan lagi unit terakhir sampai dengan 65 unit dengan jumlah personil sekitar 325 orang.” (44)														atas, SG memberikan kontribusi berlebihan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim cara/pelaksanaan. Pelanggaran yang disebabkan karena keinginan untuk berbagi informasi selain terjadi pada maksim kuantitas dan relevansi, juga terjadi pada maksim cara/pelaksanaan. Dilihat dari data tuturan (44) Alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan di atas terjadi karena SG terlihat berbagi informasi. Hal tersebut tegambar pada tuturan SG yang menceritakan awal mulanya mendapat kabar kebakaran gedung Jaksa Agung. Hal tersebut tergambar pada data tuturan (44) <i>Jadi pertama kita dapat berita terjadinya kebakaran yaitu dari warga yang datang ke pos terdekat.</i>

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice								Analisis	
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA		TTL
45	<p>NS : “Apakah di dalam ada alat-alat pemadam yang sempat berfungsi atau sama sekali tidak ada?”</p> <p>SG : “Pada saat itu sudah terbakar jadi mungkin kita akan liat nanti hasil porenisf dari kepolisian seperti apa gitu.(45)</p>			✓		TIDAK TAHU JAWABAN PASTI								<p>Tuturan (45) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim relevansi. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban SG pada data (45) yang tidak relevan dengan pertanyaan NS. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim relevansi menginginkan supaya partisipan memberikan kontribusi yang sesuai dengan topik pembicaraan. Dalam data tuturan (45) Pada saat itu sudah terbakar jadi mungkin kita akan liat nanti hasil porenisf dari kepolisian seperti apa gitu tidak relevan dengan pertanyaan NS, lain yang ditanya lain pula yang dijawab sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim relevansi.</p> <p>Tuturan (45) di atas termasuk pelanggaran</p>	

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis		
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL			
																	maksim relevansi. Namun, alasan pelanggarannya berbeda dari apa yang sudah disampaikan teori. Teori menyebutkan bahwa alasan pelanggaran maksim relevansi adalah karena humor atau lelucon, dan penolakan. Namun ternyata, berdasarkan data tuturan (54) ditemukan alasan pelanggaran maksim relevansi disebabkan karena SG tidak mengetahui jawaban pasti tentang ada atau tidaknya alat pemadam yang berfungsi saat kebakaran. Hal tersebut tergambar pada kalimat <i>Pada saat itu sudah terbakar jadi mungkin kita akan liat nanti hasil porenfis dari kepolisian seperti apa gitu.</i>
46	NS : “Jadi, tapi ketika kemudian masuk kedalam itu titik api dimula memang	✓				✓											Tuturan (46) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL	
	<p>dari lantai 6 dan cepat sekali menjalar ke titik-titik yang lain itu karena kondisi gedungnya yang tadi anda katakan?</p> <p>SG : “Betul, jadi pada saat jam tepatnya sekitar jam 7.10 menit itu sampai dengan jam 12 kita bisa mengantisipasi melokalisir satu setengah gedung utama kejaksaan agung itu, hanya pas jam 1 tepatnya itu <i>flash over</i> terjadi di lantai 6 kemudian merambat sampai ke sisi selatan gedung kejaksaan agung. (46)</p>														<p>adalah maksim kuantitas. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban SG yang berlebihan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim kuantitas tidak menginginkan mitra tutur memberikan informasi yang kurang maupun berlebihan. Dalam tuturan (46) terlihat bahwa SG berlebihan dalam menjawab pertanyaan NS yang seharusnya SG cukup menjawab sampai <i>Betul</i>, karena tuturan tersebut sudah memadai untuk menjawab pertanyaan NS. Namun pada percakapan data (46) SG memberikan kontribusi berlebihan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim kuantitas.</p> <p>Alasan terjadinya pelanggaran maksim kuantitas pada data (46) karena SG menceritakan</p>

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis	
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL		
																proses saat memadamkan kebakaran, hal itu dilakukan supaya NS mendapatkan informasi yang lengkap. Hal tersebut tergambar pada kalimat <i>Jadi pada saat jam tepatnya sekitar jam 7.10 menit itu sampai dengan jam 12 kita bisa mengantisipasi melokalisir satu setengah gedung utama kejaksaan agung itu, hanya pas jam 1 tepatnya itu flash over terjadi di lantai 6 kemudian merambat sampai ke sisi selatan gedung kejaksaan agung.</i>
47	NS : “Apa istilahnya Pak <i>flash over</i> itu? SG : “ <i>Flahs over</i> itu ada pengaruh dari asap, pengaruh asap yang bisa mengakibatkan panas nah itu juga merambat sampai ke sebelah sisi selatan gedung	✓				✓										Tuturan (47) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim kuantitas. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban SG yang berlebihan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis		
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL			
	kejaksanaan agung. (47)																Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim kuantitas tidak menginginkan mitra tutur memberikan informasi yang kurang maupun berlebihan. Dalam tuturan (47) terlihat bahwa SG berlebihan dalam menjawab pertanyaan NS yang seharusnya SG cukup menjawab <i>Flahs over itu ada pengaruh dari asap</i> , karena tuturan tersebut sudah memadai untuk menjawab pertanyaan NS. Namun, pada data (47) percakapan di atas, SG menambahkan ucapan <i>Pengaruh asap yang bisa mengakibatkan panas nah itu juga merambat sampai ke sebelah sisi selatan gedung kejaksanaan agung yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim kuantitas.</i> Alasan pelanggaran maksim kuantitas yang terjadi pada tuturan (47) di atas karena SG terlihat



NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis	
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL		
																berbagi informasi. Hal tersebut tergambar pada tuturan SG yang memberikan informasi yang tidak dibutuhkan oleh NS yaitu <i>Pengaruh asap yang bisa mengakibatkan panas nah itu juga merambat sampai ke sebelah sisi selatan gedung kejaksaan agung</i> pada tuturan tersebut menunjukkan suatu informasi yang diberikan oleh SG supaya NS lebih tahu.
48	<p>NS : “Dari pengalaman anda memadamkan kebakaran ini termasuk yang besar Pak?</p> <p>SG : “Besarnya, termasuk besar ini karena satu gedung ada 6 lantai memanjang areanya cukup luas dan cukup besar, dan api juga dengan cepat</p>	✓				✓										Tuturan (48) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim kuantitas. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban SG yang berlebihan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim kuantitas tidak

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL	
	merambat ke bagian yang lainnya” (48)														<p>menginginkan mitra tutur memberikan informasi yang kurang maupun berlebihan. Dalam tuturan (48) terlihat bahwa SG berlebihan dalam menjawab pertanyaan NS yang seharusnya SG cukup menjawab sampai <i>Besar</i>, termasuk <i>besar</i>, karena tuturan tersebut sudah memadai untuk menjawab pertanyaan NS. Namun, pada percakapan data (48) di atas, SG memberikan kontribusi berlebihan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim kuantitas.</p> <p>Alasan pelanggaran maksim kuantitas yang terjadi pada tuturan (48) di atas karena SG terlihat berbagi informasi. Hal tersebut tegambar pada tuturan SG yang menceritakan kondisi gedung Jaksa Agung pada saat api merambat ke bagian gedung yang</p>

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL	
															lainnya. Hal tersebut tergambar pada data tuturan (48) <i>Satu gedung ada 6 lantai memanjang areanya cukup luas dan cukup besar, dan api juga dengan cepat merambat ke bagian yang lainnya.</i> Kalimat tersebut disampaikan supaya NS mendapatkan informasi selengkap-lengkapunya sehingga tidak bertanya lagi.
49	<p>NS : “Oke, tapi yang gedung utamanya yang di depan yang kita lihat itu yang terbakar, nah pertanyaannya tadi Pak, apakah memang tidak ada sistem proteksi kebakaran atau yang bisa mendeteksi?”</p> <p>HS : “Yak, sepengetahuan saya karena gedung ini kemarin saya katakan bahwa</p>			✓		MENGELAK/MENCARI ALASAN									<p>Tuturan (49) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim relevansi. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban HS pada data (49) yang tidak relevan dengan topik pertanyaan NS. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim relevansi menginginkan supaya partisipan memberikan kontribusi</p>

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice								Analisis	
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA		TTL
	<p>masuk dikawasan pemukiman kemarin memang dikatakan ini belum sebagai gedung cakar budaya tetapi sudah masuk kawasan pemukiman, kenapa? Karena ketika kami pengen mempercantik gedung itu di tahun 2018 itu ditegur oleh dinas pariwisata tidak boleh begini tidak boleh begitu sehingga ketika dilakukan itu ada berita acara yang ditandatangani oleh pengawas cagar budaya” (49)</p>														<p>yang sesuai dengan topik pembicaraan. Dalam data tuturan (49) Yak, sepengetahuan saya karena gedung ini kemarin saya katakan bahwa masuk dikawasan pemukiman kemarin memang dikatakan ini belum sebagai gedung cakar budaya tetapi sudah masuk kawasan pemukiman, tuturan tersebut tetap bisa dikatakan relevan dengan pertanyaan NS. Namun, tuturan HS dalam data (49) tidak ditemukan jawaban apakah memang tidak ada sistem proteksi kebakaran atau yang bisa mendeteksi kebakaran, sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim relevansi. Tuturan (49) di atas termasuk pelanggaran maksim relevansi. Namun, alasan pelanggarannya berbeda dari apa yang sudah disampaikan teori. Teori menyebutkan bahwa alasan pelanggaran maksim</p>

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice								Analisis	
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA		TTL
															relevansi adalah karena humor atau lelucon, dan penolakan. Namun ternyata, berdasarkan data tuturan (49) ditemukan alasan pelanggaran maksim relevansi disebabkan karena HS berusaha mencari alasan atau mengelak dari pertanyaan NS. Hal tersebut terjadi karena NS sudah bertanya berulang kali dengan pertanyaan yang sama namun belum di jawab oleh HS, HS selalu membahas ke hal-hal yang lain.
50	<p>NS : “Oke, pertanyaannya Pak itu belum menjawab pertanyaan saya Pak Hari, apakah ada sistem proteksi itu Pak?”</p> <p>HS : “Iya saya mau masuk ke sana” (50)</p>				✓	TIDAK TAHU JAWABAN PASTI								<p>Tuturan (50) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim cara/pelaksanaan. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban HS pada tuturan (50) yang berbicara secara tidak langsung kepada NS. Hal tersebut bertentangan</p>	

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice								Analisis	
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA		TTL
															<p>dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim cara/pelaksanaan mengharuskan setiap peserta tutur berbicara secara langsung, tidak kabur dan tidak berlebihan. Dalam tuturan (50) <i>Iya saya mau masuk ke sana</i> terlihat bahwa HS berbicara secara tidak langsung, sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim cara/pelaksanaan.</p> <p>Respons yang diberikan oleh MM pada tuturan (50) tergolong pada pelanggaran maksim cara/pelaksanaan. Namun, alasan pelanggarannya berbeda dari apa yang disampaikan teori. Teori menyebutkan bahwa alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan terjadi karena Bingung memberikan jawaban, Basa-basi dan Tuturan tidak langsung. Namun ternyata,</p>

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL	
															berdasarkan data pelanggaran maksim cara/pelaksanaan alasan pelanggaran karena HS tidak memiliki jawaban yang pasti apakah sistem proteksi benar ada atau tidak di gedung kejaksaan sehingga bertutur secara tidak langsung. Hal tersebut tergambar pada data tuturan HS (50) tidak langsung menjawab pertanyaan dari NS.
51	<p>NS : “Oke, pertanyaannya Pak itu belum menjawab pertanyaan saya Pak Hari, apakah ada sistem proteksi itu Pak?”</p> <p>HS : “Ya tentu di dalam pemeliharaan gedung itu ada proteksi terhadap keamanan gedung itu sepanjang yang saya ketahui ada istilahnya apar park</p>				✓	✓									Tuturan (51) di atas dapat dikatakan melanggar prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim cara/pelaksanaan. Dikatakan melanggar karena respons yang diberikan sangat panjang dan berbelit HS juga tidak langsung menjawab pertanyaan NS. Menurut Grice dalam maksim cara/pelaksanaan partisipan diminta bertutur secara langsung, jelas, tidak kabur,

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL	
	<p>ya, apar di tiap-tiap jarak sekian meter kemudian juga yang saya ketahui peringatan dini katakanlah sedangkan spengler karena tinggi gedung juga ruangan itu saya ketahui cukup tinggi hanya di beberapa bagian saja yang saya tau ini ya, tetapi secara umum saya tidak tau, tetapi ada seperti itu, nah nanti mungkin dari bapak damkar yang sudah melakukan itu bisa lebih lengkap lagi” (51)</p>														<p>dan berlebihan. Pelanggaran tersebut terjadi karena ketidaklangsungannya dalam berbicara. Pelanggaran yang disebabkan karena keinginan untuk berbagi informasi selain terjadi pada maksim kuantitas dan relevansi, juga terjadi pada maksim cara/pelaksanaan. Dilihat dari data tuturan (51) Alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan di atas terjadi karena HS terlihat menambah informasi dalam jawabannya. Hal tersebut regambar pada tuturan data (51) <i>Nah nanti mungkin dari bapak damkar yang sudah melakukan itu bisa lebih lengkap lagi, HS seolah melemparkan pertanyaan NS kepada Bapak damkar.</i></p>
52	NS : “Yaaaak dalam kasus seperti ini				✓		✓								Tuturan (52) di atas termasuk pada pelanggaran



NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL	
	<p>Pak Bili investigasi itu biasanya meliputi apa-apa saja?</p> <p>SG : “Yaak, jadi kalau investigasi itu kewenangan dari puslapolri ya, kalau pemadam kebakaran memang posisinya pada saat itu hanya operasi bagaimana segera tuntas kebakaran yang terjadi di TKP itu.” (52)</p>														<p>prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim cara/pelaksanaan. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban SG pada tuturan (52) yang memberikan kontribusi yang berlebihan kepada NS. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim cara/pelaksanaan mengharuskan setiap peserta tutur berbicara secara langsung, tidak kabur dan tidak berlebihan. Dalam tuturan (52) terlihat bahwa SG memberikan kontribusi yang berlebihan sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim cara/pelaksanaan. Alasan terjadinya pelanggaran maksim cara/pelaksanaan pada data (52) karena SG terlihat basa-basi kepada NS terkait</p>

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL	
															kesantunan. Hal tersebut tergambar pada kalimat <i>Jadi kalau investigasi itu kewenangan dari puslapolri ya, kalau pemadam kebakaran memang posisinya pada saat itu hanya operasi bagaimana segera tuntas.</i> SG menceritakan bahwa untuk investigasi itu bukan kewenangan dari dia melainkan kewenangan puslaporli.
53	<p>NS : “Hmm jadi anda tidak dilibatkan ni oleh, oleh puslapor tidak dimintai nasehat juga tidak dimintai masukan sebagai orang yang sehari-hari urusan dengan api?”</p> <p>SG : “Tidak Mba Nana, saya hanya melakukan tugas saya dengan mengerahkan semua anggota saya untuk turun ke TKP</p>	✓				✓									Tuturan (53) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim kuantitas. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban SG yang berlebihan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim kuantitas tidak menginginkan mitra tutur memberikan informasi yang kurang maupun

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL	
	(53)														<p>berlebihan. Dalam tuturan (53) terlihat bahwa SG berlebihan dalam menjawab pertanyaan NS yang seharusnya SG cukup menjawab sampai <i>Tidak Mba Nana</i>, karena tuturan tersebut sudah memadai untuk menjawab pertanyaan NS. Namun, pada percakapan data (53) SG menambahkan informasi berlebihan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim kuantitas.</p> <p>Alasan pelanggaran maksim kuantitas yang terjadi pada tuturan (53) di atas karena SG berbagi informasi dengan menambahkan tuturan lain di luar pertanyaan NS. Hal tersebut tergambar pada kalimat <i>Saya hanya melakukan tugas saya dengan mengerahkan semua anggota saya untuk turun ke TKP</i>. Supaya NS lebih tahu.</p> <p>Respons yang diberikan oleh MM pada</p>

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL	
															<p>tuturan (54) tergolong pada pelanggaran maksim cara/pelaksanaan. Namun, alasan pelanggarannya berbeda dari apa yang disampaikan teori. Teori menyebutkan bahwa alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan terjadi karena Bingung memberikan jawaban, Basa-basi dan Tuturan tidak langsung. Namun ternyata, berdasarkan data pelanggaran maksim cara/pelaksanaan alasan pelanggaran karena SG tidak memiliki jawaban yang pasti atas pertanyaan yang diajukan oleh NS. Hal tersebut tergambar pada data tuturan (54) <i>Memang aturannya seperti itu mungkin</i> dari kalimat tersebut kata <i>mungkin</i> adalah jawaban yang tidak pasti atau ambigu bisa iya bisa juga tidak. Seharusnya</p>

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL	
															SG cukup menjawab <i>Memang aturannya seperti itu</i> , tanpa menambahkan kata <i> mungkin</i> .
54	NS : “Kenapa ya pak? SG : “Memang aturannya seperti itu mungkin” (54)				✓	TIDAK TAHU JAWABAN PASTI									Tuturan (54) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim cara/pelaksanaan. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban SG pada tuturan (54) yang memberikan kontribusi yang taksa kepada NS. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim cara/pelaksanaan mengharuskan setiap peserta tutur berbicara secara langsung, tidak kabur, tidak taksa, dan tidak berlebih-lebihan. Dalam tuturan (54) <i>Memang aturannya seperti itu mungkin</i> terlihat bahwa

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice								Analisis	
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA		TTL
															SG memberikan kontribusi yang taksa sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim cara/pelaksanaan.
55	NS : “Ada rasa gemas mungkin, ingiin” SG : “Ya, pasti ada rasa, tapi ya manakala dibutuhkan kami siap” (55)	✓						✓							Tuturan (55) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim kuantitas. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban SG yang berlebihan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim kuantitas tidak menginginkan mitra tutur memberikan informasi yang kurang maupun berlebihan. Dalam tuturan (55) terlihat bahwa SG berlebihan dalam menjawab pertanyaan NS yang seharusnya SG cukup menjawab sampai <i>Ya pasti ada rasa</i> , karena tuturan tersebut sudah memadai untuk menjawab pertanyaan NS. Namun,

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL	
															<p>pada percakapan data (55) SG menambahkan informasi berlebihan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksimum kuantitas.</p> <p>Alasan pelanggaran maksimum kuantitas yang terjadi pada tuturan (55) di atas karena SG terlihat lebih ramah dalam menjawab pertanyaan NS. Hal tersebut tergambar pada tuturan (55) <i>Tapi ya manakala dibutuhkan kami siap.</i></p>
56	<p>NS : “Oke, saya membutuhkan anda malam ini untuk menjawab Pak, jadi kalau bapak beri tugas wewenang investigasi biasanya apa sih yang diperiksa untuk tau ini tu sebetulnya tidak wajar wajar kebakarannya.?”</p> <p>SG : “Yaa kita pasti</p>				✓	✓									<p>Tuturan (56) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksimum cara/pelaksanaan. Pelanggaran tersebut tergambar dari respons SG pada tuturan (56) respons yang diberikan oleh SG sangat panjang dan berbelit-belit bahkan SG juga menjelaskan apa yang tidak menjadi pertanyaan</p>

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL	
	nyari titik utama titik pertama dari api tu dari mana di lantai berapa dan itu kita akan telusuri, kita akan telusuri biasanya ada berkas-berkas yang memang pasti ada titik utama itu di lantai berapa, nah itu perambatannya kemana arahnya nah itu nanti kita” (56)														NS. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim cara/pelaksanaan mengharuskan setiap peserta tutur berbicara secara langsung, tidak kabur dan tidak berlebihan. Dalam tuturan (56) terlihat bahwa SG memberikan kontribusi yang berlebihan sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim cara/pelaksanaan. Pelanggaran yang disebabkan karena keinginan untuk berbagi informasi selain terjadi pada maksim kuantitas dan relevansi, juga terjadi pada maksim cara/pelaksanaan. Dilihat dari data tuturan (56) Alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan di atas terjadi karena SG menegaskan jawabannya dengan menjelaskan dan



NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL	
															menceritakan secara berkepanjangan. Hal tersebut tergambar pada data tuturan (56) <i>Kita pasti nyari titik utama titik pertama dari api tu dari mana di lantai berapa dan itu kita akan telusuri, kita akan telusuri biasanya ada berkas-berkas yang memang pasti ada titik utama itu di lantai berapa, nah itu perambatannya kemana arahnya nah itu nanti kita.</i>
57	<p>NS : “Oke saya ingin ke Bu Fatma, Buk Fatma jadi dugaan sabotase kalau memang ada itu sesungguhnya bisa ditemukan dalam penyelidikan kasus-kasus seperti ini Buk?</p> <p>FL : “Betul sekali Mba Nana, jadi kita menggunakan sains dengan mengambil sampel dari tempat</p>	✓				✓									Tuturan (57) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim kuantitas. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban FL yang berlebihan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim kuantitas tidak menginginkan mitra tutur memberikan informasi

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL	
	<p>lokasi kejadian kebakaran kemudian dibawa ke laboratorium untuk membutikan apakah disitu ada jejak-jejak apabila terjadi sabotase misalnya jejak-jejak adakah hidrokarbon karena di sebuah perkantoran tentunya jejak hidrokarbon ini tidak ada sebagai sumber bahan bakar, kalau disitu ditemukan ada jejak-jejak hidrokarbon maka ada kemungkinan di bakar, tetapi kalau itu tidak ada maka murni karena terbakar begitu. Kemudian, disamping itu juga bisa terlihat dari material-material yang merupakan sumber dari selain</p>														<p>yang kurang maupun berlebihan. Dalam tuturan (57) terlihat bahwa FL berlebihan dalam menjawab pertanyaan NS yang seharusnya FL cukup menjawab <i>Betul Mba Nana</i>, karena tuturan tersebut sudah memadai untuk menjawab pertanyaan dari NS. Namun, pada percakapan data (57) FL menambahkan kontribusi berlebihan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim kuantitas.</p> <p>Alasan pelanggaran maksim kuantitas yang terjadi pada tuturan (57) di atas karena FL memberikan informasi bahwa sabotase bisa ditemukan dalam penyelidikan menggunakan sains. Hal tersebut tergambar pada data tuturan FL (57) <i>Kita menggunakan sains dengan mengambil sampel dari tempat lokasi kejadian kebakaran</i></p>

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL	
	<p>bahan bakar kemudian juga dari sumbernya dari dimana lokasi pertama api itu bisa terjadi dari pola kebakarannya itu semua bisa ditemukan di investigasi dan didalam sebuah investigasi sebetulnya bisa saja melibatkan ahli ataupun melibatkan damkar atau melibatkan ekspert, witnes, atau saksi untuk bisa merangkum hasil investigasi tersebut secara lebih komprehensif" (57)</p>														<p>kemudian dibawa ke laboratorium untuk membutuhkan apakah disitu ada jejak-jejak apabila terjadi sabotase misalnya jejak-jejak adakah hidrokarbon karena di sebuah perkantoran tentunya jejak hidrokarbon ini tidak ada sebagai sumber bahan bakar.</p>
58	<p>NS : "Oke. Pak Hari tapi yang jelas gedung kejaksaan yang terbakar belum diasuransikan ya Pak? HS : "Sepengetahuan saya memang demikian" (58)</p>			✓		TIDAK TAHU JAWABAN PASTI									<p>Tuturan (58) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim relevansi. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban HS pada data (58) tidak memiliki relevansi dengan</p>

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice								Analisis	
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA		TTL
															<p>apa yang ditanyakan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim relevansi menginginkan supaya partisipan memberikan kontribusi yang sesuai dengan topik pembicaraan. Dalam data tuturan (58) tidak berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan NS lain yang ditanya lain pula yang dijawab sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim relevansi.</p> <p>Tuturan (58) di atas termasuk pelanggaran maksim relevansi. Namun, alasan pelanggarannya berbeda dari apa yang sudah disampaikan teori. Teori menyebutkan bahwa alasan pelanggaran maksim relevansi adalah karena humor atau lelucon, dan penolakan. Namun ternyata, berdasarkan data</p>

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice								Analisis	
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA		TTL
															tuturan (58) ditemukan alasan pelanggaran maksim relevansi disebabkan karena HS tidak tahu jawaban pasti sehingga menjawab pertanyaan NS dengan tuturan lain. Hal tersebut tergambar pada kalimat <i>Sepengetahuan saya memang demikian.</i>
59	<p>NS : “Oke. Pak Hari tapi yang jelas gedung kejaksaan yang terbakar belum diasuransikan ya Pak?”</p> <p>HS : “Sepengetahuan saya memang demikian” (59)</p>				✓	TIDAK TAHU JAWABAN PASTI								<p>Tuturan (59) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim cara/pelaksanaan. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban HS pada tuturan (59) yang memberikan kontribusi yang taksa kepada NS. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim cara/pelaksanaan mengharuskan setiap peserta tutur berbicara secara langsung, tidak kabur, tidak taksa, dan</p>	

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice								Analisis	
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA		TTL
															<p>tidak berlebihan. Dalam tuturan (59) <i>Sepengetahuan saya memang demikian</i> terlihat bahwa HS memberikan kontribusi yang taksa sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim cara/pelaksanaan.</p> <p>Respons yang diberikan oleh MM pada tuturan (59) tergolong pada pelanggaran maksim cara/pelaksanaan. Namun, alasan pelanggarannya berbeda dari apa yang disampaikan teori. Teori menyebutkan bahwa alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan terjadi karena Bingung memberikan jawaban, Basa-basi dan Tuturan tidak langsung. Namun ternyata, berdasarkan data pelanggaran maksim cara/pelaksanaan alasan pelanggaran karena HS tidak memiliki jawaban yang pasti atas pertanyaan yang diajukan oleh NS. Hal tersebut tergambar pada</p>

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice								Analisis	
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA		TTL
															data tuturan (59) <i>Sepengetahuan saya memang demikian</i> dari kalimat tersebut adalah jawaban yang tidak pasti atau ambigu bisa iya bisa juga tidak. Seharusnya HS cukup menjawab <i>Belum diansurasi</i> atau <i>sudah diansurasi</i> namun karena HS tidak tau pasti jawabannya sehingga ia menututurkan <i>Sepengetahuan saya memang demikian.</i>
60	<p>NS : “Itu karena memang sesuatu yang tidak pernah dirasa perlu atau karena lalai saja atau karena tidak sempat atau kenapa Pak?”</p> <p>HS : “Ya barang kali lalai saja, mungkin sudah beranggapan oo ini masuk cagar budaya maka pengelolaannya sesuai dengan standar yang ada di dalam pengelolaan</p>	✓				✓									Tuturan (60) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim kuantitas. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban HS yang berlebihan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim kuantitas tidak menginginkan mitra tutur memberikan informasi yang kurang maupun berlebihan. Dalam tuturan

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL	
	<p>cagar budaya, nah tadi saya katakan bahwa kenapa kami mengatakan itu cagar budaya di tahun 2018 tadi yang sudah saya sampaikan nah tentunya kalau itu masuk di dalam kawasan cagar budaya saya pikir perlakuannya juga harus memenuhi standar pengamanan untuk cagar budaya dan barang kali kami sebagai yang menempati tentu juga pemerintah provinsi DKI yang seharusnya juga peduli terhadap gedung-gedung yang sudah ditetapkan masuk di dalam kawasan itu. (60)</p>														<p>(60) terlihat bahwa HS berlebihan dalam menjawab pertanyaan NS yang seharusnya HS cukup menjawab sampai <i>Ya barang kali lalai saja</i>, karena tuturan tersebut sudah memadai untuk menjawab pertanyaan NS. Namun, pada percakapan data (60) HS menambahkan tuturan berlebihan yang tidak dibutuhkan NS sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim kuantitas.</p> <p>Alasan pelanggaran maksim kuantitas yang terjadi pada tuturan (60) di atas karena HS menambahkan informasi pendukung atas jawabannya. Hal tersebut tergambar pada data tuturan HS (60) <i>Mungkin sudah beranggapan oo ini masuk cagar budaya maka pengelolaannya sesuai dengan standar yang ada di dalam pengelolaan cagar budaya.</i></p>



NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice								Analisis	
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA		TTL
61	<p>NS : “Kawasan-kawasan cagar budaya Pak tapi gedungnya bukan, gedungnya tidak Pak”</p> <p>HS : “Dibawahnya lagi perlakuan terhadap kawasan budaya sama dengan cagar budaya makanya bacanya jangan” (61)</p>				✓	KESAL								<p>Tuturan (61) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim cara/pelaksanaan. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban HS pada tuturan (61) yang memberikan kontribusi yang taksa kepada NS. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim cara/pelaksanaan mengharuskan setiap peserta tutur berbicara secara langsung, tidak kabur, tidak taksa, dan tidak berlebih-lebihan. Dalam tuturan (61) <i>Makanya bacanya jangan</i> terlihat bahwa HS memberikan kontribusi yang taksa sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim cara/pelaksanaan.</p> <p>Respons yang diberikan oleh MM pada tuturan (61) tergolong pada pelanggaran</p>	

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis	
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL		
																<p>maksim cara/pelaksanaan. Namun, alasan pelanggarannya berbeda dari apa yang disampaikan teori. Teori menyebutkan bahwa alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan terjadi karena Bingung memberikan jawaban, Basa-basi dan Tuturan tidak langsung. Namun ternyata, berdasarkan data pelanggaran maksim cara/pelaksanaan alasan pelanggaran karena HS kesal atas pernyataan yang diberikan oleh NS. Hal tersebut tergambar pada data tuturan (61) <i>Dibawahnya lagi perlakuan terhadap kawasan budaya sama dengan cagar budaya makanya bacanya jangan</i>, dari kalimat tersebut HS terlihat kesal yang ditandai pada kalimat <i>makanya bacanya jangan</i>. Tuturan tersebut tidak dituturkan sampai selesai sehingga menggantung <i>jangan</i> apa?</p>

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice								Analisis	
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA		TTL
						MENGELAK/MENCARI ALASAN									
62	<p>NS : “Jadi artinya tidak perlu di asuransi”</p> <p>HS : “Nah contohnya tadi saya katakan di 2018 tadi kita katakan mau direnovasi di tegur itu ditandatangani oleh pengawas cagar budaya nah siapa yang seharusnya mengansuransikan, ha itu kira-kira” (62)</p>				✓	MENGELAK/MENCARI ALASAN								<p>Tuturan (62) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim cara/pelaksanaan. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban HS pada tuturan (62) yang memberikan kontribusi yang berlebihan kepada NS. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim cara/pelaksanaan mengharuskan setiap peserta tutur berbicara secara langsung, tidak kabur dan tidak berlebihan. Dalam tuturan (62) terlihat bahwa HS memberikan kontribusi yang berlebihan sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim cara/pelaksanaan.</p> <p>Respons yang diberikan oleh MM pada tuturan (62) tergolong pada pelanggaran</p>	

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice								Analisis	
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA		TTL
															maksim cara/pelaksanaan. Namun, alasan pelanggaran berbeda dari apa yang disampaikan teori. Teori menyebutkan bahwa alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan terjadi karena Bingung memberikan jawaban, Basa-basi dan Tuturan tidak langsung. Namun ternyata, berdasarkan data pelanggaran maksim cara/pelaksanaan alasan pelanggaran karena HS terlihat menghindari dari pertanyaan NS. Hal tersebut tergambar pada tuturan 2018 tadi kita katakan mau direnovasi di tegur itu ditandatangani oleh pengawas cagar budaya nah siapa yang seharusnya mengansuransikan.
63	NS : “Hmm oke tapi yang jelas sekarang karena tidak di			✓										KESAL	Tuturan (63) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice.

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice								Analisis	
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA		TTL
	<p>asuransi maka kerugiannya ini kalau dari direktur jendral kekayaan negara itu nilai gedungnya 161 milyar Pak dan itu akan masuk ke APBN di 2021 kalau sekarang katanya belum di anggarkan jadi memang ini kerugian yang kerugian yang besar, kerugian yang besar”</p> <p>BS : “Ya tapi bagaimana mungkin meminta orang lain peduli anda sendiri tidak peduli Pak Hari? (63)</p>														<p>Maksim yang dilanggar adalah maksim relevansi. Pelanggaran tersebut tergambar dari tuturan BS pada data (63) yang tidak relevan dengan topik pembicaraan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim relevansi menginginkan supaya partisipan memberikan kontribusi yang sesuai dengan topik pembicaraan. Dalam data tuturan (63) tidak berkaitan dengan pembahasan yang sedang dibicarakan sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim relevansi.</p> <p>Tuturan (63) di atas termasuk pelanggaran maksim relevansi. Namun, alasan pelanggarannya berbeda dari apa yang sudah disampaikan teori. Teori menyebutkan bahwa alasan pelanggaran maksim relevansi adalah karena</p>

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice								Analisis	
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA		TTL
															humor atau lelucon, dan penolakan. Namun ternyata, berdasarkan data tuturan (63) ditemukan alasan pelanggaran maksim relevansi disebabkan karena BS terlihat kesal terhadap jawaban HS. Hal tersebut tergambar pada kalimat <i>Ya tapi bagaimana mungkin meminta orang lain peduli anda sendiri tidak peduli Pak Hari?</i>
64	<p>BS : “Bukan, infeksi keselamatan itu lo, saya hanya kapan terakhir dilakukan? Itu aja”</p> <p>HS : “Ya, oleh karena itu kami akan lakukan cek itu” (64)</p>			✓		PEMBELAAN DIRI								Tuturan (64) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim relevansi. Pelanggaran tersebut tergambar dari tuturan HS pada data (64) yang tidak relevan dengan topik pembicaraan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim relevansi menginginkan supaya partisipan memberikan kontribusi yang sesuai	

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice								Analisis	
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA		TTL
															<p>dengan topik pembicaraan. Dalam data tuturan (64) tidak berkaitan dengan pertanyaan yang diberikan oleh BS sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim relevansi.</p> <p>Tuturan (64) di atas termasuk pelanggaran maksim relevansi. Namun, alasan pelanggarannya berbeda dari apa yang sudah disampaikan teori. Teori menyebutkan bahwa alasan pelanggaran maksim relevansi adalah karena humor atau lelucon, dan penolakan. Namun ternyata, berdasarkan data tuturan (64) ditemukan alasan pelanggaran maksim relevansi disebabkan karena HS melakukan pembelaan terhadap dirinya atas apa yang telah ia sampaikan. Hal tersebut tergambar pada kalimat <i>Ya, oleh karena itu kami</i></p>

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice								Analisis		
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA		TTL	
																akan lakukan cek itu, jawaban HS tersebut menandakan bahwa ia tidak memahami pertanyaan BS karena lain yang ditanya lain pula jawaban.
65	<p>NS : “Yak kebakaran gedung kejaksaan memicu spekulasi terkait penanganan kasus Djoko Tjandra yang melibatkan jaksa Pinangki, selain nara sumber di studio kita sudah terhubung dengan ketua komisi kejaksaan Barita Simanjuntak, selamat malam Pak Barita.</p> <p>PB : “Selamat malam Mba Nana, selamat malam Pak Arsep, Pak Mas Boyamin, Mas kurnia. (65)</p>	✓						✓								<p>Tuturan (65) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim kuantitas. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban PB yang berlebihan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim kuantitas tidak menginginkan mitra tutur memberikan informasi yang kurang maupun berlebihan. Dalam tuturan (65) terlihat bahwa PB berlebihan dalam menjawab pertanyaan NS yang seharusnya PB cukup menjawab <i>Selamat malam Mba Nana</i>. Namun pada percakapan di atas, PB menambahkan ucapan</p>



NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL	
															<p><i>Selamat malam Pak Arsep, Pak Mas Boyamin, Mas Kurnia yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim kuantitas.</i></p> <p><i>Alasan pelanggaran maksim kuantitas yang terjadi pada tuturan (65) di atas karena PB ingin terlihat lebih ramah. Hal tersebut tegambar pada tuturan PB yang memberikan penambahan informasi yang tidak dibutuhkan oleh NS yaitu Selamat malam Pak Arsep, Pak Mas Boyamin, Mas kurnia pada tuturan tersebut menunjukkan keramahan karena menyapa orang lain selain NS.</i></p>
66	NS : “Baik sebelum ke anda saya mau ke maki dulu Bonyamin yang sejak awal mengawal kasus ini, apa <i>to the point</i> . Jadi anda tidak	✓								✓					<p>Tuturan (66) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim kuantitas. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban BS yang berlebihan. Hal</p>

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL	
	<p>percaya jaksa Pinangki bekerja sendirian pasti ada orang lain yang terlibat.</p> <p>BS : “Iyalah, masak dalam konteks itu menerima suap pemberi gak ada, ini ngarangnya bukan main ini kejaksaan agung ini. (66)</p>														<p>tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim kuantitas tidak menginginkan mitra tutur memberikan informasi yang kurang maupun berlebihan. Dalam tuturan (66) terlihat bahwa BS berlebihan dalam menjawab pertanyaan NS yang seharusnya BS cukup menjawab sampai <i>Iyalah</i>. Namun pada percakapan data (66) BS menambahkan ucapan <i>Masak dalam konteks itu menerima suap pemberi gak ada, ini ngarangnya bukan main ini kejaksaan agung ini</i> yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim kuantitas.</p> <p>Alasan pelanggaran maksim kuantitas yang terjadi pada tuturan (66) di atas karena informasi yang diberikan BS tidak mendukung tuturan NS.</p>

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis	
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL		
																Hal tersebut tergambar pada data tuturan (66) <i>Masak dalam konteks itu menerima suap pemberi gak ada, ini ngarangnya bukan main ini kejaksanaan agung ini.</i> Kalimat tersebut menandakan bahwa BS menolak pernyataan NS.
67	<p>NS : “Bukan yang memberi, maksud saya apakah mungkin jaksa eslon empat bisa bertemu dengan buron kakap dan menjanjikan macam-macam sampai menjanjikan fatwa.</p> <p>BS : “Ya sementara ini masih apa, istilah saya kepandaian Pinangki itu aja mancatut banyak orang (67)</p>			✓		KESAL									<p>Tuturan (67) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim relevansi. Pelanggaran tersebut tergambar dari tuturan BS pada data (67) yang tidak relevan dengan pertanyaan NS. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim relevansi menginginkan supaya partisipan memberikan kontribusi yang sesuai dengan topik pembicaraan. Dalam data tuturan (67) <i>Ya sementara ini masih apa, istilah saya kepandaian</i></p>	

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis		
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL			
																	<p><i>Pinangki itu aja mancatut banyak orang, tuturan tersebut tetap bisa dikatakan relevan dengan pertanyaan NS. Namun, tidak ditemukannya jawaban apakah mungkin jaksa eslon empat bisa bertemu dengan buron kakap dan menjanjikan macam-macam sampai menjanjikan fatwa, sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim relevansi.</i></p> <p>Alasan pelanggaran maksim relevansi yang terjadi pada tuturan (67) karena BS menghindari tuturan langsung, menjawab pertanyaan NS dengan tuturan lain . Hal tersebut tergambar pada kalimat <i>Istilah saya kepandaian Pinangki itu aja mancatut banyak orang.</i></p>
68	BS : “Ya sementara ini masih apa, istilah saya kepandaian				✓										✓		Tuturan (68) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice.

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis				
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL					
	Pinangki itu aja mancatut banyak orang” atau, atau” (68) NS : “Mencatut atau, atau” (68)																		Maksim yang dilanggar adalah maksim cara/pelaksanaan. Pelanggaran tersebut tergambar dari respons NS pada tuturan (68) yang memberikan kontribusi yang taksa kepada BS. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim cara/pelaksanaan mengharuskan setiap peserta tutur berbicara secara langsung, tidak kabur dan tidak berlebih-lebihan. Dalam tuturan (68) terlihat bahwa NS memberikan kontribusi yang taksa sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim cara/pelaksanaan. Alasan terjadinya pelanggaran maksim cara/pelaksanaan pada data (68) karena NS bertutur secara tidak langsung. Hal tersebut tergambar pada tuturan <i>Mencatut atau, atau</i>

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL	
															NS bertutur menggantung segingga tuturannya tidak sampai sehingga tuturannya menjadi taksa <i>mecatut</i> atau apa yang dimaksud. Fatmawati (2020:154—156) mengatakan bahwa salah satu alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan adalah berkaitan dengan tuturan yang disampaikan secara tidak langsung.
69	NS : “Mecatut atau, atau” BS : “Ya itu nanti bisa anu dimaknai ke kanan dan ke kiri gitu” (69)		✓			MENGELAK/MENCARI ALASAN									Tuturan (69) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim kualitas. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban BS menyebutkan yang tidak sebenarnya. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim kualitas mewajibkan setiap peserta percakapan mengatakan hal yang sebenarnya, didasarkan pada bukti-bukti

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL	
															<p>yang memadai. Jawaban yang diberikan BS dalam data (69) <i>Bisa anu dimaknai ke kanan dan ke kiri gitu</i>, merupakan jawaban yang tidak sebenarnya, mana bisa kasus korupsi dimaknai ke kanan dan ke kiri. Hal tersebut menyebabkan pelanggaran terhadap maksim kualitas.</p> <p>Tuturan (69) di atas termasuk pelanggaran maksim kualitas. Namun, alasan pelanggarannya berbeda dari apa yang sudah disampaikan teori. Teori menyebutkan bahwa alasan pelanggaran maksim kualitas adalah karena humor atau lelucon, dan penolakan. Namun ternyata, berdasarkan data (69) ditemukan alasan pelanggaran maksim kualitas disebabkan karena BS mengelak atau mencari alasan dalam merespons</p>

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice								Analisis	
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA		TTL
															pertanyaan NS. Hal tersebut tergambar pada kalimat <i>Bisa anu dimaknai ke kanan dan ke kiri gitu.</i>
70	<p>NS : “Anda jadi hati-hati ni Pak Bonyamin”</p> <p>BS : “Ya kan nanti kan bisa menjadi bersedia dicabut kan ada, kan gitu kan malah udah cabut aja nama ku juga ada nanti, itu lo jadi artinya bukan hati-hati kan saya harus koridor hukum karena sebagai detektek patikelir begitu jadi ya harus pada posisi meskipun saya sejak awal kalimat dugaan tapi lebih banyak terbukti gitu lo.(70)</p>				✓	MENGELAK/MENCARI ALASAN								<p>Tuturan (70) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim cara/pelaksanaan. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban BS pada tuturan (70) yang memberikan kontribusi yang tidak jelas, kabur serta berlebihan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim cara/pelaksanaan mengharuskan setiap peserta tutur berbicara secara langsung, tidak kabur dan tidak berlebihan. Dalam tuturan (70) terlihat bahwa BS memberikan kontribusi yang tidak jelas, taksa dan berlebihan, sehingga menyebabkan terjadinya</p>	



NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis	
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL		
																<p>pelanggaran terhadap maksim cara/pelaksanaan.</p> <p>Respons yang diberikan oleh MM pada tuturan (70) tergolong pada pelanggaran maksim cara/pelaksanaan. Namun, alasan pelanggarannya berbeda dari apa yang disampaikan teori. Teori menyebutkan bahwa alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan terjadi karena Bingung memberikan jawaban, Basa-basi dan Tuturan tidak langsung. Namun ternyata, berdasarkan data pelanggaran maksim cara/pelaksanaan alasan pelanggaran karena BS mencari alasan berusaha menghindar. Hal tersebut tergambar pada data kalimat <i>Kan gitu kan malah udah cabut aja nama ku juga ada nanti, itu lo jadi artinya bukan hati-hati kan saya harus koridor hukum</i></p>

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice								Analisis	
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA		TTL
															<i>karena sebagai detektek patikelir begitu jadi ya harus pada posisi meskipun saya sejak awal kalimat dugaan tapi lebih banyak terbukti gitu lo.</i>
71	<p>NS : “Oke karena kan kemudian ada dokumen yang menyebut bahwa melapor ke jaksa agung dua kali soal pertemuannya menggelar video call dan sebagainya, ee itu, itu sesuatu yang memang hasil temuan anda juga ya terjadi atau bagaimana?”</p> <p>BS : “Gak itu temuan tempo kalau itu saya mengakui karena, saya posisi bahwa Pinangki itu memang pergi keluar negeri terus kemudian Djoko Tjandra itu pasti tidak mudah</p>				✓	MENYANGKAL								<p>Tuturan (71) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim cara/pelaksanaan. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban BS pada tuturan (71) yang memberikan kontribusi yang berlebihan kepada NS. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim cara/pelaksanaan mengharuskan setiap peserta tutur berbicara secara langsung, tidak kabur dan tidak berlebihan. Dalam tuturan (71) terlihat bahwa BS memberikan kontribusi yang berlebihan, sehingga</p>	

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice								Analisis	
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA		TTL
	<p>percaya seorang jaksa yang bukan bidangnya eslonnya bawah terus kemudian bisa dipercaya oleh Djoko Tjhandra tanpa sesuatu yang akan diberitahukan dia, baik secara rahasia maupun secara terbuka kepada Djoko Tjhandra bahwa saya itu begini lo dekat dengan A dekat dengan B itu, sehingga saya akan bisa memberikan bantuan kepada anda bebas dari hukum untuk mengajukan permohonan fatwa, permohonan fatwa ini akan didukung dari sisi yang kemudian bisa jadi akan didukung oleh instansinya dia, dan dia bisa mencatat level tertinggi, nah</p>														<p>menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim cara/pelaksanaan. Respons yang diberikan oleh MM pada tuturan (71) tergolong pada pelanggaran maksim cara/pelaksanaan. Namun, alasan pelanggarannya berbeda dari apa yang disampaikan teori. Teori menyebutkan bahwa alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan terjadi karena Bingung memberikan jawaban, Basa-basi dan Tuturan tidak langsung. Namun ternyata, berdasarkan data pelanggaran maksim cara/pelaksanaan alasan pelanggaran karena BS membantah pernyataan NS. Hal tersebut tergambar pada data tuturan (71) <i>Gak itu temuan tempo kalau itu saya mengakui.</i></p>

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice								Analisis			
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA		TTL		
	tapi mencatat itu bisa juga memang, bersedia dicatat atau malah menyuruh dicatat kan begitukan. (71)																
72	<p>BS : “Penanganan perkara korupsikan cepat utamakan dari yang lain”</p> <p>HS : “Kan tidak boleh omongan di warung kopi kemudian jadi berkas kemudian dipaksakan untuk menjadi berkas kan alat bukti Pak” (72)</p>			✓							✓						<p>Tuturan (72) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim relevansi. Pelanggaran tersebut tergambar dari tuturan HS pada data (72) yang tidak relevan dengan topik pembicaraan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim relevansi menginginkan supaya partisipan memberikan kontribusi yang sesuai dengan topik pembicaraan. Dalam data tuturan (72) tidak berkaitan dengan pertanyaan yang diberikan oleh BS sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim relevansi.</p> <p>Alasan pelanggaran</p>

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice										Analisis	
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL			
																	maksim relevansi yang terjadi pada tuturan (72) karena HS terlihat merespon pernyataan BS dengan candaan. Hal tersebut tergambar pada data tuturan (72) <i>Kan tidak boleh omongan di warung kopi kemudian jadi berkas kemudian dipaksakan untuk menjadi berkas kan alat bukti Pak.</i>
73	HS : “Nana boleh saya jawab ya, saya belum selesai dalam penanganan perkara itukan bai proses tgl 4 diserahkan bidang pengawasan tgl 7 kalau tidak salah penyidikan tgl 11 ditangkap 12 ditahan. Kemudian untuk memanggil memeriksa seseorang siapa kawan berbuat kemudian pemberinya siapa		✓			SINDIRAN										Tuturan (73) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim kualitas. Pelanggaran tersebut tergambar dari pernyataan BS menyebutkan yang tidak sebenarnya. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim kualitas mewajibkan setiap peserta percakapan mengatakan hal yang sebenarnya, didasarkan pada bukti-bukti yang	

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice								Analisis	
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA		TTL
	<p>inikan bai proses artinya apa ketika seseorang di panggil menggunakan haknya tidak adil tentukan bai proses dan hari ini kita periksa 3 orang termasuk Djoko Tjandra kemudian juga dari Garuda juga dari salah satu diluar mobil BMW oleh karena itu tolong dukung kami berikan masukan kami dan kami akan buktikan itu.</p> <p>BS : “Misalnya berandai-andai Pak, berandai inikan sebenarnya bisa jadi penyidiknya pengen cepat terus kemudian ada tangan-tangan tidak terlihat atau tangan-tangan yang lebih kuat meminta untuk tidak cepat-cepat</p>														<p>memadai. Pernyataan yang diberikan BS dalam data (73) <i>Tangan-tangan tidak terlihat atau tangan-tangan yang lebih kuat</i>, merupakan respons yang tidak sebenarnya, mana ada tangan yang tidak terlihat semua tangan pasti terlihat. Hal tersebut menyebabkan pelanggaran terhadap maksim kualitas.</p> <p>Alasan pelanggaran maksim kualitas dalam data (73) tersebut karena BS menggunakan kata sindiran. Hal tersebut tergambar dari tuturan BS pada data (73) yaitu ada <i>Tangan-tangan tidak terlihat atau tangan-tangan yang lebih kuat</i>. Kalimat tersebut dituturkan supaya HS berpikir dengan sindiran yang diberikan oleh BS. Maksud dari kalimat sindiran tersebut adalah orang yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi.</p>

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice								Analisis			
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA		TTL		
	ada gak Pak? Ini” (73)																
74	<p>NS : “Iyaaak saya ingin ke Pak Barita komisi kejaksaan, perlu ditekankan jadi ini komisi kejaksaan komisi independen yang memang sejak awal menerima laporan masyarakat dan berniat memeriksa jaksa Pinangki tetapi kemudian dikatakan tidak perlu diperiksa karena sudah diperiksa internal dan sampai sekarang juga masih belum dapat akses untuk memeriksa langsung jaksa Pinangki, begitu Pak Barita?</p> <p>PB : “Yak betul, tapi saya perlu sampaikan bahwa kami melaksanakan</p>	✓				✓											<p>Tuturan (74) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim kuantitas. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban PB yang berlebihan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim kuantitas tidak menginginkan mitra tutur memberikan informasi yang kurang maupun berlebihan. Dalam tuturan (74) terlihat bahwa PB berlebihan dalam menjawab pertanyaan NS yang seharusnya PB cukup menjawab sampai <i>Yak betul</i>, karena tuturan tersebut sudah memadai untuk menjawab pertanyaan NS. Namun pada percakapan data (74) PB menambahkan kontribusi berlebihan yang tidak dibutuhkan oleh NS</p>

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL	
	<p>pasal 4 A peraturan presiden NO 18 tahun 2011 yang mengatakan wewenang komisi kejaksaan adalah menerima dan menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat tentang kinerja dan perilaku jaksa dalam melakukan tugas dan wewenangnya. Itu makanya kami mengundang untuk didengarkan penjelasan dan keterangannya kami belum masuk tahapan pemeriksaan masih meminta penjelasan dan keterangan, itu perlu di sampaikan sehingga klir buat kita bahwa komisi kejaksaan melakukan tugasnya</p>														<p>yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim kuantitas. Alasan pelanggaran maksim kuantitas yang terjadi pada tuturan (74) di atas karena BS terlihat menambahkan tuturan lain di luar pertanyaan yang diajukan oleh NS. Hal tersebut tergambar pada data tuturan (74) Tapi saya perlu sampaikan bahwa kami melaksanakan pasal 4 A peraturan presiden NO 18 tahun 2011 yang mengatakan wewenang komisi kejaksaan adalah menerima dan menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat tentang kinerja dan perilaku jaksa dalam melakukan tugas dan wewenangnya. Kalimat tersebut dituturkan supaya NS mendapatkan informasi yang lengkap.</p>



NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice										Analisis	
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL			
	berdasarkan peraturan presiden Mbak Nana. (74)																
75	<p>NS : “Pak Barita, apakah mendapatkan akses itu, karena tadi di awal pak Mahfud MD mengatakan bahwa seharusnya komisi kejaksaan bisa juga mendapatkan akses tidak perlu menunggu 2 minggu untuk mendapatkan laporan, apakah memang merasa ada ketidak ada tertupi kejaksaan agung tidak membuka ke komisi kejaksaan, betulkah kesan itu?”</p> <p>PB : “Iya, karena pertama kami mengundang oknum jaksa P itu tanggal 27 juli tidak datang tanpa alasan tanggal 30 juli kami undang</p>	✓											✓				<p>Tuturan (75) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim kuantitas. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban PB yang berlebihan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim kuantitas tidak menginginkan mitra tutur memberikan informasi yang kurang maupun berlebihan. Dalam tuturan (75) terlihat bahwa PB berlebihan dalam menjawab pertanyaan NS yang seharusnya PB cukup menjawab sampai <i>Iya</i>, karena tuturan tersebut sudah memadai untuk menjawab pertanyaan dari NS. Namun, pada percakapan data (75) PB menambahkan kontribusi berlebihan yang tidak</p>

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL	
	<p>kedua juga tidak datang. Namun kami mendapatkan surat dari atasannya bahwa karena pemeriksaan pengawasan sudah berjalan sehingga artinya komisi kejaksaan tidak perlu memeriksa lagi. Itu sebabnya sesuai dengan pasal 4 C peraturan presiden kami meminta laporan hasil pemeriksaannya sebab itu wewenang komisi kalau kami tidak bisa periksa. Kasih dong mana LHP nya karena LHP ini diperlukan supaya kami bisa menjawab ini maki, Mas Bonyamin inikan kejar terus ni, mana hak dia itu sebagai pelapor harus kita</p>														<p>dibutuhkan oleh NS yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim kuantitas.</p> <p>Alasan pelanggaran maksim kuantitas yang terjadi pada tuturan (75) di atas karena BS menambahkan tuturan lain dengan menceritakan hal-hal di luar pertanyaan yang diajukan oleh NS, itu dilakukan oleh BS supaya terlihat lebih akrab. Hal tersebut tergambar pada data tuturan (75) <i>Karena pertama kami mengundang oknum jaksa P itu tanggal 27 juli tidak datang tanpa alasan tanggal 30 Juli kami undang kedua juga tidak datang.</i></p>

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis		
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL			
	sampaikan untuk memberi jawaban itu kami harus membutuhkan dokumen itu. (75)																
76	<p>NS : “Baik, Pak Barita silahkan, karena kemudian ini juga bisa menjadi preseden menunjukkan bahwa memang ada keengganan dari kejaksaan agung untuk diperiksa atau diawasi oleh pihak independen.”</p> <p>BS : “Buka aja Pak Barita” (76)</p>			✓		MEMERINTAH									<p>Tuturan (76) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim relevansi. Pelanggaran tersebut tergambar dari tuturan BS pada data (76) yang tidak relevan dengan topik pembicaraan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim relevansi menginginkan supaya partisipan memberikan kontribusi yang sesuai dengan topik pembicaraan. Dalam data tuturan (76) tidak berkaitan dengan pertanyaan yang diberikan oleh NS. BS mengatakan <i>Buka aja Pak Barita</i> dari tuturan tersebut tidak tau apa yang dibuka, sehingga menyebabkan terjadinya</p>		

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice								Analisis	
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA		TTL
															pelanggaran terhadap maksim relevansi. Tuturan (76) di atas termasuk pelanggaran maksim relevansi. Namun, alasan pelanggarannya berbeda dari apa yang sudah disampaikan teori. Teori menyebutkan bahwa alasan pelanggaran maksim relevansi adalah karena humor atau lelucon, dan penolakan. Namun ternyata, berdasarkan data tuturan (76) ditemukan alasan pelanggaran maksim relevansi disebabkan karena BS memerintah PB untuk menjelaskan semua perkaranya. Hal tersebut tergambar pada kalimat <i>Buka aja Pak Barita</i> .
77	NS : “Pak Barita waktu saya mepet sekali, boleh langsung jawab <i>to the point</i> saja Pak, karena saya mau membahas yang			✓		MENEGASKAN								Tuturan (77) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim relevansi. Pelanggaran tersebut tergambar dari tuturan PB	

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice								Analisis	
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA		TTL
	<p>lain, betul atau tidak itu tidak bisa memanggil jampidung?</p> <p>PB : “Nah selanjutnya kamikan menindak lanjuti supaya kami mengundang meminta keterangan kepada kejaksaan tinggi direktur DPWEL dan aspidung DKI itu yang kami tidak lagi di ijinakan untuk kami mintai keterangan” (77)</p>														<p>pada data (77) yang tidak relevan dengan topik pembicaraan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim relevansi menginginkan supaya partisipan memberikan kontribusi yang sesuai dengan topik pembicaraan. Dalam data tuturan (77) tidak berkaitan dengan pertanyaan yang diberikan oleh NS sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim relevansi.</p> <p>Alasan pelanggaran maksim relevansi yang terjadi pada tuturan (77) terlihat PB menegaskan jawabannya. Hal tersebut tergambar pada kalimat <i>Nah selanjutnya kamikan menindak lanjuti supaya kami mengundang meminta keterangan kepada kejaksaan tinggi direktur DPWEL dan aspidung DKI</i></p>

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice								Analisis	
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA		TTL
															<i>itu yang kami tidak lagi di ijinakan untuk kami mintai keterangan</i>
78	<p>NS : “Oke, berarti betul ya, berarti betul kalau begitu sekarang Pak Hari tolong dijawab karena ini tanda-tanda dulu tidak mau sekarang tidak mau dibuka anda tadi bilang percayakanlah kepada kejaksaan, bagaimana mau percaya kalau ada keengganan seperti ini Pak Hari?</p> <p>HS : “Yak baik, memang betul ada perpres 18 tahun 2011 tentang komisi kejaksaan di pasal 4 tadi juga disampaikan komisi kejaksaan berwenang menerima laporan dan menindaklanjuti</p>				✓	✓									<p>Tuturan (78) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim cara/pelaksanaan. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban HS pada tuturan (78) respons yang diberikan oleh HS sangat panjang dan juga berbelit-belit. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim cara/pelaksanaan mengharuskan setiap peserta tutur berbicara secara langsung, tidak kabur dan tidak berlebihan. Dalam tuturan (78) terlihat bahwa HS memberikan kontribusi yang runtut dan berkepanjangan sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran</p>

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL	
	<p>tetapi perpres tersebut ada tambahannya mungkin Pak Ketua komisi kejaksaan belum menyampaikan tadi saya sampaikan ada MOYU antara komisi kejaksaan dengan bidang pengawasan kalau tidak atau dengan kejaksaan jadi apabila ada laporan pengaduan yang ditujukan ke komisi kejaksaan itu komisi kejaksaan melakukan rapat kalau tidak salah yang saya baca untuk menyerahkan kepada bidang pengawasan atau kejaksa agung untuk dilakukan pemeriksaan oleh bidang pengawasan. Apabila dalam pemeriksaan itu</p>														<p>terhadap maksim cara/pelaksanaan. Pelanggaran yang disebabkan karena keinginan untuk berbagi informasi selain terjadi pada maksim kuantitas dan relevansi, juga terjadi pada maksim cara/pelaksanaan. Dilihat dari data tuturan (78) Alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan di atas terjadi karena HS menambahkan tuturan lain di luar pertanyaan yang diajukan oleh NS. Hal tersebut tergambar pada data tuturan (78) <i>Memang betul ada perpres 18 tahun 2011 tentang komisi kejaksaan di pasal 4 tadi juga disampaikan komisi kejaksaan berwenang menerima laporan dan menindaklanjuti tetapi perpres tersebut ada tambahannya mungkin Pak Ketua komisi kejaksaan belum menyampaikan tadi saya sampaikan ada MOYU antara komisi kejaksaan dengan bidang</i></p>

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis	
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL		
	tidak sempurna dan sebagainya maka komisi kejaksaan bisa mengambil alih atau menambahi seperti yang disampaikan oleh Pak Bonyamin tadi dan seterusnya, itu kira-kira.” (78)															<i>pengawasan.</i>
79	HS : “Mudah-mudahan ndak lah, mudah-mudahan ndak” BS : “Berarti boleh masuk? (79)				✓		✓									Tuturan (79) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim cara/pelaksanaan. Pelanggaran tersebut tergambar dari respons BS pada tuturan (79) yang memberikan kontribusi yang taksa. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim cara/pelaksanaan mengharuskan setiap peserta tutur berbicara secara langsung, tidak kabur, tidak taksa, dan tidak berlebih-lebihan. Dalam tuturan (79) <i>Berarti</i>



NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice								Analisis	
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA		TTL
															<i>boleh masuk</i> terlihat bahwa BS memberikan kontribusi yang taksa dalam tuturan tersebut tidak jelas yang dimaksud boleh masuk itu apa, sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim cara/pelaksanaan.
80	<p>HS : “Nah itu tadi tergantung pimpinan dalam arti Pak Barita Simanjuntak untuk berkomunikasi”</p> <p>KR : “Jadi semua menutup diri Mbak nana, ada menutup diri tentang komisi kejaksaan, tidak pernah mengundang KPK untuk melakukan gelar perkara jadi klir sekali kejaksaan agung ingin melokalisir kasus jaksa Piangki Sirna Malasari” (80)</p>		✓			SINDIRAN								<p>Tuturan (80) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim kualitas. Pelanggaran tersebut tergambar dari pernyataan KR menyebutkan yang tidak sebenarnya. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim kualitas mewajibkan setiap peserta percakapan mengatakan hal yang sebenarnya, didasarkan pada bukti-bukti yang memadai. Pernyataan yang diberikan KR dalam data (80) <i>Jadi semua menutup diri Mbak Nana, ada menutup diri tentang komisi</i></p>	

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL	
															<p><i>kejaksaan</i>, merupakan respons yang tidak sebenarnya, apa yang dimaksud menutup diri. Hal tersebut menyebabkan pelanggaran terhadap maksim kualitas.</p> <p>Alasan pelanggaran maksim kualitas dalam data (80) tersebut karena KR menggunakan kata sindiran. Hal tersebut tergambar dari tuturan KR pada data (80) yaitu ada <i>Jadi semua menutup diri Mbak Nana, ada menutup diri tentang komisi kejaksaan</i>. Kalimat tersebut dituturkan supaya HS berpikir dengan sindiran yang diberikan oleh KR. Maksud pada kalimat sindiran tersebut adalah orang yang tidak bertanggung jawab atas tugas-tugas yang harus dilakukannya.</p>
81	NS : “Oke, apakah akan ada rencana memeriksa internal	✓				✓									Tuturan (81) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice.

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL	
	<p>kejaksanaan sendiri, apakah misalnya akan memeriksa jaksa agungnya sendiri karena namanya disebut-sebut akan memeriksa mantan jam intel Janmarinka karena namanya disebut-sebut?</p> <p>HS : “Yak, sebagaimana kita ketahui bahwa sudah ada penyidikan terhadap jaksa PSM tentu penyidikan akan lebih kuat apakah diperoleh dari keterangan para saksi ataupun tersangka untuk mengait ke masalah itu oleh karena itu ini sudah cukup kuat sudah dilakukan penyidikan saya kira itu lebih dipertekankan. (81)</p>														<p>Maksim yang dilanggar adalah maksim kuantitas. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban HS yang berlebihan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim kuantitas tidak menginginkan mitra tutur memberikan informasi yang kurang maupun berlebihan. Dalam tuturan (81) terlihat bahwa HS berlebihan dalam menjawab pertanyaan NS yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim kuantitas.</p> <p>Alasan pelanggaran maksim kuantitas yang terjadi pada tuturan (81) di atas karena BS menambahkan tuturan lain diluar pertanyaan. Hal tersebut tergambar pada data tuturan (81) <i>Kita ketahui bahwa sudah ada penyidikan terhadap jaksa</i></p>

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis		
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL			
																	<p><i>PSM tentu penyidikan akan lebih kuat apakah diperoleh dari keterangan para saksi ataupun tersangka untuk mengait ke masalah itu oleh karena itu ini sudah cukup kuat sudah dilakukan penyidikan saya kira itu lebih dipertekankan. Kalimat tersebut dituturkan supaya NS lebih tahu.</i></p>
82	<p>HS : “Yak, yaak menurut kami itu ada namanya korsup, saya pikir semua terbuka, semua terbuka dan mudah-mudahan kedepan juga seperti itu harapan kita”.</p> <p>BS : “Nana sebagai sama-sama barangkali santrinya Gusbahaudin Nursalim rembang ini saya kembalikan ke spiritual jadi kebakaran itu bisa</p>			✓									✓				<p>Tuturan (82) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim relevansi. Pelanggaran tersebut tergambar dari tuturan BS pada data (82) yang tidak relevan dengan topik pembicaraan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim relevansi menginginkan supaya partisipan memberikan kontribusi yang sesuai dengan topik pembicaraan. Dalam data tuturan (82)</p>

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL	
	<p>jadi tanda kutip karena doa kita ini hanya berdoa memohon keselamatan tapi tindakan-tindakan kita bukan bagian dari doa, bukan bagian dari menjalankan tugas ini bukan bagian dari doa artinya apa kalau doa, berarti tulus melakukan tugasnya tulus keterbukaan, tulus untuk kebaikan dan kebaikan negeri ini juga sebagai bendera saya yang merah putih saya melakukan ini sebagai sumbangsih saya kepada negara ini untuk tidak runtuh Pak. Jadi, inilah kejaksan agung nampaknya doanya itu hanya doa memohon keselamatan tapi</p>														<p>tidak berkaitan dengan topik pembicaraan sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim relevansi.</p> <p>Pelanggaran yang disebabkan karena keakraban tidak hanya terjadi pada maksim kuantitas. Akan tetapi, setelah diteliti pada data (82) ditemukan bahwa keakraban juga menjadi alasan terjadinya pelanggaran maksim relevansi. Alasan keakraban itu karena BS menambah topik pembicaraan supaya lebih bersosialisasi dan terlihat lebih akrab. Hal tersebut tergambar pada kalimat <i>Nana sebagai sama-sama barangkali santrinya Gusbahaudin Nursalim rembang ini saya kembalikan ke spiritual jadi kebakaran itu bisa jadi tanda kutip karena doa kita ini hanya berdoa memohon keselamatan tapi tindakan-tindakan kita bukan bagian dari doa.</i></p>

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis	
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL		
	tidak disertai dengan doa-doa yang melakukan tugas dengan tulus dengan kebaikan tidak ada selingkuh, selingkuh arti luas arti sempit itu, sehingga cctv itu khawatir saya dibakar atau terbakar karena ada selingkuh baik arti luas maupun arti sempit, demikian” (82)															
83	NS : Mohon maaf Pak Barita waktunya sudah habis kita juga akan mendorong supaya komisi kejaksanaan bisa dapat akses untuk memeriksa karena sekali lagi ini komisi independen yang perlu untuk mewakili puplik menjawab berbagai spekulasi yang ada. Selamat bekerja Pak	✓						✓								Tuturan (83) di atas termasuk pada pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Maksim yang dilanggar adalah maksim kuantitas. Pelanggaran tersebut tergambar dari jawaban PB yang berlebihan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama Grice. Grice menyatakan bahwa dalam maksim kuantitas tidak menginginkan mitra tutur memberikan informasi

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL	
	Barita kita akan dorong terus supaya komisi kejaksaan terus” PB : “Terimakasih, sip selamat kerja kembali Nana dan semuanya” (83)														yang kurang maupun berlebihan. Dalam tuturan (83) terlihat bahwa PB berlebihan dalam menjawab pertanyaan NS yang seharusnya HS cukup menjawab <i>Terima kasih</i> . Namun pada percakapan di atas, HS menambahkan ucapan <i>Sip selamat kerja kembali Nana dan semuanya</i> yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim kuantitas. Alasan pelanggaran maksim kuantitas yang terjadi pada tuturan (83) di atas karena PB ingin terlihat lebih ramah. Hal tersebut tegambar pada tuturan Hary yang memberikan penambahan informasi yang tidak dibutuhkan oleh NS yaitu <i>Sip selamat kerja kembali Nana dan semuanya</i> tuturan tersebut menunjukkan keramahan karena selamat kepada orang lain baik itu

NO	Data	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama				Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice									Analisis
		Pel. Maksim Kuantitas	Pel. Maksim Kualitas	Pel. Maksim Relevansi	Pel. Maksim Cara/pelaksanaan	BI	BB	KR	KS	PN	PS	HR	KA	TTL	
															untuk NS, narasumber, maupun penontonnya yang tergambar pada kata <i>Semuanya</i> .



## BARA DI MARKAS JAKSA

**Konteks [I]** : Acara dibuka oleh Najwa Shihab yang merupakan pembawa acara atau tuan rumah dari Mata Najwa ia menyapa para penonton kemudian menyampaikan wacana singkat tentang berita terbakarnya gedung Kejaksaan Agung. Lalu menyebutkan bintang tamu yang akan menjadi narasumbernya yaitu Hari Setiyono (kepala pusat penerangan hukum kejakung), Boyamin Saiman (koordinator masyarakat anti korupsi indonesia), Kurnia Ramadhana (peneliti ICW) dan juga Najwa menyampaikan bahwa telah terhubung melalui video *call* dengan Mahfud MD (menteri koordinator politik hukum dan ham jakarta selatan) tuturan ini bermula saat Najwa Shihab menyapa bintang tamunya satu persatu seperti percakapan dibawah ini.

NS : "Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa saya Najwa Shihab tuan rumah Mata Majwa, gedung utama Kejaksaan Agung lantak dimakan bara melalap ruang-ruang pejabat utama Korps Adhyaksa. Berbagai spekulasi bermunculan dengan seketika bersama banyak pertanyaan yang mencuat begitu saja, dari soal berkas yang musnah, tata kelola gedung yang lengah, hingga kinerja yang bikin cengah, apalagi terjadi saat ramai kasus Djoko Tjhandra yang berujung menyeret-nyeret nama seorang jaksa. Mengapa gedung sangat vital dengan mudah terbakar, salahkan jika puplik ramai-ramai sibuk menakar, inilah Mata Najwa *Bara di Markas Jaksa*". (1)

NS : "Empat hari setelah kebakaran melanda markas jaksa spekulasi masih terus bermunculan penyebab kebakaranpun masih jadi tanda tanya, bagaimana perkembangan terkini terkait pengusutan kasus kebakaran ini, hadir di studio Mata Najwa kepala pusat penerangan dan hukum Kejaksaan Agung Hary Setyono "Selamat malam Pak Hari"(2)

HS : "Selamat malam, salam sehat untuk semuanya". (3)

NS : "Insyaallah semoga sehat terus, hadir juga koordinator masyarakat anti korupsi atau Maki Bonyamin Saiman. "Selamat malam Mas Bonyamin"(4)

BS : "Assalamualaikum wr.wb".(5)

NS : "Walaikumsalam wr.wb. dan hadir teman saya peneliti indonesian korupsion was atau ICW Kurnia Ramadhana. Selamat malam Kurnia" (6)

KR : "Selamat malam Mba Nana, selamat malam semuanya" (7)

NS : "Saya juga sudah terhubung lewat video *call* dengan mentri koordinator politik hukum dan ham Muhammad Mahfud Md. "Selamat malam, assalamualaikum Pak Mahfud".(8)

- MM : “Walaikumsalam, Najwa dan semuanya, Hari, Mas Bonyamin, Mas Ramadani.” (9)
- NS : “Terimakasih sudah bergabung Pak Mahfud. Pak saya mau langsung *to the point* ya Pak Mahfud karnakan anda bahkan pada malam saat terjadi kebakaran langsung berani menyebut dan menjamin berkas-berkas perkara aman 100%, tidak akan mengganggu proses penanganan perkara, keyakinan Pak Mahfud dari mana Pak? bahkan sudah disebutkan pada saat kebakarannya masih terjadi” (10)
- MM : “Karena saya langsung berhubungan dengan jaksa agung dan jampidum, itu gimana perkara-perkara yang sedang ditangguh, ooo jauh Pak, bukan disitu kalau berkas perkara, gitu. Jadi yang saya jamin aman tu jamak, perkara yang sedang ditangani yang pada saat itu sering disebut ada dua. Satu, soal Djoko Thjandra dan Pinangki, yang kedua soal Jiwasraya. (11)
- NS : “Iyaa” (12)
- MM : Nah kalau itu saya pastikan berdasar keterangan dari Jaksa Agung dan, dari jampidum Pak Fadil Sumana tu Deputi tiga, Kemenko Pulhukam baru, baru dua minggu lalu lah”(13)
- NS : “Iyaak jadi pernaaa, hmhhh” (14)
- MM : “Saya kenal betul orangnya ya saya umumkan bahwa saya yakin, kan gedungnya beda”(15)
- NS : “Jadi, Pak Mahfud karena kemudiannya bisa saja, kemudian argumennya jadi Pak Mahfud yakin hanya sebatas pernyataan sepihak yang dikeluarkan oleh pihak Kejaksaan Agung?(16)
- MM : “Ya pasti dong, kan dia pejabat yang punya otoritas di situ dan saya tau bahwa itu bisa di pertanggung jawabkan. Nah kalo nanti salah, buktikan nanti di di proeses-proses yang berjalan ini buktikan saja kan gitu.(17)
- NS : “Tapi anda sendiri?”(18)
- MM : “Saya sudah katakan Pak gitu, saya katakan Pak kita nda bisa berbohong sekarang, nda mungkin berbohong ke masyarakat kita berbohong sekarang besok lusa akan dibuka oleh Bonyamin itu saya bilang. Oleh sebab itu jangan main-main RSM sekarang tu lebih canggih, Bonyamin tu suka menghubungi istri-istri jaksa itu minta fotonya hahaha, sehingga foto-foto yang rahasia dia punya tu. Saya bilang jangan main-main.” (19)
- NS : “Pak...Pak Mahfud, iya. Sebelum masuk ke bohong berbohong karena itu juga menarik, tapi saya ingat Andakan sempat mengatakan terbuka kaget bahwa kebakarannya besar sekali, cepat sekali, jadi jujur Pak Mahfud ke

saya malam ini memang adakan di benak Pak Mahfud? mungkin saja ada ketidak wajaran dari bara yang muncul di markas Jaksa ini”(20)

MM : “Oo begini, saya katakan masyarakat jangan berspekulasi, itukan ada di TV ya, spekulasi apa Pak, spekulasi yang saya baca di medsos itu, itu nda masuk akal gitu, lalu media itu banyak yang menulis kata Mahfud MD terbakarndya nda masuk akal, padahal saya mengutip medsos, yang berkembang ketika itu masyarakat mengatakan di medsos itu, ini ndak masuk akal kok dari lantai enam turun ke-empat turun ke-lima, masa kalo listrik separah itu, itu kata masyarakat. Oleh sebab itu saya katakan jangan berspekulasi lah, spekulasi apa, ya itu yang ada di masyarakat bahwa kok turun dari lantai enam ke-empat ke-tiga. (21)

NS : “Tapi dari pengamatan Pak maaf” (22)

MM : “Itu masyarakat yang mengatakan tapi tidak disebut bahwa saya mengutip masyarakat, tapi tidak apa-apa kalau itu sih, itu sudah terjadi”(23)

NS : “Tapi, Pak Mahfud pertanyaan saya apakah Pak Mahfud sendiri tidak terlintas dibenak Pak Mahfud mungkin saja ada ketidak wajaran, tidak pernah terlintas sama sekali Pak? Melihat besarnya kebakaran.(24)

MM : “Semula terlintas, semula terlintas karena begini saya tidak tau kebakarannya tiba-tiba itu ada telpon, Kejaksaan Agung kebakaran lalu saya liat televisi sudah parah lalu saya baca di media di medsos macammacam ada kecurigaan saya juga ikut curiga gitu, terlintas. Lalu saya telpon Jaksa Agung gimana Pak? Ooo Pak saya ada di tengah-tengah, gimana tu perkara-perkara itu gitu aman, Oo aman. Saya terus telpon Fadil Sumana juga aman, lalu saya katakan saya terlintas ndak mungkinlah tidak telintas, kalo itu bohong kalo (25)

NS : “Apa Pak Mahfud, boleh saya tau Pak lintasan pertama dibenak karena mungkin saja itu yang benar Pak, hans Pak Mahfud apa? waktu terlintasnya ini dibakar.(26)

MM : “Ya lintasan pertama karena sedang nangani perkara itu jangan-jangan ini ada yang sengaja orang dalam, kan gitu itu saya kira siapa aja bisa mengira begitu, manusiawi saya juga mengira begitu tetapi sesudah telpon itu, Pak gedungnya jauh yang diseberang sana itu kalo gedung yang nangani perkara itu begitu. (27)

NS : “Karena misalnya Pak kebakaran di gedung vital milik negara ditengah pengusutan kasus besar inikan bukan pertama kali terjadi, kita tau misalnya tahun 97 di gedung BI, kemudian juga di gedung BPKP juga pernah, kemudian di gedung kementerian ESDM tiba-tiba terbakar ketika sedang menyelidiki kasus yang melibatkan menteri ESDM ketika itu jadi ada presedenya terbakar atau dokumen yang dalam tanda kutip RAIP atau

di raipkan terjadi di tengah-tengah pengusutan kasus yang besar, Pak kemonpuluhukam”(28)

MM : “Iya iya makanya tadi saya terlintas gitu hehehe, kan sudah saya bilang keterlantasan keingat ke yang lain-lain juga saya dulukan di luar, jadi juga saya ingat ke yang lain-lain tapi sesudah berkomunikasi saya kemudian mengatakan ya sudah jangan berspekulasi kita serahkan ke polisi kan gitu, ha polisinya juga langsung saya telepon Pak IPDA Hamasid, Pak ini dibuka Pak siap, kami lurus tegak, tegak lurus melaksanakan konstitusi dan hukum gitu, kami pasti profesional. Saya ingatkan lagi jangan main-main dengan masyarakat sekarang, kita akan ketahuan kalau bohong sedikit sekarang, orang ndak bohong aja dibilang bohong saya bilang begitu heheheh” (29)

NS : “Iya Pak Mahfud itukan Bapak bilang tidak mungkin pemerintah berbohong tidak mungkin pemerintah menyembunyikan sesuatu, pemerintah ini maksudnya siapa Pak? yang gak mungkin bohong presidennya, menkopulhukamnya, aparat-aparatnya atau siapa yang tidak mungkin bohong? di jawab setelah pariwisata saya akan menunggu jawaban pak Mahfud tetap di Mata Najwa”.(30)

**Konteks [III]** : Pada segmen ini Najwa Shihab selaku pembawa acara melanjutkan pertanyaan yang belum sempat dijawab oleh Mahfud MD pada segmen sebelumnya, Najwa juga meminta Kurnia Rhamadana (peneliti ICW) dan Boyamin Saiman (koordinator masyarakat anti korupsi indonesia) untuk memberikan argumennya sehingga terjadilah percakapan seperti dibawah ini.

NS : “Bara di markas jaksa, saya akan kembali menghubungi menkopulhukam Bapak Muhammad Mahfud MD, Pak Mahfud Anda berkali-kali menyebutkan tidak mungkin pemerintah menyembunyikan sesuatu dalam situasi seperti ini, pertanyaannya Pak, pemerintah itu maksudnya presiden Jokowi, atau menkopulhukamnya Pak Mahfud MD atau aparat-aparat dibawahnya Pak?(31)

MM : “Semua menurut saya kalau pemerintah main-main, kalau pemerintah berani berarti dia melanggar sebuah ketidak mungkinan dia lakukan, karena tidak ada yang disembunyikan sekarang ini, oleh sebab itu jangan berspekulasi karena kalau anda berbohong hari ini menyembunyikan sesuatu anda tidak akan bisa tidur mencari alasan baru untuk besok, oleh sebab itu kalau saya katakan saja bahwa tidak mungkin dan yang saya katakan yang saya yakini hari ini, karena seumpama saya apa, misalnya besok harus ketemu orang lagi ya saya tidak mencari kebohongan baru, jadi sekarang siapapun pejabat jangan coba berbohonglah, nanti akan ketahuan” (32)

NS : “Ketika disebut pemerintah tidak mungkin menyembunyikan sesuatu atau aparat-aparat dalam hal ini aparat kepolisian atau aparat penegak hukum

tidak mungkin menyembunyikan sesuatu, tapi tidak usah jauh-jauh Pak, kasus Novel Baswedan, jelas-jelas ada kejanggalan disitu, puplik berteriak, puplik membongkar tapi tidak ditelusuri dan dalihnya sudah sesuai proses hukum jadi agak sulit untuk meminta puplik percaya ketika yang di depan mata seperti Novel Baswedan saja tidak”(33)

MM : “Ya itulah, itulah kalau orang berbohong orang akan tidak percaya silahkan, tetapi kalau saya ndak akan berbohong, saya katakan tidak mungkin bisa maksudnya, tidak mungkin sekarang ini orang pemerintah berbohong artinya tidak mungkin bisa, lalu orang bisa begitu percaya aja kepada kebohongan itu, tetap itu akan menjadi perdebatan puplik kalau mau berbohong, gitu kan” (34)

NS : “Pak Mahfud tapi lagi-lagi walaupun misalnya tidak mungkin bisa berbohong dalam beberapa kasus kita lihat mungkin saja bukan berbohong tetapi menutup mata atas kejanggalan yang jelas-jelas nyata terlihat Pak, sekali lagi saya mengambil contoh kasus Novel Baswedan, tidak berbohong mungkin tetapi yang ada di depan mata tidak diakui” (35)

MM : “Akhirnya puplik akan menilai silahkan dinilai aja, kan pasti puplik menilai oo ini ternyata ada kebohongan tu di situ, ternyata benar Pak Mahfud bahwa tidak mungkin orang bisa berbohong kan begitu”(36)

NS : “Akhirnya selesai habis di spekulasi puplik Pak dan peran negara yang seharusnya bisa lebih jauh dari situ kita tidak lihat apakah ini akan berulang lagi dikasus ini Pak Mahfud?(37)

MM : “Kalau saya tidak akan berakhir di kasus ini saya kan sakarang koordinator, ini mentri koordinator saya akan mengkoordinir kemana arahnya perkara ini saya akan pertanggungjawabkan ke puplik, sehingga nantik kalau terpaksa loh kok di bawah beda saya akan beda ndak papa, kalau memang ada yang akan berbohong dibawah. (38)

NS : “Pak Mahfud sampai sejauh apakah anda akan mendorong KPK atau institusi di luar Kejaksaan Agung yang masuk dan memeriksa kasus yang saat ini ditangani Kejaksaan Agung menyangkut oknum jaksanya Pak?(39)

MM : “Itu tidak perlu dorongan seorang minfo itu adalah haknya KPK kalau KPK mau ambil alih ndak boleh jaksa agung menolak, ndak boleh menkopulhukam menolak itu berdasar pasal 8 dan pasal 9 UU KPK bagaimana anda minta dorongan ke saya, saya tidak akan mendorong dan tidak akan menghalangi itu haknya KPK sepenuhnya, KPKnya mau gak, kalau KPK mau silahkan aja itu UU yang mengatakan begitu, bukan saya bukan anda” (40)

NS : “Apakah perlu atau apakah menurut anda puplik harus percaya begitu saja kejaksaan berani memeriksa keluarganya sendiri?(41)

- MM : “Terserah publik dan terserah juga kejaksaannya mau transparan apa tidak dan terserah KPK mau ambil apa tidak. KPK punya hak kan” (42)
- NS : “Kalau Pak Mahfud sendiri bagaimana saya bertanya pendapat anda sebagai kementerian hukum Pak, apakah anda memang merasa kejaksaan tidak bisa memeriksa keluarganya sendiri apalagi kalau mungkin memeriksa Jaksa Agungnya langsung?(43)
- MM : “Tidak itu tidak fer, kalau saya sebagai atasan saya harus bicara atas nama kesatuan pemerintah tapi saya orang di luar KPK kalau KPK mau ambil, ambil”(44)
- NS : “Saya ingin ke Pak Mahfud ada Kurnia dari ICW saya ingin tau karena ICW yang sejak awal bilang KPK harus masuk karena melihat rasanya sulit untuk, untuk kejaksaan memeriksa kasus ini”(45)
- KR : “Iya.. saya tadi mau bahas soal bohong atau tidak bohong ya Mbak Nana, kita masih mengingat masih ditahun ini sebenarnya dua kali pemerintah diduga memberikan kabar yang tidak benar bukan hanya novel Baswedan bulan januari ada kasus Harun Masiku apa kata bawahan Pak Mahfud saat itu, Harun Masiku tidak berada di Indonesia, padahal beberapa waktu kemudian pernyataan itu diralat. Yang kedua kasus Djoko Tjandra bawahan Pak Mahfud juga mengatakan tidak ada data perlintasan atas nama Djoko Tjandra faktanya orangnya ada mendapatkan berbagai prefilip sampai pada mendaftarkan upaya hukum luar biasa. Yang kedua soal tadi apakah persoalan hukum terbatas pada dokumen perkara kalau kita melihat kasus yang ada di kejaksaan agung yang melibatkan jaksa Pinangki Sirna Malasari oke klim kejaksaan dokumennya berbeda gedung akan tetapi ada bukti petunjuk berupa CCTV yang ada diruangan jaksa Pinangki kemana sekarang, pastikan hangus, jadi jangan terlalu cepat menyimpulkan apalagi kalau kasus hukum hanya melandaskan pada dokumen ada banyak alat bukti lain yang juga masih kita pertanyakan hari ini kepada kejaksaan agung dan ICW sejak awal mendorong agar KPK terlibat dalam penyelidikan terbakarinya gedung kejaksaan agung kenapa Mbak Nana? karena kita khawatir inikan apakah ini tidak disengaja atau ini disengajakan dua itu saja opsiannya. Kami ingin KPK masuk kalau memang nanti terbukti ada pihak-pihak entah itu oknum internal kejaksaan agung atau di luar kejaksaan agung yang berupaya untuk menghentikan perkara-perkara besar maka dapat di sangka dengan pasal 21 oprasaljastis. Karena tadi Mbak Nana sampaikan kita agak sulit percaya kalau penegak hukum A menangani perkara yang melibatkan oknum penegak hukum A juga lebih bagus ambil tarik netral biar KPK yang masuk. Itu pointnya Mba Nana. (46)
- NS : “Tadi Pak Mahfud mengatakan kewenangan itu ada pada KPK, apakah anda berharap menkopulhukam bisa, karena tadi katanya tidak boleh ni”(47)

- KR : “Saya akan masuk disini sekaligus mengkritisi kejaksaan agung, Mbak Nana pekan lalu bareskrim secara terbuka mengundang KPK untuk mengadakan gelar perkara tapi kejaksaan agung saya tidak tau, saya belum pernah melihat ada pemberitaan kejaksaan agung mengundang KPK untuk gelar perkara, dan sampai hari ini pun kejaksaan agung” (48)
- NS : “Ini spesifik gelar perkara terhadap?(49)
- KR : “Gelar perkara kasus suap surat jalan dan reknotis, itu kabarnya sih mengundang KPK tapi sampai hari ini kok terlihat seperti kejaksaan agung menutup diri, itu yang ada” (50)
- MM : “Nana saya jawab dulu Nana”(51)
- NS : “Silahkan Pak Mahfud”(52)
- MM : “Boleh saya jawab sedikit”(53)
- NS : “Silahkan Pak!”(54)
- MM : “Jadi kalau begitu, benar dong saya bahwa sekarang ini pejabat ndak bisa berbohong buktinya tadi disampaikan oleh Mas Kurnia, dulu ada orang yang bilang Masiku ndak ada ternyata bohongkan militas, kemudian katanya Djoko Tjandra bohong ternyata masuk, kan berarti saya sudah benar bilang, jangan berbohong sekarang ini masyarakat akan tau, dimana salahnya” (55)
- NS :”Masyarakat tau tapi apakah pemerintah perlu berbohong di awal Pak hehhe..”(56)
- MM : “Kenapa?”(57)
- KR : “Dan sanksi orang yang berbohong itu sampai hari ini tidak ada Prof Mahfud itu yang kita sesalkan kalau tidak ada *phanismen* yang tegas dari presiden maka bukan tidak mungkin orang itu akan berbohong dimasa yang akan datang terlebih terhadap penegakan hukum di bawah kewenangan profesor Mahfud MD. Itu yang kita khawatir Pak Mahfud”(58)
- MM : “Konteksnya bukan itu, konteksnya yang saya katakan tidak mungkin sekarang orang bisa berbohong buktinya anda sudah tunjukkan buktinya itu bohong ketahuan juga, nah soal itu nanti soal lain ada, ada proses-proses internal kan sudah ada tindakan-tindakan juga tu, cuma tindakan menurut anda beda menurut tindakan pemerintah, misalnya saya contoh begini, di keminkoham dirjennya dicopot, wah anda curiga lagi, namanya sudah curiga oo itu bukan itu gitu terus gimana dong kan begitu, nanti aja yang Djoko Tjandra juga semuanya ditangani siapa yang melayani dia pergi sudah ditangani semua terus apalagi yang mau dilakukan, apakah

mau melanggar hukum kita ini, ikut saran anda gitu wah itu yang ditangkap kapolrinya gitu misalnya, kan harus yang, kan sudah ada bukti bahwa yang berbohong ternyata salah ditindak ha gitu, lagi pula kasus Harun Masiku bukan bukan di pemerintah ya itukan di KPK” (59)

NS : “Oke”(60)

MM : “KPK itu katanya tidak boleh dicampuri pemerintah kita sudah ndak pernah ikut campur makanya saya bilang tadi KPK mau ambil, ambil aja kita ndak ikut campur itu perintah UU pasal 8 dan pasal 9, mau ambil, ambil besok, makanya saya ucapkan bagus kapolri tu Pak Pak Listio ngundang KPK kalau mau KPK ambil, ambil katanya, ya saya sama dengan itu, kalau ngambil ambil aja, kalau mau cari kebenaran kok susah-susah amat, gitu lo”(61)

NS : “Baik, Pak Mahfud, Pak Bonyamin silahkan anda mau menyampaikan apa?”(62)

BS : “Sederhana Pak Mahfud mengajukan permohonan ajalah, Pak Mahfud atas kewenangan yang dimiliki memberikan arahan menghimbau atau tanda kutip lebih tinggi memerintah, jaksa agung untuk dalam ekspose, istilah di kejaksaan itu ekspose bukan gelar perkara, ketika pada posisi nanti di arahkan mengundang KPK, biar menjawab keraguan ini jadi Pak Mahfud saya yakin tidak akan menyalahi kewenangan dan tidak akan interpenasi karena jaksa agung adalah di bawah pemerintahan, jadi diarahkan ajalah dihimbau saya yakin kalau Pak Mahfud nyentil jaksa agungnya eh tolong itu KPK di undang ajalah dalam ekspose ini hal yang sederhana dan gampang dilakukan Pak Mahfud, demikian terimakasih.” (63)

MM : “Ya melalui ini aja, melalui ini saya sampaikan melalui forum ini biar semua dengar, saya juga minta kejaksaan agung KPK kan minta di undang juga eksposanya di undang saja kenapa kalau benar jangan takut, kenapa juga komisi kejaksaan tidak diberi dokumen yang diminta itukan lalu menimbulkan kecurigaan, saya kasikan saja UU mengatakan begitu, gitu. Besok akan saya sampaikan lagi. Uwong polisi juga ngundang, apa yang harus saya sembunyikan dari ini”(64)

BS : “Jadi gini bapaknya penegasan kecil aja profesor setuju kalau kemudian kejaksaan agung gelar perkara mengundang KPK, itu aja ini untuk keras kepada”(65)

MM : “Amat sangat setuju, amat sangat setuju kalau mau terbuka karena UU memungkinkan bukan hanya memungkinkan mendorong itu.(66)

NS : “Oke”(67)

MM : “Dan saya nanti akan sampaikan juga”(68)



- BS : “Persetujuan ini mohon di implementasikan habis ini atau besok mengontak Jaksa Agung eh tolong dong diajak ajalah KPK begitu”(69)
- MM : “Itu, tu tinggal cara saya hahaha” (70)
- NS : “Yang jelas, ini sudah terbuka dan disaksikan jutaan orang jadi seharusnya ini sudah,” (71)
- MM : “Iya disaksikan jutaan orang dan bisa disampaikan juga oleh Pak Hari kan” (72)
- NS : “Jaksa agung yang menyaksikan Mata Najwa saya tau sedang nonton jadi Pak jaksa agung tolong di dengar itu Pak Mahfud MD. Pak Mahfud” (73)
- BS : “Jadi ini model orang solo ujung ujungnya nuntutnya juga, ujungnya ya nusuk juga Pak Mahfud jadi tolong dipahami.” (74)
- NS : “Baik, Pak Mahfud pertanyaan penutup Pak Mahfud yang jelas publik sempat dikagetkan oleh beberapa temuan yang dilakukan investigasi yang dilakukan media maupun investigasi yang dilakukan oleh sebutlah maki begitu ya, salah satunya adalah dugaan bahwa jaksa Pinangki itu melapor kepada jaksa agung pertemuannya dengan Djoko Tjandra di luar negeri, jaksa Pinangki bahkan sempat video *call* dengan jaksa agung melapor sudah dil begitu, itu dugaan-dugaan yang muncul, apakah anda melihat kejaksaan akan berani memeriksa jaksa agung atas kasus ini Pak Mahfud?(75)
- MM : “Itu sudah substansi perkara saya ndak boleh masuk tanyakan ke Pak Hari Setiyono aja ada di situ, saya ndak boleh masuk ke situ, karena Nana kan tau sendiri” (76)
- NS : “Tapi seharusnya apakah bisa jeruk makan jeruk pak?” (77)
- MM : “Ndak papa jeruk makan jeruk (hahaha)” (78)
- NS : “Yakin ya Pak bisa, jadi...jadi kita” (79)
- MM : “Pertanyaannya terlalu main-main sih” (80)
- NS : “Kita masih bisa percaya bahwa tidak akan sungkan-sungkan anak buah Jaksa Agung memeriksa bos besarnya untuk perkara yang dikaitkan dengan Djoko Tjandra Pak?(81)
- MM : “Seluruh rakyat indonesia mulai dari presiden sama rakyat kecil sampai rakyat kecil sama pikirannya semua harus terbuka saya tadi baru bertemu presiden” (82)
- NS : “Presiden bilang apa Pak?” (83)

- MM : “Saya bilang Pak ini yang ribut-ribut sabtu kemarin orang mempersoalkan orang 546 milyar seakan-akan itu digelapkan, itu ndak benar sesudah itu dijelaskan bahwa itu ndak benar sudah ada bukti otentiknya orang mempertanyakan lagi, la dulu kan 900 laputusan mahkamah agungnya 546 gitu, yang 300nya silahkan dipersoalkan lagi tapi yang putusan mahkamah agung 546 yang diributkan sampe sore sampe saya menjelaskan itu ni masih ada di meja saya ni bukti-buktinya ni, bahwa itu sudah selesai, ha kata presiden Pak Mahfud profesional aja, kita jangan takut, buka sejujur-jujurnya begitu kalau presiden selalu. (84)
- NS : “Baik”(85)
- MM : “Tadi kami baru ketemu jam 10” (86)
- NS : “Baik, baik Pak Mahfud terimakasih waktu anda untuk Mata Najwa malam ini Pak,(87)
- MM : “Makasih Najwa, jumpa lagi di lain waktu” (88)
- NS : “Sehat-sehat terus ya Pak”(89)
- MM : “Alhamdulillah sehat, terimakasih Najwa dan semuanya juga sehat-sehat” (90)
- NS : “Kita tunggu bagaimana jeruk makan jeruknya ya Pak ya” (91)
- MM : “Salam Abi Quraish Shibab ya” (92)
- NS : “Disampaikan insyaallah Pak”(93)
- MM : “Salam sama Abi Quraish Shibab ya”(94)
- NS : “Disampaikan terimakasih Pak Mahfud.”(95)
- NS : “Pemirsa kita akan brek karena saya masih menyimpan kapuspen komusi jaksa agung yang duduk di samping saya sebelah kanan, karena ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, apa yang terjadi di gedung kejaksanaan agung termasuk kita juga akan bahas kenapa kebakarannya bisa sehebat itu. Kepala dinas pemadam kebakaran akan hadir dimata Najwa, kita akan telusuri detik demi detik kebakaran terjadi, setelah pariwisata tetap di sini.(96)

**Konteks [III]** : Pada segmen ini Najwa Shihab selaku pembawa acara, bersama Satriadi Gunawan (kepala dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan DKI Jakarta), Fatmawati Lestari (pakar fire safety FKM UI Depok, Jawa Barat) membahas tentang cerita apa yang sebenarnya terjadi dibalik terbakarnya gedung Kejaksaan, Najwa juga minta keterangan dari Hari Setiyono (kepala pusat penerangan hukum Kejaksaan) seperti percakapan di bawah ini.

NS : “Yak membutuhkan waktu kurang lebih 11 jam untuk bisa menaklukkan api di gedung Kejaksaan Agung yang terbakar 65 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan bagaimana api bisa menhancurkan seluruh gedung utama Kejaksaan, sudah hadir di mata Najwa kepala dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta hadir Bapak, saya mengundang Pak Satria Digunawan yang akrab disapa Pak Bili, selamat malam Pak Bili”(97)

SG : “Selamat malam Mba Nana, salam sejahtera untuk kita semua” (98)

NS : “Terima kasih sudah hadir di mata Najwa Pak”(99)

SG : “Sama-sama Mba Nana, terimakasih juga telah mengundang saya” (100)

NS : “Saya juga terhubung dari luar dengan Ibu Fatma Lestari pakar fairsevti dari fakultas kesehatan masyarakat universitas Indonesia, selamat malam Bu Fatma”(101)

FL : “Selamat malam Mba Nana, selamat malam juga semuanya” (102)

NS : “Baik, jadi dibagian ini saya akan bicara khusus soal apa yang terjadi, cerita dibalik cerita sebelumnya kita akan tampilkan video kebakaran yang kami peroleh dari teman-teman Gulkarmat ini video yang akan kita saksikan betapa dahsyatnya api di Kejaksaan Agung.(103)

NS : “Yak terimakasih atas video itu Pak Bili jadi persisnya anda dan teman-teman mendapatkan info dari orang yang datang justru kemarkas?”(104)

SG : “Betul, jadi pertama kita dapat berita terjadinya kebakaran yaitu dari warga yang datang ke pos terdekat, yaitu pos Kebayoran Baru tepatnya sekitar jam 7 lewat 10 menit, kemudian langsung kita luncurkan 4 unit dan pada saat di TKP sudah ada 3 selasar dari gedung utama Kejaksaan Agung sisi sebelah utara sudah terbakar nah itu langsung kita tambahkan lagi unit terakhir sampai dengan 65 unit dengan jumlah personil sekitar 325 orang.” (105)

NS : “Apa kesulitannya sehingga bisa hampir 11 jam baru bisa dipadamkan Pak?(106)

- SG : “Yak pertama kaitannya dengan kondisi bangunan, kondisi bangunan itu jauh dari jalan dan itu akses untuk masuk kendaraan pemadam juga tidak, tidak tersedia nah itu menjadi kendala kami kemudian bangunannya pun memang bangunan sudah tua dengan bahan material yang mudah terbakar nah itu menjadi kendala bagi kami untuk mempercepat proses pemadaman.(107)
- NS : “Apakah di dalam ada alat-alat pemadam yang sempat berfungsi atau sama sekali tidak ada?(108)
- SG : “Pada saat itu sudah terbakar jadi mungkin kita akan liat nanti hasil porsif dari kepolisian seperti apa gitu.(109)
- NS : “Jadi, tapi ketika kemudian masuk kedalam itu titik api dimula memang dari lantai 6 dan cepat sekali menjalar ke titik-titik yang lain itu karena kondisi gedungnya yang tadi anda katakan? (110)
- SG : “Betul, jadi pada saat jam tepatnya sekitar jam 7.10 menit itu sampai dengan jam 12 kita bisa mengantisipasi melokalisir satu setengah gedung utama kejaksaan agung itu, hanya pas jam 1 tepatnya itu *flash over* terjadi di lantai 6 kemudian merambat sampai ke sisi selatan gedung kejaksaan agung. (111)
- NS : “Apa istilahnya Pak *flash over* itu?(112)
- SG : “*Flahs over* itu ada pengaruh dari asap, pengaruh asap yang bisa mengakibatkan panas nah itu juga merambat sampai ke sebelah sisi selatan gedung kejaksaan agung. (113)
- NS : “Dari pengalaman anda memadamkan kebakaran ini termasuk yang besar Pak?(114)
- SG : “Besar, termasuk besar ini karena satu gedung ada 6 lantai memanjang areanya cukup luas dan cukup besar, dan api juga dengan cepat merambat ke bagian yang lainnya” (115)
- NS : “Oke, saya ingin ke Bu Fatma, Bu Fatma apa yang anda lihat dari peristiwa terjadinya kebakaran ini anda sebagai *fire safety*, karenan masyarakat banyak bertanya-tanya dan lain sebagainya kalau dari pakar apa yang harus kita cermati kalau melihat kebaran sebesar ini buk?(116)
- FL : “Yak, dari kejadian ini kita bisa lihat bahwa tidak bekerjanya sistem proteksi kebakaran gedung, karena apabila sitem proteksi kebakaran gedung bekerja maka ketika terjadi api itu akan langsung dipadamkan oleh *spring clab* yang ada di dalam gedung dan tidak akan merambat begitu melebar dan begitu cepat api berkobar begitu”(117)

- NS : “Oke, saya ingin ke Pak Hari kalau begitu Pak Hari sistem proteksi yang bisa mendeteksi dan sebagainya seberapa, seberapa siap sih Pak gedung kejaksaan agung inikan gedung vital ya Pak?”(118)
- HS : “Yak, jadi begini Mbak Nana perlu kami gambarkan terlebih dahulu bahwa kalau disebut bara dimarkas jaksa itu kan seolah-olah semua gedung tu terbakar jadi saya gambarkan dulu ya area yang ada di sana bahwa tadi disampaikan ada gedung utama di area kejaksaan agung itu ada gedung utama, yang menghadap ke jalan sultan Hasanuddin itu ditempati oleh pimpinan, jaksa agung, wakil jaksa agung, kemudian di lantai 3 dan lantai 4 itu jam intel beserta staf lantai 5 dan 6 itu jaksa agung muda pembinaan beserta staf, di sebelah selatan gedung kira-kira berjarak sekita 200 meter dengan batas lapangan sepak bola atau lapangan upacara itu ada gedung jaksa agung muda tindak pidana khusus, ini saya gambarkan supaya nanti kita bisa memahami bahwa dimana tempat beraktivitas penanganan perkara tindak pidana khusus yang dalam hal ini adalah ada tindak pidana korupsi , kemudian dari gedung utama ini kebelakang kira-kira berjarak 14 meter itu gedung yang saya tempati itu mbak nana gedung guspenkum, ini pak bonnyamin kalo pas lewat pasti saya teriak mampir pak gitu. Kemudian dibelakangnya gedung utama ini berjarak kira-kira 60 meter itu ada poliklinik.(119)
- NS : “Oke, tapi yang gedung utamanya yang di depan yang kita lihat itu yang terbakar, nah pertanyaannya tadi Pak, apakah memang tidak ada sistem proteksi kebakaran atau yang bisa mendeteksi?(120)
- HS : “Yak, sepengetahuan saya karena gedung ini kemarin saya katakan bahwa masuk dikawasan pemukiman kemarin memang dikatakan ini belum sebagai gedung cakar budaya tetapi sudah masuk kawasan pemukiman, kenapa? Karena ketika kami pengen mempercantik gedung itu di tahun 2018 itu ditegur oleh dinas pariwisata tidak boleh begini tidak boleh begitu sehingga ketika dilakukan itu ada berita acara yang ditandatangani oleh pengawas cagar budaya” (121)
- NS : “Oke, pertanyaannya Pak itu belum menjawab pertanyaan saya Pak Hari, apakah ada sistem proteksi itu Pak?(122)
- HS : “Iya saya mau masuk ke sana” (123)
- NS : “Iyaa boleh langsung *to the point* Pak”(124)
- HS : “Ya tentu di dalam pemeliharaan gedung itu ada proteksi terhadap keamanan gedung itu sepanjang yang saya ketahui ada istilahnya apar park ya, apar di tiap-tiap jarak sekian meter kemudian juga yang saya ketahui peringatan dini katakanlah sedangkan spengler karena tinggi gedung juga ruangan itu saya ketahui cukup tinggi hanya di beberapa bagian saja yang saya tau ini ya, tetapi secara umum saya tidak tau, tetapi ada seperti itu,

nah nanti mungkin dari bapak damkar yang sudah melakukan itu bisa lebih lengkap lagi” (125)

NS : “Oke kita akan brek, karena kemudian sejauh mana investigasi ini dilakukan apakah memang bisa diketahui kalau kebakaran dilakukan dengan sengaja sabotase atau itu sulit untuk di deteksi kita akan bahas itu setelah peristiwa, tetap di *Mata Najwa*.(126)

**Konteks [IV]** : Pada segmen ini Najwa selaku pembawa acara kembali melanjutkan pembahasan pada segmen sebelumnya yaitu tentang cerita dibalik terbakarnya gedung kejaksaan agung, dan pada segmen ini Najwa meminta keterangan dari Satriadi Gunawan (kepala dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan DKI Jakarta), Fatmawati Lestari (pakar fire safety FKM UI Depok, Jawa Barat), Hari Setiyono (kepala pusat penerangan hukum kejaksaan), Boyamin Saiman (koordinasi masyarakat anti korupsi Indonesia) dan Kurnia Ramadhana (peneliti ICW), seperti pada percakapan di bawah ini.

NS : “Yaaak dalam kasus seperti ini Pak Bili investigasi itu biasanya meliputi apa-apa saja?(127)

SG : “Yaak, jadi kalau investigasi itu kewenangan dari puslapolri ya, kalau pemadam kebakaran memang posisinya pada saat itu hanya operasi bagaimana segera tuntas kebakaran yang terjadi di TKP itu.” (128)

NS : “Hmm jadi anda tidak dilibatkan ni oleh, oleh puslapor tidak dimintai nasehat juga tidak dimintai masukan sebagai orang yang sehari-hari urusan dengan api?(129)

SG : “Tidak Mba Nana, saya hanya melakukan tugas saya dengan mengerahkan semua anggota saya untuk turun ke TKP. (130)

NS : “Tidak,?(131)

SG : “Ya, Mba Nana saya tidak dilibatkan oleh puslapor”(132)

NS : “Kenapa ya Pak?(133)

SG : “Memang aturannya seperti itu mungkin” (134)

NS : “Ada rasa gemas mungkin”(135)

SG : “Ya, pasti ada rasa, tapi ya manakala dibutuhkan kami siap”(136)

- NS : “Oke, saya membutuhkan anda malam ini untuk menjawab Pak, jadi kalau bapak beri tugas wewenang investigasi biasanya apa sih yang diperiksa untuk tau ini tu sebetulnya tidak wajar kebakarannya.?(137)
- SG : “Yaa kita pasti nyari titik utama titik pertama dari api tu darimana di lantai berapa dan itu kita akan telusuri, kita akan telusuri biasanya ada berkas-berkas yang memang pasti ada titik utama itu di lantai berapa, nah itu perambatannya kemana arahnya nah itu nanti kita” (138)
- NS : “Itu bisa terdeteksi ini kira-kira apinya di sengaja di bakar di sabotase atau ini tidak sengaja bisakah itu terdeteksi dalam investigasi?(139)
- SG : “Bisa, bisa. Dalam investigasi semuanya bisa terdeteksi”(140)
- NS : “Bisa ya?”(141)
- SG : “Pasti bisa”(142)
- NS : “Oke saya ingin ke Bu Fatma, Buk Fatma jadi dugaan sabotase kalau memang ada itu sesungguhnya bisa ditemukan dalam penyelidikan kasus-kasus seperti ini Buk?(143)
- FL : “Betul sekali Mba Nana, jadi kita menggunakan sains dengan mengambil sampel dari tempat lokasi kejadian kebakaran kemudian dibawa ke laboratorium untuk membutikan apakah disitu ada jejak-jejak apabila terjadi sabotase misalnya jejak-jejak adakah hidrokarbon karena di sebuah perkantoran tentunya jejak hidrokarbon ini tidak ada sebagai sumber bahan bakar, kalau disitu ditemukan ada jejak-jejak hidrokarbon maka ada kemungkinan di bakar, tetapi kalau itu tidak ada maka murni karena terbakar begitu. Kemudian, disamping itu juga bisa terlihat dari material-material yang merupakan sumber dari selain bahan bakar kemudian juga dari sumbernya dari dimana lokasi pertama api itu bisa terjadi dari pola kebakarannya itu semua bisa ditemukan di investigasi dan didalam sebuah investigasi sebetulnya bisa saja melibatkan ahli ataupun melibatkan damkar atau melibatkan ekspert, witnes, atau saksi untuk bisa merangkum hasil investigasi tersebut secara lebih komprehensif” (144)
- NS : “Bu fatma misalnya jadi cara-cara arsen atau pembakaran itu apa Bu misalnya membuat korsleting listrik atau memang sengaja menyiram sesederhana menyim bensin di atas kertas atau, atau apa Bu yang canggih sampai yang sederhana?(145)
- FL : “Yak, bisa tadi dengan menyiramkan bensin itu akan terlihat dari jejak-jejak hidrokarbonnya kalau diperiksa di laboratorium, kemudian bisa dengan cara tadi menggunakan krsleting listrik bisa saja tetapi akan terlihat dari pola kebakarannya kalau memang karena korslet maka itu tidak sengaja akan terbentuk api seperti api dalam sekam begitu ya membara jadi kabel listrik itu tentunya akan memerlukan waktu untuk terbakar tidak

secara tiba-tiba jadi kalau disengaja itu akan terlihat kemudian yang ketiga yaitu menggunakan bahan peledak tetapi itu akan sangat mudah teridentifikasi dari sisa-sisa bahan peledak yang ada dilokasi.”(146)

NS : “Oke.. Pak Bili seharusnya standar keselamatan kebakaran di gedung bukan hanya di gedung vital pemerintah tapi secara, secara umum apa seharusnya yang wajib dimiliki untuk mencegah supaya kebakaran atau terbakar atau dibakar semasif ini?(147)

SG : “Sebenarnya ada standar yang sudah ditentukan dalam kementerian PU itu kaitan dengan standarisasi bagaimana pengamanan proteksi kebakaran di gedung ada 4 Mba Nana. Pertama kaitan kesiapan proteksi kebakaran aktif dan pasif, kemudian yang kedua kaitan dengan tersedianya fasilitas atau sarana untuk penyelamatan jiwa, kemudian yang keempat kaitan dengan akses masuk petugas pemadam kebakaran ke gedung tersebut, kemudian yang keempat itu kaitan dengan MKKG manajemen keselamatan kebakaran gedung sudah harus terbentuk di gedung itu, nah memang seharusnya setiap gedung, gedung pengelola gedung atau pemilik itu harus memiliki pengkaji teknis, pengkaji teknis itulah yang setiap saat dia memeriksa proteksi kebakaran yang ada di gedung tersebut dan dia melaporkan ke dinas bagaimana perkembangannya jadi memang harusnya setiap gedung-gedung itu harus ada yang namanya file sepi monev terbentuk itu ya Mba Nana”(148)

NS : “Oke Pak Hari tapi yang jelas gedung kejaksaan yang terbakar belum diasuransikan ya Pak?(149)

HS : “Sepengetahuan saya memang demikian”(150)

NS : “Itu karena memang sesuatu yang tidak pernah dirasa perlu atau karena lalai saja atau karena tidak sempat atau kenapa Pak?(151)

HS : “Ya barang kali lalai saja, mungkin sudah beranggapan oo ini masuk cagar budaya maka pengelolaannya sesuai dengan standar yang ada di dalam pengelolaan cagar budaya, nah tadi saya katakan bahwa kenapa kami mengatakan itu cagar budaya di tahun 2018 tadi yang sudah saya sampaikan nah tentunya kalau itu masuk di dalam kawasan cagar budaya saya pikir perlakuannya juga harus memenuhi standar pengamanan untuk cagar budaya dan barang kali kami sebagai yang menempati tentu juga pemerintah provinsi DKI yang seharusnya juga peduli terhadap gedung-gedung yang sudah ditetapkan masuk di dalam kawasan itu. (152)

NS : “Tapikan faktanya bukan cagar budaya Pak, sudah ada bantahan tu dari direktur pelestarian cagar budaya, dirjen kebudayaan”(153)

HS : “Mungkin Mba Nana bacanya hanya di atas ya dibawahnya dikatakan itu termasuk” (154)



- NS : “Kawasan-kawasan cagar budaya Pak tapi gedungnya bukan, gedungnya tidak Pak”(155)
- HS : “Dibawahnya lagi perlakuan terhadap kawasan budaya sama dengan cagar budaya makanya bacanya jangan” (156)
- NS : “Jadi artinya tidak perlu di asuransi”(157)
- HS : “Nah contohnya tadi saya katakan di 2018 tadi kita katakan mau direnovasi di tegur itu ditandatangani oleh pengawas cagar budaya nah siapa yang seharusnya mengansuransikan, ha itu kira-kira” (158)
- NS : “Hmm oke tapi yang jelas sekarang karena tidak di asuransi maka kerugiannya ini kalau dari direktur jendral kekayaan negara itu nilai gedungnya 161 milyar Pak dan itu akan masuk ke APBN di 2021 kalau sekarang katanya belum di anggarkan jadi memang ini kerugian yang kerugian yang besar, kerugian yang besar”(159)
- BS : “Ya tapi bagaimana mungkin meminta orang lain peduli anda sendiri tidak peduli Pak Hari? (160)
- HS : “Ya peduli kita, kalau tidak peduli berartikan ditelantarkan tidak dirawat”(161)
- BS : “Di ansuransikan saja tidak, pastinya inikan di pastikan dulu diansuransikan atau tidak kalau memang PEMDA DKI tidak ya berarti ya kejaksaan agung yang menganggarkan untuk di ansuransikan”(162)
- HS : “Ya itulah tadi saya katakan perlakuan terhadap gedung ini karena masuk kawasan cagar budaya perlakuannya sama”(163)
- BS : “Tapi setidaknya stekholdernya adalah kejaksaan agung, kalau belum di ansuransikan pemda DKI minta diasuransikan pernahkah itu dilakukan, satu. Kedua infeksi terakhir terhadap keselamatan itu kapan dilakukan?(164)
- HS : “Iya”(165)
- BS : “Itu kalau tidak dilakukan, kenapa tidak dilakukankan jadi pertanyaannya jadi panjang Pak Hari”(166)
- HS : “Ndaak karena pertanyaan itu dibuat, ini gak begini, ini gak begini iya ini gak akan selese, sekarang saya jawab 2018 kami melakukan kegiatan tapi di tegor oleh dinas pariwisata”(167)
- BS : “Bukan, infeksi keselamatan tadi Pak?(168)

- HS : “Oleh karena itu kemudian kita lakukan pembenahan-pembenahan o ini cagar budaya”(169)
- NS : “Oke” (170)
- HS : “Proteksinya harus lebih baik lagi, kalau bertanya-bertanya, bertanya terus saya akan jawab-jawab terus gitu”(171)
- BS : “Bukan”(172)
- NS : “Baik” (173)
- BS : “Bukan, infeksi keselamatan itu lo, saya hanya kapan terakhir dilakukan? Itu aja”(174)
- NS : “Oke”(175)
- HS : “Ya, oleh karena itu kami akan lakukan cek itu” (176)
- NS : “Baik” (177)
- HS : “Kami akan bekerja sama melakukan itu kira-kira itu Mbak Nana” (178)
- NS : “Baik, baik, yang jelas memang banyak kali spekulasi yang menyelumuti apa yang terjadi di kebakaran gedung kejaksaan ini, terimakasih banyak Pak Bili sudah hadir dan menjelaskan di *Mata Najwa*.(179)
- SG : “Satu Mba Nana” (180)
- NS : “Iya Pak”(181)
- SG : “Iyakan, jadi saya pikir ini satu momentum yang baik untuk lebih gedung-gedung yang lain lebih care lah, kaitan dengan proteksi kebakaran, kemudian yang berikutnya kaitan dengan penanganan kebakaran di gedung-gedung kejaksaan RI ini kami merasa berhasil sebenarnya karena tidak terjadi perambatan ke gedung yang lebih besar lagi, sampai ada satu tempat yang memang sangat strategis yang kita bisa amankan itu yang luar biasa, kemudian yang paling penting dalam satu operasi itu adalah bagaimana anggota dan masyarakat tidak ada korban malam itu tidak ada korban jiwa jangankan korban jiwa korban luka pun tidak ada itu satu keberhasilan operasi dalam keadaan kebakaran yang sangat dahsyat, sampai terakhir Pak, Mba Nana Pak gubernur itu menyampaikan kepada saya Pak Kadis pastikan anggota pulang dalam keadaan selamat bertemu dengan keluarga, itu luar biasa.(182)
- BS : “Mungkin begini maksud saya kalau tadi kebelakang gak boleh kedepan ajalah, mungkin pada posisi ini Pak saya memberikan masukan ada alat yang bisa merobohkan penyekat itu misalnya dari gedung utara ke selatan

itukan ada lobi, nah kalau itu pemadam kebakaran punya alat yang alat berat yang untuk merobohkan begitu saya tadinya di apa tempatnya Pak Hari itu ada tangga kan itu kan kalau segera cepat bisa dirobuhkan sehingga tidak merembet gitu, mungkin ini masukan yang perlu dipikirkan aja Pak.(183)

KR : “Saya tidak perlu bayangkan kalau ini disengaja orang bagaimana capeknya Pak Kadis ini 65 mobil dan kerugian keuangan negara juga tadi gedung itu hancur sehingga di anggarkan lagi itu maka dari itu penting untuk penyelidikan ini di perhatikan oleh seluruh masyarakat di Indonesia.(184)

HS : “Siap Mbak Nana, khusus, khusus aja ya”(185)

NS : “Setelah pariwisata ya Pak, yaak terimakasih dan terimakasih juga Bu Fatma kami masih akan kembali karena masih banyak sekali isu seputar bara di markas jaksa, jangan kemana mana tetap di *Mata Najwa*.(186)

**Konteks [V]** : Pada segmen ini Najwa selaku pembawa acara akan membahas spekulasi tentang kasus korupsi Djoko Tjandra yang melibatkan salah satu jaksa yaitu Pinangki, segmen ini yang memberi penjelasan adalah Boyamin Saiman (koordinasi masyarakat anti korupsi indonesia), Hari Setiyono (kepala pusat penerangan hukum keagungan), Kurnia Ramadhana (peneliti ICW), dan Hari Setiyono (kepala pusat penerangan hukum keagungan), hingga terjadi perdebatan seperti percakapan di bawah ini.

NS : “Yak kebakaran gedung kejaksaan memicu spekulasi terkait penanganan kasus Djoko Tjandra yang melibatkan jaksa Pinangki, selain nara sumber di studio kita sudah terhubung dengan ketua komisi kejaksaan Barita Simanjuntak, selamat malam Pak Barita.(187)

PB : “Selamat malam Mba Nana, selamat malam Pak Arsep, Pak Mas Boyamin, Mas kurnia. (188)

NS : “Baik sebelum ke anda saya mau ke maki dulu Bonyamin yang sejak awal mengawal kasus ini, apa *to the point*. Jadi anda tidak percaya Jaksa Pinangki bekerja sendirian pasti ada orang lain yang terlibat.(189)

BS : “Iyalah, masak dalam konteks itu menerima suap pemberi gak ada, ini ngarangnya bukan main ini Kejaksaan Agung ini. (190)

NS : “Bukan yang memberi, maksud saya apakah mungkin jaksa eslon empat bisa bertemu dengan buron kakap dan menjanjikan macam-macam sampai menjanjikan fatwa.(191)

BS : “Ya sementara ini masih apa, istilah saya kepandaian Pinangki itu aja mancatut banyak orang (192)

- NS : “Mencatut atau, atau” (193)
- BS : “Ya itu nanti bisa anu dimaknai ke kanan dan ke kiri gitu” (194)
- NS : “Anda jadi hati-hati ni Pak Bonyamin” (195)
- BS : “Ya kan nanti kan bisa menjadi bersedia dicabut kan ada, kan gitu kan malah udah cabut aja nama ku juga ada nanti, itu lo jadi artinya bukan hati-hati kan saya harus koridor hukum karena sebagai detektek patikelir begitu jadi ya harus pada posisi meskipun saya sejak awal kalimat dugaan tapi lebih banyak terbukti gitu lo.(196)
- NS : “Oke karena kan kemudian ada dokumen yang menyebut bahwa melapor ke jaksa agung dua kali soal pertemuannya menggelar video *call* dan sebagainya, ee itu, itu sesuatu yang memang hasil temuan anda juga ya terjadi atau bagaimana? (197)
- BS : “Gak itu temuan tempo kalau itu saya mengakui karena, saya posisi bahwa Pinangki itu memang pergi keluar negeri terus kemudian Djoko Tjandra itu pasti tidak mudah percaya seorang jaksa yang bukan bidangnya eslonnya bawah terus kemudian bisa dipercaya oleh Djoko Tjhandra tanpa sesuatu yang akan diberitahukan dia, baik secara rahasia maupun secara terbuka kepada Djoko Tjhandra bahwa saya itu begini lo dekat dengan A dekat dengan B itu, sehingga saya akan bisa memberikan bantuan kepada anda bebas dari hukum untuk mengajukan permohonan fatwa, permohonan fatwa ini akan didukung dari sisi yang kemudian bisa jadi akan didukung oleh instansinya dia, dan dia bisa mencatut level tertinggi, nah tapi mencatut itu bisa juga memang, bersedia dicatut atau malah menyuruh dicatut kan begitukan. (198)
- NS : “Oke, kalau ICW bagaimana melihatnya Kurnia karena, karena ini kan kasus yang sebetulnya modus-modusnya kerap terjadi cuma sekarang terjadinya di kejaksaan, dari pengalaman Anda? (199)
- KR : “Ya memang sejak awal ya kita sudah meragukan komitmen kejaksaan agung untuk menangani jaksa Pinangki secara objektif dan transparan ada beberapa indikatornya Mbak Nana, nantik Pak Barita dikomjak bisa cerita lebih jauh kalau kita melihat dari berbagai pemberitaan komjak seakan tidak diberikan akses untuk memeriksa jaksa Pinangki Sirna Malasari itu yang pertama. Yang kedua tanggal 11 Agustus tiba-tiba jaksa agung mengeluarkan pedoman pemeriksaan jaksa harus izin dari jaksa agung, yang ketiga tiba-tiba Pak Hari juga yang berbicara walaupun akhirnya dicabut kejaksaan memberikan bantuan hukum kepada jaksa Pinangki, bagaimana mungkin seorang penegak hukum yang sudah menampar wajah kejaksaan agung diberikan bantuan hukum. Akhirnya diralat karena saya juga membaca anggaran dasar rumah tangga persatuan jaksa indonesia itu jaksa diberikan bantuan kalau terkait dengan profesinya pertanyaan lebih lanjutnya apakah bertemu buronan itu profesi jaksa? kan bukan seperti itu

lain hal dari itu juga ya tadi soal gedung tiba-tiba terbakar memang semuanya itu serba kebetulan jadi tidak salah jika publik menduga dan kalau kita lihat trektrek jaksa agung kalo Mba Nana ingat. Tahun lalu itu sempat ada OTT jaksa di kejaksaan tinggi DKI Jakarta apa yang dilakukan kejaksaan agung saat itu dan anggota partai politik DPR mengatakan kepada KPK agar kasus itu ditangani oleh kejaksaan. Padahal pasal 11 UU KPK, KPK itu lekspesialis yang diberikan kewenangan untuk menangani perkara yang terlibat penegak hukum maka dari itu kami dari awal mengatakan seluruh kasus yang melibatkan penegak hukum sudah serahkan saja ke KPK daripada harus berdebat konflik kepentingan, jeruk makan jeruk dan lain-lain.(200)

NS : “Bagaimana Pak Hari?(201)

HS : “Yak terimakasih, barangkali ini saatnya kami menjawab keraguan Mas Kurnia maupun masyarakat bahwa kami pun akan serius menangani perkara ini bukti keseriusan itu telah kami tampilkan kami wujudkan bahwa dalam waktu cepat kita tangani itu dan tetapkan tersangka dan langsung ditahan, tadi yang disampaikan mas kurnia tentang kenapa saya merilis bahwa BCI akan memberikan bantuan hukum aturan anggaran dasarnya seperti itu, tetapi apakah nanti BCI akan menunjuk atau memberikan bantuan hukum tentu dalam konteks kajian selaku kapuspenkum saya membaca di anggaran dasar dan ternyata dijawab oleh ketua BCI bahwa itu tidak perlu diberikan bantuan hukum. Kemudian mengenai pedoman untuk memeriksa seorang jaksa sebetulnya UU 16 2004 sudah mengatur itu cuman lagi-lagi, mudah-mudahan bukan negara kebetulan ya. Momentnya tidak tepat walaupun tidak ada pedoman itu di UU 16 2004 di pasal 8 juga sudah cukup jelas oleh karena itu mari masyarakat dukung kami, kami akan buktikan bahwa kami serius dan kapan lagi kami diberikan kepercayaan untuk menangani sebuah perkara yang cukup besar. Mengenai siapa keterkaitannya tentu alat bukti nantik yang bicara, sebagaimana.(202)

BS : “Itu normatif selalu normatif Pak Hari” (203)

HS : “Ya...ya selalu, kalau kita gak bicara normatif apalagi kan memang itu”(204)

BS : “Tapi trobosan bahwa penanganan” (205)

HS : “Kalau tidak pakai normatif mau pakai apalagi”(206)

BS : “Penanganan perkara korupsikan cepat utamakan dari yang lain”(207)

HS : “Kan tidak boleh omongan di warung kopi kemudian jadi berkas kemudian dipaksakan untuk menjadi berkas kan alat bukti Pak” (208)

- KR : “Kalau kita bandingkan dengan teman-teman yang ada di bareskrim polri, bareskrim tu sudah menetapkan 5 orang sebagai tersangka 3 di antaranya penegak hukum 2 swarta Djoko Tjandra dan juga Tomi Sumardi kejaksaan agung bahkan.(209)
- BS : “Pemberi suap juga belum Pak Kurnia” (210)
- KR : “Iya” (211)
- BS : “Pemberi suap juga belum di tetapkan tersangka” (212)
- KR : “Bahkan kejaksaan agung baru menetapkan penerima suap kan tidak mungkin tidak ada pemberi suap itupun lama prosesnya” (213)
- HS : “Iya betul, betul”(214)
- KR : “Jadi bagaimana puplik akan percaya kalau kejaksaan agung tidak menunjukkan upaya untuk menciptakan penegakan hukum yang objektif, begitu” (215)
- HS : “Nana boleh saya jawab ya, saya belum selesai dalam penanganan perkara itukan bai proses tgl 4 diserahkan bidang pengawasan tgl 7 kalau tidak salah penyidikan tgl 11 ditangkap 12 ditahan. Kemudian untuk memanggil memeriksa seseorang siapa kawan berbuat kemudian pemberinya siapa inikan bai proses artinya apa ketika seseorang di panggil menggunakan haknya tidak adil tentukan bai proses dan hari ini kita periksa 3 orang termasuk Djoko Tjandra kemudian juga dari garuda juga dari salah satu diluar mobil BMW oleh karena itu tolong dukung kami berikan masukan kami dan kami akan buktikan itu. (216)
- NS : “Kalau, kalau tadi”(217)
- BS : “Misalnya berandai-andai Pak, berandai inikan sebenarnya bisa jadi penyidiknya pengen cepat terus kemudian ada tangan-tangan tidak terlihat atau tangan-tangan yang lebih kuat meminta untuk tidak cepat-cepat ada gak Pak? Ini” (218)
- HS : “Ya”(219)
- NS : “Setelah pariwisata di jawab kita harus brek tetap di mata najwa tetap di sini.(220)

**Konteks [VI]** : Pada segmen ini Najwa selaku pembawa acara meminta keterangan dari Barita Simanjuntak (ketua komisi kejaksaaan jakarta timur), Boyamin Saiman (koordinator masyarakat anti korupsi indonesia), dan Kurnia Ramadhana (peneliti ICW) tentang kasus Jaksa Pinangki dan kasus Novel Baswedan yang diduga telah melakukan korupsi, seperti percakapan di bawah ini.

NS : “Iyaaak saya ingin ke Pak Barita komisi kejaksaaan, perlu ditekankan jadi ini komisi kejaksaaan komisi independen yang memang sejak awal menerima laporan masyarakat dan berniat memeriksa jaksa Pinangki tetapi kemudian dikatakan tidak perlu diperiksa karena sudah diperiksa internal dan sampai sekarang juga masih belum dapat akses untuk memeriksa langsung jaksa Pinangki, begitu Pak Barita? (221)

PB : “Yak betul, tapi saya perlu sampaikan bahwa kami melaksanakan pasal 4 A peraturan presiden NO 18 tahun 2011 yang mengatakan wewenang komisi kejaksaaan adalah menerima dan menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat tentang kinerja dan perilaku jaksa dalam melakukan tugas dan wewenangnya. Itu makanya kami mengundang untuk didengarkan penjelasan dan keterangannya kami belum masuk tahapan pemeriksaan masih meminta penjelasan dan keterangan, itu perlu di sampaikan sehingga klir buat kita bahwa komisi kejaksaaan melakukan tugasnya berdasarkan peraturan presiden Mbak Nana. (222)

NS : “Jadi apakah tetap berwenang melakukan pemeriksaan walaupun misalnya sekarang sudah diperiksa internal dan sebagainya, tetap merasa berwenang? Itu memng jelas ada dikomisi kejaksaaan? (223)

PB : “Yaak di dalam pasal 5 disebutkan bahwa komisi kejaksaaan punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan bilamana pemeriksaan pengawasan internal kejaksaaan tidak dikoordinasikan kepada komisi kejaksaaan, jadi artinya kewenangan itu masih ada. Namun, karena oknum jaksa P itu sudah di proses secara produstisia penyidikan oleh jampitsus tentu kita sekarang berkewajiban untuk mengawasi proses itu agar penegakan hukum terhadap oknum jaksa P itu serta siapa saja yang terlibat di samping dibelakangnya diusut secara tuntas dan tegas itu yang akan.(224)

NS : “Pak Barita, apakah mendapatkan akses itu, karena tadi di awal pak Mahfud MD mengatakan bahwa seharusnya komisi kejaksaaan bisa juga mendapatkan akses tidak perlu menunggu 2 minggu untuk mendapatkan laporan, apakah memang merasa ada ketidak ada tertupi kejaksaaan agung tidak membuka ke komisi kejaksaaan, betulkah kesan itu? (225)

PB : “Iya, karena pertama kami mengundang oknum jaksa P itu tanggal 27 juli tidak datang tanpa alasan tanggal 30 juli kami undang kedua juga tidak datang. Namun kami mendapatkan surat dari atasannya bahwa karena

pemeriksaan pengawasan sudah berjalan sehingga artinya komisi kejaksaan tidak perlu memeriksa lagi. Itu sebabnya sesuai dengan pasal 4 C peraturan presiden kami meminta laporan hasil pemeriksaannya sebab itu wewenang komisi kalau kami tidak bisa periksa. Kasih dong mana LHP nya karena LHP ini diperlukan supaya kami bisa menjawab ini maki, Mas Bonyamin inikan kejar terus ni, mana hak dia itu sebagai pelapor harus kita sampaikan untuk memberi jawaban itu kami harus membutuhkan dokumen itu. (226)

BS : “Pak Barita, selaku pengaju saya bisa memberikan celah diulang aja dengan catatan bahwa proses dari LHP kemarin ada yang kurang karena ada yang disampaikan Bonyamin itu ada kurang ini itu isu yang lain ini itu belum ada sehingga berhak lagi untuk memeriksa dan dipanggil ulang itu bisa dalam celah peraturan presiden tadi, kedua juga berkaitan dengan novel Baswedan saya mendengar dan ingin mengklarifikasi mengkonfirmasi bahwa panggilan terhadap jampidung, terhadap kajati, termasuk asmidung itu tidak dipenuhi sehingga yang bisa dipanggil hanya jaksa penuntut umum, sanking stresnya mungkin terus imunnya turun kemudian kena covid, kira-kira begitu apakah benar itu kemudian memang panggilan terhadap jampidung dan lain-lain dibawahnya itu tidak diizinkan, karena apa gak mungkin kasus sebesar novel Baswedan itu tidak berjenjang sampai aspidung, kajati, jampidung begitu saya pasti memastikan itu sampai jenjang kesana justru ini nampaknya malah justru JPU yang di kejar-kejar dan itulah yang ingin saya buka di sini.(227)

NS : “Baik, Pak Barita silahkan, karena kemudian ini juga bisa menjadi preseden menunjukkan bahwa memang ada keengganan dari kejaksaan agung untuk diperiksa atau diawasi oleh pihak independen.” (228)

BS : “Buka aja Pak Barita” (229)

PB : “Yak, jadi begini kalau soal Pak novel Baswedan kami sudah melakukan permintaan keterangan kepada tim JPU kan dari situ pertama yang menangani perkara itu. (230)

NS : “Oke” (231)

PB : “Dan itu memungkinkan untuk mintai keterangan sudah selesai atas 6 orang oknum jaksa yang tim”(232)

NS : “Pak Barita waktu saya mepet sekali, boleh langsung jawab *to the point* saja Pak, karena saya mau membahas yang lain, betul atau tidak itu tidak bisa memanggil jampidung? (233)

PB : “Nah selanjutnya kamikan menindak lanjuti supaya kami mengundang meminta keterangan kepada kejaksaan tinggi direktur DPWEL dan aspidung DKI itu yang kami tidak lagi di ijinan untuk kami mintai keterangan” (234)



- NS : “Oke, berarti betul ya, berarti betul kalau begitu sekarang Pak Hari tolong dijawab karena ini tanda-tanda dulu tidak mau sekarang tidak mau dibuka anda tadi bilang percayakanlah kepada kejaksaaan, bagaimana mau percaya kalau ada keengganan seperti ini Pak Hari? (235)
- HS : “Yak baik, memang betul ada perpres 18 tahun 2011 tentang komisi kejaksaaan di pasal 4 tadi juga disampaikan komisi kejaksaaan berwenang menerima laporan dan menindaklanjuti tetapi perpres tersebut ada tambahannya mungkin Pak Ketua komisi kejaksaaan belum menyampaikan tadi saya sampaikan ada MOYU antara komisi kejaksaaan dengan bidang pengawasan kalau tidak atau dengan kejaksaaan jadi apabila ada laporan pengaduan yang ditujukan ke komisi kejaksaaan itu komisi kejaksaaan melakukan rapat kalau tidak salah yang saya baca untuk menyerahkan kepada bidang pengawasan atau kejaksa agung untuk dilakukan pemeriksaan oleh bidang pengawasan. Apabila dalam pemeriksaan itu tidak sempurna dan sebagainya maka komisi kejaksaaan bisa mengambil alih atau menambahi seperti yang disampaikan oleh Pak Bonyamin tadi dan seterusnya, itu kira-kira.” (236)
- NS : “Oke” (237)
- BS : “Nun sewu Pak Hari, tapi pengertiannya kalau demi kebaikan, demi transparansi segala macam turuti aja dong komisi kejaksaaan jangan normatif lagi-normatif lagi gitu lo Pak Hari”(238)
- KR : “Jadi Mba Nana harusnya kalau kejadian seperti ini komisi kejaksaaan melaporkan kepada presiden. Presiden harus menegur Jaksa Agung. Jadi jangan hal-hal seperti ini terus menerus berulang ada egosporal, ada esprit dekorf disini maka dari itu komjak saran, saran kita ya lebih baik melaporkan saja apa keluhan selama ini kepada presiden karena itu atasan komjak untuk menegur langsung jaksa agung.(239)
- BS : “Dan ini saya balik tadikan minta masyarakat untuk percaya ke Jaksaan, kepercayaan itu harus dengan hal-hal yang terukur tadi. Diminta komisi kejaksaaan dihadirkan itu Pak, jadi bukan minta narasi kami dipercaya tapi kenyataan tidak ada hal-hal yang bisa dipercaya”(240)
- HS : “Yak, yaak kita orang hukum, kita berjalan dalam norma aturan, norma aturan yang ada adalah seperti itu oleh karena itu mari kita ikuti norma aturan itu” (241)
- NS : “Oke tapi anda tidak melihat perlu ada ekstra ordeneri evert yang dilakukan karena ini kasusnya ekstra ordeneri terjadi dimasa ada kebakaran ada spekulasi titik kepercayaan masyarakat berada di batas nadi anda tidak merasa perlu ada evert yang sungguh-sungguh untuk berusaha meyakinkan puplik, oknum jaksa diduga menerima 7 milyar bertemu buronan kakap nama jaksa agung disebut-sebut. Setelah pariwisata kita akan bahas tetap disini. (242)

**Konteks [VII]** : Pada segmen terakhir ini Najwa selaku pembawa acara melanjutkan pembahasan pada segmen sebelumnya yaitu membahas tentang proses kasus korupsi Djoko Chandra yang melibatkan jaksa Pinangki pimpinan tertinggi, pada segmen ini yang memberikan penjelasan adalah Hari Setiyono (kepala pusat penerangan hukum kejaksaan), Kurnia Ramadhana (peneliti ICW), dan Boyamin Saiman (koordinator masyarakat anti korupsi indonesia), seperti pada percakapan di bawah ini.

NS : “Pak Hari bagaimana bisa percaya kalau belum-belum tampaknya sudah enggan?(243)

HS : “Nah ini perlu komunikasi yang baik tadi disampaikan kalau itu mekanisme pemeriksaan tadi kita ceritakan mekanisme pemeriksaan seperti itu. tetapi kalau ini masih sifatnya komunikasi misalnya ini kami baru pengen mendengarkan dulu tidak dalam bentuk berita acara mungkin lain, mungkin yang dimaksud tadi saya katakan normatif dengan mengundang misalnya begitu, dengan mengundang nah ini konotasi yang menerima surat undangan itu atau panggilan itu lo ini kok tidak diserahkan ke kami kira-kira gitu, jadi hanya menurut saya hanya miskomunikasi saja yang nanti bisa dibangun dengan baik dan ada memang beberapa yang komisi kejaksaan meminta katakanlah informasi awal gitu kira-kira.(244)

NS : “Oke” (245)

KR : “Ini, ini terlihat resisten yang dibungkus dengan miskomunikasi itu sebenarnya yang terlihat ya jadi sebenarnya nggak, nggak salah bagi kejaksaan agung untuk membuka lebar kepada komisi kejaksaan silahkan masuk, silahkan panggil jaksa kami periksa jaksa kami, kami kooperatif jadi tidak berdalih ada MOU lah, ada A ada B ada C itu kan terlihat resisten jadi tidak tepat juga kalau dikatakan miskomunikasi” (246)

NS : “Bagaimana Pak, kenapa. Adakah kekhawatiran karena ada kesan berusaha melokalisir kasus ini, sebutlah ketika misalnya sebutlah nama jaksa agung yang disebut-sebut begitu” (247)

HS : “Hmm.. ya”(248)

NS : “Apakah apa sikap resmi kejaksaan agung ketika nama pimpinan tertingginya disebut-sebut terlibat dalam kasus ini Pak? (249)

HS : “Yak, tentu sebelum mengarah kesana tadi yang disampaikan kami selalu melihat aturan ya, aturannya yang ada seperti apa tadi sudah disampaikan oleh Pak ketua komjak bahwa ini belum melakukan PAP belum melakukan pemeriksaan tetapi masih mau klarifikasi dulu, nah tentu ketika sudah mengundang memanggil pemahaman terhadap institusi kejaksaan mungkin dianggap sudah, lo inikan ada aturannya kira-kira begitu, maka kami kejaksaan selalu kembali ke aturan itu. (250)

- NS : “Sampai sistensi tadi anda tidak,”(251)
- HS : “Mudah-mudahan ndak lah, mudah-mudahan ndak” (252)
- BS : “Berarti boleh masuk? (253)
- HS : “Nah itu tadi tergantung pimpinan dalam arti Pak Barita Simanjuntak untuk berkomunikasi”(254)
- KR : “Jadi semua menutup diri Mbak nana, ada menutup diri tentang komisi kejaksaan, tidak pernah mengundang KPK untuk melakukan gelar perkara jadi klir sekali kejaksaan agung ingin melokalisir kasus jaksa Piangki Sirna Malasari” (255)
- NS : “Oke” (256)
- BS : “Belum yang lebih tinggi lagi pengaduan saya kan pejabat tinggi saya sebut aja Pak Janmarinka itu pernah menghubungi Djoko Tjandra dia dapat nomor handphonnya Djoko Tjandra dari seseorang, seseorang itu dari siapa ini bisa mengkait kemudian dengan dugaan pertemuan Pinangki dengan Djoko Tjandra dan itupun juga belum ada tindak lanjut ini perlu saya tagih itu dan kalau tadi berkaitan dengan norma-normatif sekarang saya uji gini apakah kemudian ketika ekodinasi dilakukan akan diberikan ruang komisi kejaksaan untuk mendengar keterangannya pada Janmarinka mantan jam intel terkait dengan komunikasi dengan Djoko Tjandra. (257)
- NS : “Oke, apakah akan ada rencana memeriksa internal kejaksaan sendiri, apakah misalnya akan memeriksa jaksa agungnya sendiri karena namanya disebut-sebut akan memeriksa mantan jam intel Janmarinka karena namanya disebut-sebut?(258)
- HS : “Yak, sebagaimana kita ketahui bahwa sudah ada penyidikan terhadap jaksa PSM tentu penyidikan akan lebih kuat apakah diperoleh dari keterangan para saksi ataupun tersangka untuk mengait ke masalah itu oleh karena itu ini sudah cukup kuat sudah dilakukan penyidikan saya kira itu lebih dipertekankan. (259)
- KR : “Tapi apakah Pak Hari selaku kapuspenkum kejaksaan agung pernah mendengar dari Kejaksaan Agung untuk membuka pintu kepada KPK untuk terlibat dalam menangani kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari”?(260)
- NS : “Yaak, seperti halnya yang tadi disampaikan Pak Mahfud MD” (261)
- KR : “Seperti yang dilakukan oleh bareskrim polri”(262)
- NS : “Bagaimana Pak Hari sebelum kita tutup?” (263)

- HS : “Yak, yaak menurut kami itu ada namanya korsup, saya pikir semua terbuka, semua terbuka dan mudah-mudahan kedepan juga seperti itu harapan kita” (264)
- BS : “Nana sebagai sama-sama barangkali santrinya Gusbahudin Nursalim rembang ini saya kembalikan ke spiritual jadi kebakaran itu bisa jadi tanda kutip karena doa kita ini hanya berdoa memohon keselamatan tapi tindakan-tindakan kita bukan bagian dari doa, bukan bagian dari menjalankan tugas ini bukan bagian dari doa artinya apa kalau doa, berarti tulus melakukan tugasnya tulus keterbukaan, tulus untuk kebaikan dan kebaikan negeri ini juga sebagai bendera saya yang merah putih saya melakukan ini sebagai sumbangsih saya kepada negara ini untuk tidak runtuh Pak. Jadi, inilah kejaksaan agung nampaknya doanya itu hanya doa memohon keselamatan tapi tidak disertai dengan doa-doa yang melakukan tugas dengan tulus dengan kebaikan tidak ada selingkuh, selingkuh arti luas arti sempit itu, sehingga cctv itu khawatir saya dibakar atau terbakar karena ada selingkuh baik arti luas maupun arti sempit, demikian” (265)
- KR : “Dan sampai ada *pablo eskobar* indonesia Mba Nana karena *pablo eskobar* itu pernah membakar gedung negara jangan sampai itu yang ada di indonesia hari ini. (266)
- NS : “Baik, kita akan tunggu bagaimana langkah kejaksaan, kejaksaan agung meminta publik untuk percaya tapi sebelum kita percaya kita harus melihat bukti-bukti keseriusan yang dilakukan oleh kejaksaan agung itu yang akan kita tunggu. Mohon maaf Pak Barita waktunya sudah habis kita juga akan mendorong supaya komisi kejaksaan bisa dapat akses untuk memeriksa karena sekali lagi ini komisi independen yang perlu untuk mewakili publik menjawab berbagai spekulasi yang ada. Selamat bekerja Pak Barita kita akan dorong terus supaya komisi kejaksaan terus”(267)
- PB : “Terimakasih, sip selamat kerja kembali Nana dan semuanya” (268)
- NS : “Terimakasih Pak Hari, Mas Kurnia, Mas Bonyamin” (269)
- BS : “ Baik, terimakasih Nana” (270)
- KR : “Terimakasih kembali Mba Nana” (271)



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISSET/39499  
T E N T A N G



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau, Nomor : 670/E-UIR/27-FKIP/2021 Tanggal 5 Maret 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

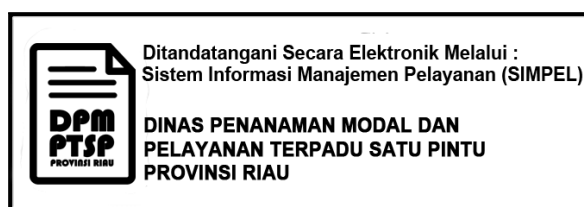
- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama              | : | <b>YULIA CITRA</b>   |
| 2. NIM/ KTP          | : | 176210509  |
| 3. Program Studi     | : | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA   |
| 4. Jenjang           | : | S1   |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>PELANGGARAN PRINSIP KERJA SAMA DALAM PROGRAM MATA NAJWA<br/>BARA DI MARKAS JAKSA DI TRANS 7: PERSPEKTIF GRICE</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | PROGRAM TV MATA NAJWA DI TRANS 7   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 9 Maret 2021



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru  
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



**FORMULIR PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yulia Citra  
NPM : 176210509  
Tempat/Tgl. Lahir : Tanjung Betung, 19 Maret 1999  
Alamat : Jl. Air Dingin  
No. Telp./HP : 0822 8541 5658

Bermaksud mengajukan judul skripsi sebagai berikut:

Judul I : Pelanggaran Prinsip Kerja Sama dan Implikatur Percakapan di Pasar Dupa Jalan Merpati Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru


Judul II : Analisis Semantik Pantang Larang Di Desa Serombou Indah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu

Judul III : Penulisan Akronim Dan Singkatan Dalam Ruprik “Opini” Surat Kabar Harian Kompas Edisi 1 September – 31 Desember 2020

Usulan Pembimbing (Ditentukan oleh Kaprodi):

Pembimbing : 1. Fatmawati, S.Pd., M.Pd.  
2. Muhammad Mukhlis, S.Pd., M.Pd.  
3. Noni Andriyani, S.S., M.Pd


Menyetujui,  
Ketua Program Studi  
Pendidikan Bahasa dan Sastra  
Indonesia

  
(Desi Sukenti, S.Pd., M.Ed.)  
NIDN. 1019078001

Mengetahui,  
Wakil Dekan Bid. Akademik

  
(Dra. Tity Hastuti, M.Pd.)  
NIDN. 0011095901

Pekanbaru, Juli 2020  
Mahasiswa yang mengajukan

  
(Yulia Citra)  
NPM. 176210509

Pertimbangan Utama Ka. Prodi dalam menetapkan Pembimbing:

1. Judul ini merupakan penelitian Payung (Kolaboratif) dengan dosen yang bersangkutan
2. Kepakaran Dosen sesuai Rumpun Ilmu
3. Pemerataan Distribusi Pembimbing

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FKIP UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**NOMOR : 316 /FKIP-UIR/Kpts/2021**

**Tentang : Penunjukan Pembimbing I Dan Pembimbing II Penulisan Skripsi Mahasiswa FKIP**  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**Menimbang** : 1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan skripsi, maka perlu ditunjuk Pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.  
2. Bahwa saudara-saudara yang namanya tersebut tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk membimbing skripsi mahasiswa, maka untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :  
a. Nomor 339/U/1994 Tentang Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.  
b. Nomor 224/U/1995 Tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.  
c. Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.  
d. Nomor 124/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Studi Perguruan Tinggi.  
e. Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.  
5. Surat Keputusan Pimpinan YLPI Riau Nomor 66/Kep/YLPI-II/1976 Tentang Peraturan Dasar Universitas Islam Riau.  
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor. 112/UIR/Kpts/2016 Tentang Pengangkatan Dekan FKIP Universitas Islam Riau Tanggal.31 Maret 2016.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : 1. Menunjuk nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Pembimbing skripsi

No	Nama	Pangkat/Golongan	Pembimbing
1.	Dr. Fatmawati, S.Pd., M.Pd	Asisten Ahli / Penata III-b	Pembimbing Utama

Nama Mahasiswa	:	Yulia Citra
NIM	:	17 621 0509
Program Studi	:	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Judul Skripsi	:	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama dalam Program Mata Najwa Bara di Markas Jaksa di Trans 7

2. Tugas-tugas Pembimbing berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.  
3. Dalam melaksanakan bimbingan, pembimbing supaya memperhatikan usul dan saran seminar proposal  
4. Kepada Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini diberi honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Riau.  
5. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak surat keputusan ini diterbitkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Kutipan** : Disampaikan pada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan : di Pekanbaru

Tanggal : 05 Maret 2021

Dekan,



**Dr. Hj. Sri Amnah, S.Pd., M.Si**

NIP.1970.10071998 032002

NIDN.0007107005

Sertifikasi.13110100601134

**Tembusan disampaikan kepada :**

1. Yth.Rektor UIR Pekanbaru
2. Yth.Kepala Biro Keuangan UIR Pekanbaru
3. Yth.Ketua Program Study Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP UIR Pekanbaru
4. Pteringgal..

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL**

Nama Mahasiswa	:	Yulia Citra
NIM	:	17 6210509
Hari Tanggal Seminar	:	Selasa / 23 Februari 2021
Pembimbing Utama	:	Dr. Fatmawati, S.Pd., M.Pd.
<b>Judul Proposal Penelitian</b>		
Pelanggaran Prinsip Kerja Sama dalam Program Mata Najwa <i>Bara di Markas Jaksa</i> di Trans 7.		
<b>REKOMENDASI HASIL SEMINAR</b>		
1. Judul yang diterima	:	Disetujui/ <del>Direvisi/ diubah judul baru</del>
<i>Pelanggaran Prinsip Kerja Sama dalam Program Mata Najwa Bara di Markas Jaksa di Trans 7</i>		
2. Identifikasi Masalah	:	Jelas/ <del>Kurang Jelas/ Diubah</del>
3. Perumusan Masalah	:	Jelas/ <del>Kurang Jelas/ Diubah</del>
4. Tujuan Penelitian	:	Jelas/ <del>Kurang Jelas/ Diubah</del>
5. Teori Utama dan Teori Pendukung	:	Jelas/ <del>Kurang Jelas/ Diubah</del>
6. Hipotesis Penelitian ( jika ada )	:	Jelas/ <del>Kurang Jelas/ Diubah</del>
7. Populasi dan Sampel/ Subjek Penelitian	:	Jelas/ <del>Kurang Jelas/ Diubah</del>
8. Metode dan Disain Penelitian	:	Jelas/ <del>Kurang Jelas/ Diubah</del>
9. Variabel Penelitian	:	Jelas/ <del>Kurang Jelas/ Diubah</del>
10. Instrumen Penelitian	:	Jelas/ <del>Kurang Jelas/ Diubah</del>
11. Prosedur Penelitian	:	Jelas/ <del>Kurang Jelas/ Diubah</del>
12. Teknik Pengambilan Data	:	Jelas/ <del>Kurang Jelas/ Diubah</del>
13. Teknik Pengolahan Data	:	Jelas/ <del>Kurang Jelas/ Diubah</del>
14. Teknik Analisis Data	:	Jelas/ <del>Kurang Jelas/ Diubah</del>
15. Daftar Rujukan / Pustaka	:	Jelas/ <del>Kurang Jelas/ Diubah</del>

**Tim Dosen Pemrasaran Seminar Proposal**

Dosen Pemrasaran	Jabatan Dalam Seminar	Tanda Tangan
Dr. Fatmawati, S.Pd., M.Pd.	Pembimbing Utama	1.
Dr. Erni., M.Pd.	Anggota	2.
Sri Rahayu, S.Pd., M.Pd.	Anggota	3.

Ketua Program Studi

Desi Sukenti, S.Pd., M.Ed.

NIDN. 1019078001

Pekanbaru, ..... 2021

Dekan

Dr. Hj. Sri Amnah., M.Si

NIP.1970.10071998.032002

Sertifikasi .13110100601134

NIDN.007107005





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

### الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيُّوِيَّةُ

Alamat: Jalan Kahrudin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: [edufac.fkip@uir.ac.id](mailto:edufac.fkip@uir.ac.id) Website: [www.uir.ac.id](http://www.uir.ac.id)

Pekanbaru, 05 Maret 2021

Nomor : 670 /E-UIR/27-FKIP/2021  
Hal : *Izin riset*

Kepada Yth Bapak Gubernur Riau  
C/q Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau  
Di –  
Pekanbaru

Assalamu' alaikum Wr, Wbr.

Bersama ini datang menghadap Bapak/Ibu mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau:

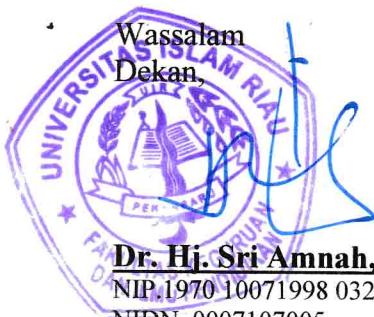
Nama : Yulia Citra  
Nomor Pokok Mhs : 17 621 0509  
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Program Studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Untuk meminta izin melakukan penelitian dengan judul *"Pelanggaran Prinsip Kerja Sama dalam Program Mata Najwa Bara di Markas Jaksa di Trans 7"*.

Untuk kepentingan itu, kami berharap agar Bapak/Ibu berkenan memberikan rekomendasi izin kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Atas perhatian Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Wassalam  
Dekan,



**Dr. Hj. Sri Amnah, S.Pd., M.Si**

NIP.1970.10071998.032002

NIDN. 0007107005

Sertifikasi.13110100601134



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U  
Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISSET/39499  
T E N T A N G



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau, Nomor : 670/E-UIR/27-FKIP/2021 Tanggal 5 Maret 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **YULIA CITRA**
2. NIM/ KTP : 176210509
3. Program Studi : **PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **PELANGGARAN PRINSIP KERJA SAMA DALAM PROGRAM MATA NAJWA BARA DI MARKAS JAKSA DI TRANS 7: PERSPEKTIF GRICE**
7. Lokasi Penelitian : **PROGRAM TV MATA NAJWA DI TRANS 7**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 9 Maret 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU**

**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru  
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

### الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيَوِيَّةُ

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: edufac.fkip@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

### BERITA ACARA MEJA HIJAU / SKRIPSI DAN YUDICIUM

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau Tanggal 30 bulan Juli Tahun 2021, Nomor 10850/Kpts/2021, maka pada hari Kamis Tanggal 30 bulan Juli tahun 2021 telah diselenggarakan Ujian Skripsi dan Yudisium atas nama mahasiswa berikut ini :

1. Nama : Yulia Citra
2. Nomor Pokok Mhs - : 17 6210509
3. Program Studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
4. Judul Skripsi : Pelanggaran Prinsip Kerja Sama dalam Program Mata  
Najwa Bara di Markas Jaksa di Trans 7: Perspektif Grice
5. Tanggal Ujian : 30 Juli 2021
6. Tempat Ujian : FKIP UIR
7. Nilai Ujian Skripsi : 94 (A)
8. Prediket Kelulusan : Dengan pujian

Keterangan Lain : Ujian berjalan aman dan tertib

Ketua

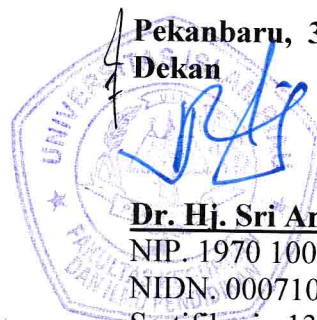
( Dr. Fatmawati, S.Pd., M.Pd. )

#### Dosen Penguji :

1. Dr. Fatmawati, S.Pd., M.Pd.
2. Dr. Erni, M.Pd.
3. Dr. Rika Ningsih, S.Pd., M.Pd.

Pekanbaru, 30 Juli 2021

Dekan



Dr. Hj. Sri Amnah, S.Pd., M.Si.

NIP. 1970 10071998 032002

NIDN. 0007107005

Sertifikasi : 13110100601134

**DAFTAR PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA**

Nama : YULIA CITRA  
 Tempat/Tgl.Lahir : TANJUNG BETUNG / 19 Maret 1999  
 NPM : 176210509  
 Fakultas : Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan  
 Program Studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia  
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)

KODE MK	MATA KULIAH	NILAI	AM	K	KM
BI12002	APRESIASI PUISI / POETRY APPRECIATION	B	3	3	9
BI12006	BAHASA INGGRIS / ENGLISH LANGUAGE	B+	3.33	2	6.66
BI12005	BERBICARA / SPEAKING	B+	3.33	2	6.66
BI12001	LANDASAN PENDIDIKAN / INTRODUCTION OF EDUCATION	B+	3.33	2	6.66
BI12001	LINGUISTIK UMUM / GENERAL LINGUISTICS	B+	3.33	2	6.66
BI12004	MEMBACA / READING	A-	3.67	2	7.34
BI12003	MENYIMAK / LISTENING	A-	3.67	2	7.34
BI12006	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA INDONESIA / GUIDANCE AND DEVELOPMENT OF INDONESIAN	B	3	2	6
BI12001	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM / ISLAMIC EDUCATION	A	4	2	8
BI12007	PENDIDIKAN PANCASILA / PANCASILA EDUCATION	A-	3.67	2	7.34
BI22002	AL ISLAM 1 (FIQIH IBADAH) / AL ISLAM 1 (FIQIH IBADAH)	A-	3.67	2	7.34
BI22012	APRESIASI PROSA FIKSI / PROE FICTION APPRECIATION	A-	3.67	2	7.34
BI22013	DIALEKTOLOGI*** / DIALECTOLOGY***	B+	3.33	2	6.66
BI22008	FONOLOGI BAHASA INDONESIA / INDONESIAN PHONOLOGY	A-	3.67	2	7.34
BI22004	ILMU KEALAMAN / NATURAL SCIENCES	A	4	2	8
BI32006	KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN / CURRICULUM AND LEARNING	A	4	2	8
BI22007	MENULIS / WRITING	A	4	2	8
BI12008	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN / CITIZENSHIP	A-	3.67	2	7.34
BI22011	SASTRA MELAYU / MALAY LITERATURE	B-	2.75	2	5.5
BI22009	SEJARAH SASTRA / LITERATURE HISTORY	B+	3.33	2	6.66
BI22010	TULISAN ARAB MELAYU / MALAY ARABIC SCRIPT	A-	3.67	2	7.34
BI32005	AL ISLAM 2 (FIQIH MU`AMALAH) / AL ISLAM 2 (FIQIH MU`AMALAH)	A	4	2	8
BI32023	APRESIASI DRAMA / DRAMA APPRECIATION	A-	3.67	2	7.34
BI32022	BAHASA ARAB / ARABIC	A-	3.67	2	7.34
BI32016	BELAJAR DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA / LEARNING AND INDONESIAN EDUCATION	B	3	2	6
BI32024	LEKSIKOGRAFI*** / LEXICOGRAPHY***	A-	3.67	2	7.34
BI33019	MORFOLOGI BAHASA INDONESIA / INDONESIAN MORPHOLOGY	B	3	3	9
BI32021	PEMBELAJARAN MENULIS / WRITING LEARNING	A-	3.67	2	7.34
BI32028	RETORIKA*** / RHETORIC***	A-	3.67	2	7.34
BI32017	TEORI BELAJAR BAHASA / LANGUAGE LEARNING THEORY	B+	3.33	2	6.66
BI32018	TEORI SASTRA / LITERATURE THEORY	B	3	2	6
BI32020	TRADISI MELAYU / MALAY TRADITION	A	4	2	8
BI42007	AL ISLAM 3 (ULUM AL-QUR`AN DAN HADIST) / AL ISLAM 3 (ULUM AL-QUR`AN AND HADIST)	A	4	2	8

BI42010	ETIKA DAN PROFESI PENDIDIKAN / ETIC AND EDUCATIONAL PROFESSION	A	4	2	8
BI43030	MEDIA PEMBELAJARAN DAN TIK PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA / MEDIA LEARNING AND ICT EDUCATION INDONESIAN	A	4	3	12
BI42034	MENULIS KARYA ILMIAH / WRITING SCIENTIFIC WORKS	A-	3.75	2	7.5
BI42032	PEMBELAJARAN MEMBACA / READING SKILL INSTRUCTIONS	A-	3.75	2	7.5
BI42035	PEMBELAJARAN MENYIMAK / LISTENING SKILL INSTRUCTIONS	B-	2.75	2	5.5
BI42009	PENGLOLAAN DAN PENDIDIKAN / MANAGEMENT OF EDUCATION	A	4	2	8
BI42008	PSIKOLOGI PENDIDIKAN / EDUCATIONAL PSYCHOLOGY	A	4	2	8
BI42036	SEMIOTIKA*** / SEMIOTICS***	A	4	2	8
BI43031	SINTAKSIS BAHASA INDONESIA / INDONESIAN SYNTAX	B+	3.5	3	10.5
BI42033	WACANA BAHASA INDONESIA / INDONESIAN DISCOURSE	B	3	2	6
BI52046	ANALISIS WACANA KRITIS*** / DISCOURSE ANALYSIS***	B	3	2	6
BI53040	EVALUASI DAN TEKNIK PENCAPAIAN HASIL BELAJAR SISWA BI / EVALUTION AND TECHNICAL ACHIEVEMENT STUDENT RESULT LANGUAGE EDUCATION	B	3	3	9
BI52011	FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM / PHILOSOPHY OF ISLAMIC EDUCATION	A	4	2	8
BI52044	PEMBELAJARAN SASTRA / LEARNING LITERATURE	A-	3.75	2	7.5
BI52042	PSIKOLINGUISTIK / PSYCHOLINGUISTIC	A-	3.75	2	7.5
BI52045	SASTRA NUSANTARA / LITERATURE NUSANTARA	C+	2.5	2	5
BI52043	SOSIOLINGUISTIK / SOCIOLINGUISTICS	A-	3.75	2	7.5
BI53012	STATISTIK PENDIDIKAN / EDUCATIONAL STATISTIC	B+	3.5	3	10.5
BI53041	TELAH BUKU TEKS BAHASA INDONESIA / TEXTBOOKS INDONESIAN STUDY	A	4	3	12
BI53039	TELAH KURIKULUM DAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN / THE STUDY CURRICULUM & DEVELOPMENT PLANNING EDUCATION LEARNING INDONES	A-	3.75	3	11.25
BI62056	ANALISIS KESALAHAN BAHASA / ERROR ANALYSIS	A-	3.75	2	7.5
BI62014	BIMBINGAN DAN KONSELING / GUIDANCE AND COUNSELING	A-	3.75	2	7.5
BI62011	KEWIRUSAHAAN DI BIDANG PENDIDIKAN / ENTERPRENEURSHIP EDUCATION	A	4	2	8
BI62054	PEMBELAJARAN BERBICARA / SPEAKING SKILL INSTRUCTIONS	A-	3.75	2	7.5
BI63049	PENELITIAN PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA / INDONESIAN EDUCATION RESARCH	A	4	3	12
BI62053	PERBANDINGAN BAHASA NUSANTARA / COMPARISON OF NUSANTARA LANGUAGE	A-	3.75	2	7.5
BI62052	PRAGMATIK / PRAGMATIC	B	3	2	6
BI62055	SASTRA KONTEMPORER / CONTEMPORARY LITERATURE	A-	3.75	2	7.5
BI62051	SEMANTIK BAHASA INDONESIA / SEMANTICS INDONESIAN	A-	3.75	2	7.5
BI62057	STILISTIKA*** / STILISTIKA***	A-	3.75	2	7.5
BI63050	TEORI DAN PRAKTEK PENGAJARAN MIKRO PEND. BAHASA INDONESIA / THEORY AND PRACTICE OF MICROTEACHING EDUCATION INDONESIAN	A-	3.75	3	11.25
BI74015	KULIAH PRAKTEK LAPANGAN PENDIDIKAN (KLP) / EDUCATION FIELD AND PRACTICE	A	4	4	16
BI73060	SEMINAR PEND. BIDANG STUDI PEND. BAHASA INDONESIA / EDUCATIONAL SEMINARS FIELD STUDY INDONESIAN LANGUAGE AND LITERATURE	A-	3.75	3	11.25
FK 86016	SKRIPSI / FINAL PROJECT	A	4	6	24
		Jumlah		151	545.79
		IPK		3.61	

Pekanbaru, 13 Agustus 2021  
Kepala BAAK



DR. Kurnia Hastuti, S.T., M.T